PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2023-2026



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
   Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAKALAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah periode 20 (dua puluh) tahun.

3. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2023-2026.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Takalar.
8. Pembangunan daerah adalah Pembangunan Kabupaten Takalar.
9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah bahwa RPD Tahun 2023-2026 memperhatikan target indikator makro dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024, kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Takalar sampai dengan Tahun 2025, hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022, Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional serta regulasi yang berlaku dan untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Takalar dengan pembangunan Provinsi dan Nasional dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan nyata daerah dalam upaya perbaikan di segala bidang pembangunan.

(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
   a. digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026;
   b. pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);

c. pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) RPD Tahun 2023-2026, yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang dimulai sejak berakhirnya periode RPJMD Tahun 2017-2022 sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode hasil pilkada serentak Tahun 2024.
(2) RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas 9 (sembilan) Bab sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3) Dalam rangka pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
(4) Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pagu anggaran setiap program prioritas yang sifatnya indikatif terdapat pada Bab VII.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 :

a. Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Rancangan RPD;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan verifikasi kesesuaian antara RPD Tahun 2023-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026; dan
c. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat Minggu keempat bulan Maret Tahun 2022.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Kepala Bappelitbangda bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PERUBAHAN

Pasal 6

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting.
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.
c. Terjadi perubahan yang mendasar.
d. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 11 Maret 2022

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 03

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 03 TAHUN 2022
TANGGAL 11 MARET 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2023-2026

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023-2026

Secara normatif dan substantif, sistematika dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.5. Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Takalar 2021
- 2.6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)
- 2.7. Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III Gambaran Keuangan Daerah
- 3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu
- 3.2. Neraca Daerah
- 3.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
- 3.4. Kerangka Pendanaan
- 3.5. Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah
- 3.6. Proyeksi Kebutuhan Investasi di Kabupaten Takalar

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah
- 4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah
- 4.2. Isu Strategis
- 4.3. Isu Daerah
- 4.4. Isu-isu Strategis

Bab V Tujuan dan Sasaran

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas
6.1. Strategi
6.2. Arah Kebijakan
6.3. Program Prioritas
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan
7.2. Program Perangkat Daerah
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8.1. Penetapan Indikator Kinerja Daerah
8.2. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)
8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)
Bab IX Penutup
9.1. Pedoman Transisi
9.2. Kaidah Pelaksanaan

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 LATAR BELAKANG I-1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN I-6
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN I-12
1.3.1 Hubungan RPD Takalar dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan I-12
1.3.2 Hubungan RPD dengan RPJMN I-12
1.3.3 Hubungan RPD dengan RPJPD I-12
1.3.4 Hubungan RPD dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan I-12
1.3.5 Hubungan RPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). I-13
1.3.6 Hubungan RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). I-13
1.3.7 Hubungan RPD dengan RKPD. I-13
1.4 MAKSUD DAN TUJUAN I-14
1.4.1 Maksud *I-14*
1.4.2 Tujuan *I-14*
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN I-15

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-1

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI II-1
2.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi *II-1*
2.1.2 Topografi *II-3*
2.1.3 Geologi *II-3*
2.1.4 Hidrologi *II-4*
2.1.5 Klimatologi *II-4*
2.1.6 Penggunaan Lahan *II-5*
2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah *II-5*
2.1.8 Wilayah Rawan Bencana *II-8*
2.1.9 Demografi *II-18*
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT II-20
2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi *II-20*
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial *II-28*
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM II-36
2.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar *II-37*

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar *II-70*
2.3.3 Urusan Pilihan *II-99*
2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan *II-107*
2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH II-127
2.4.1 Indeks Daya Saing Daerah *II-128*
2.4.2 Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah *II-129*
2.4.3 Indeks Inovasi Daerah *II-130*
2.5 EVALUASI CAPAIAN TARGET INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) KABUPATEN TAKALAR 2021 ..... II-131
2.6 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/SUISTANABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) II-135
2.7 HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-199
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU III-2
3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD *III-2*
3.1.2 Pendapatan Daerah *III-3*
3.1.3 Belanja Daerah *III-27*
3.1.4 Pembiayaan Daerah *III-34*
3.2 NERACA DAERAH III-36
3.2.1 Aset *III-41*
3.2.2 Kewajiban *III-41*
3.2.3 Ekuitas Dana *III-41*
3.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas) *III-42*
3.3 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU III-45
3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran *III-46*
3.3.2 Analisis Pembiayaan *III-47*
3.4 KERANGKA PENDANAAN III-51
3.4.1 Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal *III-51*
3.4.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja *III-55*
3.4.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan *III-64*
3.5 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH NON PEMERINTAH III-68
3.5.1 Pembiayaan melalui pinjaman daerah *III-68*
3.6 PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI DI KABUPATEN TAKALAR III-71
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS IV-1
4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1.1 Permasalahan Pembangunan Untuk Penentuan Prioritas Daerah *IV-1*

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah *IV-8*
4.2 ISU STRATEGIS IV-26
4.2.1 Isu Internasional/Global *IV-26*
4.2.2 Isu Nasional *IV-27*
4.3 ISU DAERAH IV-30
4.3.1 Isu Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan *IV-30*
4.3.2 Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata *IV-30*
4.3.3 Isu Pembangunan Kabupaten Takalar *IV-32*
4.4 ISU – ISU STRATEGIS IV-34

BAB V TUJUAN DAN SASARAN V-1

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS VI-1

6.1 STRATEGI VI-1
6.2 ARAH KEBIJAKAN VI-4
6.1 PROGRAM PRIORITAS VI-9

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

7.1 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN VII-1
7.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH 3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR VIII-1

8.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH VIII-1
8.1.1 Indikator Kinerja Makro *VIII-1*
8.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) *VIII-6*
8.2 INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) VIII-25
8.1. INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN / SUISTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (TPB/SDGS) VIII-30

BAB IX PENUTUP IX-1

9.1 PEDOMAN TRANSISI IX-1
9.2 KAIDAH PELAKSANAAN IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel II- 1 : Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar Tahun 2021 ..... II-2

Tabel II- 2 : Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kacamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2021 ..... II-3

Tabel II- 3 : Jumlah Curah Hujan dan Rata-Rata Temperatur Udara Di Kabupaten Takalar Tahun 2021..... II-4

Tabel II- 4 : Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Takalar Tahun 2021 ..... II-5

Tabel II- 5 : Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2021 ..... II-6

Tabel II- 6 : Kejadian Bencana di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... II-8

Tabel II- 7 : Bahaya Bencana Banjir Perkecamatan di Kabupaten Takalar II-11

Tabel II- 8 : Bahaya Bencana Banjir Bandang Perkecamatan di Kabupaten Takalar II-12

Tabel II- 9 : Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim Perkecamatan di Kabupaten Takalar II-12

Tabel II- 10 : Bahaya Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Perkecamatan di Kabupaten Takalar II-14

Tabel II- 11 : Bahaya Bencana Gempa Bumi Per kecamatan di Kabupaten Takalar II-15

Tabel II- 12 : Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan Di Kabupaten Takalar II-15

Tabel II- 13 : Bahaya Bencana Kekeringan Perkecamatan di Kabupaten Takalar II-16

Tabel II- 14 : Bahaya Bencana Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Takalar II-17

Tabel II- 15 : Bahaya Bencana Tsunami Perkecamatan di Kabupaten Takalar II-17

Tabel II- 16 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... II-18

Tabel II- 17 : Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Takalar Tahun 2021 ..... II-19

Tabel II- 18 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Takalar Tahun 2021 ..... II-19

Tabel II- 19 : Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021 ..... II-21

Tabel II- 20 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... II-21

Tabel II- 21 : Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021 ..... II-25

Tabel II- 22 : Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 – 2021 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Takalar II-26

Tabel II- 23 : Indeks Gini Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2020, Perkiraan Capaian Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 ..... II-28

Tabel II- 24 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-29

Tabel II- 25 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2021, Perkiraan Capaian Tahun 2021 dan Target Tahun 2022 ..... II-30

Tabel II- 26 : Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) Kabupaten Takalar Tahun 2018 - 2021 ..... II-30

Tabel II- 27 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-32

Tabel II- 28 : Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2020 ..... II-33

Tabel II- 29 : Angka Kriminalitas di Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021 ..... II-34

Tabel II- 30 : Capaian Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 .....II-35

Tabel II- 31 : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 .....II-37

Tabel II- 32 : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 .....II-38

Tabel II- 33 : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13- 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 .....II-39

Tabel II- 34 : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Takalar II-40

Tabel II- 35 : Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021.....II-41

Tabel II- 36 : Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 .....II-42

Tabel II- 37 : Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 .....II-43

Tabel II- 38 : Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 .....II-44

Tabel II- 39 : Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 .....II-45

Tabel II- 40 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021.....II-45

Tabel II- 41 : Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021.....II-46

Tabel II- 42 : Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-47

Tabel II- 43 : Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-48

Tabel II- 44 : Persentase Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-49

Tabel II- 45 : Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-49

Tabel II- 46 : Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-50

Tabel II- 47 : Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-51

Tabel II- 48 : Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-52

Tabel II- 49 : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-53

Tabel II- 50 : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-53

Tabel II- 51 : Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... II-54

Tabel II- 52 : Jumlah Rumah Tangga Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 ..... II-55

Tabel II- 53 : Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2017 – 2021 .....II-56

Tabel II- 54 : Rasio kepatuhan IMB kab/ kota domestik Tahun 2017 – 2021 .....II-57

Tabel II- 55 : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Tahun 2017 – 2021 .....II-58

Tabel II- 56 : Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2017 – 2021 .....II-58

Tabel II- 57 : Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Tahun 2017 – 2021 .....II-59

Tabel II- 58 : Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 .....II-59

Tabel II- 59 : Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 .....II-60

Tabel II- 60 : Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani Tahun 2017 – 2021 .....II-61

Tabel II- 61 : Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2017 – 2021 .....II-62

Tabel II- 62 : Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2017 – 2021 .....II-62

Tabel II- 63 : Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Tahun 2017 – 2021 .....II-63

Tabel II- 64 : Perda dan Perkada Yang Ditegakkan Tahun 2017 – 2021 .....II-63

Tabel II- 65 : Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2017 – 2021 .....II-64

Tabel II- 66 : Jumlah Warga Negara Yang Layanan Dan Terhadap Bencana Memperoleh Pencegahan Kesiapsiagaan Tahun 2017 – 2021 .....II-65

Tabel II- 67 : Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelematan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2017 – 2021 ..... II-66

Tabel II- 68 : Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2017 – 2021 ..... II-66

Tabel II- 69 : Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran Tahun 2017 – 2021 ..... II-67

Tabel II- 70 : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM) Tahun 2017 – 2021 ..... II-68

Tabel II- 71 : Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 ..... II-69

Tabel II- 72 : Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja Tahun 2017 - 2021 ..... II-71

Tabel II- 73 : Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2017 – 2021 ..... II-71

Tabel II- 74 : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2017 – 2021 ..... II-72

Tabel II- 75 : Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2017 – 2021 ..... II-73

Tabel II- 76 : Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 ..... II-73

Tabel II- 77 : ARG Pada Belanja Langsung APBD Tahun 2017 – 2021 ..... II-74

Tabel II- 78 : Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten Tahun 2017 – 2021 ..... II-75

Tabel II- 79 : Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) Tahun 2017 – 2021 ..... II-76

Tabel II- 80 : Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan) Tahun 2017 – 2021 .....II-77

Tabel II- 81 : Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Takalar Tahun 2018 – 2021.....II-77

Tabel II- 82 : Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 .....II-78

Tabel II- 83 : Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021.....II-79

Tabel II- 84 : Perekaman KTP Elektronik Tahun 2017 – 2021.....II-80

Tabel II- 85 : Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIAs Tahun 2017 – 2021.....II-81

Tabel II- 86 : Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2017 – 2021.....II-81

Tabel II- 87 : OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Tahun 2017 – 2021 .....II-82

Tabel II- 88 : Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2017 – 2021.....II-83

Tabel II- 89 : Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun 2017 – 2021 .....II-83

Tabel II- 90 : TFR (Angka Kelahiran Total) Tahun 2017 – 2021 .....II-84

Tabel II- 91 : Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2017 – 2021 .....II-84

Tabel II- 92 : Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2017 – 2021.....II-85

Tabel II- 93 : Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 .....II-86

Tabel II- 94 : Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 .....II-86

Tabel II- 95 : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Tahun 2017 – 2021.....II-87

Tabel II- 96 : Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Tahun 2017 – 2021 ..... II-88

Tabel II- 97 : Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 ..... II-88

Tabel II- 98 : Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas Tahun 2017 – 2021 ..... II-89

Tabel II- 99 : Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirasausaha Tahun 2017 – 2021 ..... II-90

Tabel II- 100 : Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021 ..... II-91

Tabel II- 101 : Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tahun 2017 – 2021 ..... II-91

Tabel II- 102 : Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 2017 – 2021 ..... II-92

Tabel II- 103 : Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2017 – 2021 ..... II-93

Tabel II- 104 : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2021 ..... II-93

Tabel II- 105 : OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2021 ..... II-94

Tabel II- 106 : Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Tahun 2017 – 2021 ..... II-95

Tabel II- 107: Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2017 – 2021 ..... II-95

Tabel II- 108 : Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2017 – 2021 ..... II-96

Tabel II- 109 : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2017 – 2021 ..... II-97

Tabel II- 110 : Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional Tahun 2017 – 2021 ..... II-98

Tabel II- 111 : Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 – 2021 ..... II-99

Tabel II- 112 : Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 ..... II-99

Tabel II- 113 : Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan Tahun 2017 – 2021 ..... II-100

Tabel II- 114 : Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021 ..... II-101

Tabel II- 115 : Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2017 – 2021 ..... II-101

Tabel II- 116 : Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2017 – 2021 ..... II-102

Tabel II- 117 : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2017 – 2021 ..... II-102

Tabel II- 118 : Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun Tahun 2017 – 2021 ..... II-103

Tabel II- 119 : Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun 2017 – 2021 ..... II-103

Tabel II- 120 : Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2017 – 2021 ..... II-104

Tabel II- 121 : Kinerja Realisasi Pupuk Tahun 2017 – 2021 ..... II-105

Tabel II- 122 : Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku Tahun 2017 – 2021 ..... II-105

Tabel II- 123 : Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait Tahun 2017 – 2021 ..... II-106

Tabel II- 124 : Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan Tahun 2017 – 2021 ..... II-108

Tabel II- 125 : Rasio PAD Tahun 2017 – 2021 ..... II-110

Tabel II- 126 : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2017 – 2021 ..... II-111

Tabel II- 127 : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2017 – 2021 ..... II-112

Tabel II- 128 : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2017 – 2021 ..... II-114

Tabel II- 129 : Opini Laporan Keuangan Tahun 2017 – 2021 ..... II-115

Tabel II- 130 : Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun 2017 – 2021 ..... II-115

Tabel II- 131 : Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Tahun 2017 – 2021 ..... II-116

Tabel II- 132 : Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan Tahun 2017 – 2021 ..... II-117

Tabel II- 133 : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2017 – 2021 ..... II-118

Tabel II- 134 : Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Tahun 2017 – 2021 ..... II-118

Tabel II- 135 : Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Tahun 2017 – 2021 ..... II-119

Tabel II- 136 : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD Tahun 2017 – 2021 ..... II-121

Tabel II- 137 : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD Tahun 2017 – 2021 ..... II-123

Tabel II- 138 : Manajemen Aset Tahun 2017 – 2021 ..... II-124

Tabel II- 139 : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun 2017 – 2021 ..... II-125

Tabel II- 140 : Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Tahun 2017 – 2021 ..... II-126

Tabel II- 141 : Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Tahun 2017 – 2021 ..... II-127

Tabel II- 142 : Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi Melalui Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2021 ..... II-129

Tabel II- 143 : Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2021 ..... II-130

Tabel II- 144 : Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2021 ..... II-131

Tabel II- 145 : Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... II-131

Tabel II- 146 : Capaian Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2020 ..... II-137

Tabel II- 147 : Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar II-200

Tabel III- 1 : Perkembangan PAD Kabupaten Takalar Tahun Takalar 2017-2021 ..... III-6

Tabel III- 2 : Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... III-32

Tabel III- 3 : Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019) III-33

Tabel III- 4 : Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 ..... III-35

Tabel III- 5 : Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-37

Tabel III- 6 : Rasio Lancar Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-42

Tabel III- 7 : Rasio Quick Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-43

Tabel III- 8 : Rasio Kas Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-43

Tabel III- 9 : Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-44

Tabel III- 10 : Rasio Total Kewajiban dengan Aset Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-44

Tabel III- 11 : Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021 ..... III-46

Tabel III- 12 : Defisit Riil Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021 ..... III-48

Tabel III- 13 : Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021 ..... III-49

Tabel III- 14 : Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021 ..... III-50

Tabel III- 15 : Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ..... III-53

Tabel III- 16 : Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ..... III-54

Tabel III- 17 : Proyeksi Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 ..... III-58

Tabel III- 18 : Proyeksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 ..... III-61

Tabel III- 19 : Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ..... III-66

Tabel III- 20 : Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ..... III-67

Tabel III- 21 : Perkiraan Kebutuhan Investasi Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ..... III-71

Tabel IV- 1 : Rumusan Masalah Masih Rendahnya Peningkatan Kapasitas Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan IV-4

Tabel IV- 2 : Rumusan Masalah Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan IV-6

Tabel IV- 3 : Rumusan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Masih Rendah IV-7

Tabel V- 1 : Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Takalar 2023-2026 ..... V-3

Tabel VI- 1 : Strategi RPD Kabupaten Takalar 2023-2026 ..... VI-2

Tabel VI- 2 : Arah Kebijakan Pembangunan RPD Kabupaten Takalar 2023-2026 ..... VI-5

Tabel VI- 3 : Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Takalar VI-11

Tabel VII- 1 : Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ..... VII-2

Tabel VII- 2 : Kerangka Pendanaan Dan Program RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026..... VII-4

Tabel VIII- 1 : Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 .....VIII-2

Tabel VIII- 2 : Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 .....VIII-4

Tabel VIII- 3 : Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 .....VIII-7

Tabel VIII- 4 : Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ..... VIII-25

Tabel VIII- 5 : Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026..... VIII-32

DAFTAR GAMBAR

Gambar I- 1 : Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RENSTRA PD..... I-4

Gambar I- 2 : Hubungan antar Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai Satu Kesatuan Sistem I-14

Gambar II- 1 : Peta Administrasi Kabupaten Takalar..... II-1

Gambar IV- 1 : Cakupan Kawasan Mamminasata IV-32

Gambar VI- 1 : Tema Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ..... VI-8

DAFTAR GRAFIK

Grafik III- 1 : Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-9

Grafik III- 2 : Postur Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-10

Grafik III- 3 : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-11

Grafik III- 4 : Postur PAD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-12

Grafik III- 5 : Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-13

Grafik III- 6 : Postur Pajak Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-14

Grafik III- 7 : Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-15

Grafik III- 8 : Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-15

Grafik III- 9 : Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-16

Grafik III- 10 : Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-17

Grafik III- 11 : Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-17

Grafik III- 12 : Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-18

Grafik III- 13 : Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-19

Grafik III- 14 : Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-19

Grafik III- 15 : Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-20

Grafik III- 16 : Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-21

Grafik III- 17 : Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-22

Grafik III- 18 : Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-23
Grafik III- 19 : Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-24
Grafik III- 20 : Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-24
Grafik III- 21 : Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-25
Grafik III- 22 : Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-26
Grafik III- 23 : Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-27
Grafik III- 24 : Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-28
Grafik III- 25 : Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-29
Grafik III- 26 : Realisasi Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaraan Pembiayaan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ..... III-36

LAMPIRAN 2
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 03 TAHUN 2022
TANGGAL 11 MARET 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Hal ini berdampak pada Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang RPJMD nya berakhir pada Tahun 2022 serta berkaitan dengan Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa bagi daerah yang belum memiliki RPJMD, untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah kabupaten/ kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/ kota dengan pembangunan Daerah provinsi.

Selanjutnya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian

penyusunan APBD, diinstruksikan kepada Bupati/Wali kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2023-2026.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 memperhatikan :

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Takalar sampai dengan Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022;
4. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan Nasional;
7. Regulasi yang berlaku.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 19 ayat 3, bahwa RPJMD ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang substansinya merupakan rencana kerja 5 (lima) tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun, namun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan perkada.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kedudukan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 dalam Tahun perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada BAB IV pada Sub bab IV.2.4. RPJM ke-4 (2020-2025), dijelaskan bahwa berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3 (2015-2019), RPJM ke-4 ditujukan untuk

mewujudkan : “Masyarakat mandiri, demokratis, berkeadilan sosial dan sejahtera lahir bathin”. Upaya tersebut dilakukan dengan Percepatan peningkatan Kualitas Manusia, Pembangunan Infrastruktur untuk kebutuhan pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa RPJM ke-4 adalah dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar yang menjadi pedoman arah kebijakan Pembangunan Tahun 2023 – 2026.

Sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 dilaksanakan melalui Tahapan dan tata cara sebagai berikut :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Takalar Menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 pada Bulan dengan memperhatikan Rancangan Renstra PD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Takalar Menyusun Rancangan Renstra PD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 serta Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
3. BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar Melakukan forum Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan / atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam berita acara forum konsultasi publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
4. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi;
5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancanngan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provisi Sulawesi Selatan;

6. BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Surat Rekomendasi Hasil Fasilitasi;
7. Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan diajukan oleh Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar Kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan;
8. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 yang telah ditetapkan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ;
9. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar melakukan verifikasi terhadap Rancangan Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;
10. Rancangan Akhir Renstra PD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 yang telah disempurnakan sesuai hasil verifikasi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) antara Tahapan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dan RENSTRA PD Tahun 2023-2026 sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar I- 1 : Keterkaitan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan RENSTRA PD

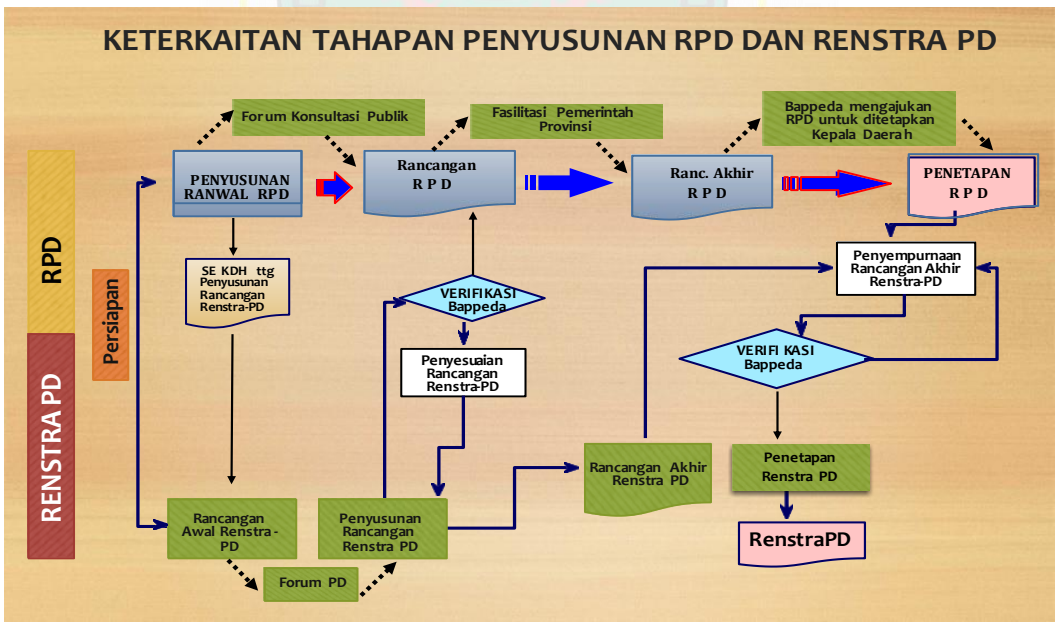

Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017; Diolah Bappelitbangda 2022

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan daerah Kabupaten, Provinsi, maupun Pusat, maka RPD Kabupaten Takalar disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025, RPJMN Tahun 2020–2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018, dan RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan lebih dahulu. Disamping itu, penyusunan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 juga memperhatikan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun yang lalu serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengingat Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai pengganti RPJMD Kabupaten Takalar sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, maka proses penyusunannya dilakukan secara sistematis, akurat dan terpadu dengan melibatkan seoptimal mungkin peran para pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan konsultasi publik Rancangan RPD Kabupaten Takalar. Proses penyusunan RPD Kabupaten Takalar dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, holistik dan berkesinambungan yang disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
2. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
3. Pendekatan Politis, pendekatan ini mengkaji administrasi negara yang menekankan fungsi-fungsi politik dalam bernegara.
4. Pendekatan top-down, pendekatan ini dilaksanakan dengan mempedomani RPJPD sebagai arah kebijakan pembangunan jangka panjang.
5. Pendekatan bottom-up, pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPD memiliki **nilai-nilai strategis**, yaitu :

1. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

2. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan pedoman pembangunan selama 4 (empat) tahun;
3. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD);
4. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappelitbangda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan;
5. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Pj. Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah selama 4 (empat) tahun;
6. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi;
7. RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 merupakan pedoman penilaian keberhasilan Pemerintah Daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
37. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
38. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional pada Saat Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
39. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
40. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
43. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2005–2025;
45. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
47. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2012-2031.
48. Peraturan Bupati Takalar Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan RPD Takalar dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan ketentuan didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 260 menyatakan bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun Rencana sebagai bagian dari rencana pembangunan nasional. Makna ini mengamanahkan bahwa rencana pembangunan di Kabupaten Takalar, harus berpedoman pada rencana pembangunan nasional dan provinsi sulawesi selatan baik rencana jangka panjang, maupun rencana pembangunan menengah. Oleh karena itu penyusunan RPD kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ini berpedoman pada dokumen nasional dan provinsi.

1.3.2 Hubungan RPD dengan RPJMN

Sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Menengah Daerah harus mengacu dan selaras dengan RPJPN dan RPJMN karena keberhasilan pembangunan di daerah termasuk perencanaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberhasilan pembangunan nasional.

RPJMN dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Takalar dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Oleh karena itu, substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan untuk kesejahteraan rakyat menjadi inti dari RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

1.3.3 Hubungan RPD dengan RPJPD

Dokumen RPD Tahun 2023 - 2026 merupakan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang masuk dalam periode Keempat dari periodesasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2005 - 2025. Oleh karena itu, berdasarkan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, penyusunan RPD juga berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan yang termuat dalam dokumen RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005 - 2025.

1.3.4 Hubungan RPD dengan Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

Sesuai arahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 bahwa dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) harus memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen

RPJMD Provinsi, oleh karena itu dalam penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Takalar juga mempedomani Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Tahun 2023-2026.

1.3.5 Hubungan RPD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Penyusunan RPD senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Takalar sebagai dasar untuk menetapkan lokasi kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan pola ruang daerah di Kabupaten Takalar.

1.3.6 Hubungan RPD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

RPD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk masa 3 (tiga) tahun kedepan. Oleh karena itu, Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Bappelitbangda Kabupaten Takalar.

1.3.7 Hubungan RPD dengan RKPD.

Pelaksanaan RPD Tahun 2023 - 2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam dokumen RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan (Renja) PD.

Adapun gambaran hubungan (keterkaitan) dokumen antara RPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan di Kabupaten Takalar dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar I- 2 : Hubungan antar Dokumen RPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya sebagai Satu Kesatuan Sistem

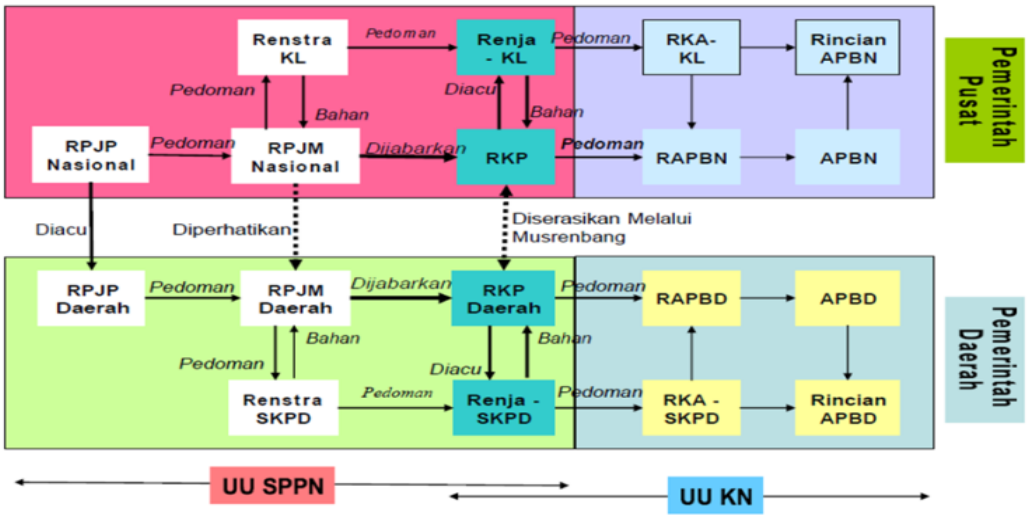

Sumber : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri 86 Tahun 2017; Diolah Bappelitbangda 2022.

1.4 Maksud Dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Takalar sesuai dengan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan periode keempat RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026 adalah :

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 4 (empat) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar dalam menyusun Renstra PD Tahun 2023-2026;
2. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 menjadi pedoman penyusunan RENSTRA PD 2023-2026, RKPD

Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 dan RAPBD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 .

3. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 4 (empat) tahun ke depan;
4. Merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2023-2026, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing PD Tahun 2023-2026, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025;
5. Menetapkan arah pembangunan dalam jangka 4 (empat) tahun kedepan;
6. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023-2026;
7. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 4 (empat) tahun yang akan datang;
8. Menetapkan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) dan Indikator kinerja utama sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Takalar periode 2023 – 2026;
9. Menjadi pedoman bagi Penjabat (Pj.) Kepala Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 terdiri dari 9 (sembilan) bab, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan awal RPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab Gambaran Umum Kondisi Daerah menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar – dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah

yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang diawali dengan penjelasan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu – isu strategi daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPD karena menjadi dasar utama tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir – butir penting isu – isu strategis yang menentukan kinerja pembangunan dalam 4 (empat) tahun mendatang. Penyajian isu – isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis dan memperhatikan dinamika internasional, kebijakan regional maupun nasional yang dapat memberikan manfaat serta pengaruh dimasa datang terhadap Kabupaten Takalar.

BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah disepakati Pemerintah Kabupaten Takalar untuk menjawab isu-isu strategis daerah selama kurun waktu 3 (tiga) tahun.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

Dalam bab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing – masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi, misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target serta Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapain tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan *Sustainable Development Goals*/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)/(TPB) pada akhir periode RPD.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menguraikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. Pedoman transisi untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pembangunan karena berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yakni periode 2017-2022 dimana dokumen RPD ini akan memasukkan program – program yang diarahkan pada pencapaian target kinerja yang belum dicapai pada periode perencanaan sebelumnya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. Kaidah perencanaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dokumen

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1 Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

Di dalam kebijakan penataan ruang nasional (PP. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN) seluruh wilayah Kabupaten Takalar masuk dalam KSN Perkotaan Mamminasata bersamaan dengan kawasan perkotaan Maros, Kota Makassar, perkotaan Sungguminasa dan perkotaan Takalar (ibukota kabupaten Pattalassang).

Gambar II- 1 : Peta Administrasi Kabupaten Takalar

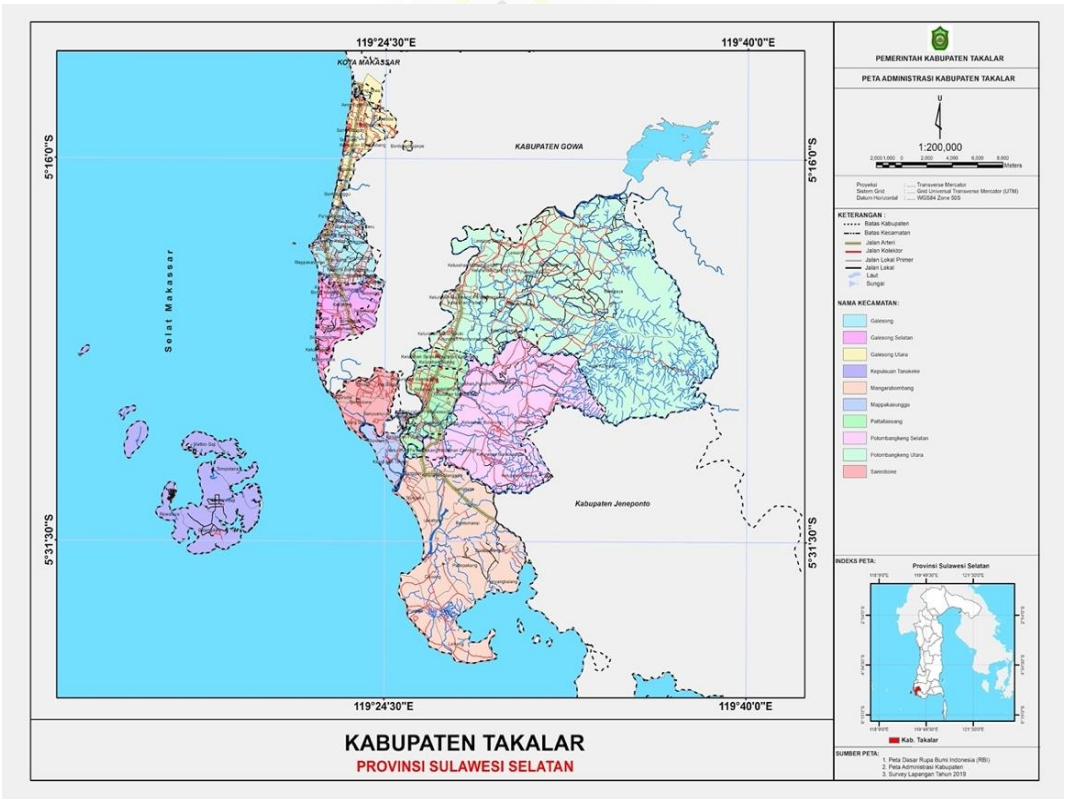

Sumber : Draft RTRW Kabupaten Takalar 2021 - 2041

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Takalar terletak antara $5^0$30' – $5^0$38' Lintang Selatan dan $119^0$22' – $119^0$39' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografis, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar. Sedangkan di sebelah barat dan selatan dibatasi oleh Selat Makassar dan Laut Flores.

Sesuai Permendagri No. 56 tahun 2015 tentang luas wilayah administratif, maka Kabupaten Takalar dengan ibukota Pattallassang memiliki luas wilayah 56.651 ha atau 566,61 Km^2 atau sekitar 1,24% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yaitu seluas 45.764,53 Km^2. Adapun jarak ibukota Kabupaten Takalar dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 45 km yang melalui Kabupaten Gowa.

Secara administratif, Kabupaten Takalar terdiri atas 10 (Sepuluh) wilayah kecamatan, 100 Desa/Kelurahan yang terdiri atas 76 (tujuh puluh enam) desa dan 24 kelurahan yang terdiri dari 465 (331 dusun dan 113 lingkungan). Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Polongbangkeng Utara (212,25 km2), dan yang paling sempit adalah Galesong Utara (15,11 km2). Kecamatan dengan desa/kelurahan terbanyak adalah Polongbangkeng Utara (12 desa dan 6 kelurahan), sedangkan Kecamatan dengan Desa/Kelurahan paling sedikit adalah Sanrobone (6 desa). Kecamatan dengan Dusun/Lingkungan paling banyak adalah Polongbangkeng Utara, sedangkan Kecamatan dengan Dusun/Lingkungan yang paling sedikit adalah Sanrobone. Adapun pembagian wilayah administrasi Kabupaten Takalar dapat dilihat pada tabel II-1.

Tabel II- 1 : Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Takalar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Km2)	Persentase (%)
		Desa	Kel		
1.	Mangarabombang	11	1	100,50	17,74
2.	Mappakasunggu	3	1	15,12	2,67
3.	Sanrobone	6	-	29,46	5,18
4.	Polongbangkeng Selatan	4	6	88,07	15,54
5.	Pattallassang	-	9	25,31	4,47
6.	Polongbangkeng Utara	12	6	212,25	37,47
7.	Galesong Selatan	12	-	24,71	4,36
8.	Galesong	14	-	25,93	4,58
9.	Galesong Utara	9	1	15,11	2,67
10.	Kepulauan Tanakeke	5	-	30,15	5,32
Jumlah		**76**	**24**	**566,51**	**100,0**

Sumber : Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022

Berdasarkan tabel II-1 juga dapat dilihat bahwa Kecamatan dengan luas wilayah terbesar terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara yaitu seluas 212,25 Km2 atau 37,47% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Takalar, sementara Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu masing-

masing Kecamatan Galesong Utara yaitu seluas 15,11 Km2 (2,67%) dan Kecamatan Mappakasunggu yaitu seluas 15,12 Km2 (2,67%) dari total luas wilayah Kabupaten Takalar.

2.1.2 Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Takalar berada pada ketinggian 0 – 64 meter diatas permukaan laut (*mdpl*), dengan bentuk permukaan lahan relatif datar, bergelombang hingga perbukitan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah dataran dan wilayah pesisir dengan ketinggian 0 – 44 *mdpl*.

Tabel II- 2 : Tinggi Wilayah di Atas Permukaan Laut (DPL) Menurut Kacamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2021

No.	Kecamatan	Tinggi (meter)
1.	Mangarabombang	34
2.	Mappakasunggu	44
3.	Sanrobone	22
4.	Polongbangkeng Selatan	64
5.	Pattallassang	38
6.	Polongbangkeng Utara	41
7.	Galesong Selatan	22
8.	Galesong	32
9.	Galesong Utara	17
10.	Kepulauan Tanakeke	19

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2022

2.1.3 Geologi

Struktur geologi Kabupaten Takalar dipengaruhi oleh formasi camba, terobosan, gunung api cindako, formasi tonasa dan endapan aluvium. Masing masing formasi batuan tersebut memiliki karakteristik yang membentuk struktur tanah dan batuan, antara lain :

- Formasi Terobosan, terbentuk atas batuan basal
- Formasi Camba terbentuk atas sendimen laut berselingan
- Formasi Tonasa terbentuk atas batuan gamping
- Formasi Gunung Api–Cindako, terbentuk atas batuan lava-breksi-tufa-konglomerat dan terutama lava
- Endapan alivium dan pantai, terbentuk atas kerikil, pasir, lempung, dan lumpur

Jenis batuan atau geologi Kabupaten Takalar terdiri dari; Vulcanic (batuan Vulkanik), batuan ini merupakan batuan tertua yang telah mengalami

perubahan, sebagian besar batu kapur terbentang sepanjang pantai perbatasan Takalar dengan Jeneponto. Gunung Api Baturape – Cindako merupakan batuan vulkanik basal yang terdiri dari lava dan batuan piroklastik yang bersilangan dengan tufa dan batu pasir. Batuan ini tersebar luas di wilayah pegunungan dan daerah dataran, Lapisan batuan ini memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah. Batuan Instrusif terdiri atas batuan basal mulai dari dolerit, diorit, gabbro hingga diabase.

2.1.4 Hidrologi

Secara Hidrologi, Kabupaten Takalar dilewati oleh 6 (enam) buah Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Sungai Je'neberang, Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Je'netallasa, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung. 4 (empat) diantara 6 (enam) sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 Ha, yaitu Sungai Pappa, Sungai Palleko, Sungai Pammukkulu dan Sungai Je'nemarrung.

2.1.5 Klimatologi

Secara Klimatologi Kabupaten Takalar beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Musim hujan biasanya terjadi antara bulan November hingga bulan Mei. Jumlah curah hujan dan temperatur udara di Kabupaten Takalar selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel II-3.

Tabel II- 3 : Jumlah Curah Hujan dan Rata-Rata Temperatur Udara Di Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Bulan	Curah Hujan		Suhu/Temperature °C		
		Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (Hari)	Min	Rata-Rata	Max
1	Januari	839,3	30	22,8	27,2	31,2
2	Februari	397,0	20	23,2	27,5	31,9
3	Maret	626,3	23	22,7	27,8	32,6
4	April	294,0	11	23,2	28,5	32,2
5	Mei	78,1	11	23,4	29,4	34,0
6	Juni	87,0	14	22,4	28,8	34,5
7	Juli	77,3	9	20,5	28,3	34,0
8	Agustus	104,2	8	22,7	29,5	34,3
9	September	82,5	11	22,3	29,4	34,6
10	Oktober	245,4	17	23,6	29,0	33,5
11	November	542,0	26	23,6	28,3	32,6
12	Desember	860,3	28	23,0	27,7	32,6

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2022

Berdasarkan tabel II-3 dapat dilihat bahwa jumlah curah hujan terbanyak tahun 2021 terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 860mm^3 dan terjadi selama 28 hari. Temperatur udara terendah sebesar 20,5 derajat celcius pada bulan Juli dan tertinggi 34.5 derajat celcius pada bulan Juni.

2.1.6 Penggunaan Lahan

Kabupaten Takalar memiliki luas 566,51 km2. Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Takalar terdiri atas Tubuh Air (embung), Lahan Terbuka, Tambak, Semak Belukar, Rawa, Pertanian Lahan Basah, permukiman, Perkebunan, hutan dan beberapa jenis penggunaan lahan yang lainnya. Berdasarkan tabel berikut, bahwa penggunaan lahan terluas yaitu Pertanian Lahan Basah dengan luas 32.442,53 Ha sedangkan penggunaan lahan terkecil yaitu perkebunan seluas 15,45 Ha. Untuk lebih jelasnya penggunaan lahan di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel II- 4 : Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Tubuh Air (Embung)	33,24	0,06
2	Lahan Terbuka	6.208,38	10,96
3	Tambak	2.916,78	5,15
4	Semak Belukar	11.880,70	20,97
5	Rawa	467,79	0,83
6	Pertanian Lahan Basah	32.442,53	57,27
7	Permukiman	903,19	1,59
8	Perkebunan	15,45	0,03
9	Hutan	1.506,26	2,66
10	Lainnya	276,67	0,49
Jumlah		**56.651,00**	**100**

Sumber : Kabupaten Takalar Dalam Angka Tahun 2022

2.1.7 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Takalar tahun 2012-2031, pola ruang kawasan budi daya direncanakan sesuai kemampuan lahan guna mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya. Pemanfaatan kawasan budi daya juga diarahkan dalam rangka mendukung terciptanya struktur ruang yang mendukung bagi pengembangan berbagai sektor pembangunan dan integrasi wilayah. Pengembangan kawasan budi daya di Kabupaten Takalar dilakukan secara efektif dan efisien serta sinergis,

agar pemanfaatan ruang dan sumberdaya dapat dilakukan secara optimal. Berkenaan dengan itu, strategi pengembangan kawasan budi daya ditekankan pada upaya-upaya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Tabel II- 5 : Potensi Pengembangan Wilayah Kabupaten Takalar Tahun 2021

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
1	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 2.856 (dua ribu delapan ratus lima puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara.
2	Kawasan Pertanian	Kawasan tanaman pangan seluas kurang lebih 26.266 (dua puluh enam ribu dua ratus enam puluh enam) hektar berada di seluruh wilayah kecamatan. Kawasan tanaman pangan terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 18.457 (delapan belas ribu empat ratus lima puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Sanrobone.
		Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 4.266 (empat ribu dua ratus enam puluh enam) hektar berada di Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Polongbangkeng Utara
3	Kawasan Perikanan	Kawasan perikanan dengan luas kurang lebih 4.186 (empat ribu seratus delapan puluh enam) hektar berada di Kecamatan Galesong, Kecamatan

No.	Rencana Pengembangan Kawasan	Uraian
		Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Sanrobone.
4	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 3.561 (tiga ribu lima ratus enam puluh satu) hektar berada di Kecamatan Mangarabombang.
5	Kawasan Pariwisata	Kawasan pariwisata berada di Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Sanrobone.
6	Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 5.112 (lima ribu seratus dua belas) terdapat di Kecamatan Galesong, Kecamatan Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Sanrobone.
		Kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.178 (tiga ribu seratus tujuh puluh delapan) terdapat di seluruh wilayah kecamatan
7	Kawasan Transportasi	Kawasan transportasi seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Galesong
8	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Kawasan pertahanan dan keamanan berada di Kecamatan Galesong, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Sumber : Draft RTRW KabupatenTakalar Tahun 2021-2041

2.1.8 Wilayah Rawan Bencana

Kabupaten Takalar terletak di kaki Pulau Sulawesi dimana 40% wilayahnya merupakan wilayah pesisir dengan panjang garis pantai sepanjang 74 km. Kondisi topografis Kabupaten Takalar yang terdiri atas dataran rendah, perbukitan dan pesisir pantai, selain memiliki potensi keindahan dan kesuburan juga memiliki potensi rawan bencana khususnya banjir dan angin puting beliung. Semua kondisi tersebut akan menimbulkan risiko dan dampak kerawanan bencana baik banjir, banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, angin puting beliung (cuaca ekstrim), gelombang ekstrim dan abrasi, kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Takalar perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana guna meminimalisir dampak dari bencana-bencana yang berpotensi terjadi.

Tabel II- 6 : Kejadian Bencana di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Jenis Bencana	Lokasi	Luas Wilayah Terdampak	Waktu Kejadian
2017				
1	Banjir	4 Kecamatan	100 Ha	Desember
2	Puting Beliung	Dusun Campagaya Kec. Galesong	12 Rumah	Desember
2018				
1	Puting Beliung	Galesong Utara	68 Rumah	September s/d Desember
2	Gelombang Pasang/ Abrasi	Sampulungan Galesong Utara	1 Rumah	Desember
2019				
1	Banjir			
2	Puting Beliung	Polongbangkeng Utara dan Mangarabombang	41 Rumah	Januari, Maret, November
3	Gelombang Pasang/ Abrasi	Galesong	3 Rumah	Januari
4	Kekeringan	Mangarabombang	1 Kecamatan	Agustus
2020				
1	Puting Beliung	Galesong Utara	15 Rumah	Januari, Februari, November dan Desember

No	Jenis Bencana	Lokasi	Luas Wilayah Terdampak	Waktu Kejadian
2021				
1	Banjir	**	**	**
2	Puting Beliung	**	**	**
3	Gelombang Pasang/ Abrasi	**	**	**
4	Kekeringan	**	**	**

Sumber : Website Data Informasi Bencana Indonesia, 2021

*** : Tidak ada kejadian*

Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) mencatat bahwa Kabupaten Takalar pernah mengalami kejadian bencana seperti banjir, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kekeringan. Bencana cuaca ekstrim merupakan bencana yang paling sering terjadi dengan tingkat kerusakan rumah dari sedang sampai tinggi. Sedangkan jumlah pengungsi yang terbanyak ada pada bencana banjir. Data dari DIBI menunjukkan kejadian yang sudah pernah terjadi di Kabupaten Takalar dan tidak menutup kemungkinan Kabupaten Takalar masih menyimpan potensi bencana yang lain.

Kawasan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Takalar adalah kawasan pesisir merupakan kawasan rawan bencana abrasi pantai (Kecamatan Mappakasunggu dan Kecamatan Mangarabombang) dan banjir (pada dataran rendah Sungai Gamanti dan Sungai Pappa), kawasan perbukitan dan perkebunan rentan dengan bahaya longsor di kemiringan > 40% terletak di Kecamatan Polombangkeng Utara yang berbatasan dengan Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa dan Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto.

Dampak dari kejadian bencana tersebut mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis pasca bencana. Menyikapi tingginya potensi risiko bencana, Kabupaten Takalar membutuhkan sebuah Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Optimalitas perencanaan penanggulangan bencana tersebut dapat dilakukan melalui pelibatan setiap pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, serta pengintegrasian RPB ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Takalar. Proses ini diperlukan agar dapat memastikan RPB yang telah dibuat menjadi bagian dari rencana induk pembangunan Kabupaten Takalar secara terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada, sehingga dapat menjadi dasar untuk upaya penanggulangan bencana,

meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi terkait Penanggulangan Bencana (PB) di Kabupaten Takalar, serta membangun dasar yang kuat untuk penyelenggaraan PB.

Analisis bahaya bencana disusun berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Takalar dengan mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional. Pendekatan ini menghasilkan tingkat/kelas bahaya bencana di setiap potensi bencana yang kemudian disajikan dalam bentuk spasial. Kajian bahaya suatu kawasan diperoleh berdasarkan analisis indeks bahaya untuk setiap potensi bencana. Indeks bahaya yang merupakan dasar penentuan kategori kelas bahaya diperoleh dari parameter-parameter penentu bahaya dengan melalui proses tumpang susun (overlay) menggunakan pendekatan SIG (Sistem Informasi geografi). Analisis tumpang susun menggunakan metode berbobot tertimbang yaitu Scoring. Potensi bencana diperoleh dari sejarah kejadian dan kemungkinan terjadi suatu bencana di kawasan tersebut. Dari potensi bencana yang ada, maka dapat diperkirakan besaran luas bahaya yang akan terjadi di kawasan tersebut.

Kajian bahaya di Kabupaten Takalar terdiri dari 9 (sembilan) jenis bencana yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim (angin puting beliung), gempabumi, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan tsunami. Pengkajian bahaya yang dilakukan untuk seluruh potensi bencana berpedoman pada metodologi bahaya untuk memperoleh kelas bahaya dan peta bahaya yang tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 dan referensi pedoman lainnya di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Skala indeks bahaya dibagi dalam 3 (tiga) kelas bahaya yaitu:

- Rendah (0 - 0,333);
- Sedang (0,333 - 0,666); dan
- Tinggi (0,666 - 1).

a. Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, *http://www.bnpb.go.id*). Metode kajian bahaya banjir yang digunakan adalah metode GFI (Geomorphic Flood Index) yang merupakan pendekatan untuk melihat wilayah rawan dan potensi banjir berdasarkan parameter geomorfologi di wilayah tersebut. Peta yang dihasilkan akan menggambarkan wilayah yang berpotensi tergenang air apabila faktor

penyebab banjir terjadi seperti air sungai meluap, air laut pasang, dan hujan dengan intensitas tinggi dalam periode waktu yang lama. Adapun luasan bahaya bencana banjir di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel II- 7 : Bahaya Bencana Banjir Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	3.410.38	4.607.78	1.272.64	9.290.80
2.	Mappakasunggu	24.73	652.18	251.40	928.31
3.	Sanrobone	227.64	1.204.51	222.89	1.655.03
4.	Polongbangkeng Selatan	2546.74	4.409.52	637.48	7.593.74
5.	Pattallassang	375.16	2.027.91	282.71	2.685.77
6.	Polongbangkeng Utara	6.446.43	5.539.37	642.44	1.2628.24
7.	Galesong Selatan	430.46	1.532.29	227.37	2.190,12
8.	Galesong	299,26	1.627.45	231.25	2.157,96
9.	Galesong Utara	619.43	1.070.27	105.32	1.795.02
10	Kepulauan Tanakeke	1.114.34	2.192.23	490.98	3.797.56
Total		15.494.58	24.863.51	43.64.47	44.722.55
Persentase (%)		34.65	55.60	9.76	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana banjir di Kabupaten Takalar sebesar 44.722,55 Ha dan didominasi kelas bahaya sedang dengan luas 24.863,51 Ha atau 55,60 persen. Sedangkan bahaya bencana banjir dengan kelas bahaya tinggi sebesar 4.364,47 Ha atau 9,76%.

Bencana banjir merupakan ancaman bagi penduduk beserta aktivitasnya sehingga perlunya Pemerintah Kabupaten Takalar menyiapkan penanggulangan bencana banjir yang dapat dilakukan secara bertahap, dari pencegahan sebelum banjir (prevention), penanganan saat banjir (response/intervention), dan pemulihan setelah banjir (recovery). Tiga Tahapan tersebut berada dalam suatu siklus kegiatan penanggulangan banjir yang berkesinambungan. Pemetaan terhadap bencana banjir juga sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya mitigasi bencana.

b. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi secara tiba-tiba dengan volume air yang besar selama periode waktu yang singkat. Banjir bandang biasanya terjadi di hulu sungai yang mempunyai alur sempit. Penyebab banjir bandang antara lain hujan yang lebat dan runtuhnya bendungan air. Pemetaan banjir bandang ini dilakukan dengan melihat alur sungai yang berpotensi

tersumbat oleh longsor di hulu sungai. Adapun luasan bahaya bencana banjir bandang di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel II- 8 : Bahaya Bencana Banjir Bandang Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Pattallassang	14.36	61.91	120.21	196.48
2.	Polongbangkeng Selatan	54.92	280.99	756.07	1091.98
3.	Polongbangkeng Utara	194.85	575.10	906.98	1676.93
Total		264.13	918.00	1.783.26	2.965.39
Persentase (%)		8.91	30.96	60.14	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

c. Cuaca Ekstrim

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, cuaca ekstrim atau angin puting beliung didefinisikan sebagai angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Sedangkan dalam Peraturan Kepala BMKG Nomor: Kep. 009 Tahun 2010 disebutkan, angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar yang keluar dari awan cummulonimbus dengan kecepatan lebih dari 34,8 knots atau 64,4 km/jam dan terjadi dalam waktu yang singkat. Angin puting beliung merupakan fenomena atmosfer dapat terjadi ketika faktor-faktor pembentuknya terpenuhi seperti adanya wilayah tekanan udara rendah yang dikelilingi oleh daerah bertekanan udara tinggi sehingga terbentuk siklon. Adapun luasan bahaya bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel II- 9 : Bahaya Bencana Cuaca Ekstrim Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.302.16	9.302.16
2.	Mappakasunggu	918.02	918.02
3.	Sanrobone	1.643.14	1.643.14
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77

5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	21.973.31	21.973.31
7.	Galesong Selatan	2.220.02	2.220.02
8.	Galesong	2.187.85	2.187.85
9.	Galesong Utara	1.834.52	1.834.52
10	Kepulauan Tanakeke	4.120.07	4.120.07
	Total (Ha)	55.549.21	55.549.21

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

d. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras. Sementara itu, abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Adapun luasan bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel II- 10 : Bahaya Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya		Total (Ha)
		Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	528.70	183.06	711.76
2.	Mappakasunggu	79.66		79.66
3.	Sanrobone	99.15		99.15
4.	Galesong Selatan	146.05		146.05
5.	Galesong	107.35		107.35
6.	Galesong Utara	286.40		286.40
7.	Kepulauan Tanakeke	258.51	143.33	401.84
Total (Ha)		1.505.82	326.39	1.832.21
Presentase (%)		82.18	17.81	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Takalar sebesar 1.832,21 Ha dan didominasi kelas bahaya sedang dengan luas 1.505,82 Ha atau 8 2 , 1 8 persen. Sedangkan untuk kelas bahaya tinggi dengan luas 326,39 Ha atau 17,81 persen.

e. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, akitivitas gunungapi atau runtuhan batuan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, *http://www.bnpb.go.id*). Adapun luasan bahaya bencana gempabumi di Kabupaten Takalar sebagai berikut :

Tabel II- 11 : Bahaya Bencana Gempa Bumi Per kecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.373.93	9.373.93
2.	Mappakasunggu	928.81	928.81
3.	Sanrobone	1.652.49	1.652.49
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77
5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	2.1973.32	2.1973.32
7.	Galesong Selatan	2.220.31	2.220.31
8.	Galesong	2.189.34	2.189.34
9.	Galesong Utara	1.840.40	1.840.40
10	Kepulauan Tanakeke	4.226.34	4.226.34
Total (Ha)		55.755.05	55.755.05

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana gempa bumi di Kabupaten Takalar sebesar 55.755,05 Ha dengan kelas bahaya sedang.

f. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, *http://www.bnpb.go.id*). Adapun luasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel II- 12 : Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan Di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Tinggi	Total (Ha)
1.	Polongbangkeng Selatan	81.34	81.34
2.	Polongbangkeng Utara	4.260.97	4.260.97
Total (Ha)		4.342.31	4.342.31

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Takalar sebesar 4.342,31 Ha dengan kelas bahaya tinggi.

g. Kekeringan

Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Kondisi ini bermula saat berkurangnya curah hujan di bawah normal dalam periode waktu yang lama sehingga kebutuhan air dalam tanah tidak tercukupi dan membuat tanaman tidak dapat tumbuh dengan normal. Jenis kekeringan yang dikaji dalam adalah kekeringan meteorologis yang merupakan indikasi awal dalam terjadinya bencana kekeringan, sehingga perlu dilakukan analisa untuk mengetahui tingkat kekeringan tersebut. Adapun luasan bahaya bencana kekeringan di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel II- 13 : Bahaya Bencana Kekeringan Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya Sedang	Total (Ha)
1.	Mangarabombang	9.425.26	9.425.26
2.	Mappakasunggu	938.24	938.24
3.	Sanrobone	1.666.08	1.666.08
4.	Polongbangkeng Selatan	8.650.77	8.650.77
5.	Pattallassang	2.699.34	2.699.34
6.	Polongbangkeng Utara	2.1973.32	2.1973.32
7.	Galesong Selatan	2.220.31	2.220.31
8.	Galesong	2.220.31	2.220.31
9.	Galesong Utara	1.840.40	1.840.40
10	Kepulauan Tanakeke	4.225.44	4.225.44
Total (Ha)		55.825.39	55.825.39

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

h. Tanah Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Peta zona gerakan tanah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) disesuaikan dengan kemiringan lereng untuk menghasilkan sebaran wilayah rawan longsor. Kondisi lereng yang curam berpotensi longsor lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi lereng yang landai. Adapun luasan bahaya bencana tanah longsor di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel II- 14 : Bahaya Bencana Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Rendah	Sedang	Tinggi	
1.	Polongbangkeng Selatan	6.97	186.13	3.34	196.44
2.	Polongbangkeng Utara	76.66	4.263.16	1.962.84	6.302.66
Total (Ha)		83.62	4.449.29	1.966.18	6.499.10
Presentase (%)		1.29	68.46	30.25	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, luasan bahaya bencana tanah longsor di Kabupaten Takalar sebesar 6.449,10 Ha dan didominasi kelas bahaya sedang dengan luas 4.449.29 Ha atau 6 8 , 4 6 persen. Sedangkan untuk kelas bahaya tinggi dengan luas 1.966,18 Ha atau 3 0 , 2 5 persen.

i. Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempabumi (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, http://www.bnpb.go.id). Adapun luasan bahaya bencana tsunami di Kabupaten Takalar sebagai berikut:

Tabel II- 15 : Bahaya Bencana Tsunami Perkecamatan di Kabupaten Takalar

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Ringan	Sedang	Tinggi	
1.	Mangarabombang	621.56	455.61	2.320.52	3.397.69
2.	Mappakasunggu	38.63	36.38	799.03	874.04
3.	Sanrobone	208.26	130.35	929.65	1.268.26
4.	Polongbangkeng Selatan	3.86			3.86
5.	Pattallassang	74.76	13.32	18.79	106.87
6.	Polongbangkeng Utara				
7.	Galesong Selatan	219.80	111.99	260.38	592.17
8.	Galesong	65.68	35.15	126.32	227.15
9.	Galesong Utara	222.44	143.43	298.05	663.92
10	Kepulauan Tanakeke	1.348.87	423.95	767.82	2.540.64

No.	Kecamatan	Kelas Bahaya			Total (Ha)
		Ringan	Sedang	Tinggi	
Total (Ha)		2.803.86	1.350.18	5.520.57	9.674.61
Presentase (%)		28.98	13.96	57.06	100

Sumber : Hasil Analisis Revisi RTRW, 2020

Berdasarkan hasil analisis, terdapat 9 Kecamatan di Kabupaten Takalar yang berpotensi terdampak bahaya bencana tsunami dengan luasan sebesar 9.674,61 Ha dan didominasi kelas bahaya tinggi dengan luas 5.520,57 Ha atau 57,06 persen.

2.1.9 Demografi

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Takalar terlihat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan penduduk per tahun selama periode 2017-2021 sebesar 1.05%. Berdasarkan Kecamatan, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada wilayah Kecamatan Sanrobone dan Galesong Utara dengan nilai laju pertumbuhan penduduk masing masing sebesar 1,34% per tahun dan terendah terjadi pada wilayah Kecamatan Kepulauan Tanakeke dan Mappakasunggu yaitu masing masing sebesar 0.78. Sebagai catatan bahwa Kepulauan Tanakeke adalah Kecamatan yang baru terbentuk pada tahun 2019.

Tabel II- 16 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Laju Pert. Penduduk (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	Mangarabombang	38.913	39.156	39.378	41.085	42.916	1,08
2	Mappakasunggu	16,129	16.239	16.343	9.461	9.936	0,78
3	Sanrobone	14.048	14.130	14.206	15.257	16.319	1,34
4	Polongbangkeng Selatan	28.494	26.690	28.871	29.237	29.807	0,84
5	Pattallassang	38.975	39.551	40.119	39.275	40.160	1,18
6	Polongbangkeng Utara	49,797	50.290	50.762	50.255	51.372	0,88
7	Galesong Selatan	25.936	26.194	25.443	26.985	28.210	1,.19
8	Galesong	40.962	41.421	41.865	41.003	42,873	0,88
9	Galesong Utara	39.729	40.221	40.701	41.311	42.174	1,34
10	Kepulauan Tanakeke	*	*	*	6.984	7.395	0,78
Takalar		**292.983**	**295.892**	**298.688**	**300.853**	**311.162**	**1,05**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, 2022

Tabel II-16 menunjukkan sebaran kepadatan penduduk tidak merata dan hanya terfokus pada 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan

Polongbangkeng Utara, Mangarabombang, Pattallassang, Galesong dan Galesong Utara. Kepadatan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2.791 jiwa/km^2 terdapat diwilayah kecamatan yang berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yaitu Kecamatan Galesong Utara. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Polongbangkeng Utara.

Jika dilihat dari besaran jumlah penduduk maka Kecamatan Polongbangkeng Utara merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan juga merupakan Kecamatan terluas yang ada dalam wilayah Kabupaten Takalar.

Tabel II- 17 : Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	% Penduduk	Jumlah Penduduk (Org)	Kepadatan Penduduk (Org/ Km^2)
1.	Mangarabombang	100,50	13,72	42.916	427
2.	Mappakasunggu	15,12	3,23	9.936	657
3.	Sanrobone	29,36	5,25	16.319	556
4.	Polongbangkeng Selatan	88,07	9,63	29.807	338
5.	Pattallassang	25,31	13,03	40.160	1.587
6.	Polongbangkeng Utara	212,25	16,56	51.372	242
7.	Galesong Selatan	24,71	9,00	28.210	1.142
8.	Galesong	25,93	13,70	42,873	1.653
9.	Galesong Utara	15,11	13,55	42.174	2.791
10.	Kepulauan Tanakeke	30,15	2,33	7.395	245
Takalar		566,51	100,00	311.162	549

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2021), data diolah

Populasi penduduk terbanyak terdapat pada kelompok umur 5 – 9 Tahun yaitu sebanyak 29.128 jiwa atau 9,58% dari total penduduk Kabupaten Takalar sementara populasi penduduk terkecil terdapat pada kelompok umur 60 – 64 tahun yaitu sebanyak 11.384 jiwa atau 3,74% dari total jumlah penduduk Kabupaten Takalar tahun 2019.

Tabel II- 18 : Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Takalar Tahun 2021

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persen	Rasio JK (L/P)
		Laki-Laki	Perempuan			
1	0-4	12.848	12.119	24.967	8,02	1,06
2	5-9	15.024	14.018	29.042	9,33	1,07
3	10-14	14.721	13.760	28.481	9,15	1,07
4	15-19	11.754	11.960	23.714	7,62	0,98

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah	Persen	Rasio JK (L/P)
		Laki-Laki	Perempuan			
5	20-24	12.989	13.068	26.057	8,37	0,99
6	25-29	12.461	12.467	24.928	8,01	1,00
7	30-34	11.403	11.469	22.872	7,35	0,99
8	35-39	11.182	12.144	23.326	7,50	0,92
9	40-44	10.126	11.469	21.595	6,94	0,88
10	45-49	10.118	11.316	21.434	6,89	0,89
11	50-54	9.107	10.008	19.115	6,14	0,91
12	55-59	6.765	8.112	14.877	4,78	0,83
13	60-64	5.390	6.124	11.514	3,70	0,88
14	65-69	3.392	4.004	7.396	2,38	0,85
15	70-74	1.888	2.605	4.493	1,44	0,72
16	>=75	2.693	4.658	7.351	2,36	0,58
Takalar		151.861	159.301	311.162	100,00	0,95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (2021), data diolah

Tabel II.18 Menunjukan bahwa berdasarkan jenis kelamin, sampai dengan tahun 2021 di Kabupaten Takalar jumlah penduduk laki laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan dengan besaran rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar 0.95. Berdasarkan kelompok umur dapat dilihat bahwa pada kelompok umur tertentu, jumlah penduduk laki laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin diatas 1,0 terdapat pada kelompok umur 0 – 14 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun dan kelompok umur 25 – 29 tahun.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial

2.2.1 Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan terhadap indikator yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, diantaranya adalah :

2.2.1.1 Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan menggambarkan batas minimum pengeluaran per kapita per bulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang memisahkan seseorang tergolong miskin atau tidak. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Takalar pada periode 2017 - 2021 mengalami penurunan tiap tahunnya, Tahun 2017 sebesar 9,24% (26,990 jiwa), turun

menjadi 9% (26.570 jiwa) pada Tahun 2018. Selanjutnya kembali mengalami penurunan pada Tahun 2019 menjadi 8,70% (25.930 jiwa), tahun 2020 menjadi 8,44% (25.380 jiwa) dan tahun 2021 juga menurun menjadi 8,25% (24.600 jiwa), lebih rendah dari tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 8,53% dan Nasional sebesar 9,71% . Angka kemiskinan di Kabupaten Takalar menunjukkan tren yang menurun dalam kurun waktu 2017-2021. Peran Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten sampai ke Pemerintah Desa sangat mendukung penurunan angka kemiskinan. Berbagai program dan kegiatan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat menekan peningkatan angka kemiskinan. Diantaranya Dana desa yang dialokasikan sejak tahun 2015 dan berbagai program social lainnya, dan Alokasi anggaran penanganan Covid 19 Tahun 2020 dalam bentuk Bantuan Sosial dan Pemulihan Ekonomi masyarakat.

Tabel II- 19 : Jumlah Penduduk Miskin dan Persentase Kemiskinan Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/capital/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2017	299.721	26,99	9,24
2018	335.989	26,57	9,00
2019	356.973	25,93	8,70
2020	364.378	25,38	8,44
2021	380.564	24,60	8,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2021

2.2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu cara untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu daerah yakni dengan mencermati nilai dan pertumbuhan riil Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB yang berhasil diciptakan pada tahun tertentu dibandingkan dengan nilai PDRB tahun sebelumnya. Dari Tabel II-20 nampak bahwa PDRB atas dasar harga berlaku berkembang rata rata jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan PDRB atas dasar harga konstan. Hal ini dikarenakan PDRB atas dasar harga berlaku dipengaruhi oleh harga pada tahun berjalan.

Tabel II- 20 : Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Tahun	PDRB adh berlaku (milyar Rp.)	PDRB adh konstan (milyar Rp.)	Perkembangan (persen)
1	2017	7.750,36	5.405,32	9,61
2	2018	8.559,00	5.803,94	7,37
3	2019	10.157,35	6.616,25	6,87
4	2020	10.220,31	6.575,76	-0,61
5	2021	11.162,00	**	5,05
Rata-rata		9.201,98	6.118,39	5,98

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2021

Bila diperhatikan selama periode 2017-2021, perekonomian Kabupaten Takalar relatif stabil sampai dengan Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 7,63 persen per tahun, namun pada Tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar dengan pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan yang negative yakni sebesar -0,61 persen sehingga rata-rata pertumbuhan ekonomi sampai dengan Tahun 2020 menjadi 5,98 persen. Sementara itu pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 meningkat menjadi 5,05 persen namun masih berada dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 6,71 persen. Tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 masih disebabkan terjadinya pandemi covid-19. Hal ini tidak terlepas dari pemberlakuan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus, yang mengubah secara fundamental cara manusia dalam bersosialisasi; hal lainnya adalah dampak dari pandemi covid-19 juga mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja, sehingga ada pemerosotan dalam aktivitas perekonomian di Kab. Takalar khususnya di bidang pariwisata;

Jika di lihat dari tahun ke tahun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar sedikit mengalami perlambatan, pada Tahun 2016 tumbuh sekitar 9,61 persen, kemudian mengalami kontraksi menjadi 7,37 persen pada Tahun 2017 dan 6,66 persen pada Tahun 2018. Untuk Tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan menjadi 6,87 persen. Namun pada Tahun 2020 kontraksinya cukup dalam dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,61 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang negative, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah memukul pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Takalar. Meskipun ada beberapa sektor yang mengalami kenaikan, sebagian besar sektor mengalami kontraksi. Namun demikian, angka tersebut belum dapat menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata, karena angka ini hanya merupakan angka rata-rata dari semua penduduk. Dengan kata lain, selain indikator ini juga harus dilihat bagaimana distribusi pendapatan di daerah tersebut.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain yang ada di Sulawesi Selatan, maka pertumbuhan ekonomi Takalar merupakan salah satu daerah yang cukup tinggi pertumbuhannya dengan rata-rata 7,63% sebelum mengalami kontraksi yang cukup dalam pada Tahun 2020 dengan pertumbuhan sebesar -0,61%, namun masih lebih baik dari pertumbuhan Sulawesi Selatan yang mengalami kontraksi sampai -0,70% serta pertumbuhan nasional yang mengalami kontraksi sampai -2,07%.

Dengan melihat kondisi seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yang saat ini masih bergelut dengan wabah covid-19 yang makin meluas, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi masih mengalami perkembangan yang fluktuasi namun asumsi yang digunakan adalah asumsi yang positif, maka ditahun 2021 Kabupaten Takalar memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 6,71%. Sulawesi Selatan memproyeksikan target capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,10 – 5,55 persen dan Nasional menargetkan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0 persen. Sementara untuk ditahun 2022 pertumbuhan ekonomi Takalar diproyeksikan sebesar 7,54% sama dengan target RPJMD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022, Sulawesi Selatan diproyeksikan sebesar sebesar 5,98 - 7,60 persen yang lebih tinggi dari target awal yaitu 4,62 – 5,98 persen sebagai mana yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018- 2023 dan Nasional sebesar 5,4 - 6,0 persen.

2.2.1.3 PDRB per Kapita

Perekonomian Takalar pada Tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Takalar Tahun 2020 mencapai -0,61 persen, sedangkan Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 5,05 persen. Peningkatan ini disebabkan telah melandainya kasus pandemi Covid – 19 yang mengakibatkan semakin bebasnya pergerakan barang dan jasa sehingga pertumbuhan ekonomi mengalai peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu sebesar 9,17 dan 7,31 persen .

Pertumbuhan ekonomi terendah berada di sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan pertumbuhan sebesar 1,05 persen, setelah itu ada sektor Real Estate dengan pertumbuhan sebesar 1,07 persen. Secara umum, lapangan usaha ekonomi PDRB pada Tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan berpeluang untuk terus mengalami pertumbuhan positif sampai dengan Tahun 2026.

Pertumbuhan kontribusi sektor dan PDRB atas harga berlaku dan harga konstan secara rinci dapat dilihat pada tabel II.21.

PDRB atas dasar harga berlaku (Hb) Tahun 2017 - 2021 mengalami kenaikan per tahun yaitu dari Rp 8.559,00 milyar pada Tahun 2017 menjadi Rp 11.126,11 milyar pada Tahun 2021. Selama Tahun 2017 - 2021, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontrubusi yang besar yaitu sebesar Rp. 4.326,52 milyar (50,55%) Tahun 2017 dan mengalami peningkatan sampai Tahun 2019 sebesar Rp. 5.033,40 milyar (49,55%), sementara Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 5.019,28 milyar (49,11%) dan kembali mengalami kenaikan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 5.699,39 (51,23%). Sektor kedua terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda memberikan kontribusi Tahun 2017 sebesar Rp. 999,49 milyar (11,68%) mengalami peningkatan sampai Tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1.340,95 milyar (12,05%), sementara kontribusi terkecil adalah sektor Jasa Perusahaan Tahun 2017 sebesar Rp. 0,48 milyar (0,01%) sementara Tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 0,59 milyar (0,01), ini menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi yang dihasilkan Kabupaten Takalar berasal dari sektor Pertanian, kehutanan dan perikanan sepert terlihat pada tabel II.22.

Tabel II- 21 : Pertumbuhan Kontribusi Sektor dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021

NO	SEKTOR	TAHUN									
		2017		2018		2019		2020		2021	
		(Hb)	(Hk)	(Hb)	(Hk)	(Hb)	(Hk)	(Hb)	(Hk)	(Hb)	(Hk)
1	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	50,55	7,13	50,25	6,56	49,55	5,58	49,11	-1,55	51,23	7,31
2	Pertambangan Dan Penggalian	1,80	8,62	1,78	6,40	1,76	6,42	1,82	2,77	1,75	3,14
3	Industri Pengolahan	5,30	4,95	5,02	1,25	5,19	10,17	5,07	-2,07	4,81	2,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	6,26	0,11	7,20	0,11	14,27	0,11	2,52	0,11	1,91
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	0,04	6,83	0,04	7,46	0,04	3,80	0,04	8,61	0,04	5,61
6	Konstruksi	7,29	9,37	7,37	6,30	7,44	5,48	7,33	-1,03	6,98	2,61
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	11,68	8,93	12,18	10,47	12,41	8,69	12,37	-1,41	12,05	4,20
8	Transportasi dan Pergudangan	2,59	8,61	2,64	9,70	2,68	8,59	2,60	-1,91	2,51	3,18
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	0,31	9,32	0,32	12,40	0,33	8,49	0,31	-7,10	0,30	3,63
10	Informasi Dan Komunikasi	3,65	10,12	3,62	7,00	3,64	8,52	4,02	10,43	3,83	3,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,65	6,14	1,64	5,01	1,63	5,35	1,73	6,70	1,78	7,19
12	Real Estate	5,54	8,63	5,41	4,38	5,31	5,77	5,28	-0,69	4,91	1,07
13	Jasa Perusahaan	0,01	7,95	0,01	9,70	0,01	9,74	0,01	-4,91	0,01	1,32
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,69	3,34	6,82	5,10	7,13	11,06	7,19	-0,30	6,72	1,05
15	Jasa Pendidikan	1,32	6,69	1,33	8,73	1,32	6,04	1,38	4.45	1,33	4,75
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,25	4,58	1,22	3,22	1,22	5,24	1,39	10,05	1,43	9,17
17	Jasa Lainnya	0,23	8,52	0,24	12,40	0,24	6,42	0,22	-9,72	0,21	1,66
PDRB		100	7,39	100	6.66	100	6.87	100	-0,61	100	5,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2021

Tabel II- 22 : Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 – 2021 Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Takalar

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
1	Pertanian , Kehutanan dan Perikanan	4.326,52	50,55	4.686,07	50,25	5.033,40	49,55	5 019,28	49,11	5 699,39	51,23
2	Pertambangan Dan Penggalian	154,29	1,80	166,02	1,78	178,39	1,76	185,98	1.86	194,26	1,75
3	Industri Pengolahan	453,86	5,30	467,91	5,02	527,48	5,19	518,24	5,07	534,69	4,81
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,30	0,11	10,19	0,11	11,52	0,11	11,49	0,11	12,26	0,11
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur Ulang	3,62	0,04	3,89	0,04	4,08	0,04	4,52	0,04	4,82	0,04
6	Konstruksi	623,88	7,29	686,89	7,37	755,31	7,44	749,41	7,33	776,83	6,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	999,49	11,68	1.135,58	12,18	1.260,83	12,41	1 264,65	12,37	1 340,95	12,05
8	Transportasi dan Pergudangan	221,45	2,59	246,15	2,64	271,98	2,68	265,67	2,60	279,50	2,51
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	26,57	0,31	30,24	0,32	33,56	0,33	31,99	0,31	33,52	0,30
10	Informasi Dan Komunikasi	312,17	3,65	337,51	3,62	369,24	3,64	410,77	4,02	426,28	3,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	141,64	1,65	153,32	1,64	165,68	1,63	177,11	1,73	198,32	1,78
12	Real Estat	473,81	5,54	504,09	5,41	538,85	5,31	540,02	5,28	546,61	4,91
13	Jasa Perusahaan	0,48	0,01	0,54	0,01	0,9	0,01	0,58	0,01	0,59	0,01

No	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	572,81	6,69	635,96	6,82	724,10	7,13	734,49	7,19	748,12	6,72
15	Jasa Pendidikan	112,86	1,32	124,36	1,33	134,24	1,32	141,35	1,38	147,85	1,33
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	106,60	1,25	113,65	1,22	123,53	1,22	142,38	1,39	159,04	1,43
17	Jasa Lainnya	19,67	0,23	22,44	0,24	24,56	0,24	22,38	0,22	23,06	0,21
PDRB		8.559,00	100	9.324,82	100	10.157,35	100	10 220,31	100	11 126,11	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar, 2021

2.2.1.4 Indeks Gini

Indeks Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh dalam suatu daerah. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Kabupaten Takalar pada periode Maret Tahun 2018 sebesar 0,361, atau berada di bawah angka rata-rata Provinsi yaitu 0,397. Pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0,345, namun pada Tahun 2020 mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,356. Untuk Tahun 2021, Indeks Gini di Takalar di proyeksi akan mencapai angka 0,360, dan di tahun yang sama angka Indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377, atau dibawah angka Sulawesi Selatan dan Nasional yang mencapai 0,381. Sementara pada Tahun 2022, angka Indeks Gini Takalar di targetkan sebesar 0,365, sedangkan target Provinsi sebesar 0,398 dan Nasional sebesar 0,376 - 0,378 . Hal Ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kabupaten Takalar mengalami sedikit kenaikan dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 terhadap pendapatan penduduk (didekati dengan pengeluaran) realtif stabil, sehingga peningkatannya tidak terlalu signifikan.

Tabel II- 23 : Indeks Gini Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2020, Perkiraan Capaian Tahun 2021 dan Target Tahun 2022

No	Indeks Gini	Tahun			Target 2022
		2017	2020	2021	
1.	Takalar	0,345	0,356	0,368	0,365
2.	Sulsel	0,389	0,382	0,377	0,398
3.	Nasional	0,380	0,385	0,381	0,376 - 0,378

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2021 dan BPS Provinsi Sulsel, 2021

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Indeks Pembagunan Manusia

Angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia) Kabupaten Takalar merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk Kabupaten Takalar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), sedangkan pendidikan ada dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi

penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Takalar pada Tahun 2016 sebesar 64,96 pada Tahun 2017 sebesar 65,48 Tahun 2018 sebesar 66,67, Tahun 2019 sebesar 66,94 Dan Tahun 2020 sebesar 67,31. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Takalar terus mengalami kenaikan, hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Takalar menempati peringkat kedua puluh dua di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia meningkat di Kabupaten Takalar dengan adanya Gerakan Kembali Bersekolah.

Tabel II- 24 : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indikator Penyusunan IPM						
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	66,38	66,64	67,01	67,18	67,30
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,21	12,22	12,25	12,41	12,42
3.	Rata – rata Lama Sekolah (RLS)	6,77	6,91	7,18	7,29	7,49
4.	Pengeluaran Perkapita Riil Sehari Disesuaikan (dalam juta rupiah)	9.759	9.845	10.474	10,454	10,543
5.	**Indeks Pembangunan Manusia**	**65,48**	**66,67**	**66,94**	**67,31**	**67,72**

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, 2020

2.2.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Memperhatikan perkembangan ekonomi dan kondisi pandemi Covid-19 yang diperkirakan masih melanda Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan dan terkhusus Kabupaten Takalar, tidak hanya masalah kesehatan yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang masih menurun sampai pada akhir tahun 2020. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Takalar. Tidak hanya pengangguran, penduduk usia kerja lainnya juga turut terdampak dengan adanya pandemi Covid-19.

Capaian tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 (berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan angka absolut jumlah penangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar) diperoleh hasil sebesar 4,0% indeks kepuasan atau menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Capaian tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Takalar tahun

2021 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 5,72 dan Nasional yaitu sebesar 5,9-6,5%.

Hal ini menginterpretasikan bahwa persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran di Kabupaten Takalar tergolong kategori rendah, ini juga menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap supply tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan, indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lain. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antar kelompok tersebut; data TPT Kabupaten Takalar diatas menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 4 orang merupakan pengangguran;

Tabel II- 25 : Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2018-2021, Perkiraan Capaian Tahun 2021 dan Target Tahun 2022

No	TPT (%)	Tahun				Target 2022 (%)
		2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	
1.	Takalar	3,88	4,13	4,16	4,0	3,93
2.	Sulsel	4,94	4,97	6,31	5,72	6,95
3.	Nasional	5,34	5,28	7,07	5,9-6,5	5,5-6,2

Sumber : BPS Kabupaten Takalar, 2021 dan BPS Provinsi Sulsel, 2022

2.2.2.3 Nilai SAKIP Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah diukur melalui penilaian terhadap Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP). Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Tabel II- 26 : Nilai Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) Kabupaten Takalar Tahun 2018 - 2021

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	30	20,67	20,65	21,08	137,8	114,72	100,38

Pengukuran Kinerja	25	12,32	12,14	13,07	98,48	80,93	74,69
Pelaporan Kinerja	15	10,19	10,16	10,29	135,86	112,89	98,00
Evaluasi Kinerja	10	3,70	3,70	4,01	74	61,67	57,29
Capaian Kinerja	20	11,16	10,93	10,93	111,6	91,08	78,07
Nilai Hasil Evaluasi	100	58,04	57,58	59,38	116,08	95,97	84,83
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	CC	CC	CC

Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, 2021

Berdasarkan tabel II-26 Dapat dilihat bahwa walaupun terjadi peningkatan nilai SAKIP setiap tahunnya yaitu dari 58,04 pada tahun 2018 menjadi 59,38 pada tahun 2020 akan tetapi tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Takalar masih berada pada kategori CC sehingga belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD 2017-2022 yaitu BB.

2.2.2.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu indikator Indeks Kualitas Air (IKA) yang diukur berdasarkan parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2; dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan hutan.

Pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan sangat dipengaruhi dari Pencapaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan sangat erat kaitannya dengan ketersediaan dan anggaran yang memadai, sumberdaya manusia yang cukup dan terampil serta didukung dengan sarana dan prasarana yang baik.

Perhitungan indeks untuk indikator kualitas air sungai dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pada pedoman tersebut dijelaskan mengenai penentuan status mutu air dengan metoda indeks pencemaran (Pollution Index – PI). PIj memenuhi baku mutu atau kondisi baik

jika 0 ≤ PIj ≤ 1,0 2. Tercemar ringan jika 1,0 < PIj ≤ 5,0 3. Tercemar sedang jika 5,0 < PIj ≤ 10,0 4. Tercemar berat jika PIj > 10,0.

Rentang indeks pencemar udara dikategorikan kedalam 5 kelompok yaitu : 1). BAIK dengan rentang 0 – 50 (tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan bangunan atau nilai estetika); 2) SEDANG rentang 51 – 100 (tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi tidak berpengaruh pada tumbuhan bangunan atau nilai estetika); 3) TIDAK SEHAT dengan rentang 101 – 199 (tingkat kualitas udara yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika); 4) SANGAT TIDAK SEHAT dengan rentang 200 – 299 (tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar, dan 5) BERBAHAYA dengan rentang 300 atau lebih (tingkat kualitas udara berbahaya yang secara umum dapat merugikan kesehatan yang serius). Parameter Indeks Standar Pencemar Udara meliputi : a. Partikulat (PM10) b. Karbondioksida (CO) c. Sulfur dioksida (SO^2). d. Nitrogen dioksida (NO^2). e. Ozon (O^3).

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2015. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL yang mengelaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karateristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. IKTL dihitung dengan menjumlahkan nilai dari lima indeks penyusunan yang telah diberikan bobot yaitu Indeks Tutupan Lahan (ITL), Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Performance Hutan, Indeks Kondisi Tutupan Tanah, Indeks Konservasi Badan Air, dan Indeks Kondisi Habitat.

Tabel II- 27 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan Indeks Kualitas Air	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	69,51
Peningkatan Indeks Kualitas Udara	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	85,69
Peningkatan Indeks Tutupan Lahan	Angka	N/A	N/A	N/A	N/A	30,39
IKLH		N/A	N/A	N/A	N/A	58,98

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 (diolah)

Pengukuran indeks kualitas lingkungan di Kabupaten Takalar baru dilakukan pada tahun 2021. Hal ini disebabkan karena pengukuran indeks kualitas air sebagai salah satu indikator yang menjadi indikator penyusun indeks kualitas lingkungan tidak dapat dilakukan pada tahun tahun sebelumnya mengingat beberapa parameter tidak diukur/diperiksa sebagai akibat keterbatasan anggaran.

Pada tahun 2021, capaian Indeks Kualitas Air sebesar 69,51 atau termasuk dalam kategori Tercemar karena berada diatas nilai IP = 5,0 – 10.00, capaian Indeks Kualitas Udara sebesar 85,69 atau termasuk dalam kategori Baik (skor 70 - <90) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebesar 30,39 atau Buruk (skor 25 - <50) sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 58,98 atau termasuk dalam kategori Sedang (50 - <70).

Hasil capaian Indeks Kualitas Air yang termasuk dalam kategori tercemar disebabkan oleh tingginya kadar Nitrit yang diduga akibat terjadinya pencemaran pada badan air akibat penggunaan pestisida yang berlebihan, sementara rendahnya capaian indeks kualitas tutupan lahan diakibatkan karena komponen penyusun yang dinilai hanya terhadap Indek Tutupan Lahan (ITL) sementara 4 (empat) komponen penyusun lainnya yaitu Indeks Tutupan Hutan (ITH), Indeks Performance Hutan, Indeks Kondisi Tutupan Tanah, Indeks Konservasi Badan Air, dan Indeks Kondisi Habitat tidak diukur.

2.2.2.5 Indeks Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Adapun capaian indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2020 adalah :

Tabel II- 28 : Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2020

Indikator	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
Indeks Reformasi Birokrasi	CC	CC	CC	C

Sumber : Bagian Organisasi Kabupaten Takalar, 2021

Berdasarkan tabel II-28 diatas dapat dilihat bahwa capaian indeks reformasi birokrasi tahun 2020 masih bernilai C yang menunjukkan bahwa secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja. Sementara data Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 belum dirilis hingga dokumen ini disusun.

2.2.2.6 Angka Kriminalitas

Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti makan, minum, serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Maslow (1943) dalam teori hierarki kebutuhan manusia, rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Tabel II- 29 : Angka Kriminalitas di Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kasus Narkoba	54	50	46	42	59
Jumlah Kasus Pembunuhan	1	2	3	0	1
Jumlah Kasus Kejahatan Seksual	2	3	10	16	4
Jumlah Kasus Penganiayaan	68	78	99	114	117
Jumlah Kasus Pencurian	23	27	55	80	102
Jumlah Kasus Penipuan	5	4	15	9	17
Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0
Total Jumlah Kasus	153	164	228	261	300
Jumlah Penduduk	292.983	295.892	298.688	300.853	311.162

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk	52,22	55,43	76,33	86,75	96,41

Sumber : Kepolisian Resort Takalar, 2022

Berdasarkan tabel II-29 Dapat dilihat bahwa jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah kasus tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan jumlah kasus sebanyak 300 Kasus yang didominasi oleh jenis kasus penganiyaan yaitu sebanyak 117 kasus. Angka kriminalitas paling tinggi sepanjang periode 2017-2022 juga terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 96,41 per 100.000 penduduk.

2.2.2.7 Indeks Kepatuhan Terhadap SPM

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.

Pengukuran Indeks kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk menilai seberapa besar penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah dilaksanakan oleh instansi pengampu kewenangan pelayanan dasar di Kabupaten Takalar. Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan adalah total capaian SPM pada masing masing jenis pelayanan dasar dibagi dengan jumlah indikator pada masing masing jenis pelayanan dasar.

Tabel II- 30 : Capaian Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pelayanan Dasar Pendidikan	50,14	56,58	75,46	45,47	60,75
2	Pelayanan Dasar Kesehatan	64,56	67,82	66,69	54,42	74,49
3	Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	N/A	N/A	N/A	12,3	32
4	Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	N/A	N/A	66,295	N/A	0

No	Jenis Pelayanan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
5	Pelayanan Dasar Sosial	40	59,68	72,00	17,81	50,80
6	Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	4,58	2,275	N/A	33,96	58,30
Rata Rata Capaian Kabupaten		26,55	31,06	46,74	27,33	46,11

Sumber : Bappelitbangda Takalar, 2022 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel II-30 dapat dilihat bahwa rata rata capaian Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal Di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi dan tidak pernah mencapai target sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian SPM di Kabupaten Takalar masih perlu mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Takalar.

2.2.2.8 Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan Persepsi penerima pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini diperoleh dengan melaksanakan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik.

Pada tahun 2021 telah dilakukan pengukuran Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Kabupaten Takalar terhadap 2 OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan 5 UPT dengan nilai rata-rata indeks dengan hasil baik, tetapi hasil pengukuran Indeks ini belum menggambarkan secara utuh lingkup Kabupaten Takalar karena masih ada 10 kecamatan dan 13 UPT yang belum dilakukan pengukuran.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Indikator yang digunakan untuk mengukur pelayanan umum di Kabupaten Takalar dalam dokumen ini merujuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indikator yang diukur adalah berupa indikator kinerja hasil/outcome.

2.3.1 Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1 Urusan Wajib Pendidikan

2.3.1.1.1 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani dan jasmani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Capaian tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Capaian tingkat partisipasi tertinggi dicapai pada tahun 2018 sebesar 73,87% dan terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 48,11%. Sementara itu untuk tahun 2021, capaian tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD mencapai 61,01% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Tabel II- 31 : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam PAUD Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	Orang	113	7.968	7.937	5.668	6.972
Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi yang bersangkutan	Orang	205	10.787	16.497	10.893	11.427
Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	55,12	73,87	48,11	52,03	61,01

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, 2021 (data diolah)

2.3.1.1.2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan sikap dasar yang diperlukan dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Trend capaian tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2022 menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, capaian tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar yang diperoleh sebesar 90,52% atau berada dibawah target tahun 2021 yaitu sebesar 100%.

Tabel II- 32 : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	Orang	33.251	31.873	31.006	31.362	**31.440**
Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan	Orang	30.928	31.016	32.665	34.370	**34.732**
Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	107,51	102,76	94,92	91,25	**90,52**

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, 2021 (data diolah)

2.3.1.1.3 Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 memiliki kecenderungan menurun dari tahun ke

tahun. Tingkat capaian yang diraih untuk indikator ini pada tahun 2021 adalah sebesar 76,46% atau lebih rendah dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Tabel II- 33 : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13- 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	Orang	13.053	12.649	12.707	12.504	12.812
Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	Orang	15.709	15.660	15.386	16.264	16.757
Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	83,09	80,77	82,59	76,88	76,46

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 (diolah)

2.3.1.1.4 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan atau akses bagi warga masyarakat khususnya para pemuda yang putus sekolah dan putus lanjut di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum, yang mencakup program paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs dan Paket C setara SMA/MA. Program ini ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang karena berbagai faktor tidak dapat mengikuti pendidikan di bangku sekolah, putus sekolah dan putus lanjut di berbagai jenjang pendidikan, serta usia produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidupnya, serta masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari peningkatan taraf

hidup dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pengembangan program pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C ini diharapkan semakin memperluas layanan pendidikan bagi masyarakat melalui layanan pendidikan nonformal.

Pada tabel II-34 Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi selama periode 2017-2021. Pada tahun 2021, tingkat partisipasi untuk indikator ini mencapai 37,86% atau lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Tabel II- 34 : Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Takalar

Tahun 2017 - 2021

Formulasi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	Orang	N/A	2.585	1.770	3.996	716
Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	Orang	N/A	63.039	1.927	51.629	1.891
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang	Persen	N/A	4,10	89,76	7.74	37,86

Formulasi/Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan						

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, 2021 (diolah)

2.3.1.2 Urusan Wajib Kesehatan

2.3.1.2.1 Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk

Jumlah rumah sakit yang ada di Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 4 (empat) buah rumah sakit yang terdiri atas 3 (tiga) rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Takalar dan 1 (satu) rumah sakit milik swasta. Dari 4 (empat) rumah sakit tersebut, 2 (dua) diantaranya adalah rumah sakit rujukan yaitu RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dan RS. Maryam (Swasta)

Daya tampung rumah sakit ditandai dengan jumlah tempat tidur yang tersedia dan disiapkan untuk pelayanan kesehatan rujukan terutama rawat inap bagi penduduk. Rasio ideal ketersediaan tempat tidur menurut World Health Organization (WHO) adalah 1 : 1000 penduduk.

Rasio daya tampung rumah sakit di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai 2021 dapat dilihat pada tabel II-35

Tabel II- 35 : Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Daya Tampung RS Rujukan	Tempat Tidur	284	316	246	356	356
Jumlah Penduduk	Jiwa	287.472	295.892	298.688	300.853	304.204
Rasio Daya Tampung RS Terhadap Jumlah Penduduk	Per 1000 Penduduk	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Jumlah tempat tidur yang tersedia pada 2 (dua) rumah sakit yang menyelenggaran pelayanan rujukan di Kabupaten Takalar mengalami kenaikan pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan jumlah tempat tidur yang tersedia pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan rasio ideal yang ditetapkan WHO yaitu 1 per 1000 penduduk (0,001) maka Kabupaten Takalar telah melampaui rasio yang dipersyaratkan oleh WHO dengan nilai rasio

sebesar 0,12 per 1000 penduduk.

2.3.1.2.2 Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Akreditasi Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi Standar Akreditasi.

Tabel II- 36 : Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi	Unit	0	0	1	2	2
Jumlah RS di kabupaten/kota	Unit	0	0	2	2	4
Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	Persen	0	0	50	100	50

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan rujukan dan telah terakreditasi di Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 2 (dua) rumah sakit yang terdiri atas 1 (satu) rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Takalar dengan status akreditasi UTAMA dan 1 (satu) rumah sakit milik swasta dengan status akreditasi PARIPURNA.

2.3.1.2.3 Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pelayanan Kesehatan Masa Hamil adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan sejak terjadinya masa konsepsi hingga melahirkan.

Faktor yang berkontribusi terhadap kematian ibu, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung kematian ibu adalah faktor yang berhubungan dengan komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas seperti perdarahan, preeklampsia/eklampsia, infeksi, persalinan macet dan abortus. Penyebab tidak langsung kematian ibu adalah faktor-faktor yang memperberat keadaan

ibu hamil seperti EMPAT TERLALU (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan dan terlalu dekat jarak kelahiran).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan mempersyaratkan bahwa setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar yang meliputi standar kuantitas maupun kualitas. Standar kuantitas yaitu memenuhi jumlah kunjungan sebanyak 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga sementara standar kualitas harus memenuhi 10 T.

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai dengan tabel II-37, menunjukkan adanya fluktuasi capaian dari tahun ke tahun. Capaian kinerja indikator pelayanan kesehatan di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 sebesar 104,13% telah melampaui target capaian yang ditetapkan yaitu sebesar 100%.

Tabel II- 37 : Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Ibu Hamil Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	6.392	5.992	5.978	5.785	6.512
Jumlah Ibu Hamil Di Kabupaten/Kota	Orang	6,107	6.040	6.252	6.123	6.254
Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	104,67	99,21	95,62	94,48	104,13

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.2.4 Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan

Persalinan atau disebut dengan partus adalah suatu proses pengeluaran hasil konsepsi yang dapat hidup dari dalam uterus melalui vagina ke dunia luar (Mochtar, 2013).

Banyak faktor yang memberikan pengaruh terhadap persalinan yaitu antara lain; faktor maternal biologi berupa usia ibu, paritas, jarak kehamilan, tinggi badan kurang 145 cm dan kelainan jalan lahir; faktor maternal lainnya meliputi status gizi/IMT, anemia, tekanan darah, riwayat obstetrik buruk, penyakit penyerta, dan komplikasi persalinan; dan faktor lingkungan yang dapat berupa pendidikan, sosial ekonomi dan lain sebagainya.

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan mempersyaratkan bahwa setiap ibu bersalin berhak mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar yang meliputi persalinan normal dan persalinan dengan komplikasi.

Capaian indikator SPM pelayanan persalinan di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 berada dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%. Berdasarkan data pada tabel II-38 Dapat ditemukan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan jika dibandingkan dengan tahun 2020.

Tabel II- 38 : Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	Orang	5.739	5.828	5.645	5.856	5.843
Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	Orang	5.829	5.790	5.965	5.845	6.029
Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	Persen	98,46	100,66	94,64	100,19	96,77

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.2.5 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang memenuhi standar pelayanan minimal bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan esensial neonatal yang diberikan kepada bayi baru lahir baik dari aspek standar kuantitas maupun standar kualitas. Yang dimaksud dengan standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 (tiga) kali selama periode neonatal dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6 – 8 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3 – 7 hari dan Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8 - 28 hari. Sementara untuk; a. standar kualitas pelayanan esensial neonatal saat lahir (0 – 6) meliputi pemotongan dan perawatan tali pusat, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), injeksi Vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotik, pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0); b. Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari) meliputi Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, Imunisasi Hepatitis B injeksi

untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 berada dibawah target yang ditetapkan dalam SPM yaitu sebesar 100%.

Tabel II- 39 : Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Orang	5.716	5.828	5.294	5.564	5.778
Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	Orang	5.547	5.790	5.294	5.817	5.682
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	103,05	100,66	100,00	95,65	109,69

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.2.6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan balita usia 0 – 59 bulan yang meliputi pelayanan kesehatan balita sakit dan pelayanan kesehatan balita sehat. Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel II- 40 : Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Orang	14.955	18.236	21.521	20.852	25.463
Jumlah balita di kabupaten/kota	Orang	30.476	33.929	31.351	36.251	31.675

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	48,64	53,75	68,65	57,52	80,39

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan balita sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 80,39% atau berada dibawah target SPM.

2.3.1.2.7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar adalah pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar yang meliputi skrining kesehatan dan tindaklanjut hasil skrining kesehatan yang dilaksanakan terhadap anak kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan) minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran

Tabel II- 41 : Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	Orang	4.725	4.858	4.871	27.622	42.114
Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota	Orang	5.694	5.632	5.632	32.622	47.175
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	82,98	86,26	86,49	84,67	89,27

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai

dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 89,27% atau berada dibawah target SPM yaitu sebesar 100%.

2.3.1.2.8 Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau UKBM dan skrining faktor risiko penyakit menular/penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnese perilaku risiko.

Tabel II- 42 : Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	20.277	29.642	45.108	25.867	98.462
Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	Orang	219.552	199.632	163.995	179.384	189,231
Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	9,24	14,85	27,51	14,42	52,03

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 52,03% atau berada dibawah target SPM yaitu sebesar 100%.

2.3.1.2.9 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat yang dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan

dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah dan skrining faktor risiko pada usia lanjut yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, pemeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko.

Tabel II- 43 : Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Orang	10.687	14.697	10.005	12.291	14.255
Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota	Orang	20.937	21.187	20.202	22.648	23.758
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	51,04	69,37	49,52	54,27	60,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Capaian indikator SPM pelayanan kesehatan 60 tahun sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 60% atau berada dibawah target SPM yaitu sebesar 100%.

2.3.1.2.10 Persentase hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai standar penderita yang kesehatan

Pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi usia 15 tahun keatas sesuai standar meliputi kegiatan pengukuran tekanan darah yang dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat serta rujukan kasus jika diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel II- 44 : Persentase Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	9.130	3.465	2.434	3.073	14.576
Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	Orang	19.321	8.744	4.659	58.355	63.443
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	47,25	39,63	52,24	5,27	22,97

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Capaian indikator SPM pelayanan hipertensi sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 22,97% atau berada dibawah target SPM yaitu sebesar 100%.

2.3.1.2.11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan bagi penderita Diabetes Millitus (DM) usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar meliputi pengukuran gula darah yang dilaksanakan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi berupa perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi dan terapi farmakologi serta pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM dinilai dari persentase penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel II- 45 : Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	4.457	1.356	2.434	3.073	4.318
Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	Orang	15.149	4.252	4.659	58.355	5.067

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	29,42	31,89	52,24	5,27	85,22

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Capaian indikator SPM pelayanan diabetes mellitus sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 85,22% atau berada dibawah target SPM yaitu sebesar 100%.

2.3.1.2.12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Pelayanan kesehatan bagi penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilaksanakan pemeriksaan status mental dan wawancara, edukasi kepatuhan minum obat dan pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel II- 46 : Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	0	114	252	769	473
Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	Orang	0	758	359	693	692
Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	0,00	15,04	70,19	110,97	68,35

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Capaian indikator SPM pelayanan ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian

pada tahun 2021 sebesar 68,35% atau berada dibawah target SPM yaitu sebesar 100%.

2.3.1.2.13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Pelayanan kesehatan bagi orang terduga *Tuberkulosis* (TBC) sesuai standar meliputi pemeriksaan klinis (tanda dan gejala) yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun, pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis, edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan serta pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel II- 47 : Persentase Orang Terduga TBC yang Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	611	688	1.229	463	2.212
Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	Orang	611	671	1.229	5.211	5.211
Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100,00	102,53	100,00	8,89	42,45

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Capaian indikator SPM pelayanan orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 41,45% atau berada dibawah target SPM yaitu sebesar 100%.

2.3.1.2.14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Pelayanan kesehatan bagi orang dengan resiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV) mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku risiko dan pencegahan penularan,

skrining dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam satu tahun serta pelayanan rujukan bila diperlukan.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan risiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Tabel II- 48 : Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi Hiv Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Orang	22	20	49	3.327	5.964
Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota	Orang	22	20	1.547	15.509	7.221
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100,00	100,00	3,17	21,45	82,59

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar, 2021

Capaian indikator SPM pelayanan orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami fluktuasi dengan nilai capaian pada tahun 2021 sebesar 82,59% atau berada dibawah target SPM yaitu sebesar 100%.

2.3.1.3 Urusan Wajib Pekerjaan Umum

2.3.1.3.1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota

Tabel II-49 menunjukkan bahwa rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota setiap tahun terjadi peningkatan, bahwa pada tahun 2017 sekitar 1,81 % dan tahun 2021 sebesar 26,17%. Data ini menunjukkan masih rendahnya kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota, dibandingkan dengan Wilayah Sungai yang merupakan kewenangan pusat dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai artinya letak sungai ada di kabupaten Takalar

tetapi mengenai kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui BBWS Pompengan Je'neberang.

Tabel II- 49 : Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Ha	1	1	2	N/A	179
Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	Ha	72	69	70	N/A	684
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	Persen	1,81	1,90	2,73	N/A	26,17

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.3.2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota

Berdasarkan tabel II-50 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Takalar terdapat 75 Ha kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2020, terdapat 12,29% luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan Kab/dan meningkat menjadi 12,89% pada tahun 2021.

Tabel II- 50 : Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi	Ha	N/A	N/A	N/A	9	10

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)						
Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)	Ha	N/A	N/A	N/A	75	75
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kabupaten/kota	Persen	N/A	N/A	N/A	12,29	12,89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.3.3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Berdasarkan tabel II.51 dapat dilihat bahwa daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi pada tahun 2021 sebesar 77% dan terdapat peningkatan dari tahun 2020 yaitu 74,04%. Peningkatan rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi terjadi karena alokasi anggaran sangat terbatas, disamping itu pula persyaratan untuk mendapatkan anggaran perbaikan saluran dan bendung yang pendanaannya melalui DAK mewajibkan adanya dokumen E-Paksi/pengelolaan aset dan kinerja saluran irigasi dimana kegiatan ini baru dianggarkan tahun 2022.

Tabel II- 51 : Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Luas Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi Yang Dibangun (Ha), Ditingkatkan (Ha), Direhabilitasi (Ha),	Ha	N/A	N/A	2.852	2.852	2.966

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Dioperasi Dan Pelihara (Ha) Di Tahun Eksisting						
Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	N/A	N/A	3.852	3.852	3.852
Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	Persen	N/A	N/A	74,04	74,04	77,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.3.4 Persentase Jumlah rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan table II-52 dapat bahwa pada tahun 2017, jumlah rumah tangga mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di Kabupaten Takalar sebesar 24,72%, meningkat pada tahun 2021 menjadi 92,91%. Data lima tahun terakhir menunjukkan terjadinya peningkatan akses air minum baik melalui Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan. Hal ini di sebabkan karena adanya beberapa program atau sumber dana lainnya yang mendukung pemenuhan kebutuhan air minum, misalnya DAK, HIBAH, HAMP, Pamsimas dan HID Mama. Untuk dana yang bersumber dari APBD sangat minim karena jumlah APBD Kab. Takalar yang sangat rendah yang tidak memungkinkan untuk membiayai kegiatan air minum.

Tabel II- 52 : Jumlah Rumah Tangga Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	Rumah Tangga	18	18.986	7.576	2.398	64.608

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota						
Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut.	Rumah Tangga	72	68.929	79.302	70.302	69.538
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadapa air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	24,72	27,54	9,55	3,41	92,91

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.3.5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

Berdasarkan table II-53 dapat dilihat bahwa jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik pada periode 2017-2021 memperlihatkan trend peningkatan yang sangat menggembirakan. Walaupun alokasi APBD untuk bidang sanitasi sangat minim, tetapi Kabupaten Takalar mendapatkan sumber pendanaan lainnya yaitu bersumber dari dana APBN, dimana pada tahun 2021 persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik naik 2% karena adanya dana DAK Reguler dan penugasan serta adanya dana Sanitasi Desa Padat Karya untuk pembangunan tangki limbah domestik individual.

Tabel II- 53 : Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Unit	1	1	610	996	3

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah rumah di Kabupaten Takalar	Unit	72	69	83.380	70.302	70
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	1,81	1,90	0,73	1,42	4,88

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.3.6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota

Berdasarkan Tabel II-54 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten /Kota Takalar dalam mengurus IMB untuk pembangunan gedung atau rumah tinggal sudah baik, hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Kab. Takalar terkait bagaimana cara pengendalian dan pemanfaatan penataan ruang. Hal ini tidak terlepas dari terbentuknya Tim Terpadu yang melibatkan Dinas Tekhnis yang terkait yang memberikan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya IMB. Pemerintah sudah mensosialisasikan dengan baik, sudah membuat Perda Bangunan yang dimana isi dari Perda tersebut menjelaskan fungsi dan sanksi kepada masyarakat jika tidak memiliki IMB.

Tabel II- 54 : Rasio kepatuhan IMB kab/ kota domestik Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	IMB	6.467	7.393	816	8.769	9.235
Jumlah IMB yang berlaku	IMB	6.467	7.393	816	8.769	9.235
Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.3.7 Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

Berdasarkan tabel II-55 dapat dilihat bahwa jumlah panjang jalan kondisi mantap di Kabupaten Takalar pada tahun 2017 sebesar 344 km dan meningkat secara signifikan pada tahun 2021 menjadi 482 km. Hal ini dikarenakan jumlah alokasi anggaran untuk perbaikan jalan dalam Kabupaten Takalar yang tersedia cukup besar sehingga bisa mengakomodir perbaikan dan pemeliharaan jalan kabupaten /kota. Disamping itu, selain alokasi anggaran APBD Kabupaten (DAK dan Non DAK) juga terdapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBN yang turut memberikan berkontribusi

dalam perbaikan jalan baik jalan provinsi maupun jalan nasional yang ada/melintasi Kabupaten Takalar.

Tabel II- 55 : Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap	Km	344	355	411,16	413	482
Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota	Km	754	754	754,49	754,49	754
Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	45,57%	47,09%	54,50%	54,77%	63,90%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.3.8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi

Berdasarkan Tabel II-56 dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2021, Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPRPKP telah melaksanakan pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi sebanyak 370 orang atau 37,00%. Jumlah ini masih sangat minim untuk memenuhi standar dan kualifikasi jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota Takalar.

Tabel II- 56 : Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analis	Orang	0	0	128	325	370
Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analis di wilayah Kabupaten/Kota	Orang	200	400	600	800	1.000
Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	0	0	21,33	40,63	37,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.3.9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi

Berdasarkan table II-57 dapat dilihat bahwa jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasan kabupaten yang terjadi kecelakaan konstruksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan belum maksimalnya pengawasan kerja yang baik, karena keterbatasan anggaran, karena keterbatasan SDM dimana tenaga tehnis yang berkualifikasi kurang memadai

Tabel II- 57 : Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang terjadi kecelakaan konstruksi		0	0	0	7	53
Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		442	144	204	7	106
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konsruksi	Persen	0	0	0	100	50

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.4 Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

2.3.1.4.1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

Berdasarkan Tabel II-58 dapat dilihat bahwa belum ada upaya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yang tertangani di Kabupaten Takalar, disebabkan karena belum adanya kegiatan dan belum adanya anggaran dialokasikan untuk penanganan rumah korban bencana.

Tabel II- 58 : Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021	unit	0	0	1	0	0

Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021	unit	0	0	1	0	18
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	0	0	100	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.4.2 Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

Berdasarkan Tabel II-59 dapat dilihat bahwa jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan hanya ada pada tahun 2019 yaitu sebanyak 1.804 rumah sementara jumlah rumah tangga penerima fasilitasi penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni sebanyak 588 rumah tangga (32,59%). Sementara untuk tahun 2021 belum pernah ada kegiatan pemerintah terkait relokasi.

Tabel II- 59 : Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	RT	162	491	588	600	350
Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	RT	0	0	1.804	0	0
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Persen	0	0	32,59	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.4.3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani

Berdasarkan Tabel II-60 dapat dilihat bahwa intervensi penanganan luasan kumuh di bawah 10 ha yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan SK Bupati Takalar tentang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukinan kumuh secara keseluruhan yaitu sebesar 110,65 ha belum ada yang tertangani. Penanganan/intervensi kawasan kumuh pada tahun 2021 dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Program KOTAKU yang masuk ke Pemerintah Kabupaten Takalar yang awalnya seluas 43,10 ha membantu menangani dua(2) kelurahan yaitu Kelurahan Pattalassang awalnya luasnya 26,22 ha setelah intervensi program KOTAKU menjadi 16,57 ha dan Kelurahan Pallantikang awalnya 40,43 ha setelah intervensi KOTAKU menjadi 32,93 ha.

Tabel II- 60 : Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	Ha	0	0	0	0	0
Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	Ha	0	0	22,58	10,65	23
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.4.4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Berdasarkan tabel II-61 menunjukkan bahwa persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 mengalami penurunan dari tahun ke tahun . Pada tahun 2021, persentase jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar 8,52% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 10,94%. Hal ini disebabkan karena adanya dana APBN berupa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang banyak berkontribusi mengurangi kriteria Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah Layak Huni di Kabupaten Takalar.

Tabel II- 61 : Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah unit rumah tidak layak huni	Unit	0	0	8.498	7.910	6.159
Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	Unit	0	0	72.297	72.297	72.297
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0	0	11,75	10,94	8,52

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.4.5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Berdasarkan tabel II-62 dapat dilihat bahwa data jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) hanya tersedia pada tahun 2019 dengan capaian sebesar 1,59% sementara untuk tahun 2020 dan 2021 tidak ditemukan datanya.

Tabel II- 62 : Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	Unit	0	0	1.151	0	0
Jumlah unit rumah kab/kota	Unit	0	0	72.297	72.297	72.297
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	0	0	1,59	0	0

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.5 Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

2.3.1.5.1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan

Berdasarkan tabel II-63 Dapat dilihat bahwa selama periode 2017 – 2021, persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah pengaduan yang

ditangani sebesar 627 pengaduan dari total 643 pengaduan pelanggaran yang diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mencapai 97,51%.

Tabel II- 63 : Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pengaduan yang ditangani	Kasus	105	75	65	83	627
Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	Kasus	108	80	68	89	643
Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	97,22	93,75	95,59	93,26	97,51

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.5.2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Berdasarkan tabel II-64 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2017-2021, jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan sebanyak 8 produk hukum dan sepenuhnya telah dilakukan pengakan terhadap produk hukum tersebut.

Tabel II- 64 : Perda dan Perkada Yang Ditegakkan Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	Produk Hukum	8	8	8	8	8
Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	Produk Hukum	8	8	8	8	8
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.5.3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Pelayanan informasi rawan bencana, paling sedikit memuat penyusunan kajian risiko bencana dan komunikasi informasi dan edukasi rawan bencana. Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada

warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana meliputi wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Berdasarkan tabel II-65 Dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2021 tidak ada warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana di Kabupaten Takalar.

Tabel II- 65 : Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	N/A	75	75	200	0

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.5.4 Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, paling sedikit memuat penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana dan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Berdasarkan tabel II-66 Dapat dilihat bahwa Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 relatif kecil jumlahnya dan

bahkan pada tahun 2020 tidak ada warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tabel II- 66 : Jumlah Warga Negara Yang Layanan Dan Terhadap Bencana Memperoleh Pencegahan Kesiapsiagaan Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	N/A	50	50	0	150

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.5.5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, paling sedikit memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana antara lain gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, letusan gunung api, gelombang laut ekstrim, angin topan (termasuk siklon tropis/puting beliung), kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dan epidemi/wabah penyakit/zoonosis prioritas diantaranya rabies, anthrax, leptospirosis, brucellosis dan avian influenza (flu burung).

Berdasarkan tabel II-67 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 hanya 16 orang warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Tabel II- 67 : Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelematan Dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	N/A	8	1	40	16

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.5.6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Berdasarkan tabel II-68 dapat dilihat bahwa jumlah Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran selama periode 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan nilai persentase yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 87,27%.

Tabel II- 68 : Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh	Layanan	45	23	38	56	48

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah						
Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	Kejadian	52	27	45	57	55
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	86,54	85,19	84,44	98,25	87,27

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.5.7 Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran

Tingkat waktu tanggap (*Response Time*) adalah waktu minimal yang diperlukan dimulai saat menerima informasi dari warga negara/penduduk, sampai tiba di tempat kejadian, serta langsung melakukan tindakan yang diperlukan secara cepat dan tepat sasaran di lokasi kejadian kebakaran dan/atau operasi penyelamatan (nonkebakaran).

Secara operasional, waktu tanggap pemenuhan layanan pemadaman serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan nilai rata-rata capaian waktu tanggap sejak mulai diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap melakukan operasional pemadaman yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ataupun oleh relawan kebakaran atau komunitas masyarakat lainnya yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Pemerintah Daerah secara formal.

Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran di Kabupaten selama periode 2017-2021 telah sesuai dengan nilai rata rata capaian waktu tanggap yang dipersyaratkan yaitu 15 (lima belas) menit.

Tabel II- 69 : Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	menit	15	15	15	15	15

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.6 Urusan Wajib Sosial

2.3.1.6.1 Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)

Pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, serta gelandangan dan pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan tabel II-70 dapat dilihat bahwa capaian persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti yang terlayani di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 sebesar 63%.

Tabel II- 70 : Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	Orang	10.103	24.814	24.815	15.799	28.758
Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	Orang	25.500	52,134	34.500	25.500	45.897

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	Persen	40	48	72	61,96	63

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar, 2021

2.3.1.6.2 Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan tabel II-71 dapat dilihat bahwa jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya selama periode tahun 2017-2021 terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah korban bencana pada tahun 2021 sebanyak 181 orang dari 2.500 orang yang menjadi populasi korban bencana di Kabupaten Takalar atau 7,24%

Tabel II- 71 : Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	Orang	1.665	457	167	100	181
Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah	Orang	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota						
Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	66,60	18,28	6,68	4,00	7,24

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar, 2021

2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

2.3.2.1.1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Ketersediaan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTKD) dimasudkan untuk memberikan berbagai informasi ketenagakerjaan yang diperlukan sehingga dapat digunakan sebagai bahan perumusan strategi, kebijakan dan program ketenagakerjaan. Dokumen RTKD Kabupaten Takalar telah disusun dengan periode waktu 2018-2023.

Berdasarkan tabel II-72 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja selama periode 2017-2021. Capaian persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja pada tahun 2021 mencapai 80%.

Tabel II- 72 : Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	Kegiatan	0	3	4	3	4
Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota	Kegiatan	0	5	5	4	5
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	0	60	80	75	80

Sumber: Dinas PMPTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.1.2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Sertifikat kompetensi kerja merupakan sebuah pengakuan terhadap seorang tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi kerja yang dipersyaratkan.

Berdasarkan tabel II-73 dapat dilihat bahwa Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017-2021 cenderung sangat rendah. Persentase tenaga kerja yang memiliki sertifikasi kompetensi pada tahun 2021 hanya sebesar 0,12%.

Tabel II- 73 : Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	Orang	276	480	688	144	192
Jumlah tenaga kerja keseluruhan	Orang	137.745	141.771	138.952	143.423	151.725
Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	Persen	0,20	0,34	0,50	0,10	0,12

Sumber: Dinas PMPTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.1.3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Variabel yang menunjang tingkat produktivitas tenaga kerja adalah PDRB ADHK dibandingkan dengan Jumlah tenaga kerja. Adapun data kedua variable tersebut, Jumlah PDRB ADHK Tahun 2017 sebesar 5.803.944,31, Tahun 2018 sebesar 6.190.674,12, Tahun 2019 sebesar 6.616.253,76, Tahun 2020 sebesar 6.575.764,97 dan Tahun 2021 sebesar 6.908.047,89, sementara jumlah tenaga kerja Tahun 2017 – 2021 secara berturut – turut adalah Tahun 2017 adalah 137.745 orang, Tahun 2018 adalah 141.771 orang, Tahun 2019 adalah 138.952 orang, tahun 2020 sebanyak 143.423 orang dan tahun 2021 sebanyak 151.725 orang.

Tingkat produktivitas tenaga kerja Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 42,14 pada Tahun 2017 dan Tahun 2019 sebesar 47,62 dan mengalami penurunan pada Tahun 2020 sebesar 45,85 disebabkan terjadinya Pandemi Covid 19 yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar sampai pada titik -0,61.

Tabel II- 74 : Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan	Juta Rupiah	5.803.944,31	6.190.674,12	6.616.253,76	6.575.764,97	6.908.047,89
Jumlah tenaga kerja	Orang	137.745	141.771	138.952	143.423	151.725
Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	Nilai	42,14	43,67	47,62	45,85	45,53

Sumber: Dinas PMPTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.1.4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

Berdasarkan table II-75 dapat dilihat bahwa dari 294 perusahaan yang ada di Kabupaten Takalar pada tahun 2021, 193 (65,65%) perusahaan telah menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, maka pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah perusahan yang terdaftar namun terjadi penurunan dari sisi jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak.

Tabel II- 75 : Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Unit	74	72	83	275	193
Jumlah Perusahaan	Unit	89	87	90	287	294
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	83,15	82,76	92,22	95,82	65,65

Sumber : Dinas PMPTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.1.5 Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

Berdasarkan table II-76 dapat dilihat bahwa dari 1.223 pencari kerja yang terdaftar pada Dinas PMPTSP Naker Transmigrasi Kabupaten Takalar pada tahun 2021, 1.150 (94,03%) diantaranya telah ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota.

Tabel II- 76 : Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	Orang	N/A	1952	1984	2.150	1,150
Jumlah pencaker yang terdaftar	Orang	N/A	2.586	2.980	2.873	1.223
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	N/A	75,48	66,58	74,83	94,03

Sumber : Dinas PMPTSP Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Takalar, Tahun

2021

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3.2.2.1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan table II-77 dapat dilihat bahwa persentase anggaran responsive gender yang terdapat pada belanja langsung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 mengalam fluktuasi dari tahun ke tahun. Persentase ARG tertinggi pada belanja langsung APBD Kabupaten Takalar terjadi pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 5,88% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,86%.

Tabel II- 77 : ARG Pada Belanja Langsung APBD Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	Rupiah	92.639.900	146.993.500	250.000.000	160.000.000	135.001.450
Jumlah seluruh belanja langsung APBD	Rupiah	10.766.407.718	7.502.291.934	4.250.864.550	5.223.934.000	9.695.849.189
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	0,86	1,96	5,88	3,06	1,39

Sumber : Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.2.2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten

Menurut *World Health Organization* (WHO), kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Pada SNPHAR tahun 2018, ditemukan bahwa 2 dari 3 anak laki-laki dan perempuan berusia 13-17 tahun pernah mengalami salah satu kekerasan dalam hidupnya, baik itu kekerasan fisik, seksual, maupun emosional.

Berdasarkan tabel II-78 dapat dilihat bahwa persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh Dinas P2KPPPA Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 berada pada angka yang relatif kecil. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya jumlah anak korban kekerasan yang ditangani oleh Dinas terkait adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kasus kekerasan yang terjadi pada anak dan kurangnya perhatian dari keluarga inti sehingga penanganan kekerasan pada anak perlu kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan Organisasi Masyarakat yang peduli anak.

Tabel II- 78 : Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi	Anak	2	10	5	15	2
Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	Anak	90.463	93.739	95.963	91.619	91.089
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,002	0,011	0,005	0,016	0,002

Sumber : Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.2.3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

Berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016, 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya.

Berdasarkan tabel II-79 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO di Kabupaten Takalar pada periode tahun 2017-2020 dan kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi sebesar 1,28 per 100.000 penduduk. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020 dengan rasio sebesar 12.97 per 100.000 penduduk yang bermakna bahwa setiap 100.000 perempuan terdapat 12.97 kejadian kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Tabel II- 79 : Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Orang	0	5	7	20	2
Jumlah penduduk perempuan	Orang	152.113	153.589	150.285	154.147	155.881
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000 Penduduk	0,00	3,26	4,66	12,97	1,28

Sumber : Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.3 Pangan

2.3.2.3.1 Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan

kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu.

Berdasarkan tabel II-80 dapat dilihat bahwa Persentase ketersediaan pangan (cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 termasuk rendah dengan persentase yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 0,45%. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini Kabupaten Takalar belum melaksanakan kegiatan penyediaan cadangan.

Tabel II- 80 : Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah cadangan pangan	Ton	97,81	104,45	111,51	125,69	127,18
Jumlah kebutuhan pangan	Tom	27.453	27.725	27.987	28.190	28.363
Persentase ketersediaan pangan (persediaannya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	0,36	0,38	0,40	0,45	0,45

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.4 Pertanahan

2.3.2.4.1 Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Cakupan persentase luas lahan yang memiliki sertifikat selama periode tahun 2018 – 2021 dapat dilihat pada tabel II-81.

Tabel II- 81 : Persentase Luas Lahan Bersertifikat Kabupaten Takalar Tahun 2018 – 2021

Indikator	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	43.60	48.81	56.86	55,01

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, 2021

Berdasarkan tabel II.81 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan luas lahan bersertifikat dari 43.60% pada tahun 2018 menjadi 56.86% pada

tahun 2020. Peningkatan ini terjadi karena adanya program sertifikat tanah gratis yang diinisiasi oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 2021, terjadi penurunan persentase luas lahan bersertifikat sebesar 1,85%.

2.3.2.4.2 Penyelesaian Kasus Tanah Negara dan Izin Lokasi

Jumlah kasus sengketa tanah negara yang terjadi selama periode 2018 – 2020 di Kabupaten Takalar adalah sebanyak 5 kasus yang terdiri atas empang (Saro') di Kecamatan Mappakasunggu, Lahan pembangunan kampus ISB di Tepo' Kecamatan Mangarabombang, Lahan Pabrik Gula Takalar, Lahan SD Bontonompo Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dan Lahan Kantor Lurah Panrannuangku Kecamatan Polongbangkeng Utara. Cakupan penyelesaian sengketa adalah 0%. Seluruh kasus masih sementara dalam proses pengadilan dan belum memiliki putusan tetap (Inkra) sehingga belum dapat dianggap terealisasi.

Sama hal nya dengan penyelesaian kasus tanah negara, capaian penyelesaian izin lokasi juga 0%. Hal ini disebabkan belum tegasnya instansi mana yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian izin lokasi.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

2.3.2.5.1 Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota

Timbulan sampah ialah banyaknya sampah yang timbul dari masyarakat dalam satuan volume atau berat per kapita perhari, atau perluas bangunan, atau perpanjang jalan (SNI 19-2454-2002). Timbulan sampah terbagi atas dua bagian besar, yaitu sumber timbulan non-perumahan dan sumber timbulan perumahan.

Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar juga mengedepankan prinsip 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle) dengan mengoperasionalkan 3 (unit) unit TPS 3R dan 1 (satu) unit PUSAT Daur Ulang Sampah.

Tabel II- 82 : Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Total Vol sampah yang dapat ditangani	M^3	131.565,74	142.558,28	150.050,06	168.267,75	214.131,96
Total vol timbunan sampah kabupaten/kota	M^3	283.872,01	287.034,25	290.277,74	293.557,88	296.875,08
Terlaksananya pengelolaan	Persen	46,35	49,67	51,69	57,52	72,13

sampah di wilayah Kab/Kota						

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, 2021

Berdasarkan tabel II-82 Dapat dilihat bahwa persentase pengelolaan sampah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini ditandai dengan peningkatan volume sampah yang ditangani setiap tahunnya.

2.3.2.5.2 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha (seperti Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)).

Tabel II- 83 : Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota Di Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	Orang	N/A	3	3	3	12
Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan	Orang	N/A	15	9	10	12
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	N/A	20,00	30,33	30,00	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar, 2021

Berdasarkan tabel II-83 Dapat dilihat bahwa persentase pengelolaan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Takalar telah dilaksanakan secara berkala sejak tahun 2018 dengan peningkatan persentase ketaatan yang terus meningkat dari tahun ke tahun dengan capaian pada tahun 2021 sebesar 100%.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2.3.2.6.1 Perekaman KTP Elektronik

Berdasarkan tabel II-84 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, persentase perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Kabupaten Takalar telah mencapai 99,95%. Capaian ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang telah mencapai 100% atau mengalami penurunan sebesar 0,5%.

Tabel II- 84 : Perekaman KTP Elektronik Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	Orang	178.864	200.793	208.906	209.353	212.889
Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	Orang	208.372	202.964	292.755	209.359	212.995
Perekaman KTP elektronik	Persen	85,84	98,93	71,36	100,00	99,95

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, 2021

2.3.2.6.2 Persentase Anak Usia 0 - 17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA

Berdasarkan tabel II-85 dapat dilihat bahwa untuk periode tahun 2017-2019 tidak tersedia data terkait indikator outcome ini. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2021 yaitu sebesar 33,91% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun sebelumnya yang hanya mencapai 3,93%.

Tabel II- 85 : Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIAs Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	Orang	N/A	N/A	N/A	3.594	30.872
Jumlah anak usia 0-17 tahun	Orang	N/A	N/A	N/A	91.560	91.029
Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	0	0	0	3,93	33,91

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, 2021

2.3.2.6.3 Kepemilikan akta kelahiran

Berdasarkan tabel II-86 dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran selama periode 2017-2021 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, capaian persentase kepemilikan akta kelahiran mencapai 91,56% dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 90,55%.

Tabel II- 86 : Kepemilikan Akta Kelahiran Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	Orang	43.289	28.397	79.947	88.423	89.438
Jumlah anak usia 0-18 tahun	Orang	90.457	92.760	90.285	97.653	97.680
Kepemilikan akta kelahiran	Persen	47,86	30,61	88,55	90,55	91,56

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, 2021

2.3.2.6.4 Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Berdasarkan tabel II-87 dapat dilihat bahwa ketersediaan data persentase Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama baru tersedia pada tahun 2021 dengan capaian sebesar 12,00% atau hanya dilaksanakan oleh 3 (tiga) perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan PMD serta Dinas Kesehatan.

Tabel II- 87 : OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	25% PD	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Jumlah OPD	PD	N/A	N/A	N/A	N/A	25
Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, 2021

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.3.2.7.1 Persentase pengentasan desa tertinggal

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan, Kesehatan, Modal Sosial, Permukiman), Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat, Akses Pusat Perdagangngan dan Pasar, Akses Logistik, Akses Perbankan dan Kredit, Keterbukaan Wilayah), Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (Kualitas Lingkungan, Bencana Alam, Tanggap Bencana).

Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Jumlah desa keseluruhan di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 sebanyak 76 (tujuh puluh enam) Desa. Berdasarkan tabel II-88 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021, hanya tersisa dua desa tertinggal yaitu Desa Mattiro Baji dan Desa Rewayata yang keduanya terletak di Kacamatan Kepulauan Tanakeke dan salah satu diantaranya sudah memenuhi kriteria desa berkembang (50%).

Tabel II- 88 : Pengentasan Desa Tertinggal Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Desa	N/A	N/A	6	3	1
Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	Desa	N/A	N/A	9	5	2
Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	N/A	N/A	66,67	60,00	50,00

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar, 2021

2.3.2.7.2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Berdasarkan tabel II-89 dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2021, di Kabupaten Takalar seluruh desa yang sebanyak 74 Desa masih bersatus desa berkembang dan belum terdapat desa dengan status desa Mandiri.

Tabel II- 89 : Peningkatan Status Desa Mandiri Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	Desa	N/A	N/A	0	0	0
Jumlah desa berkembang (perawal tahun n)	Desa	N/A	N/A	67	71	74
Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	N/A	N/A	0%	0%	0%

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Takalar, 2021

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.3.2.8.1 TFR (Angka Kelahiran Total)

Berdasarkan tabel II-90 dapat dilihat bahwa terjadi penurunan angka Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2021 yaitu 1,92 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2,00. Data ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Takalar pada tahun 2021, rata-rata anak yang dilahirkan oleh wanita usia subur usia 15-49 tahun adalah sebanya 1,92 anak. Angka ini lebih

rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan untuk 2021 yaitu sebesar 2,11.

Tabel II- 90 : TFR (Angka Kelahiran Total) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	N/A	1,04	2,32	2,00	1,92

Sumber : Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.8.2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial.

Berdasarkan tabel II-91 dapat dilihat bahwa persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR) di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR) pada tahun 2021 mencapai 71,69% atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tabel II- 91 : Pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah peserta KB Aktif Modern	Akseptor	35.558	36.432	35.397	36.272	38.041
Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasang	52.196	52.684	52.661	52.712	53.062
Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence rate*/ mCPR)	Persen	68,12	69,15	67,22	68,81	71,69

Sumber : Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.8.3 Persentase Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Berdasarkan tabel II-92 dapat dilihat bahwa persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Persentase *unmet need* pada tahun 2021 adalah sebesar 14,47% atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 16,33%. Capaian persentase *unmet need* tahun 2021 masih berada diatas Nasional yaitu sebesar 8,3%.

Tabel II- 92 : Kebutuhan Ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	Pasang	8.749	8.319	9.093	8.606	7.680
Jumlah Pasangan Usia Subur	Pasang	52.196	52.684	52.661	52.712	53.062
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need)*	Persen	16,76	15,79	17,27	16,33	14,47

Sumber : Dinas P2KBPPPA Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.9 Perhubungan

2.3.2.9.1 Rasio konektivitas kabupaten/kota

Capaian Rasio Konektivitas semakin Menurun dari Tahun 2017-2021, hal ini dilihat dari jumlah Total Trayek yang dilayani baik Trayek AKAP maupun Trayek Perintis capaiannya rendah dari pada Kebutuhan Trayek, dimana kebutuhan trayek tahun 2017 untuk darat yakni 12 sementara yang terlayani 8 trayek dengan bobot lintas 1 atau 5x dalam seminggu, sementara untuk trayek penyeberangan kebutuhan lintas 12 dan yang beroperasi 8 lintas dengan bobot 0,8 atau 3x dalam seminggu. Sedangkan untuk tahun 2021 kebutuhan trayek sebesar 8 trayek sementara yang terlayani hanya 5 trayek dengan bobot lintas 0,5 atau dibawah 2x dalam seminggu, sedangkan untuk trayek penyeberangan jumlah kebutuhan lintasan 8 sementara yang terlayani hanya 3 lintas yang beroperasi dengan bobot lintas 0,5 atau 2x dalam seminggu.

Tabel II- 93 : Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio konektvitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	Angka	0,867	0,733	0,788	0,500	0,500

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.9.2 Kinerja lalu lintas kabupaten/kota

Batas Lingkup V/C ratio Kabupaten Takalar berada pada rentang 0,20-0,44 dari tahun 2017-2021 bahkan mengalami penurunan dari tahun ketahun yang berarti Tingkat Pelayanan berada pada posisi B yakni Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas dalam faktor ukuran kota. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya : 1). Dinas perhubungan propinsi masih belum membatasi mengeluarkan/ pemberian izin angkutan kepada angkutan Pete pete atau oplet yg standart umur kendaraan 15 THN keatas .(sudah tdk layak untuk perjalanan lintas kabupaten), 2) Belum adanya terminal tipe c di kab takalar yg bisa mengakses penumpang lokal ke dan dari asal tujuan, 3). keberadaan terminal induk sekarang sudah menjadi kewenangan Dinas perhubungan propinsi, 4). sarana dan prasarana jalan terkait kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan masih di bawah standart, 5). sumber daya manusia di lingkup dinas perhubungan masih di bawah rata rata, 6). anggaran untuk menunjang pelaksanaan suatu Kegiatan untuk menunjang kelancaran TUPOKSI pada bidang lalu lintas dan angkutan masih sangat memperihatinkan.

Tabel II- 94 : Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota Volume Lalu Lintas(Jumlah Kendaraan) dibagi	Angka	N/A	0,40	0,36	0,35	*

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kapasitas Jalan (Panjang Jalan)						

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

2.3.2.10.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Berdasarkan tabel II-95 dapat dilihat bahwa tidak ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini disebabkan karena terjadinya *trouble*/kerusakan pada tower Dinas Kominfo pada pertengahan 2019 sementara untuk tahun 2020 dan 2021 tidak tersedia anggaran untuk penyediaan koneksi internet.

Tabel II- 95 : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	PD	30	30	24	0	0
Jumlah OPD	PD	34	34	34	35	35
Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	88,24	88,24	70,59	0,00	0,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.10.2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Berdasarkan tabel II-96 dapat dilihat bahwa Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2021 telah mencapai 75%.

Tabel II- 96 : Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Layanan	5	6	7	9	9
Jumlah Layanan Publik	Layanan	9	9	10	12	12
Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	55,56	66,67	70,00	75,00	75,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.10.3 Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota

Berdasarkan tabel II-97 dapat dilihat bahwa Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2021 telah mencapai 83,28%.

Tabel II- 97 : Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program	Jiwa	173.567	195.877	223.541	246.532	253.887

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota						
Jumlah penduduk	Jiwa	283.768	289.767	292.790	300.919	304.856
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota	Persen	61,17	67,60	76,35	81,93	83,28

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

2.3.2.11.1 Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pemeringkatan Koperasi, koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial

Jumlah seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) koperasi, sementara jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan assetnya sebanyak 5 (lima) sehingga persentase koperasi yang berkualitas yang dicapai Kabupaten Takalar sebesar 1,35%.

Tabel II- 98 : Meningkatnya Koperasi Yang Berkualitas Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah koperasi yang meningkat	Unit	0	0	0	8	5

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset						
Jumlah seluruh koperasi	Unit	358	365	365	365	371
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	0,00	0,00	0,00	2,19	1,35

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.11.2 Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirasausaha

Pengertian usaha mikro diartikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria usaha mikro. Usaha yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,-

Berdasarkan tabel II-99 dapat dilihat bahwa jumlah usaha mikro yang tercatat pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 58.831 usaha, 26.353 (44,79%) usaha mikro diantaranya telah menjadi wirausaha (membuat suatu produk, menentukan cara produksi, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru hingga mengatur permodalan serta pemasarannya).

Tabel II- 99 : Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirasausaha Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	Unit	220	2.380	2.380	26.353	26.353
Jumlah usaha mikro keseluruhan	Unit	60.586	60.586	60.586	66.737	58.831
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,36	3,93	3,93	39,49	44,79

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Takalar, Tahun 2021

2.3.2.12 Penanaman Modal

2.3.2.12.1 Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota

Berdasarkan tabel II-100 dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah investasi di Kabupaten Takalar yaitu hanya senilai 58.572.000.000 (Lima Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai nilai 117.150.587.000 (Seratus Tujuh Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Tabel II- 100 : Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	Rupiah	248.860.774.242	136.712.498.888	117.150.587.000	58.572.000.000
Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota	Rupiah	N/A	248.860.744.242	136.712.498.888	117.150.587.000
Persentase peningkatan investasi di kab/kota	Persen	0,00	54,94	85,69	50,00

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, 2021

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

2.3.2.13.1 Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Berdasarkan tabel II-101 dapat dilihat bahwa ketersediaan data terkait tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 tidak tersedia. Hal ini disebabkan karena kegiatan untuk mendata pemuda usia 16-30 tahun yang berwirausaha tidak pernah dilaksanakan di Kabupaten Takalar.

Tabel II- 101 : Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Provinsi	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	Orang	N/A	N/A	N/A	65.924	65.677
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.13.2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan

Berdasarkan tabel II-102 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017-2021 masih tergolong sangat rendah dengan persentase tingkat partisipasi pada tahun 2021 hanya mencapai 1,79%.

Tabel II- 102 : Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota	Orang	N/A	N/A	2.715	2.081	1.173
Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota	Orang	N/A	74.698	74.989	65.924	65.677
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan	Persen	N/A	0,00	3,62	3,16	1,79

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
organisasi sosial kemasyarakatan						

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.13.3 Peningkatan Prestasi Olahraga

Berdasarkan tabel II-103 dapat dilihat bahwa jumlah perolehan medali yang dicapai oleh Kabupaten Takalar pada tahun 2021 sebanyak 24 medali. Terjadi peningkatan perolehan jumlah medali jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Peningkatan ini disebabkan karena pada periode tahun 2019-2020 adalah masa masa pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak dilaksanakannya *event* olah raga.

Tabel II- 103 : Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Buah	0	11	4	0	28

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.14 Statistik

2.3.2.14.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

Berdasarkan tabel II-104 dapat dilihat bahwa seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Tabel II- 104 : Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun	PD	34	34	34	35	35

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
perencanaan pembangunan daerah						
Jumlah OPD	PD	34	34	34	35	35
Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.14.2 Persentase OPD yang menggunakan Data Statistik Dalam melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah

Berdasarkan tabel II-105 dapat dilihat bahwa seluruh Perangkat Daerah telah menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

Tabel II- 105 : OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	PD	34	34	34	35	35
Jumlah OPD	PD	34	34	34	35	35
Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.15 Persandian

2.3.2.15.1 Tingkat keamanan informasi pemerintah

Area keamanan informasi diantaranya mencakup tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset dan teknologi. Berdasarkan tabel II-105 dapat dilihat bahwa persentase tingkat keamanan informasi pemerintah Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2021 hanya mencapai 20%. Hal ini disebabkan karena area yang dapat dipenuhi oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar hanya pada area tata Kelola sementara area penilaian lainnya belum dapat dipenuhi.

Tabel II- 106 : Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah nilai per area keamanan informasi	Nilai	1	1	1	1	1
Jumlah area penilaian	Area	5	5	5	5	5
Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	20	20	20	20	20

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.16 Kebudayaan

2.3.2.16.1 Terlestarikannya Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Jumlah cagar budaya yang terdata di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 mencapai 45 unit sementara jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah sebanyak 21 unit atau 46.67%.

Tabel II- 107: Terlestarikannya Cagar Budaya Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Unit	21	21	21	21	21

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah cagar budaya yang terdata	Unit	45	45	45	45	45
Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	46,67	46,67	46,67	46,67	46,67

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.17 Perpustakaan

2.3.2.17.1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat

Nilai kegemaran membaca masyarakat adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Metodologi yang digunakan adalah metode survei dengan pengukuran dimensi utama adalah : Frekuensi membaca, Durasi membaca dan jumlah buku yang dibaca.

Capaian nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Takalar pada tahun 2017 sebesar 1,21 dan meningkat menjadi 1,30 pada tahun 2021. Nilai tingkat kegemaran membaca yang dicapai di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 mengindikasikan bahwa nilai tingkat kegemaran membaca di Kabupaten Takalar termasuk dalam kategori Rendah. Jika dibandingkan dengan nilai tingkat kegemaran membaca yang dicapai Provinsi Sulawesi Selatan pada periode waktu yang sama yaitu sebesar 63,1 maka nilai capaian tingkat kegemaran membaca masyarakat di Kabupaten Takalar masih sangat jauh tertinggal.

Tabel II- 108 : Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	1,21	1,31	1,22	1,23	1,30

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.17.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Budaya literasi menjadi dimensi dalam indeks pembangunan kebudayaan pada RPJMN Tahun 2020-2024. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk

mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Pengukuran budaya literasi diukur dalam tiga dimensi, yaitu persentase penduduk yang membaca selain kitab suci, persentase penduduk yang mengakses internet, dan persentase penduduk yang mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan.

Capaian indeks pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017-2021 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari nilai 60 pada tahun 2017 menjadi 87,48 pada tahun 2021 atau dengan kata lain literasi membaca di Kabupaten Takalar termasuk dalam kategori tinggi. Jika dibandingkan dengan indeks pembangunan literasi yang dicapai Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yaitu sebesar 12,93, maka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Takalar sudah lebih jauh baik.

Tabel II- 109 : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	62	63,53	73,82	83,27	87,48

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.18 Kearsipan

2.3.2.18.1 Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 Dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan

Tingkat ketersediaan arsip diukur dengan cara menambahkan komponen persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip (a), persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip (i), persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik (s) dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN (j) kemudian dibagi total komponen.

Berdasarkan tabel II-110 dapat dilihat bahwa tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, tingkat ketersediaan arsip mencapai nilai 62,63 yang termasuk dalam kategori sedang.

Tabel II- 110 : Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Ketersediaan Arsip	Angka	46,47	49,57	53,21	58,53	62,63

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.2.18.2 Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat

Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat diukur terhadap 6 (enam) komponen yaitu tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK, tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK dan tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK yang kemudian dibagi dengan total komponen.

Berdasarkan tabel II-111 dapat dilihat bahwa data terkait Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017-2021 terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian yang diperoleh pada tahun 2021 mencapai 69,63 yang menandakan bahwa tingkat kebaradaa dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban di Kabupaten Takalar termasuk dalam kategori sedang.

Tabel II- 111 : Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban	Angka	51,47	52,57	60,21	66,53	69,63

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

2.3.3.1.1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)

Berdasarkan tabel II-112 dapat dilihat bahwa selama periode 2017 sampai dengan 2021 terjadi penurunan jumlah produksi perikanan baik itu perikanan tangkap maupun perikanan budidaya di Kabupaten Takalar, dimana jumlah total produksi pada tahun 2021 sebesar 590.403 ton. Hal ini ditandai dengan turunnya % produksi perikanan di beberapa komoditas setiap tahunnya. Penyebabnya adalah Cuaca ekstrim, Penyakit, Sarana prasarana kurang memadai dan Pandemi Covid-19.

Tabel II- 112 : Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	Ton	1.004.435	543.846	458.568	412.631	590.403

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.2 Pariwisata

2.3.3.2.1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan

Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2017 adalah 231 orang, tahun 2018 sebanyak 145 orang, tahun 2019 berjumlah 473 orang, 2020 sebanyak 38 orang, dan tahun 2021 sebanyak 5 orang. Persentase pertumbuhan wisatawan mancanegara sangat fluktuatif selama periode tahun 2017-2021, dimana pertumbuhan positif hanya terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 226,21% yang disebabkan karena adanya *event* yang dilakukan di Kabupaten Takalar.

Tabel II- 113 : Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	Orang	-86	328	-435	-33	-5
Jumlah wisatawan tahun n-1	Orang	231	145	473	38	5
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-37,23	226,21	-91,97	-86,84	-100

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.2.2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota

Jumlah Wisatawan Nusantara tahun 2017 adalah 4.781 orang, tahun 2018 sebanyak 6.716 orang sementara tahun 2019 dan 2020 berjumlah 10.641 orang dan 6.712 orang dan pada tahun 2021 adalah 50 orang. Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan pada tahun 2018 sebesar 58,44 persen dibanding tahun 2017 yaitu 40,47 persen, dan terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar -36,92 persen dan semakin terpuruk karena pandemic covid 19 pada Tahun 2020 sebesar -99,25 persen.

Tabel II- 114 : Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	Orang	1.935	3.925	-3929	-6662	12.224
Jumlah wisatawan tahun n-1	Orang	4781	6716	10641	6712	50
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	Persen	40,47	58,44	-36,92	-99,26	4.950

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.2.3 Tingkat Hunian Akomodasi

Berdasarkan tabel II-115 dapat dilihat bahwa data terkait tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 bersifat fluktuatif dengan capaian terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 21,19% dan kemudian meningkat Kembali pada tahun 2021 menjadi 76,16%. Penurunan tingkat hunian akomodasi pada tahun 2020 di Kabupaten Takalar juga sebagai akibat dari pandemic covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia sehingga menyebabkan pembatasan pergerakan manusia dan penutupan berbagai tempat tempat wisata yang memberikan dampak terhadap menurunnya jumlah wisatawan baik wisatawan domestik maupun wisatawan asing.

Tabel II- 115 : Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kamar yang terjual	Unit	N/A	114	114	32	115
Jumlah kamar yang tersedia	Unit	N/A	114	114	151	151
Tingkat hunian akomodasi	Persen	N/A	100	100	21,19	76,16

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.2.4 Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami peningkatan dengan kenaikan sebesar 6,99 milyar rupiah, mengalami penurunan disebabkan pandemic Covid yang memaksa merubah prilaku masyarakat untuk tetap berada dirumah dan social distancing sehingga menyebabkan kontrisbusi sektor pariwisata terhadap

PDRB menurun di Tahun 2020 sebesar 31,99 milyar rupiah, terjadi penurunan sebesar 1,57 milyar rupiah.

Tabel II- 116 : Tingkat Hunian Akomodasi Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Milyar Rupiah	26,57	30,24	33,56	31,99	26,57

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.2.5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama periode tahun 2017-2021bersifat fluktuatif dan capaiannya menurun sangat tajam pada tahun 2021 yaitu hanya mencapai 3%. Hal ini disebabkan selain karena dampak pandemi covid19, juga disebabkan oleh masih belum maksimalnya upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan melakukan intensifikasi pemungutan retribusi dan pajak terhadap sektor sektor terkait pariwisata.

Tabel II- 117 : Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	35.08	56.7	84	58	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.3 Pertanian

2.3.3.3.1 Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun

Berdasarkan tabel II-118 dapat dilihat bahwa jumlah produksi tahun 2021 menurun dari 138.480,69 ton menjadi 136.248,62 jika dibandingkan tahun 2020 karena luas panen yang juga menurun dari 28.865 Ha menjadi 27.532 Ha. Salah satu penyebabnya adalah adanya bencana pertanian seperti banjir di beberapa lokasi pertanaman yang mengakibatkan gagal panen di beberapa wilayah Kecamatan Galesong dan Kecamatan Polongbangkeng Utara. Namun secara umum terjadi kenaikan produktivitas pertanian jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel II- 118 : Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	Ton	130.535,15	121.733,42	129.579,64	138.480,69	136.248,62
Luas panen	Ha	28.384	26.695	27.689	28.865	27.532
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ Hektar	4,60	4.,56	4,68	4,80	4,85

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.3.2 Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

Berdasarkan tabel II-119 dapat dilihat bahwa persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun persentase penurunan tahun 2021 belum memenuhi target yang ditetapkan yang disebabkan karena jumlah kasus yang ditemukan masih cenderung mendekati angka kasus tahun lalu. Untuk menekan angka kasus maka dibutuhkan penganggaran yang lebih memadai untuk kebutuhan pengadaan obat-obatan ternak, vaksin dan kebutuhan sosialisasi kesehatan hewan ternak. Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar telah berupaya menekan angka kasus melalui vaksinasi, pemberian obat dan pelayanan kesehatan hewan serta sosialisasi terkait kesehatan hewwan ternak mencakup pemberian obat, penyediaan kandang dan pakan yang baik

Tabel II- 119 : Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Kasus	N/A	-76	-264	-372	-74

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	Kasus	N/A	2077	2001	1737	1365
Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	N/A	-3,66%	-13,19%	-21,42%	-5,42%

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.4 Perdagangan

2.3.3.4.1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Berdasarkan tabel II-120 dapat dilihat bahwa persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perlengkapan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) pada tahun 2021 mencapai 92,47%.

Tabel II- 120 : Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	Unit	921	441	830	897	921
Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota	Unit	996	538	904	972	996
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perlengkapan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	92,47	81,97	91,81	92,28	92,47

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.4.2 Persentase kinerja realisasi pupuk

Berdasarkan tabel II-121 dapat dilihat bahwa persentase kinerja realisasi pupuk pada tahun 2017 dan 2021 masing masng mencapai 30.90%, sementara untuk tahun 2018-2020 tidak diperoleh datanya.

Tabel II- 121 : Kinerja Realisasi Pupuk Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Realisasi	Ton	20.750	N/A	N/A	N/A	20.750
RDKK	Ton	67.162	N/A	N/A	N/A	67.162
Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	Persen	30,90	N/A	N/A	N/A	30,90

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.4.3 Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Berdasarkan tabel II-122 dapat dilihat bahwa persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku pada tahun 2021 mencapai 54,59% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Pada tahun 2020 dan 2021 UPTD Metrologi Legal Kab. Takalar melakukan kerjasama dengan Dinas Perdagangan Perindustrian Kab. Jeneponto dalam hala tera dan tera ulang sehingga yang tadinya jumlah potensi UTTP yang wajib di tera dan tera ulang di wilaya Kab. Takalar hanya 1.000 naik menjadi 1.700 karena ada penambahan UTTP dari Kab. Jeneponto 700 UTTP

Tabel II- 122 : Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	Unit	313	372	383	136	928
Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	Unit	1.000	1.000	1.000	1.700	1.700
Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	Persen	31,30	37,20	38,30	8,00	54,59

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Takalar, Tahun 2021

2.3.3.5 Perindustrian

Merujuk pada Permendagri 18 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka pada urusan perindustrian terdapat 6 (enam) indikator yang digunakan untuk mengukur

kinerja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, data yang tersedia hanya indikator mengenai persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait sehingga perlu ditambahkan indicator kinerja urusan perindustrian yang tercantum dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

2.3.3.5.1 Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

Berdasarkan tabel II-123 dapat dilihat bahwa persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait selama periode 2017-2021 telah mencapai 100%, hal ini menunjukkan bahwa seluruh izin yang dikeluarkan dilakukan pemantauan dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan.

Tabel II- 123 : Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	Izin	12	10	18	14	13
Jumlah izin yang dikeluarkan	Izin	12	10	18	14	13
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.3.5.2 Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Data indicator cakupan bina kelompok pengrajin di Kabupaten Takalar hanya tersedia untuk tahun 2021 dengan capaian sebesar 1,28%. Jumlah kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Takalar pada tahun 2021

berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Takalar adalah sebanyak 156 kelompok sementara yang mendapatkan bantuan pembinaan oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2021 sebanyak 2 kelompok.

2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Perencanaan dan Keuangan

2.3.4.1.1 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan

Berdasarkan tabel II-124 dapat dilihat bahwa selama periode Tahun 2017-2022 rata-rata rasio belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan sebesar 40,51 persen dari jumlah APBD Kabupaten Takalar dalam periode yang sama. Rasio terendah tercatat pada Tahun 2019 yakni sebesar 34,72 persen atau Rp. 399,9 Milyar lebih dari total APBD sebesar Rp.998,2 Milyar lebih, sedangkan rasio tertinggi tercatat pada Tahun 2020 sebesar 47,10 persen atau Rp.467,2 Milyar lebih dari total APBD sebesar Rp.987,7 Milyar lebih. Hal ini menunjukkan masih tingginya belanja pegawai terhadap total APBD Kabupaten Takalar. Rasio belanja pegawai digunakan untuk mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin membaiknya kualitas belanja daerah dapat dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD. Semakin sedikit porsi belanja APBD yang digunakan untuk belanja aparatur maka APBD dapat dioptimalkan untuk mendukung jenis belanja lain yang lebih terkait dengan pelayanan publik seperti belanja modal untuk pembangunan fasilitas masyarakat atau untuk mendukung belanja yang efektif mendorong roda perekonomian daerah seperti peningkatan konektivitas dengan pembangunan jalan dan jembatan baru. Perkembangan rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 124 : Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	Rupiah	448.569.968.195,00	417.681.079.210,44	399.901.246.228,00	467.217.833.549,00	454.193.318.733,00
Jumlah APBD	Rupiah	981.132.519.941,88	976.041.599.307,43	998.295.401.370,36	987.775.068.324,58	1.107.073.633.832,10
Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	41,56	37,55	34,72	47,10	41,62

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.1.2 Rasio PAD

PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat, dimana Rasio PAD mampu menggambarkan kemandirian suatu daerah, semakin tinggi rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian fiskal daerah tersebut. Berdasarkan tabel II-125 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio PAD terhadap jumlah APBD non migas dalam kurun waktu Tahun 2017-2020 sebesar 3,99 persen, sedangkan untuk Tahun 2021 belum bisa disajikan datanya.

Tabel II- 125 : Rasio PAD Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah PAD	Rupiah	111.702.803.114,49	125.186.750.078,44	104.825.639.110,40	126.864.460.821,28	95.061.361.003,49
Jumlah APBD non migas	Rupiah	8.559.004.600.000	9.324.821.980.000	10.157.346.940.000	10.220.311.170.000	N/A
Rasio PAD	Persen	1,31	1,34	1,03	1,24	0,00

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.1.3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah meyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel II-126, dapat dilihat bahwa tingkat maturitas SPIP yang dicapai Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2020 berada pada level 2 yang bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Takalar telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Sementara untuk tahun 2021 belum dapat ditampilkan pencapaian level maturitas SPIP karena belum dirilisnya hasil penilaiannya oleh lembaga berwenang.

Tabel II- 126 : Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat	2	2	2	2	Belum ada hasil penilaian

Sumber : Inspektorat Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.1.4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Menurut pedoman teknis penilaian mandiri kapabilitas APIP yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2015, Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Berdasarkan tabel II-127 dapat dilihat bahwa tingkat kualitas APIP di Kabupaten Takalar sampai dengan tahun 2020 berada pada level 2 (*Infrastructure*) yang berarti bahwa bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan pengawasannya proses audit dilakukan secara tetap, rutin dan berulang, sudah membangun *infrastruktur* namun baru sebagian yang telah selaras dengan standar audit, dengan *outcome* mampu memberikan keyakinan yang memadai proses sesuai dengan peraturan, mampu mendeteksi terjadinya korupsi.

Tabel II- 127 : Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Tingkat	2	2	2	2	Belum ada hasil penilaian

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.1.5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*)

Rata-rata rasio belanja pemerintahan umum (dikurangi *transfer expenditures*) terhadap jumlah belanja APBD selama periode Tahun 2017-2021 adalah sebesar 76,40 persen. Dengan perkembangan yang fluktuatif. Pada Tahun 2017 rasionya sebesar 67,67 persen, mengalami kenaikan sebesar

10,06 persen pada Tahun 2018 menjadi 77,73 persen kemudian mengalami penurunan sebesar 6,99 persen menjadi 70,74 persen pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 19,75 persen dan mengalami penurunan sebesar 15,11 persen menjadi 75,38 persen pada Tahun 2021 (Tahun 2021 adalah angka sementara). Data ini menggambarkan rasio belanja pada urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 setelah dikurangi belanja transfer dibandingkan dengan jumlah belanja APBD Kabupaten Takalar pada periode Tahun 2017-2022 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 128 : Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	Rupiah	730.348.878.892,00	864.540.255.596,00	811.291.409.873,56	817.859.997.926,00	821.764.580.704,00
Jumlah belanja APBD	Rupiah	981.132.519.941,88	976.041.599.307,43	998.295.401.370,36	987.775.068.324,58	1.107.073.633.832,10
Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	74,44%	88,58%	81,27%	82,80%	74,23%

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.1.6 Opini Laporan Keuangan

Berdasarkan tabel II-129 dapat dilihat bahwa opini Badan Pemeriksa Keuangan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017 sampai dengan 2020 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang disebabkan oleh masih terjadinya permasalahan dalam pengelolaan aset daerah. Sementara itu untuk tahun 2021, belum diperoleh hasil penilaian terkait kinerja keuangan (opini) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Tabel II- 129 : Opini Laporan Keuangan Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Opini Laporan Keuangan	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	Belum ada hasil Penilaian

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.2 Pengadaan

2.3.4.2.1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

Berdasarkan tabel II-130 dapat dilihat bahwa tidak ada proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama di Kabupaten Takalar selama periode tahun 2017-2021.

Tabel II- 130 : Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun Berikutnya Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Kontrak Infrastruktur Dengan Nilai Besar Yang Perlu Pembangunan Dalam 3 Kuartal Yang Ditandatangani Pada Kuartal Pertama Tahun n	Buah	0	0	0	0	0
Jumlah Kontrak Keseluruhan Tahun n	Buah	1.276	766	908	413	824
Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke Tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0

Sumber : Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.2.2 Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

Berdasarkan tabel II-131 dapat dilihat bahwa persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif pada sampai dengan tahun 2021 hanya sebesar 8,85%.

Tabel II- 131 : Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Buah	76	69	67	26	67
Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Tanpa Metode Kompetitif	Buah	1.200	757	841	387	757
Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Persen	6,33	9,11	7,97	6,72	8,85

Sumber : Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.2.3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

Berdasarkan tabel II-132 dapat dilihat bahwa rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan pada tahun 2021 mencapai hanya tersedia untuk tahun 2020 yaitu sebesar 73,58 persen atau turun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 83,10 persen namun dari sisi jumlah anggaran terjadi peningkatan jumlah belanja langsung pada tahun 2021 yang mencapai Rp. 428.906.118,047 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Juta Seratus Delapan Belas Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah) atau naik 69,93%.

Tabel II- 132 : Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Nilai Belanja Langsung Yang Melalui Pengadaan	Rupiah	310.701.839.540	488.258.960.094	247.323.284.777	247.323.284.777	315.604.149.927
Total Belanja Langsung	Rupiah	431.565.282.571	438.051.003.470	431.884.031.878,36	297.611.823.364,58	428.906.118.047
Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Persen	71,99	111,46	57,26	83,10	73,58

Sumber : Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.3 Kepegawaian

2.3.4.3.1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Berdasarkan tabel II-133 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan Perguruan Tinggi ke atas selama periode 2017 – 2021 di Kabupaten jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan SMA ke bawah. Pada tahun 2021, Rasio pegawai pendidikan tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) adalah sebesar 250,09%.

Tabel II- 133 : Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	Orang	N/A	1.326	4.465	1.417	1.318
Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah	Orang	N/A	904	796	612	527
Rasio pegawai pendidikan tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	N/A	146,68	560,93	231,54	250,09

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.3.2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Berdasarkan tabel II-134 dapat dilihat bahwa rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 sebesar 6,06%.

Tabel II- 134 : Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pegawai PNS Fungsional (Diluar Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Orang	N/A	79	336	93	124
Seluruh Jumlah Pegawai Pemerintah (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Orang	N/A	2.383	2.321	2.028	2.046

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	N/A	3,32	14,48	4,59	6,06

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.3.3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Berdasarkan tabel II-135 dapat dilihat bahwa jumlah pegawai fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan selama periode 2017-2021 terus mengalami peningkatan setiap tahun namun tidak diiringi dengan peningkatan jumlah fungsional bersertifikat kompetensi sehingga rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 hanya sebesar 5,13%. Kendala yang dihadapi adalah sistem pelaporan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga diperlukan mekanisme pelaporan yang jelas.

Tabel II- 135 : Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan) Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Pegawai Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Orang	73	73	73	73	73
Seluruh Jumlah Pegawai Fungsional (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Orang	455	557	1.891	1.392	1.423
Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%)(PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	Persen	16,04	13,11	3,86	5,24	5,13

Sumber : Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.4 Manajemen Keuangan

2.3.4.4.1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Berdasarkan tabel II-136 dapat dilihat bahwa deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dalam periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2017

deviasinya sebesar negatif 13,05 persen, kemudian mengalami sedikit perbaikan di Tahun 2018 menjadi negatif 9,47 persen dan terkoreksi menjadi negatif 8,33 persen pada Tahun 2019. Selanjutnya pada Tahun 2020 dan 2021 kembali mengalami kenaikan deviasi menjadi negatif 11,52 persen dan negatif 26,56 persen (Tahun 2021 adalah angka sementara). Angka deviasi tersebut menggambarkan selisih antara target dan realisasi belanja dalam APBD, deviasi ini pula yang akan menetukan besar kecilnya anggaran sisa dalam APBD. Adapun perkembangan deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD dalam lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel II- 136 : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Absolut Dari Total Belanja Dalam Realisasi	Rupiah	981.132.519.941,88	976.041.599.307,43	998.295.401.370,36	987.775.068.324,58	1.107.073.633.832,10
Total Belanja Apbd Dikurangi Satu	Rupiah	1.128.333.979.993,57	1.078.111.692.271,18	1.088.969.423.563,18	1.116.343.361.420,43	1.507.476.990.366,77
Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-13,05%	-9,47%	-8,33%	-11,52%	-26,56%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.4.2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD

Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 cukup berfluktuasi. Pada Tahun 2017 deviasinya sebesar negatif 9,47 persen, kemudian mengalami peningkatan deviasi yang cukup besar pada Tahun 2018 menjadi negatif 23,27 persen. Selanjutnya pada Tahun 2019 mengalami deviasi sebesar negatif 21,51 persen dan mengalami penurunan yang cukup besar pada Tahun 2020 menjadi negatif 12,57 persen namun kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Tahun 2021 menjadi negatif 44,66 persen (Tahun 2021 adalah angka sementara). Angka deviasi tersebut menggambarkan selisih antara target dan realisasi PAD dalam APBD, semakin tinggi deviasinya maka semakin tinggi pula selisih antara target dengan realisasi, demikian pula sebaliknya semakin rendah deviasi maka semakin rendah pula selisih antara target dengan realisasi. Secara lengkap gambaran realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II- 137 : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	Rupiah	111.702.803.114,49	125.186.750.078,44	104.825.639.110,40	126.864.460.821,28	95.061.361.003,49
dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu	Rupiah	123.337.301.500	163.160.114.730,00	133.551.412.309,99	145.110.477.800	171.768.659.033,77
Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	-9,43%	-23,27%	-21,51%	-12,57%	-44,66%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.4.3 Manajemen Aset

Berdasarkan tabel II-138 dapat dilihat bahwa selama periode tahun 2017-2021, Bidang Aset selaku pengelola aset di Kabupaten Takalar telah menyediakan dokumen dokumen pendukung manajemen aset berupa daftar aset tetap, manual penyusunan manual aset tetap dan inventarisasi aset.

Tabel II- 138 : Manajemen Aset Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Dokumen	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.4.4 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

Berdasarkan tabel II-139 dapat dilihat bahwa Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya pada periode Tahun 2017-2022 mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 6,15 persen. Pada Tahun 2017 sebesar 3,80 persen, lebih tinggi 1,06 persen dari Tahun 2018 yang sebesar 2,74 persen. Pada Tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 3,66 persen menjadi 6,40 persen, kemudian mengalami penurunan sebesar 1,50 persen menjadi 4,90 persen pada Tahun 2020 yang selanjutnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2021 sebesar 8,03 persen menjadi 12,93 persen (Tahun 2021 adalah angka sementara). Rasio ini membandingkan antara realisasi SILPA dengan total anggaran tahun sebelumnya.

Tabel II- 139 : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nilai realisasi SiLPA	Rupiah	981.132.519.941,88	71.190.665.488,19	56.236.690.904,43	125.460.203.203,08	69.065.569.832,09
Total Belanja Anggaran Tahun Sebelumnya	Rupiah	N/A	981.132.519.941,88	976.041.599.307,43	998.295.401.370,36	987.775.068.324,58
Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	0,00%	7,26%	5,76%	12,57%	6,99%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.5 Transparansi dan Partisipasi Publik

2.3.4.5.1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan

Berdasarkan tabel II-140 dapat dilihat bahwa persentase Informasi Tentang Sumber daya yang Tersedia Untuk Pelayanan pada tahun 2021 mencapai 211,82%. Hal ini disebabkan karena nilai Belanja Anggaran Untuk Unit Pelayanan Dapat Diakses Di Website Pemda lebih besar jika dibandingkan nilai Realisasi Belanja Untuk Unit Pelayanan Dapat Diakses Di Website Pemda.

Tabel II- 140 : Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Anggaran Untuk Unit Pelayanan Dapat Diakses Di Website Pemda	Rupiah	N/A	58.650.000	57.044.000	17.421.000	11.609.820
Realisasi Belanja Untuk Unit Pelayanan Dapat Diakses Di Website Pemda	Rupiah	N/A	58.450.000	54.034.000	16.166.000	5.481.040
Informasi Tentang Sumber daya yang Tersedia Untuk Pelayanan	Persen	N/A	100	105,57	107,76	211,82

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.3.4.5.2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah

Berdasarkan tabel II-141, dapat dilihat bahwa persentase Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah di Kabupaten Takalar tahun 2021 sebesar 40%, sementara untuk tahun tahun sebelumnya tidak dilaksanakan disebabkan karena terjadinya pengalihan pengelolaan *Website*

takalarkab.go.id dari bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kab Takalar ke Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, sehingga pengeksesan terhadap informasi keuangan daerah tahun 2017-2020 belum bisa terupload ke website.

Tabel II- 141 : Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah Tahun 2017 – 2021

Formulasi/ Indikator	Satuan	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen Yang Dipublikasikan Di Website Pemda	Dokumen	0	0	0	0	2
Total Jumlah Dokumen Yang Telah Dirinci	Dokumen	0	0	0	0	5
Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah	Persen	0	0	0	0	40

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Takalar, Tahun 2021

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi. Secara konsep, daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka membangun daya saing daerah, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa hal, antara lain:

a. Melakukan pemetaan potensi daerah mulai dari Desa, Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kabupaten;
b. Mendorong upaya-upaya peningkatan layanan publik;
c. Memperkuat seluruh infrastruktur ekonomi untuk mendorong potensi daerah, termasuk pengembangan SDM;
d. Menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menciptakan ide-ide baru, perbaikan-perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru, industri baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi;
e. Menumbuhkembangkan iklim inovasi;
f. Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan dengan terus meningkatkan penggunaan produksi lokal;
g. Selalu meningkatkan kesiapan kapabilitas pemerintah daerah termasuk kemampuan dalam mengelola keuangan daerah.

2.4.1 Indeks Daya Saing Daerah

Tingkat daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu parameter dalam konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi.

Adapun Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) menjelaskan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Indeks ini juga merupakan profil kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD adalah merupakan gambaran tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

Indeks Daya Saing Daerah terdiri dari 4 Aspek 12 Pilar, 23 Dimensi dan 97 Indikator yaitu (1)Aspek Ekosistem Inovasi terdiri dari Pilar Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, Kesiapan Teknologi (2)Aspek Penguat/Enabling Environment terdiri dari Pilar Kelembagaan, Infrastruktur dan Perekonomian Daerah (3)Aspek SUmber Daya Manusia/Human Capital terdiri dari Pilar Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan (4)Aspek Pasar/Market terdiri dari Pilar Efisiensi pasar, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan dan Ukuran Pasar.

Berdasarkan hasil pemetaan ekosistem inovasi melalui Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dipublikasikan oleh Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kabupaten Takalar pada tahun 2020 memperoleh nilai sebesar 1.2000 dengan predikat RENDAH, sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan perolehan nilai 2,4550 atau mencapai predikat daya saing SEDANG. Gambaran lengkap terkait capaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Takalar Tahun 2020 – 2021 berdasarkan masing masing aspek yang dinilai dapat dilihat pada tabel II-142.

Tabel II- 142 : Hasil Pemetaan Ekosistem Inovasi Melalui Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2021

No	Aspek	Nilai	
		2020	2021
1	Faktor Penguat/*Enabling Environment*	1.4306	2.8340
2	Sumber Daya Manusia/*Human Capital*	2.3750	3.0630
3	Faktor Pasar/*Market*	0.3542	2.6040
4	Ekosistem Inovasi	0.6404	1.3180
Skor/Nilai Indeks		**1.2000**	**2.4550**
Predikat		**RENDAH**	**SEDANG**

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, Tahun 2021

2.4.2 Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah

Kelengkapan sarana dan prasana wilayah (infrastuktur) akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, kondisi infrastruktur yang baik merupakan prasyarat utama bagi upaya meningkatkan daya saing daerah maupun perkembangan perekonomian di Kabupaten Takalar.

Dalam Penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) terdapat 12 Pilar/Variabel meliputi pilar Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan, Efesiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Kesiapan Teknologi, Dinamika Pasar, dan Kapasitas Inovasi yang menjadi komponen daya saing daerah (BRIN, 2021). Berdasarkan pemetaan Indeks Daya Saing Daerah tahun 2021, terdapat 4 aspek dan 23 pilar yang menjadi fokus daya saing daerah Kabupaten Takalar yaitu;

1. Faktor Penguat/Enabling Environment, terdiri dari pilar; Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah;
2. Sumber Daya Manusia/Human Capital, terdiri dari pilar; Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan;
3. Faktor Pasar/Market, terdiri dari pilar; Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar;
4. Ekosistem Inovasi, terdiri dari pilar; Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi, Kesiapan Teknologi.

Berdasarkan hal tersebut maka pilar Infrastruktur menjadi faktor penguat Daya Saing daerah Kabupaten Takalar. Pilar infrastruktur itu sendiri terdiri dari Dimensi/indikator infrastruktur transportasi dan Dimensi infrastruktur air bersih dan kelistrikan.

Tabel II- 143 : Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2021

Indikator	Satuan	Tahun	
		2020	2021
Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor	Persen	7,22	7,22
Rasio panjang jalan kondisi baik dibanding total panjang jalan (tidak termasuk jalan tol)	Persen	54,77	54,46
Persentase rumah tangga berakses air minum layak	Persen	77,7	77,7
Besar persentase Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Persen	10,48	10,48
Rasio elektrifikasi	Persen	107,86	110,72
Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	**Angka**	**2.1667**	**2.9170**

Sumber : https://indeks-inovasi.brin.go.id/

Berdasarkan tabel II-143 dapat dilihat bahwa indeks data saing infrastruktur Kabupaten Takalar tahun 2021 sebesar 2.9170 atau meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 2.1667.

2.4.3 Indeks Inovasi Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa "pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah" dan "pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi". Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah adalah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerah perlu diberikan penghargaan/award dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di daerah. Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan diberikan amanat untuk melaksanakan Penilaian Inovasi Daerah yang ditetapkan sebagai salah satu Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya.

Tabel II- 144 : Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020-2021

No	Tahun	Kategori Kabupaten	Dasar Penetapan
1	2018	Belum Mengisi Data	Surat Badan Litbang Kemendagri No: 002.6/3/44/LITBANG tanggal 22 Agustus 2019
2	2019	Kurang Inovatif	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-445 Tahun 2019
3	2020	Kurang Inovatif	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100-4672 Tahun 2020
4	2021	Inovatif	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 002.6-5848 Tahun 2021

Sumber : https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id.

2.5 Evaluasi Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Takalar 2021

Kinerja pemenuhan SPM Kabupaten Takalar diukur dari ketercapaian indikator pada masing-masing bidang urusan dan jenis pelayanan di Kabupaten Takalar selama periode 2017 sampai dengan 2021.

Tabel II- 145 : Capaian Target Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pelayanan Dasar Pendidikan						
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						
Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartispasi dalam PAUD	100%	55,12	73,87	48,11	52,03	61,01
Pendidikan Dasar						
Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	95,30	91,77	88,76	84,03	83,39
Pendidikan Keseteraan						
Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	N/A	4,10	89,52	7.74	37,86
Pelayanan Dasar Kesehatan						

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	104,67	99,21	95,62	94,48	104,13
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	98,46	100,66	94,64	100,19	96,77
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan kesehatan	100%	103,05	100,66	100,00	95,65	109,69
Pelayanan Kesehatan Balita						
Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	48,64	53,75	68,65	57,52	80,39
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar						
Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	82,98	86,26	86,49	84,67	89,27
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif						
Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	9,24	14,85	27,51	14,42	52,03
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut						
Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	51,04	69,37	49,52	54,27	60,00
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	47,25	39,63	52,24	5,27	22,97
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus						
Jumlah Warga Negara penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan kesehatan		29,42	31,89	52,24	5,27	85,22
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat						
Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	0,00	15,04	70,19	110,97	68,35
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis						
Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis	100%	100,00	102,53	100,00	8,89	42,45

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
yang mendapatkan layanan kesehatan						
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeiciency Virus*)						
Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100,00	100,00	3,17	21,45	82,59
Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari						
Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	N/A	N/A	N/A	24	62,56
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	N/A	N/A	N/A	0,6	6.416
Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman						
Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana						
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100%	N/A	N/A	100	N/A	0
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah						
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah	100%	N/A	N/A	32,59	N/A	0
Pelayanan Dasar Sosial						
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti						
Jumlah warga negara yang penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	N/A	86,69	N/A	15,3	40,21
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti						
Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	N/A	85,7	N/A	0	0
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti						

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Capaian SPM				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	N/A	N/A	N/A	0	100
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti						
Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	40	48	72	61,96	63
Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.						
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	N/A	18,32	N/A	11,8	N/A
Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat						
Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	4,58	4,54	N/A	0,011	93,26
Pelayanan Informasi Rawan Bencana						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	N/A	N/A	N/A	79,79	0
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	N/A	0,01	N/A	86,17	0
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	N/A	N/A	N/A	3,83	100
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran						
Jumlah Laporan dan Pengaduan Masyarakat akan Bencana Kebakaran	100%	N/A	N/A	N/A	0,00022	98,25

Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar, 2021

2.6 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs yang merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*/MDGs) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;
10. Berkurangnya Kesenjangan;
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan;
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
13. Penanganan Perubahan Iklim;
14. Ekosistem Lautan;
15. Ekosistem Daratan;
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan daerah memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat provinsi dan kabupaten. Target-target SDGs di tingkat kabupaten telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 - 2022 dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Jumlah total indikator TPB/SDG's yang dipetakan berdasarkan kewenangan kabupaten adalah sebanyak 190 (Seratus Sembilan Puluh) indikator yang terangkum dalam 17 Tujuan (Goals). Untuk capaian terhadap target Provinsi pada tahun 2021, terdapat 52 (lima puluh dua) indikator yang tidak dapat diperoleh datanya, 81 (delapan puluh satu) indikator memenuhi target provinsi dan 57 (lima puluh tujuh) indikator yang capaiannya dibawah target provinsi. Sementara untuk capaian tahun 2021 terhadap target Kabupaten, 28 (dua puluh delapan) indikator mencapai target Kabupaten dan 118 (seratus delapan belas) indikator tidak mencapai target.

Tabel II- 146 : Capaian Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2020

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
Tujuan 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun											
1.	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	Menurun menjadi 7 – 8 %	7	8.35	9.24	9.00	8.70	8.44	8.25	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	Meningkat menjadi 95%	75	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3	Proporsi peserta Program	%	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja	71.51	87.87	86.87	62	88.52	88.52	160.82	Dinas Sosial, Pemberdayaan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.		formal; 3,5 juta pekerja informal								Masyarakat Desa
4	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	%	Meningkat menjadi 17,12%	100	65	N/A	2.06	45.08	114.76	40.21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa
5	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Jiwa	Menurun menjadi 2,8 juta	348.694	26.38 (Target dalam %)	N/A	13.975	81.170	75.365	29.021	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
6	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	Meningkat menjadi 70%	93	95.5	98.5	100.7	91,8	100.2	100.0	1. inas Kesehatan 2. inas PPKBPPPA
7	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	Meningkat menjadi 63%.	95	100	94	97	99	99	94.05	Dinas Kesehatan
8	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS)	%	Meningkat menjadi 65%	73.87	68.72	68.74	65.15	67.22	68.81	107.66	Dinas PPKBPPPA

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.										
9	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	Meningkat menjadi 100%	100	88.01	55,87	59,80	64,69	N/A	63.97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
10	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	Meningkat menjadi 100%	85.80	65.58	72,97	74,67	91.51	N/A	56.48	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
11	Angka Partisipasi Murni (APM)	%	Meningkat menjadi 94,78%	N/A	100	97.89	92.4	91.66	91.66	71,79	Dinas Pendidikan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	SD/MI/sederajat.										dan Kebudayaan
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	%	Meningkat menjadi 82,2%	N/A	95	70.56	73.2	72.34	72.34	66,82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
13	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	Meningkat menjadi 77,4%.	87.37	100	N/A	63,58	85,61	100	92,53	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	%	Meningkat menjadi 100%	PM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
15	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per Satuan Pddk	Menurun	PM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.24	Badan Penanggulan Bencana Daerah
16	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.		Meningkat menjadi 39 daerah	PM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Badan Penanggulan Bencana Daerah
17	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Jiwa	Meningkat menjadi 151 ribu	N/A	65	N/A	18,32	23.64	86.40	251	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa
18	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Jiwa	Meningkat menjadi 81,5 ribu	N/A	65	N/A	18,32	23.64	86.40	N/A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa
19	Jumlah daerah bencana	Lokasi	Meningkat menjadi 450		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	Dinas Sosial, Pemberdaya

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)										an Masyarakat Desa
20	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indeks Risiko	Menurun menjadi 118,6		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa
21	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		Menurun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80.460	Badan Penanggulan Bencana Daerah
22	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat	Dokumen	Ada	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ada	Badan Penanggulan Bencana Daerah

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	nasional dan daerah.										
23	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa
24	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	%	Meningkat		Pendidikan 20% Kesehatan 10%	N/A	**Pend.** 27.55 **Kes.** 18.86	**Pend.** 28.99 **Kes.** 17.15	**Pend.** 24.19 **Kes.** 22.51	29.78	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Tujuan 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan											

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
24	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*).	%	Menurun	6.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.00	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan
25	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	Menurun menjadi 17%	18.5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.52	Dinas Kesehatan
26	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	Menurun	3.80	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	28.00	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
27	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	Menurun menjadi 8,5 %	7.71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	143.98	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan
28	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	Menurun	21.59	N/A	N/A	6,9	8,96	N/A	8.31	Dinas Kesehatan
29	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	Menurun menjadi 28%	31.5	N/A	N/A	N/A	15,58	N/A	9.34	Dinas Kesehatan
30	Prevalensi malnutrisi	%	Menurun	7.50	N/A	N/A	N/A	6,49	N/A	1,21	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	(berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.										
31	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	Menurun menjadi 28%	26.5	N/A	N/A	4,35	7,97	N/A	96,04	Dinas Kesehatan
32	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	Meningkat menjadi 50%	80	N/A	26.3	50.4	65.0	78.2	8.30	Dinas Kesehatan
33	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH Kg/ Kapita/ Tahun	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5	88.3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.600,00	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		kg/kapita/tahun								
34	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rupiah/ Tenaga Kerja	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	86.65	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
Tujuan 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia											
35	Angka Kematian Ibu (AKI).	Kematian Ibu /100.000 KH	Menurun menjadi 306	91	91	70	138	125	103	190.38	Dinas Kesehatan
36	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya	%	Meningkat menjadi 95%	97	95.5	98.5	100.7	96.3	100.2	100.0	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.										
37	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	Meningkat menjadi 85 %	97	95.5	98.5	100.7	96.3	100.2	100.0	Dinas Kesehatan
38	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Kematian Bayi/1000 KH	Menurun	5	1.75	0	0	1	0	3.63	Dinas Kesehatan
39	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000	Kematian Neonatal/1000 KH	Menurun	3	3.50	5	2,93	4,48	4,5	3.81	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	kelahiran hidup.										
40	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Kematian Bayi/1000 KH	Menurun menjadi 24	5	4.37	1.0	1.0	0.9	0.5	3.81	Dinas Kesehatan
41	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	Meningkat menjadi 95%	95.5	100	94	97	99	99	0.00	
42	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	%	Menurun menjadi <0,5%	< 0.5	< 1	0,000	0,007	0,003	0,008	1.09	Dinas Kesehatan
42	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Kasus/ 100.000 Penduduk	Menurun menjadi 245	217	269	89.05	102.40	233.35	85.73	176.76	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
43	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Kasus/ 1000 Orang	Menurun	< 1	1	0.14	0.10	0.05	0.05	0.01	Dinas Kesehatan
44	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jiwa	Menurun	81	N/A	N/A	31	34	N/A	0.00	Dinas Kesehatan
45	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	%	Menurun menjadi 5,4%	7.04	N/A	N/A	0.19	N/A	N/A	325.63	Dinas Kesehatan
46	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	Menurun menjadi 24,3%	18.08	N/A	N/A	1805	5.82	N/A	6.78	Dinas Kesehatan
47	Prevalensi obesitas pada penduduk	%	Menurun	10.11	N/A	N/A	3,9	5,1	N/A	3.40	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	umur ≥18 tahun.										
48	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	%	Menurun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.11	Dinas Kesehatan
49	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	%	Menurun menjadi 0,02%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dinas Kesehatan
50	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Liter/ Kapita/ Tahun	Menurun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dinas Kesehatan
51	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya	%	Meningkat menjadi 66%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dinas Kesehatan Dinas PPKBPPA

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.										
5	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	Meningkat menjadi 65%	73.87	68.72	68.74	65.15	67.22	68.81	107.66	Dinas PPKBPPA

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
52	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	%	Meningkat menjadi 23,5%		16.4	14.9	14.29	14.10	15.31	70.60	Dinas PPKBPPA
53	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	%	Menurun menjadi 38							46.71	Dinas PPKBPPA
54	Total Fertility Rate (TFR).	%	Menurun menjadi 2,28	2.15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	143.25	Dinas PPKBPPA
55	*Unmet need* pelayanan kesehatan.	%	Menurun menjadi 9,91%	PM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.05	Dinas PPKBPPA
56	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi	Per 1000 Penduduk	Meningkat	950	N/A	N/A	86.75	103.01	N/A	23.99	Dinas PPKBPPA

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.										
57	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	Meningkat menjadi minimal 95%	99	N/A	N/A	86.78	103.01	N/A	94.09	Dinas Kesehatan
58	Proporsi kematian akibat keracunan.	%	Menurun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dinas Kesehatan
59	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	%	Menurun	PM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dinas Kesehatan
60	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	Meningkat	93	N/A	N/A	100	100	N/A	100	Dinas Kesehatan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
61	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Per 100.000 Penduduk	Meningkat		N/A	N/A	1,852	N/A	N/A	3.93	Dinas Kesehatan
Tujuan 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua											
62	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	%	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
63	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	Meningkat menjadi 84,2%	N/A	N/A	N/A	78.82	N/A	N/A	77.82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
64	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	Meningkat menjadi 81%	N/A	N/A	N/A	67.78	N/A	N/A	64.44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
65	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	%	Meningkat menjadi 114,09%	N/A	100	110.64	114.68	111.07	109.98	71.76	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
66	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	%	Meningkat menjadi 106,94%	N/A	95	73.35	79.77	80.82	81.33	65.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
67	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	%	Meningkat menjadi 8,8 tahun	8.42	7.40	6.77	6.91	7.18	7.29		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
68	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	%	Meningkat menjadi 77,2%		75	18.00	25.22	25.22	31.39	47.17	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
69	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	%	Meningkat	PM	37.86	N/A	15.38	32.07	32.14		Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
70	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA	Rasio Perempuan/laki-laki	Meningkat	89.23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.										
71	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	Meningkat menjadi 96,1%	96.21	83.52	84.69	87.57	89.11	87.33	0.75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan BPS Takalar
72	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	Meningkat	96.21	83.52	84.69	87.57	89.11	87.33	110.36	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
73	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a)	%	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17.15	Dinas Pendidikan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).										dan Kebudayaan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
74	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%	Meningkat	SD 57.16 SMP 52.44 SMA 83.77 SMK 82.08 SLB 59.54	SD N/A SMP N/A SMA N/A SMK N/A SLB N/A	SD N/A SMP N/A SMA N/A SMK N/A SLB N/A	SD N/A SMP N/A SMA N/A SMK N/A SLB N/A	SD N/A SMP N/A SMA N/A SMK N/A SLB N/A	SD N/A SMP N/A SMA N/A SMK N/A SLB N/A	SD N/A SMP N/A SMA N/A SMK N/A SLB N/A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan											
75	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	bertambah sebanyak 16	7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	Dinas PPKBPPA
76	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64	%	Menurun	0.63	0.003	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	Dinas PPKBPPA

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
77	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	%	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	0.0007	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,00	Dinas PPKBPPA
79	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	Meningkat menjadi 70%	92	100	100	100	100	100	0,00	Dinas PPKBPPA

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
80	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	Menurun	0.63	15.56	2.7	2.06	1.53	N/A	0.00	Dinas PPKBPPA
81	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Usia	Meningkat menjadi 21 tahun	24	21.37	N/A	28.22	19.75	15.09	0.00	Dinas PPKBPPA
82	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific	Usia	Menurun menjadi 38 tahun							0.56	Dinas PPKBPPA

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	Fertility Rate/ASFR).										
83	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	%	Meningkat	12.8	30	26.66	26.66	26.66	26.66	21.39	Dinas PPKBPPA
84	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	%	Meningkat	43.4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dinas PPKBPPA Cek BPS
85	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan	%	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PPKBPPA

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.										
86	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	Menurun menjadi 9,9%	13.46	N/A	16.76	15.79	17.27	16.31	14,47	Dinas PPKBPPA
87	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	Meningkat menjadi 85%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.13	Dinas PPKBPPA
88	Proporsi individu yang menguasai/me	%	Meningkat	78	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80.05	Dinas Komunikasi dan Informasi

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	miliki telepon genggam.										
Tujuan 6 : Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan											
89	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	Meningkat menjadi 100%	86.28	88.01	55,87	59,20	63,00	N/A	63.97	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
90	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	M^3/detik	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	11.509	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
91	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan	%	Meningkat menjadi 100%	86.28	88.01	55,87	59,20	63,00	N/A	76.45	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	sumber air minum aman dan berkelanjutan.										Ruang (PUPR) Dinas Kesehatan
92	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	Meningkat	PM	N/A	N/A	71,05	73,25	N/A	N/A	
93	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	Meningkat menjadi 100%	91.02	65.58	72,97	74,67	91.51	N/A	77.87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dinas Kesehatan
94	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis	Desa	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	3.047	100 desa/ kelurahan	0	0	0	0	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	Masyarakat (STBM).										Dinas Kesehatan
95	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa	Meningkat	2.250	100	41	51	57	100	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dinas Kesehatan
96	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
97	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	%	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
98	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks Kulaitas Air	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
99	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Insentif	Ada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
100	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dokumen	Ada	RPDAST	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
101	Jumlah jaringan informasi sumber daya	Jaringan Informasi	8 WS	21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	air yang dibentuk.										Hidup dan Pertanahan
102	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Wilayah Sungai	10 WS	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
103	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiatan	Ada	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Tujuan 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua											
96	Bauran energi terbarukan.	%	10-16%	22.99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
97	Intensitas energi primer.	SBM	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	14.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Tujuan 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua											
98	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	Meningkat	PM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS Dinas Komunikasi dan Informasi
99	PDB per kapita.	Juta/ Kapita	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	45.6	38.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	BPS Dinas Komunikasi dan Informasi
100	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per	%	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	orang bekerja per tahun.										
101	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
102	Persentase tenaga kerja formal.	%	51	41.26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
103	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	Meningkat	84.93	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38.32	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
104	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	25	30	N/A	10,1	4	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
105	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rupiah/ Jam	Meningkat	PM	N/A	N/A	16.000	17.714	N/A	19.787,73	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
106	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	%	Menurun	6.5	3.0	4.93	3.88	4.13	N/A	4.36	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
107	Tingkat setengah pengangguran.	%	Menurun	PM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	59.80	Dinas Penanaman Modal,

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
											Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
108	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	Meningkat	40.91	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	243.33	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
109	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	8	1.02	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
110	Jumlah wisatawan mancanegara.	Wisatawan	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)		N/A	N/A	473	376	N/A	N/A	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
111	Jumlah kunjungan	Kunjungan *Persen	Meningkat		80.08*	N/A	58*	57*	108*	2.289	Dinas Pariwisata,

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	wisatawan nusantara.										Pemuda dan Olahraga
112	Jumlah devisa sektor pariwisata.		Meningkat	2.062.000	80.08	35.08	54	100.9	58	241.135.191	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
113	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Jiwa *Persen	Meningkat	18.29*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.01	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
114	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	ATM per 100.000 Pddk Dewasa	Meningkat	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.64	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
115	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	km	Menurun (mendekat)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	Dinas Penanaman Modal, Perijinan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
											Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
116	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	%	Meningkat	31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	53.18	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
Tujuan 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi											
118	Jumlah dermaga penyeberangan.	Unit	Meningkat		1	1	1	1	1	11	Dinas Perhubungan
119	Jumlah pelabuhan strategis.	Unit	24 pelabuhan (skala nasional)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Dinas Perhubungan
120	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	%	Meningkat								Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
121	Laju pertumbuhan	%	Lebih tinggi dari		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi,

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	PDB industri manufaktur.		pertumbuhan PDB								UMKM dan Perdagangan
122	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	%	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
123	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	%	Meningkat			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
124	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	%	Meningkat			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
125	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	%	Meningkat			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Bappelitbangda

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
126	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	%	Meningkat			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Komunikasi dan Informasi
127	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	Meningkat			N/A	N/A	N/A	N/A	80.05	Dinas Komunikasi dan Informasi
128	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	Meningkat			N/A	N/A	N/A	N/A	77.92	Dinas Komunikasi dan Informasi
Tujuan 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara											
129	Koefisien Gini.		Meningkat								Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa
130	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis	%	Menurun menjadi 7-8%		8.35	9.24	9.00	8.70	8.44	8.25	Dinas Sosial, Pemberdayaan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										Masyarakat Desa
131	Jumlah desa tertinggal.	Desa	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)			N/A	N/A	N/A	N/A	2.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa
132	Jumlah Desa Mandiri.	Desa	Meningkat paling sedikit 2.000 desa			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa
133	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan	%	Menurun			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	penyandang difabilitas.										
134	Indeks Kebebasan Sipil.	Indeks	Meningkat menjadi 87			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
135	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan	Ada			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Satuan Polisi Pamong Praja
136	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	71.51	87.87	86,87	62	88.52	88.52	160.82	Dinas PUPR

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
Tujuan 11 : Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan											
137	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	%	3,7 juta rumah tangga	PM	0.21	N/A	1 : 5	1 : 5	1 : 5		Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans
138	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Kawasan	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUPR
139	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Metropolitan	5 metropolitan (skala nasional)	PM	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUPR

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
140	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Lembaga	Ada		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUPR
141	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.		Ada			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PUPR
142	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per 100.000 Orang	Menurun		70	N/A	4	0	0	1.29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
143	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	%	Menurun menjadi 30%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	9.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
144	Jumlah sistem peringatan dini	Unit	Ada		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Penanggulan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	cuaca dan iklim serta kebencanaan.										gan Bencana Daerah
145	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	Meningkat menjadi 80%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.73	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
146	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	Ada		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan											
147	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
148	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Ton	20 ton per hari (skala nasional)		4.22	N/A	24	27	32	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
149	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Perusahaan	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
150	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Produk	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
151	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Fasilitas	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Tujuan 13 : Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya											

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
152	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	Ada		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
153	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Per 100.000 Orang	Menurun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tujuan 15 : Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati											
154	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Hektar	5,5 juta ha (skala nasional)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
155	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan
Tujuan 16 : Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan											
156	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Kasus	Menurun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13.00	Satuan Polisi Pamong Praja
157	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Per 100.000 Penduduk	Menurun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Satuan Polisi Pamong Praja
158	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	Menurun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.03	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
159	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97.97	Satuan Polisi Pamong Praja
160	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	%	Menurun		0.003	0,03	0,03	0,03	0,03	0	Dinas PPKBPPA
161	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan	%	Menurun		100	100	100	100	100	62.38	Dinas PPKBPPA

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	anak perempuan.										
162	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	%	Menurun		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas PPKBPPA
163	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Indeks	Meningkat menjadi 4,0		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Komunikasi dan Informasi
164	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	%	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	36.11	Badan Pengelola Keuangan Daerah

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
165	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	%	Meningkat menjadi 60%		WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	Badan Pengelola Keuangan Daerah
166	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah	%	Meningkat menjadi 50%		N/A	N/A	60,41	76,88	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan Daerah

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).										
167	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	Meningkat menjadi 80%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	44.56	Sekretariat Daerah
168	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	Meningkat menjadi 45%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49.49	Sekretariat Daerah

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
169	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	%	Meningkat		30	26.66	26.66	26.66	26.66	26.67	Dinas PPKBPPA
170	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12.00	Dinas PPKBPPA
171	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya		Meningkat		0.75	N/A	90.82	95.26	993.20	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										
172	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	%	Meningkat menjadi 77,4%		15	N/A	N/A	100	100	0.00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
173	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	%	Meningkat menjadi 85%		0.75	N/A	N/A	64.48	993.20	99.01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
174	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur	Sertifikat	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Komunikasi dan Informasi

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.										
175	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan	Ada		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Satuan Polisi Pamong Praja
Tujuan 17 : Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan											
176	Total pendapatan	Rupiah	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11.06	Badan Pengelola

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										Keuangan Daerah
177	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	%	Di atas 12%		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.67	Badan Pengelola Keuangan Daerah
178	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.		Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.62	Badan Pengelola Keuangan Daerah
179	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	% Mbps	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dinas Komunikasi dan Informasi

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
			(10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi								
180	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	%	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00	Dinas Komunikasi dan Informasi
181	Proporsi individu yang menggunakan internet.	%	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	77.92	Dinas Komunikasi dan Informasi
182	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan	Paket	Ada		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu, Nakertrans

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	Badan Usaha (KPBU).										
183	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Rupiah	Ada		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Pengelola Keuangan Daerah
184	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	%	Meningkat			N/A	N/A	N/A	N/A	1.86	Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
185	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	%	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.35	Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar
186	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Indikator	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.00	Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar
187	Persentase indikator SDGs terpilah yang	Indikator	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian

No.	Tujuan / Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Target Kabupaten	Capaian TPB/SDGs					OPD Penanggung Jawab
						2017	2018	2019	2020	2021	
	relevan dengan target.										dan Pengembangan Daerah
188	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)		Ada		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
189	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Kunjungan	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	27	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
190	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	%	Meningkat		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.81	Badan Pusat Statistik Kabupaten Takalar

2.7 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kinerja Pemerintah Daerah terlihat dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja ini diukur dengan menilai aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum.

Jumlah indikator kinerja kunci (IKK) perangkat daerah yang diukur sebanyak 254 (dua ratus lima puluh empat) dengan capaian 24% (61 Indikator) melampaui target RPJMD, 43% (110 indikator) belum mencapai target, 11,42% (29 indikator) sesuai target dan 21.26% (54 indikator) data tidak tersedia (N/A)

Capaian indikator kinerja kunci secara lengkap dapat dilihat pada tabel II-147.

Tabel II- 147 : Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Takalar

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,37	6,66	6,87	-0.61	5,05	7.84	*Belum Tercapai*
2	Laju inflasi.	%	7.37	6.65	N/A	2.55	N/A	3.63	N/A
3	Angka kemiskinan	%	9.24	9.00	8.70	8.44	8.25	8.35	*Belum Tercapai*
4	PDRB per kapita	Juta Rp	29,273	31,507	34,01	33,97	36,63	38.75	*Belum Tercapai*
5	Indeks Gini	Angka	0.351	0.358	0.351	0.356	0,368	0.351	*Belum Tercapai*
Kesejahteraan Sosial									
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	65.48	66.67	66.94	67.31	67,72	67.20	*Belum Tercapai*
2	Angka Melek Huruf	Angka	84.69	87.57	89.11	87.33	88,44	83.52	**Melampaui**
3	Angka Rata-Rata Lama	Tahun	6.77	6.91	7.18	7.29	7.49	7.40	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Sekolah								
4	Angka Harapan lama Sekolah	Tahun	12.21	12.22	12.25	12.41	12.42	14.62	*Belum Tercapai*
5	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	66.38	66.64	67.01	67.18	67.30	68.60	*Belum Tercapai*
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.93	3.88	4.13	N/A	3.93	3.0	**Melampaui**
7	Indeks Pendidikan	%	56.48	56.98	57.96	58.77	58,77	N/A	*Belum Tercapai*
8	Indeks Kesehatan	Angka	71.35	71.75	72.32	72.58	72,7	N/A	*Belum Tercapai*
9	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	86.76	87.24	87.29	87.56	87,45	N/A	*Belum Tercapai*
10	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	66.60	70.55	70.66	68.78	N/A	N/A	N/A
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	N/A	N/A	N/A	C	N/A	N/A	N/A
12	Nilai Sakip	Angka	CC	CC	CC	CC	N/A	BB	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
ASPEK PELAYANAN UMUM									
Pelayanan Urusan Pemerintahan Wajib									
Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Pendidikan									
Pendidikan dasar									
1	Angka Partisipasi Kasar PAUD	%	18.00	25.22	25.22	31.39	0	75	**Melampaui**
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	%	110.64	114.68	111.07	109.98	89,98	100	**Melampaui**
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	%	73.35	79.77	80.82	81.33	57,84	95	**Melampaui**
4	Angka Partispasi Murni SD/MI	%	97.89	92.4	91.66	91.66	71,79	100	**Melampaui**
5	Angka Partispasi Murni SMP/MTs	%	70.56	73.2	72.34	72.34	66,82	95	**Melampaui**
6	Angka Putus Sekolah SD/MI Sederajat	%	N/A	0,3%	0,3%	0,3%	N/A	0.05	*Belum Tercapai*
7	Angka Putus Sekolah	%	N/A	0,3%	0,4%	0,4%	N/A	0	*Belum*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	SMP/MTs Sederajat								*Tercapai*
8	Kondisi Fisik Bangunan Sekolah SD/MI Sederajat	%	N/A	76.48	77.10	77.10	N/A	70	*Belum Tercapai*
9	Kondisi Fisik Bangunan Sekolah SMP/MTs Sederajat	%	N/A	77.03	77.08	77.10	N/A	45	*Belum Tercapai*
10	Angka Kelulusan Sekolah SD/MI	%	99.26	100	N/A	N/A	94.79	100	*Belum Tercapai*
11	Angka Kelulusan Sekolah SMP/MTs	%	99.71	99.23	N/A	N/A	94.28	100	*Belum Tercapai*
12	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs	%	99.75	99.7	N/A	N/A	101.20	100	**Melampaui**
13	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/MA	%	124.33	97.91	107.53	N/A	N/A	100	*Belum Tercapai*
14	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI dan SMP/MTs	Sekolah Per Penduduk	1 : 147.7	1 : 146.9	1 : 147.2	1 : 147.5	1:142.2	1 : 152	*Belum Tercapai*
15	Rasio Guru Terhadap	Guru/Murid	1 : 12	1 : 22	1 : 13	1 : 13	1:12	20	*Belum*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Murid Sekolah SD								*Tercapai*
16	Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah SMP	Guru/Murid	1 : 13	1 : 14	1 : 13	1 : 13	1:12	N/A	*Belum Tercapai*
17	Rasio guru terhadap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA)	Guru/Siswa	1 : 14	1 : 15	1 : 14	1 : 14	1:14	N/A	*Belum Tercapai*
18	Rasio guru terhadap siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Guru/Siswa	1 : 13	1 : 15	1 : 14	1 : 14	1:13	N/A	*Belum Tercapai*
19	Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-Rata Sekolah Dasar	Guru/Murid Per Kelas	N/A	1:14	1:21	1:21	1:12	1 : 28	*Belum Tercapai*
Kesehatan									
1	Angka Kematian Neonatal (AKN)	Per 1000 KH	5	2,93	4,48	4,5	3,81	3.50	*Belum Tercapai*
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	1.0	1.0	0.9	0.5	3,81	4.37	*Belum Tercapai*
3	Angka Kematian Balita (AKABA)	Per 1000 KH	0	0	0.2	0	0.52	1.75	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
4	Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate)	Per 100.000 KH	70	138	125	103	190	0.00	*Belum Tercapai*
5	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	Per 1000 Balita	28.40	16.60	15.90	19.20	18.58	27.87	*Belum Tercapai*
6	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	12.00	*Belum Tercapai*
8	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0.007	0.007	0.007	0.013	0.013	0.04	*Belum Tercapai*
9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0.129	0.140	0.140	0.110	0,08	35	Belum Tercapai
10	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	0.27	0.35	0.36	0.31	0,26	185	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
11	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Nakes	%	98.5	100.7	96.3	100.2	96.77	95.5	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan								
12	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani	%	75.81	79.9	93.2	85.3	100	87	**Melampaui**
13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	94	97	99	99	86	100	*Belum Tercapai*
14	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	%	93.9	100.5	104.2	90.7	100	95	**Melampaui**
15	Non Folio AF Prateper 100.000 Penduduk	%	1.35	0	0.5	0	0	<2	**Melampaui**
16	Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	%	100	0	100	100	98,74	100	*Belum Tercapai*
17	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	%	11,09	15,47	15,49	5,52	13,45	100	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
18	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	%	78.04	52.33	58.96	58.10	48,19	100	*Belum Tercapai*
19	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	Per 100.000 Penduduk	89.05	102.40	233.35	85.73	176,76	269	*Belum Tercapai*
20	Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	%	4.17	4.05	4.01	7.97	6,11	5	*Belum Tercapai*
21	Proporsi Jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	%	78.04	52.33	58.96	58.10	11,55	100	*Belum Tercapai*
22	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	%	92.97	91.4	25.8	147.7	8,92	90	*Belum Tercapai*
23	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
24	Penderita Diare Yang Tertangani	%	N/A	67,44	48,04	36,6	14,41	100	*Belum Tercapai*
25	Angka Kejadian Malaria	Per 1000 Penduduk	0.14/ 1000	0.10/ 1000	0.05/ 1000	0.05/ 1000	0.01/ 1000	1/ 1000	*Belum Tercapai*
26	Proporsi Anak Balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida	%	N/A	100	100	100	100	15	**Melampaui**
27	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Diobati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat	%	N/A	100	100	100	100	100	Sesuai
28	Prevalensi HIV/AIDS (persen) Dari Total Populasi	%	0,000	0,007	0,003	0,008	0,01	< 1	**Melampaui**
29	Cakupan Kunjungan Bayi	%	94.70	97.70	100.30	97.50	98,55	93	**Melampaui**
30	Cakupan Puskesmas	%	166.7	166.7	166.7	166.7	170	100	**Melampaui**
31	Cakupan Pembantu Puskesmas	%	68,42	72,37	65,79	64,47	53	100	*Belum Tercapai*
32	Cakupan Kunjungan Ibu	%	98.49	99.20	95.70	94.50	104,13	95.5	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Hamil K4								
33	Cakupan Pelayanan Nifas	%	95.99	98.80	96.60	98.30	95,87	98	*Belum Tercapai*
34	Cakupan Neonatal Dengan Komplikasi Yang Ditangani	%	36.50	51.30	56.40	60.30	100	82	**Melampaui**
35	Cakupan Pelayanan Anak balita	%	48.60	53.70	78.50	80.00	94,19	91	**Melampaui**
36	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6–24 Bulan Keluarga Miskin	%	N/A	15.10	25.40	48.60	N/A	77	*Belum Tercapai*
37	Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	%	83.00	86.30	86.50	57.50	134,55	100	**Melampaui**
38	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
39	Cakupan Pelayanan	%	100	100	100	100	50	100	*Belum*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)								*Tercapai*
40	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	%	45.57	47.09	52.58	54.77	53.64	0.57	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
2	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk	Km/ juml penddk	2.62	2.55	2.53	2.51	0,24	0.002	**Melampaui**
3	Persentase Jalan Kabupaten Dalam	%	45.57	47.09	52.58	54.77	53.64	46.65	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)								
4	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	72,97	74,67	91.51	74.36	76.48	65.58	**Melampaui**
5	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	N/A	73,10	74,04	74.04	74.04	72.12	**Melampaui**
6	Rasio Jaringan Irigasi	%	N/A	73,10	74,04	74.04	74.04	33.15	**Melampaui**
7	Persentase Penduduk Berakses Air Minum	%	55,87	59,20	63,00	77.58	76.65	88.01	*Belum Tercapai*
8	Rasio Bangunan Ber- IMB Per Satuan Bangunan	Per Satuan Bangunan	8,8	10,07	11,12	11,95	12,59	0.11	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman									
1	Rasio Rumah Layak Huni	Per satuan rumah	N/A	1:05	1:05	1:05	1:02	0.21	Terdapat perbedaan satuan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
									antara target dan hasil
2	Rasio Permukiman Layak Huni	Rasio	N/A	1 : 14	1:39	1:39	1:39	0.74	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
3	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	N/A	88,31	88,34	89,15	89,15	0.82	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
4	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni yang Terjangkau	%	N/A	N/A	88,34	89,15	100	N/A	N/A
5	Persentase Permukiman yang Tertata	%	N/A	48,06	64,22	64,22	64,2	N/A	N/A

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
6	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	N/A	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	N/A	N/A
7	Persentase Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan	%	N/A	16,40%	16,40%	16,40%	16,40%	N/A	N/A
8	Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	%	N/A	1,87%	1,85%	1,85%	0,31%	N/A	N/A
9	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman yang Didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	%	N/A	25,40%	33,33%	34,38%	34,38%	N/A	N/A
Ketentraman. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat									
1	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat	Rasio	N/A	1.5	1.4	1.4	1.4	200	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	N/A	93.75	95.58	93.25	32.65	97.22	*Belum Tercapai*
3	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	N/A	100	100	100	100	86	**Melampaui**
4	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	N/A	81.08	93.75	100.00	98.25	84.44	**Melampaui**
5	Persentase Penegakan PERDA	%	N/A	93.75	95.58	93.25	93.26	97.22	*Belum Tercapai*
Sosial									
6	Persentase PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial	%	N/A	86,70	63,66	86.29	98.21	26.38	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
7	Persentase PMKS Yang Tertangani	%	N/A	86,70	63.66	86.29	100	33.5	**Melampaui**
8	Persentase PMKS skala Kabupaten Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	%	N/A	94,6	63.66	86.29	98.21	1.95	**Melampaui**
9	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan	%	N/A	6	6	6	6	6	Sesuai
10	Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	N/A	18,32	23.64	86.40	87.70	65	**Melampaui**
11	Persentase Korban Bencana Yang	%	N/A	4	0	0	0	70	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Dievakuasi Dengan Mengunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap								
12	Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	%	N/A	2,06	45.08	114.76	100	65	**Melampaui**
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
Tenaga kerja									
1	Angka Sengketa Pengusaha – Pekerja	%	N/A	14.70	0.71	0.71	0.71	25.42	*Belum Tercapai*
2	Besaran Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	N/A	100	0	0	100	N/A	*Belum Tercapai*
3	Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	%	N/A	72	392	52	271,87	94.5	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
4	Keselamatan dan Perlindungan Perusahaan	%	N/A	N/A	N/A	N/A	3.97	3.15	**Melampaui**
5	Besaran Pekerja/Buruh yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	%	86,87	62	88.52	88.52	100	87.87	**Melampaui**
6	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	%	N/A	0,77	0,51	0,51	6,03	18	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
7	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	%	N/A	15.38	32.07	32.14	22,42	30	*Belum Tercapai*
7	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	N/A	15.38	32.07	32.14	69,57	37.86	**Melampaui**
8	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan	%	N/A	42,18	33,86	73.23	300	100	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Pelatihan Berbasis Masyarakat								
9	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	%	N/A	15.38	32.07	32.14	0	100	*Belum Tercapai*
10	Rasio Lulusan S1/S2/S3	%	N/A	6.07	5.57	1.99	1.57	N/A	**Melampaui**
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	%	N/A	57,43	50.00	60.00	4,83	40	*Belum Tercapai*
2	Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPRD	%	26.66	26.66	26.66	26.66	26.66	30	*Belum Tercapai*
3	Rasio KDRT	Per Satuan Rumah Tangga	0,03	0,03	0,03	0,03	0,003	0.003	Sesuai

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
4	Persenatse Jumlah Tenaga Kerja Dibawah Umur	%	N/A	14,73	22,8	22,8	0	N/A	*Belum Tercapai*
5	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	N/A	48.62	43.93	68.62	104,32	70.17	*Belum Tercapai*
6	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
7	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih di Puskesmas Mampu Tatalaksana	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Ktp/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit								
8	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	%	100	0	0	0	0	100	*Belum Tercapai*
9	Indeks Kesetaraan Gender	Angka							
Pangan									
1	Ketersediaan Pangan Utama	%	N/A	200.8	210.1	250.4	250	0.03	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
2	Ketersediaan Energi Perkapita	%	N/A	3.803	4.078	4.115	4100	43.53	Terdapat perbedaan satuan antara target dan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
									hasil
3	Ketersediaan Protein Perkapita	%	N/A	85.87	90.94	87.35	86	43.53	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
Pertanahan									
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	N/A	43.60	48.81	56.86	55.01	0.23	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara dan Izin Lokasi	%	0	0	0	0	0	11	*Belum Tercapai*
Lingkungan Hidup									
1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten Takalar	Ada/Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Ada	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
2	Terintegrasinya RPPLH Dalam Rencana Pembangunan Kabupaten Takalar	Sudah / Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Belum	Ada	*Belum Tercapai*
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Indeks Pencemaran	Tidak Terukur	Tidak Terukur	Tidak Terukur	Tidak Terukur	69,51	Baik (0≤IP≤1.0)	*Belum Tercapai*
4	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara	%	N/A	82.35	86.05	85.66	85,69	90.99	*Belum Tercapai*
5	Pembinaan Dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah	%	N/A	20	33.3	30	100	50	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
6	Peningkatan Kapasitas Dan Sarana Prasarana Pejabat – Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten	Orang	0	0	0	0	0	4	*Belum Tercapai*
7	Timbulan Sampah Yang Ditangani,	M^3	N/A	118.095,81	127.456,10	136.476,37	214.132	9.07	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
8	Jumlah Sampah Yang Terkurangi Melalui 3R	%	N/A	24	27	32	8.63	4.22	**Melampaui**
9	Persentase Cakupan Area Pelayanan	%	N/A	26.68	29.16	37.18	56.17	49.17	**Melampaui**
10	Jumlah Sampah Yang Ditangani.	%	N/A	46.26	43.91	46.49	72.13	30	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
11	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	Unit	1	1	1	1	1	1	Sesuai
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Rasio Penduduk Ber – KTP Per Satuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	N/A	N/A	1.000	1.000	1000	0.85	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	Per 1000 Bayi	N/A	N/A	987.37	993.20	992,83	0.75	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
3	Rasio Pasangan Berakte Nikah	Per 1000 Pasangan Nikah	N/A	N/A	213.95	277.40	344,49	0.15	Terdapat perbedaan satuan antara

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
									target dan hasil
4	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Sudah/Belum	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sesuai
5	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	N/A	N/A	100	100	100,02	100	**Melampaui**
6	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	%	N/A	N/A	100	100	99,71	15	**Melampaui**
Pemberdayaan Masyarakat dan desa									
1	Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang Baik	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
2	Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	%	100	100	100	100	100	1	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
3	Rata – rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah Kelp. Binaan	1	1	1	1	1	1	Sesuai
4	Persentase LPM Berprestasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	13	N/A
5	Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
6	Persenatse Posyandu Aktif	%	20,76	27,3	21,3	35,3	100	100	Sesuai
7	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	38.50	N/A
Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana									
1	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang Berperan Aktif dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB	%	20,76	27,3	21,3	35,3	57,14	7.1	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	2.8	2.6	2.6	8.5	2,86	4.3	*Belum Tercapai*
3	Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang Mengatur tentang Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Penduduk	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	3	*Belum Tercapai*
4	Jumlah Sektor yang Menyepakati dan Memanfaatkan data Profil (Parameter dan Proyeksi Penduduk) Untuk Perencanaan dan	Sektor	1	7	8	8	1	9	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Pelaksanaan Program Pembangunan								
5	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang Melakukan Pendidikan Kependudukan	Institusi	N/A	1	1	1	0	N/A	*Belum Tercapai*
6	Rata – rata Jumlah Anak Per Keluarga	%	1.50	1.50	1.48	1.48	109.68	1.35	**Melampaui**
7	Rasio Akseptor KB	Per 1000 PUS	687.4	651.5	672.2	688.1	688.1	68.42	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
8	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi	%	68.74	65.15	67.22	68.81	67,82	68.72	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Perempuan Menikah Usia 15 – 49								
9	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan Usia 15-19) per 1.000 Perempuan Usia 15 – 19 Tahun (ASFR 15 – 19)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	2,41	16.24	*Belum Tercapai*
10	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	%	2.7	2.06	1.53	N/A	22,94	15.56	**Melampaui**
11	Cakupan PUS Yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	16.76	15.79	17.27	16.31	14,57	N/A	*Belum Tercapai*
12	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	14.9	14.29	14.10	15.31	16.78	16.4	**Melampaui**
13	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi	%	16.7	19.21	20.62	20.11	14,42	17	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
14	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber - KB	%	70.96	81.39	79.08	82.21	82.21	72.46	**Melampaui**
15	Persentase Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber – KB	%	70.96	81.39	79.08	82.21	75.22	56.07	**Melampaui**
16	Persentase Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber – KB	%	33.44	71.62	70.54	79.47	79.47	36.44	**Melampaui**
17	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	%	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	1	*Belum Tercapai*
18	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	5.33	4	3	3	3.3	8.33	*Belum Tercapai*
19	Cakupan PKB/PLKB Yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Untuk Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Pengendalian Penduduk								
20	Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Yang Ber – KB Mandiri	%	82.4	81.23	50.14	82.03	82.42	82.50	*Belum Tercapai*
21	Rasio Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan	Per Desa	1	1	1	1	6,17	100	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
22	Cakupan Ketersediaan Dan Distribusi Alat Dan Obat Kontrasepsi Untuk	%	68.14	36.42	80.14	21.96	N/A	68.89	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Memenuhi Permintaan Masyarakat								
23	Persentase Faskes Dan Jejaringnya (Diseluruh Tingkatan Wilayah) Yang Bekerjasama Dengan BPJS Dan Memberikan Pelayanan KBKR Sesuai Dengan Standarisasi Pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
24	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di Setiap Desa	%	100	100	100	100	100	100	Sesuai
25	Persentase Remaja Yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	%	0	0	0	0	0	0	Sesuai
26	Cakupan Kelompok Kegiatan Yang Melakukan Pembinaan	%	47.9	90.27	96.61	96.48	100	43.9	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Keluarga Melalui 8 Fungsi Keluarga								
27	Cakupan Keluarga Yang Mempunyai Balita dan Anak Yang Memahami Dan Melaksanakan Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang Anak	%	38.98	28.22	19.75	96.48	37.66	29.72	**Melampaui**
28	Rata – rata Usia Kawin Pertama Wanita	Umur	N/A	28.22	19.75	15.09	N/A	21.37	*Belum Tercapai*
29	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	%	N/A	21.52	20	N/A	0.62	N/A	*Belum Tercapai*
Perhubungan									
1	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	Orang	N/A	95.200	85.630	74.500	325	3.750	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
2	Rasio Izin Trayek	Per 1000 Kendaraan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.141	N/A
3	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	Kendaraan	N/A	N/A	N/A	2.333	N/A	3.297	*Belum Tercapai*
4	Persentase Layanan Agkutan Darat	%	13.76	13.87	13.76	13.87	7,27	16	*Belum Tercapai*
5	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	%	N/A	N/A	N/A	2.20	0	45	*Belum Tercapai*
6	Pemasangan Rambu – rambu Kabupaten Takalar	%	N/A	N/A	N/A	325	5,6	94	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
7	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	Per Jumlah Kendaraan	N/A	N/A	N/A	N/A	1,59	13.897	*Belum Tercapai*
Komunikasi dan Informatika									
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	1.100	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Masyarakat Di Tingkat Kecamatan								
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0,7	10	*Belum Tercapai*
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
1	Persentase Koperasi Aktif	%	67.42	69.83	70.00	71.40	69,81	78	*Belum Tercapai*
2	Persentase UKM Non BPR/LKM Aktif	%	43.7	46.8	46.8	N/A	0	N/A	*Belum Tercapai*
3	Persentase Usaha Kecil Mikro dan Kecil	%	N/A	15,38	20	81,5	100	N/A	*Belum Tercapai*
Penanaman Modal dan Investasi									
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Investor	N/A	576	457	299	21	27	*Belum Tercapai*
2	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Takalar	Rupiah	N/A	246.860.774.242	136.721.498.908	117.14. 587.000	22.827.758.000	39.265.000.000	**Melampaui**
Kepemudaan dan Olah Raga									

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%	N/A	80.0	75.0	75.0	24,42	100	*Belum Tercapai*
2	Persentase Wirausaha Muda	%	N/A	73.0	60.0	60.0	34,29	100	*Belum Tercapai*
3	Cakupan Pembinaan Olahraga	%	61,53	100	100	100	75	63.54	**Melampaui**
4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	%	N/A	26.0	26.0	26.0	87,5	70	**Melampaui**
5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	%	N/A	100	100	100	23,6	5.37	**Melampaui**
6	Jumlah Atlet Berprestasi	Orang	N/A	N/A	15	N/A	28	15	**Melampaui**
7	Jumlah Prestasi Olahraga	Cabor	N/A	N/A	5	N/A	13	8	**Melampaui**
Statistik									
1	Buku "kabupaten dalam angka"	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	Buku "PDRB"	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
Persandian									
1	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi	%	0	0	0	0	2,86	21.05	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Dalam Perangkat Daerah								
Kebudayaan									
1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali	21	27	2	2	20	27	*Belum Tercapai*
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	30	30	28.20	28.20	15,91	30	*Belum Tercapai*
3	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Secara Terpadu	Cagar Budaya	N/A	0	11	11	7	N/A	*Belum Tercapai*
Perpustakaan									
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	0,003	0.12	*Belum Tercapai*
2	Koleksi Buku Yang Tersedia di Perpustakaan daerah	%	0.40	0.40	0.40	0,25	0,34	0.42	*Belum Tercapai*
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	Per 1000 Penduduk	1,655	1,655	1,655	1,655	0,17	1.66	*Belum Tercapai*
4	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan	Pustakawan	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	0,08	1	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Penilai yang Memiliki Sertifikat								
Kearsipan									
1	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menerapkan Arsip Secara Baku	%	N/A	N/A	82	82	20	76.45	**Melampaui**
Pelayanan Urusan pemerintahan Pilihan									
Pariwisata									
1	Kunjungan Wisata	%	N/A	58	57	108	0,003	80.08	*Belum Tercapai*
2	Lama Kunjungan Wisata	Hari Kunjungan	N/A	250	682	541	40.916	1.5	Terdapat perbedaan satuan antara target dan hasil
3	PAD Sektor Wisata	%	35.08	54	100.9	58	17,09	80.08	*Belum Tercapai*
Pertanian									

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	%	4.60	4.56	4.68	4.80	498,89	N/A	*Belum Tercapai*
2	Cakupan Bina Kelompok Petani	%	73.68	11.34	80.01	76.63	46,88	90	*Belum Tercapai*
Perdagangan									
1	Cakupan Bina Kelompok Pedagang Usaha Informal	%	N/A	N/A	N/A	N/A	0	60.22	*Belum Tercapai*
Perindustrian									
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	%	N/A	N/A	N/A	N/A	1,28	7.37	*Belum Tercapai*
Transmigrasi									
1	Persentase Tranmigrasi Swakarsa	%	N/A	1	1	1	100	N/A	*Belum Tercapai*
Kelautan dan Perikanan190.20									
1	Produksi Perikanan	%	188.66	312.37	243.03	189.21	47,32	190.20	*Belum Tercapai*
2	Cakupan Bina Kelompok Nelayan	%	36.67	37.01	37.50	35.00	24,71	40.67	*Belum Tercapai*

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
Penunjang Urusan									
Perencanaan Pembangunan									
1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
4	Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
Keuangan									

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	Opini	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	*Belum Tercapai*
2	Nilai SILPA	Rupiah	N/A	29.698.181.528,18	71.190.665.488,19	56.236.690.904,43	98.192.103.327	N/A	*Belum Tercapai*
3	Persentase SILPA terhadap APBD	%	2,63	5,86	5,16	2,85	6,48	10	*Belum Tercapai*
4	Persentase Program/Kegiatan yang Tidak Terlaksana	%	N/A	N/A	N/A	N/A	5,58	Prog ≤ 2 Keg ≤ 1	*Belum Tercapai*
5	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	%	N/A	27,55	28,99	24,19	22,19	20	**Melampaui**
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	%	N/A	18,86	17,15	22,51	16,36	10	**Melampaui**
6	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	%	N/A	BL = 45.80 BTL = 54.20	BL : 35,65 BTL : 45,7	BL : 38,92 BTL : 46,98	BL : 28,31 BTL : 46,14	BL : 60.00 BTL : 40.00	*Belum Tercapai*
7	Bagi Hasil Kabupaten/Kota dan Desa	%	N/A	11.17	11.4	13.4	0,3	0.74	**Melampaui**

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
8	Penetapan APBD		Perda Kab. Takalar Nomor 3 Tahun 2017 tentang APBD Tahun 2018 (Tanggal 18 Desember 2017);	Perda Kab. Takalar Nomor 5 Tahun 2018 tentang APBD Tahun 2019 (Tanggal 28 Desember 2018)	Perda Kab. Takalar Nomor 10 Tahun 2019 tentang APBD Tahun 2020 (tanggal 31 Desember 2019)	Perda Kab. Takalar Nomor 5 Tahun 2020 (Tanggal 30 Desember 2020)	Perda Kab. Takalar Nomor 3 Tahun 2021	Tepat waktu	Sesuai
Kepegawaian serta pendidikan dan Pelatihan									
1	Rata – rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	JP/ Tahun	20	20	20	20	20	1.5	Terdapat perbedaan satuan antara target dan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
									hasil
2	Persentase ASN Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Formal	%	0,32	2,9	7,1	1,68	60,97	11.48	**Melampaui**
3	Persentase Pejabat ASN Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	N/A	56	38,5	64,22	32,07	5.80	**Melampaui**
4	Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	32	32	28	28	28	24	**Melampaui**
5	Jumlah Jabatan Administrasi Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	612	614	621	621	1.893	138	**Melampaui**
6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah	Jabatan	2949	2990	3017	2929	2954	15	**Melampaui**
Penelitian dan Pengembangan									

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
1	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	%	N/A	N/A	16	50	100	N/A	N/A
Pengawasan1									
1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	%	91	74.70	53.62	45.45	74,52	100	*Belum Tercapai*
2	Persentase Pelanggaran Pegawai	%	N/A	0.29	0.25	0.16	0,14	N/A	N/A
3	Jumlah Temuan BPK	%	43	83	69	66	349	30	**Melampaui**
Sekretariat Dewan									
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Dokumen	N/A	Ada (6 Buah)	Ada (6 Buah)	Ada (6 Buah)	Ada (6 Buah)	Ada	Sesuai
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi	Kegiatan	N/A	Ada 12 (kegiatan)	Ada 12 (kegiatan)	Ada 12 (kegiatan)	Ada 12 (kegiatan)	Ada	Sesuai

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
	Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)								
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Dokumen	N/A	Ada 5 (dokumen)	Ada 5 (dokumen)	Ada 5 (dokumen)	Ada 5 (dokumen)	Ada	Sesuai
DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita	Juta Rupiah	29,273	31,507	34,01	33,97	N/A	1.250.000	Terdapat perbedaan

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
									satuan antara target dan hasil
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita	%	48,85	51,53	60,32	49,19	N/A	N/A	N/A
3	Produktivitas Total daerah	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	%	64,37	65,39	95,87	62,80	N/A	N/A	N/A
5	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap Total Desa	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Angka Kriminalitas yang Tertangani	Per 1000 Penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Rasio Ketergantungan	Per 1000 Penduduk	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Jumlah Indikator *"Belum Tercapai"*									133
Jumlah Indikator "Sesuai"									29

No.	Aspek/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Standar (Target RPJMD 2020)	Interpretasi belum tercapai (<), sesuai (=), melampaui (>)
			2017	2018	2019	2020	2021		
								Jumlah Indikator "Melampaui"	80
								Jumlah Indikator Tanpa Target "N/A"	15

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Kondisi keuangan daerah Kabupaten Takalar tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumbersumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Guna menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah, selama periode Bupati Takalar dalam pelaksanaan APBD Tahun 2023-2026, telah dirumuskan berbagai strategi optimalisasi yang adaptif dengan kondisi makro ekonomi serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Strategi yang ditempuh dirumuskan dalam berbagai paket kebijakan, yang mencakup Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan. Strategi yang ditempuh diderivasi ke dalam bentuk struktur APBD yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa APBD merupakan instrumen kunci dalam sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan. Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun berkenaan. Fungsi pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk kebutuhan itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan periode lalu serta perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal tersebut menjadi sumber informasi dalam melakukan proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 4 (empat) tahun mendatang.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos

belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik.

Kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan peran dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah yang telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Takalar sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022.

Analisis kinerja pelaksanaan APBD, selama Tahun 2017-2021 dan perbandingannya terhadap kinerja pelaksanaan APBD akhir tahun periode pemerintahan sebelumnya (Tahun 2022) dapat diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

3.1.2 Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sedangkan Pendapatan Transfer berasal dari Transfer Pemerintah Pusat yang meliputi Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa serta Transfer Antar-Daerah yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.

Kebijakan Pendapatan Daerah ditujukan untuk peningkatan pendapatan daerah, guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah, mengurangi ketergantungan fiskal, serta meningkatkan ruang fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi obyek untuk tujuan tersebut, selain menggambarkan kapasitas fiskal daerah juga berpotensi meningkatkan ruang fiskal daerah untuk kebutuhan alokasi belanja prioritas pembangunan daerah. Untuk itu upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dilaksanakan dengan pengelolaan pendapatan asli daerah yang semakin inovatif dan modern.

Untuk jenis pajak daerah yang bersifat self assessment, koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pendapatan daerah akan terus diintensifkan dengan harapan adanya kerjasama-kerjasama lintas sektor yang menguntungkan bagi penerimaan pendapatan daerah. Disamping modernisasi pelayanan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan terus ditingkatkan melalui pendataan dan penagihan pajak secara aktif diiringi

penegakan sanksi yang efektif. Selain berdampak langsung kepada penerimaan Pajak Daerah, upaya ini juga menunjang penerimaan dari sisi Lain-Lain PAD Yang Sah.

Selain upaya-upaya di sektor Pajak Daerah dan Lain-Lain PAD Yang Sah, peningkatan hasil retribusi daerah juga akan mendapat perhatian melalui perbaikan sistem pengelolaan retribusi menjadi lebih efisien dan akuntabel. Adapun upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan akan ditujukan untuk meningkatkan kapasitas Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat mengupayakan sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah.

Perkembangan kapasitas fiskal Kabupaten Takalar selama periode 2017 s/d 2021 menunjukkan kinerja yang semakin membaik yang dengan ditandai peningkatan Pendapatan Daerah dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 1,06 Triliun lebih, sedangkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1,03 Triliun lebih atau mengalami kontraksi sebesar -2,85 persen. Realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 998,83 Milyar lebih atau kembali mengalami kontraksi -3,25 persen, dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2018. Realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 895,09 Milyar lebih atau mengalami kontraksi sebesar -10,38 persen, dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2019, sedangkan Realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 906,95 Milyar lebih atau mengalami kenaikan sebesar 1,32 persen, dibandingkan realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2020. Ratarata pertumbuhan pendapatan daerah tahunan selama Tahun 2017-2021 mencapai -3,79 persen.

Kontribusi pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat masih lebih tinggi dibanding pendapatan asli daerah hingga Tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,76 persen dibandingkan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah sebesar -2,86 persen. Rendahnya kontribusi PAD menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal Kabupaten Takalar terhadap pemerintah cukup besar. Meskipun kontribusinya cukup rendah, namun pertumbuhan PAD pada komponen pajak dan retribusi daerah cukup signifikan dimana pertumbuhan rata-rata pajak daerah sebesar 15,38 persen dan retribusi daerah sebesar 2,22 persen, namun rata-rata pertumbuhan pada komponen hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain - lain PAD yang sah cukup rendah dengan pertumbuhan rata-rata -6,00 persen dan -5,46 persen. Hal ini berarti upaya pemerintah

daerah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan PAD pada sektor pajak dan retribusi daerah sudah cukup baik, namun pada sektor Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah masih sangat perlu ditingkatkan untuk mendorong kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Takalar.

Gambaran pendapatan daerah mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2017–2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel III- 1 : Perkembangan PAD Kabupaten Takalar Tahun Takalar 2017-2021

No	Uraian	Tahun					Total	Proporsi (%)
		2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	**Pendapatan Asli Daerah**	**111.702.803.113,89**	**125.186.750.078,44**	**104.825.639.110,40**	**126.864.460.821,28**	**91.552.494.429,88**	**560.132.147.553,89**	**100,00**
1.1.	**Pajak Daerah**	**24.465.255.880,00**	**36.501.895.511,00**	**18.231.339.291,00**	**34.947.664.229,00**	**24.826.963.904,50**	**138.973.118.815,50**	**24,81**
	Pajak Hotel	102.009.200,00	64.186.900,00	88.452.500,00	43.417.716,00	45.901.500,00	343.967.816,00	0,25
	Pajak Restoran	96.743.440,00	46.051.413,00	182.007.195,00	369.838.951,00	311.179.814,00	1.105.820.813,00	0,80
	Pajak Hiburan	170.170.000,00	169.352.500,00	178.761.000,00	39.722.000,00	60.483.088,00	618.488.588,00	0,45
	Pajak Reklame	187.849.628,00	206.750.627,00	223.639.456,00	256.574.773,00	225.805.619,00	1.100.620.103,00	0,79
	Pajak Penerangan Jalan	7.894.471.922,00	9.231.923.218,00	9.620.310.057,00	9.278.174.039,00	9.588.008.243,00	45.612.887.479,00	32,82
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.129.516.840,00	21.052.039.250,00	2.275.000,00	16.987.095.282,00	4.259.629.875,00	54.430.556.247,00	39,17
	Pajak Air Tanah	282.892.800,00	442.598.000,00	515.233.192,00	396.089.750,00	883.261.457,00	2.520.075.199,00	1,81
	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2.756.902.983,00	3.462.317.223,00	4.553.161.692,00	4.260.128.793,00	4.169.996.276,00	19.202.506.967,00	13,82
	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	844.699.067,00	1.726.676.380,00	2.867.499.199,00	3.316.622.925,00	5.282.698.032,50	14.038.195.603,50	10,10
1.2.	**Retribusi Daerah**	**2.802.036.691,00**	**2.005.431.291,00**	**2.098.727.728,00**	**3.040.103.590,00**	**2.578.235.130,00**	**12.524.534.430,00**	**2,24**
	Retribusi Jasa Umum	801.309.541,00	566.143.891,00	999.617.428,00	2.214.731.540,00	1.167.590.230,00	5.749.392.630,00	45,91

No	Uraian	Tahun					Total	Proporsi (%)
		2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Retribusi Jasa Usaha	1.146.927.000,00	411.139.000,00	445.066.000,00	416.525.000,00	773.176.000,00	3.192.833.000,00	25,49
	Retribusi Perizinan Tertentu	853.800.150,00	1.028.148.400,00	654.044.300,00	408.847.050,00	637.468.900,00	3.582.308.800,00	28,60
1.3.	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**	**10.170.259.932,73**	**8.674.271.961,00**	**8.963.787.807,00**	**8.152.525.395,00**	**8.238.598.134,00**	**44.199.443.229,73**	**7,89**
	Bagian Laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah / BUMD	10.170.259.932,73	8.674.271.961,00	8.963.787.807,00	8.152.525.395,00	8.238.598.134,00	44.199.443.229,73	100,00
1.4.	**Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**	**74.265.250.610,16**	**78.005.151.315,44**	**75.531.784.284,40**	**80.724.167.607,28**	**55.908.697.261,38**	**364.435.051.078,66**	**65,06**
	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	21.019.647,00	122.209.265,00	114.252.362,00	35.572.775,44	97.263.390,00	390.317.439,44	0,11
	Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	0,01
	Penerimaan Jasa Giro	2.891.231.297,00	3.651.218.167,00	4.257.289.846,00	4.216.347.032,00	3.983.399.763,50	18.999.486.105,50	5,21
	Penerimaan Atas Tuntutan	477.018.432,00	1.591.367.353,92	2.053.961.637,40	1.049.842.640,84	1.993.250.641,88	7.165.440.706,04	1,97

No	Uraian	Tahun					Total	Proporsi (%)
		2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Ganti Kerugian Daerah							
	Pendapatan Denda Retribusi	-	50.000,00	-	-	19.912.000,00	19.962.000,00	0,01
	Pendapatan dari Pengembalian	1.114.293.962,00	719.216.791,00	826.775.522,00	715.030.002,00	472.462.605,00	3.847.778.882,00	1,06
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Pendapatan BLUD)	53.705.983.472,16	53.911.451.918,52	47.278.711.489,00	2.262.985.698,00	36.015.565.173,00	193.174.697.750,68	53,01
	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	16.055.703.800,00	18.009.637.820,00	21.000.793.428,00	17.071.520.502,00	13.306.843.688,00	85.444.499.238,00	23,45
	Dana Kapitasi JKN Pada FKRTL	-	-	-	55.372.868.957,00	-	55.372.868.957,00	15,19

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar Tahun 2022

Selama periode 2017-2021, pendapatan daerah secara nominal mengalami penurunan dari Rp 1,06 Trilyun lebih pada Tahun 2017 menjadi 906,95 Milyar lebih pada Tahun 2021. Selama periode ini pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -3,79 persen per tahun. Dari ketiga sumber pendapatan daerah, pendapatan transfer menempati urutan pertama sebagai sumber pendapatan utama dengan proporsi terhadap total pendapatan rata-rata 84,27 persen per tahun. Pada periode yang sama, sumber pendapatan asli daerah mengalami kontraksi dengan pertumbuhan yang fluktuatif. Tahun 2017-2018 mengalami kenaikan dari Rp.111,70 Milyar lebih Tahun 2017 menjadi Rp.125,18 Milyar lebih di Tahun 2018, kemudian Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi Rp.104,82 Milyar lebih namun kembali naik di Tahun 2020 menjadi Rp.126,86 Milyar lebih dan kembali mengalami penurunan menjadi Rp.91 milyar lebih pada Tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan -2,86 persen per tahun, jauh di bawah pertumbuhan penerimaan pendapatan transfer. Demikian pula dengan pertumbuhan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah juga mengalami pertumbuhan yang fluktuatif, karena dari rentang waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 mengalami peningkatan, namun pada Tahun 2020 mengalami penurunan. Dan pada Tahun 2021 sama sekali tidak ada realisasi penerimaannya.

Adapun kinerja pertumbuhan dan postur pendapatan daerah secara berturut-turut terlihat pada grafik berikut.

Grafik III- 1 : Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

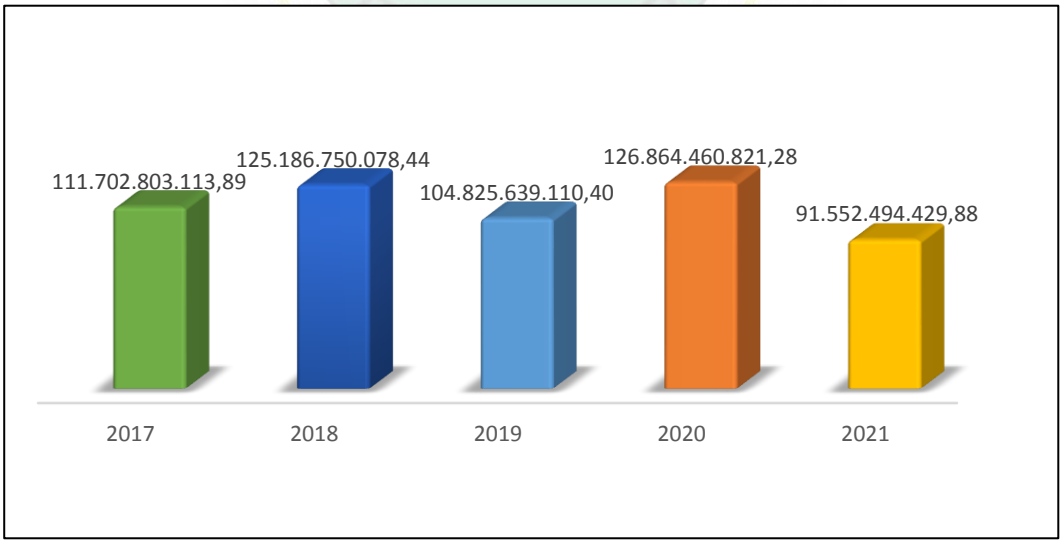

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Grafik III- 2 : Postur Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

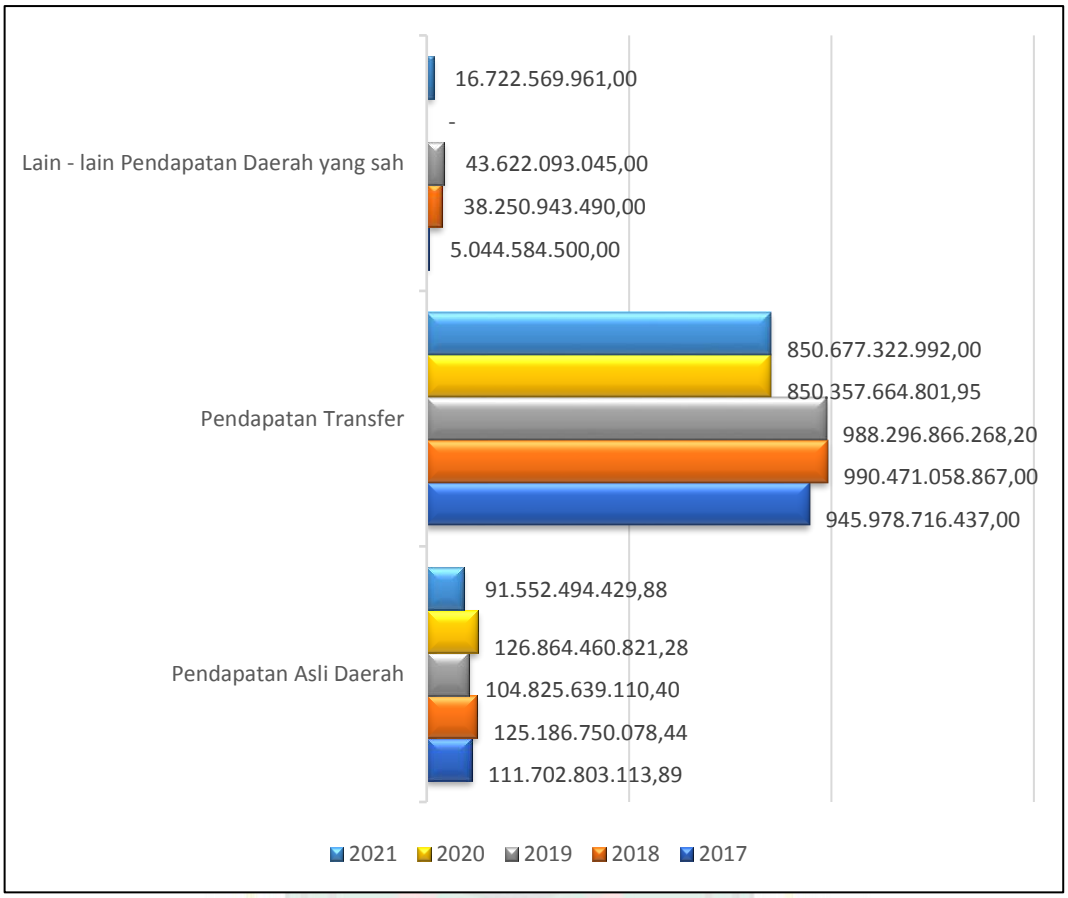

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Lebih lanjut dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan

parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiskal gap). Pemerintah Kabupaten Takalar berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah nilainya mengalami peningkatan yang signifikan dari Tahun 2017-2020. Tahun 2017 nilai PAD Kabupaten Takalar masih sekitar Rp 111,70 Milyar lebih, mengalami peningkatan pada Tahun 2020 menjadi Rp 126,86 Milyar lebih. Namun pada Tahun 2021 mengalami kontraksi menjadi Rp 91 Milyar lebih. Gambaran Perkembangan pendapatan asli daerah dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik III- 3 : Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

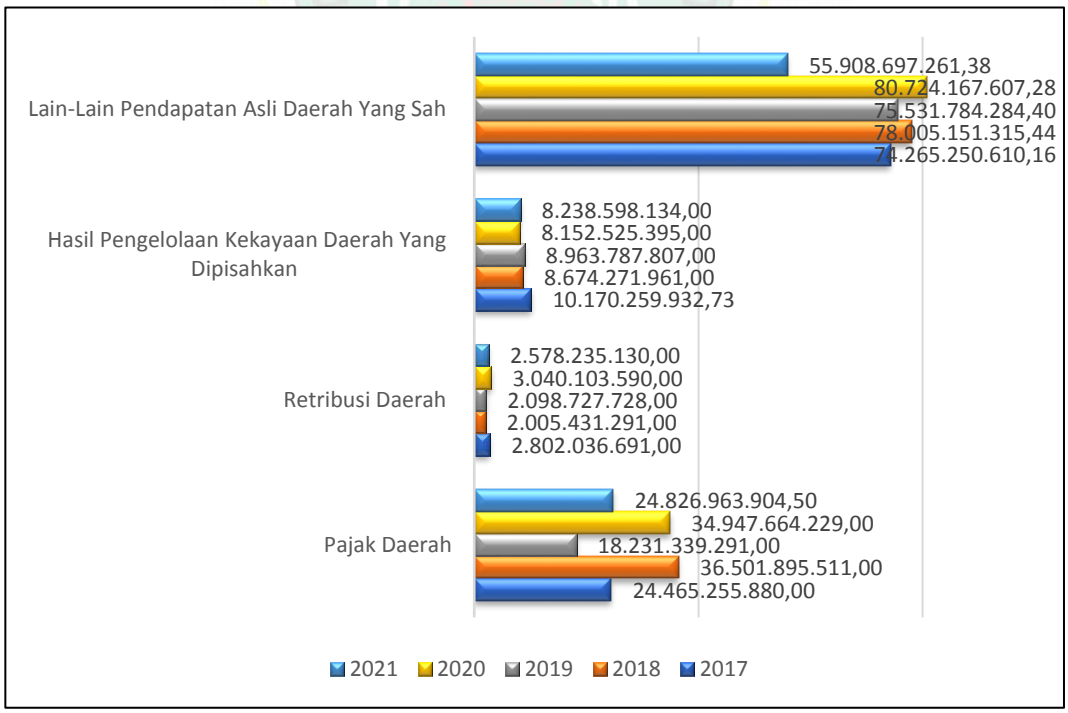

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Dari segi Postur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar selama Tahun Anggaran 2017-2021 masih didominasi oleh kontribusi dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata–rata (65,06 persen), diikuti dengan Pajak Daerah rata–rata (24,81 persen), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan rata-rata (7,89 persen), dan yang terakhir adalah Retribusi Daerah rata-rata (2,24 persen). Kontribusi Retribusi Daerah merupakan yang paling kecil terhadap PAD, dan yang paling besar adalah kontribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Grafik III- 4 : Postur PAD Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

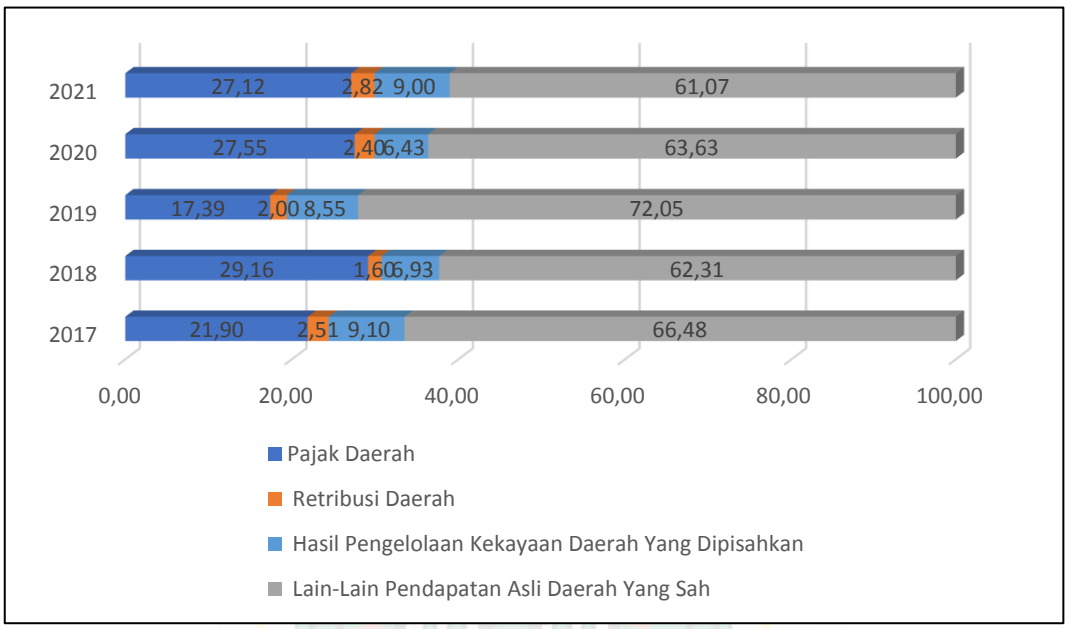

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari **: (a) pajak daerah; (b) retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.**

Pendapatan Pajak Daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan pungutan meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Saat ini Pajak Daerah masih menjadi tulang punggung PAD Kabupaten Takalar. Realisasi Pajak Daerah dengan rata-rata pertumbuhan 15,38 persen dalam kurun waktu 2017-2021.

Grafik III- 5 : Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

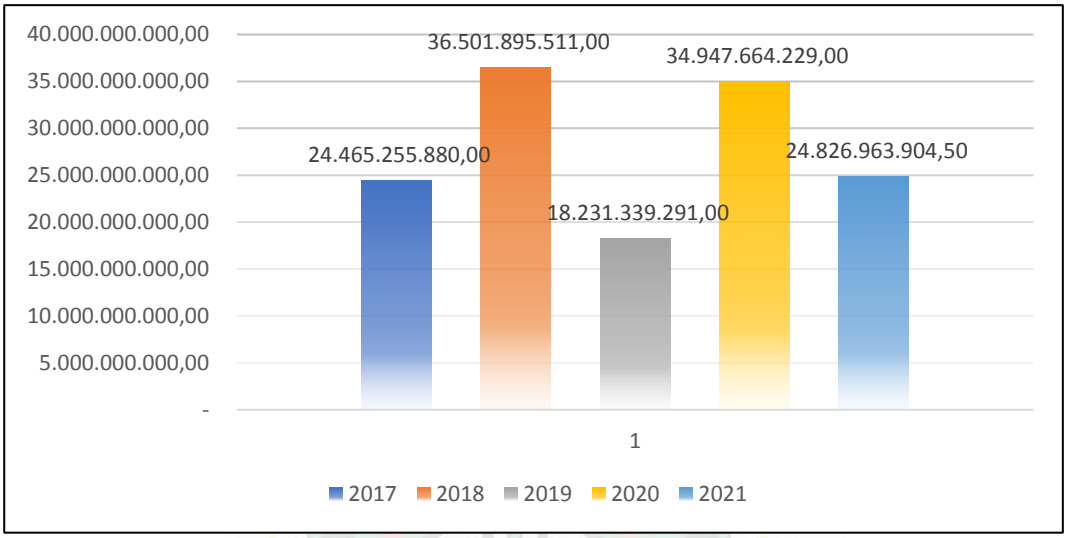

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Dari segi Postur Pajak Daerah Kabupaten Takalar selama Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2021, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan masih mendominasi dalam pendapatan Pajak Daerah dengan kontribusi sebesar 39,17 persen terhadap Pajak Daerah, seperti grafik dibawah ini.

Grafik III- 6 : Postur Pajak Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

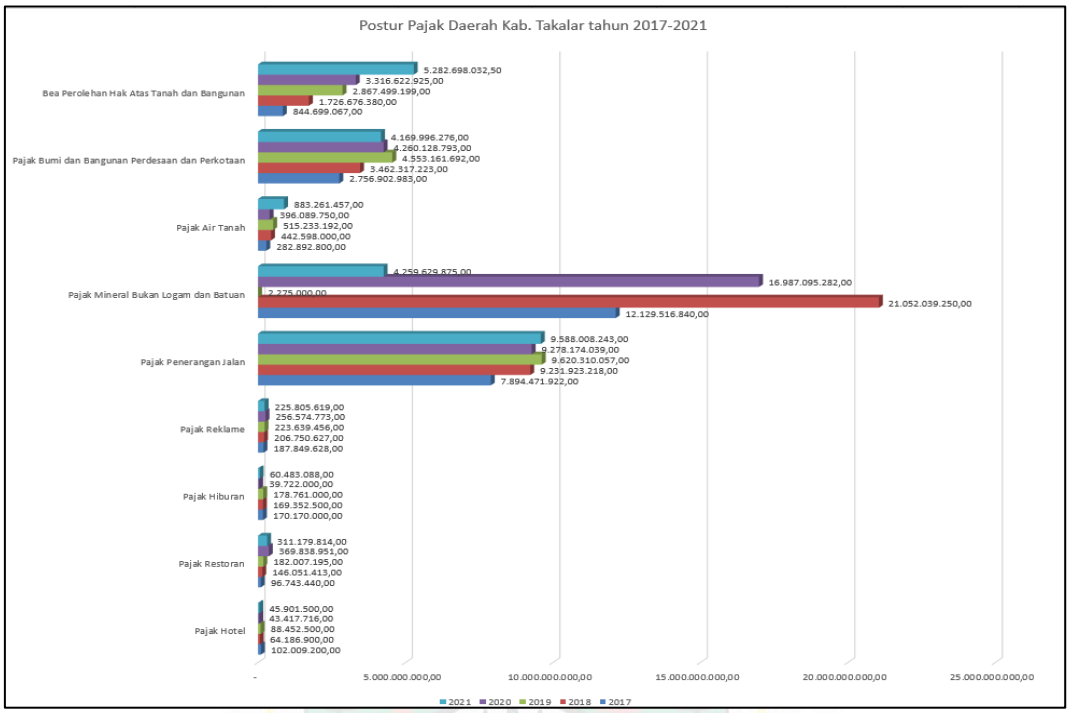

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Untuk **Pajak Hotel** adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dimana hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Realisasi Pajak Hotel mengalami fluktuasi dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dengan nilai paling rendah terjadi pada Tahun 2020. Pandemi Covid-19 merupakan salah satu penyebab turunnya realisasi pada tahun tersebut. Adapun kontribusi rata-rata terhadap Pajak Daerah relative kecil yakni sebesar 0,25 persen.

Grafik III- 7 : Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

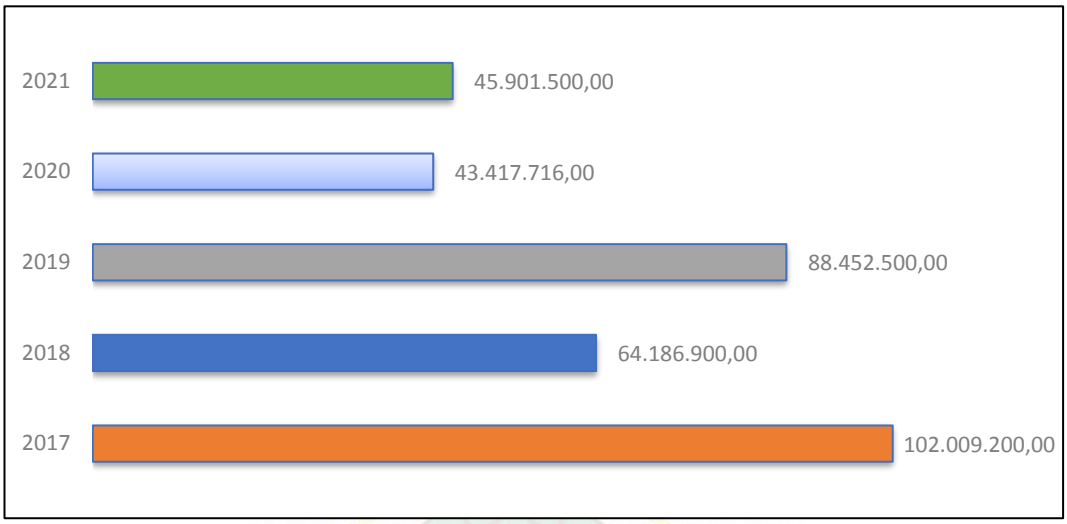

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Realisasi Pajak Restoran dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya, bahkan pada Tahun 2020 realisasinya hampir dua kali lipat dari Tahun 2019 meskipun capaian pada Tahun 2021 mengalami sedikit kontraksi namun kontribusi rata-rata terhadap Pajak Daerah lebih besar dari kontribusi Pajak Hotel yakni sebesar 0,80 persen.

Grafik III- 8 : Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

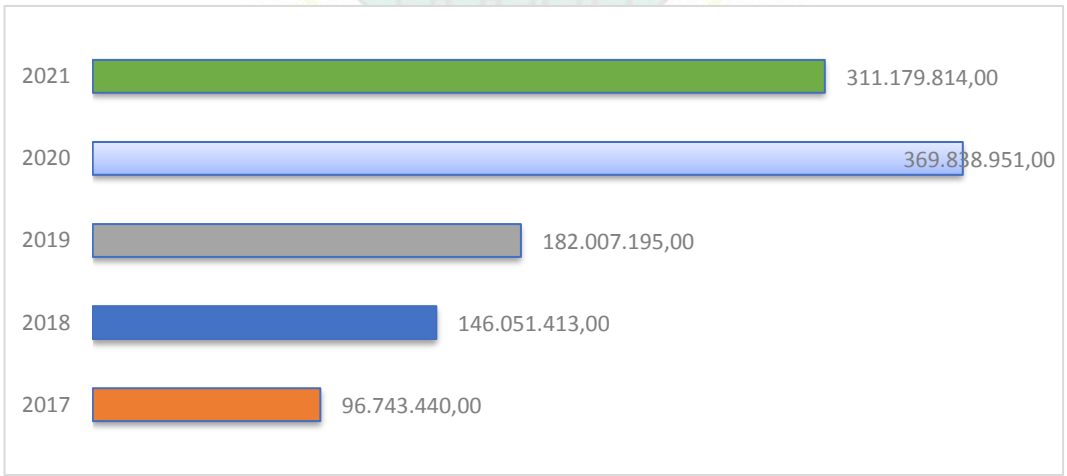

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Realisasi Pajak Hiburan dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kontribusi rata-rata terhadap Pajak Daerah sebesar 0,45 persen.

Grafik III- 9 : Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

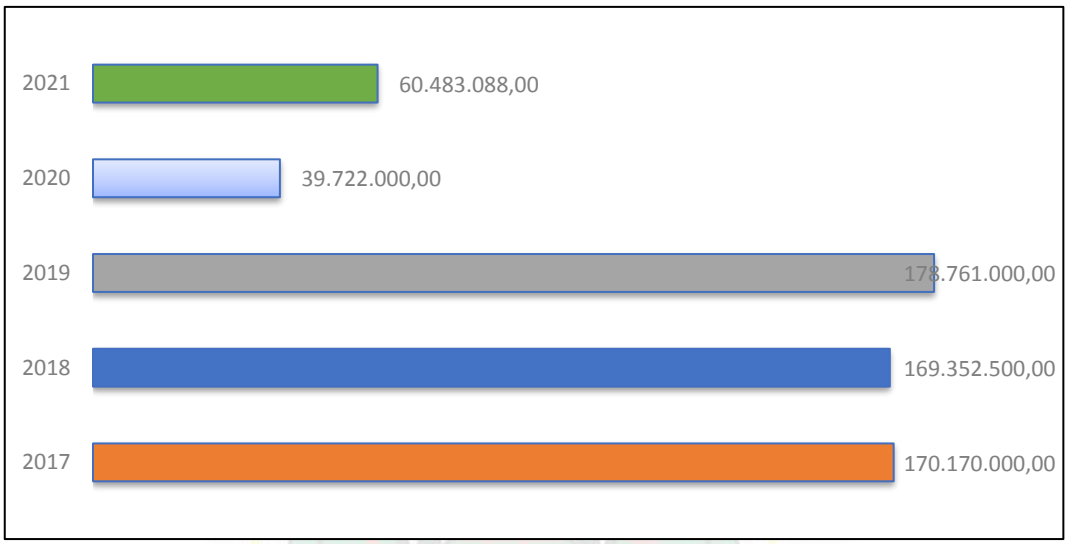

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Realisasi Pajak Reklame dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun pada Tahun 2021 mengalami sedikit kontraksi namun rata-rata kontribusi terhadap Pajak Daerah lebih besar dibandingkan dengan Pajak Hiburan yakni sebesar 0,79 persen.

Grafik III- 10 : Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

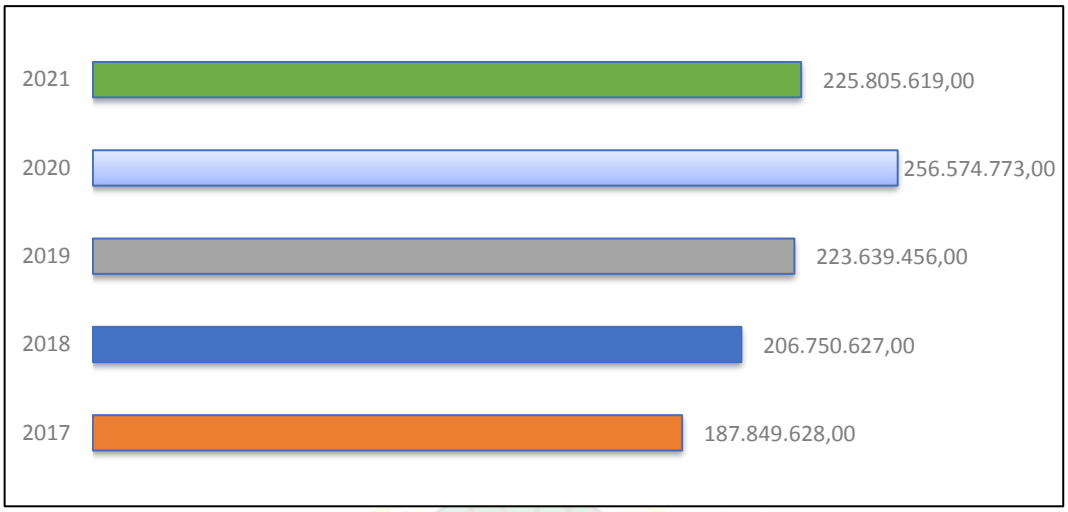

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Realisasi sektor Pajak Penerangan Jalan dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 cukup fluktuatif. Sektor ini merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap Pajak Daerah dengan kontribusi rata-rata sebesar 32,82 persen.

Grafik III- 11 : Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

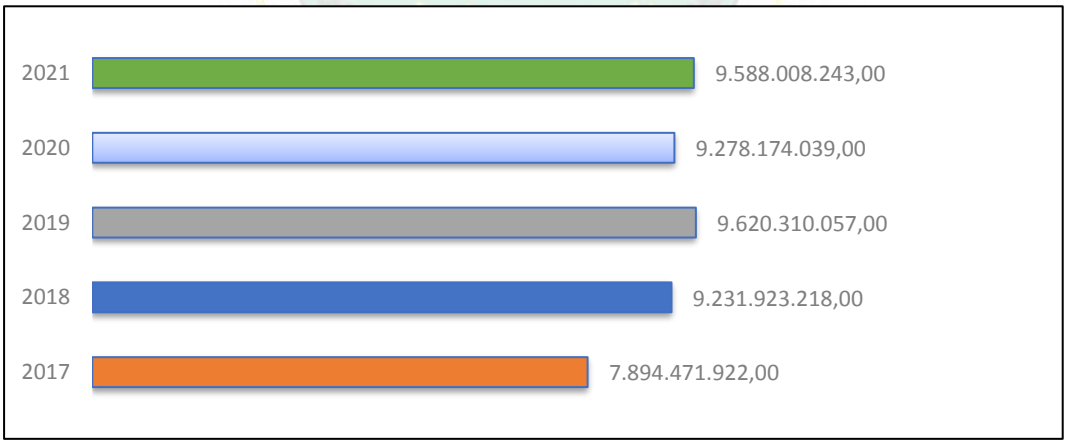

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Terkait **Pajak Mineral** Bukan **Logam dan Batuan**, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Realisasi Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami fluktuasi dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021, namun memberikan kontribusi terbesar terhadap komponen Pajak Daerah, hal ini diakselerasi oleh proyek penambangan pasir laut di perairan Galesong untuk pembangunan CPI. Upaya intensifikasi yang dilakukan adalah melalui koordinasi yang intens dengan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengidentifikasi perusahaan yang sudah berkontrak dan akan melakukan aktivitas penambangan, koordinasi juga dilakukan dengan perusahaan-perusahaan tersebut agar taat dan tepat waktu dalam menunaikan kewajiban penyetoran pajak sesuai perda. Dalam hal penagihan tunggakan pajak yang belum terbayar, untuk optimalisasi dilakukan perjanjian kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri.

Grafik III- 12 : Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

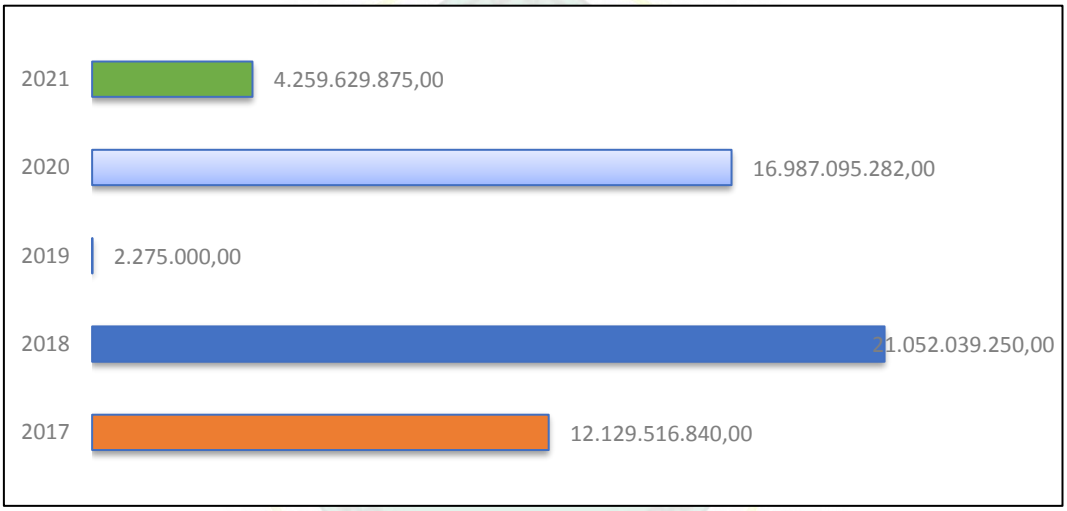

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Realisasi Pajak Air Tanah dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan kontribusi rata-rata terhadap Pajak Daerah sebesar 1,81 persen. Capaian ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran pada periode yang sama.

Grafik III- 13 : Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

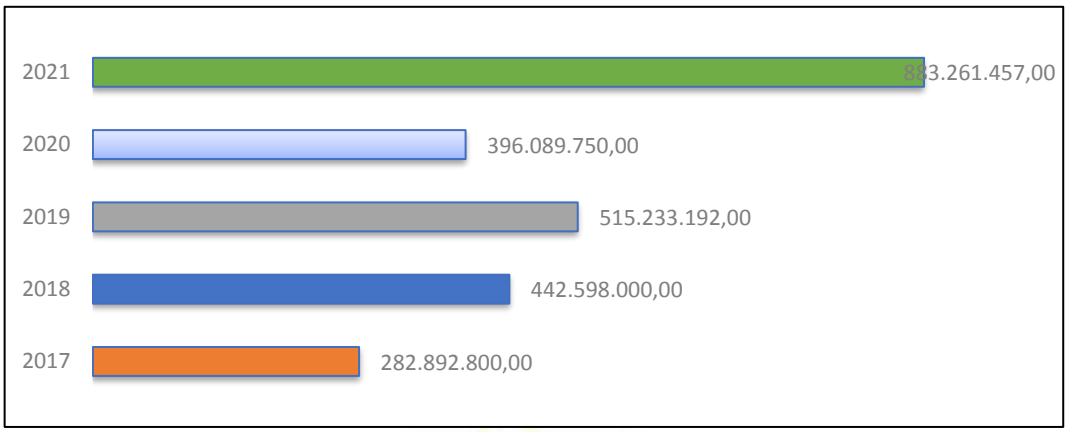

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi terhadap Pajak Daerah sebesar 13,82 persen, merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan dan Pajak Penerangan Jalan.

Grafik III- 14 : Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

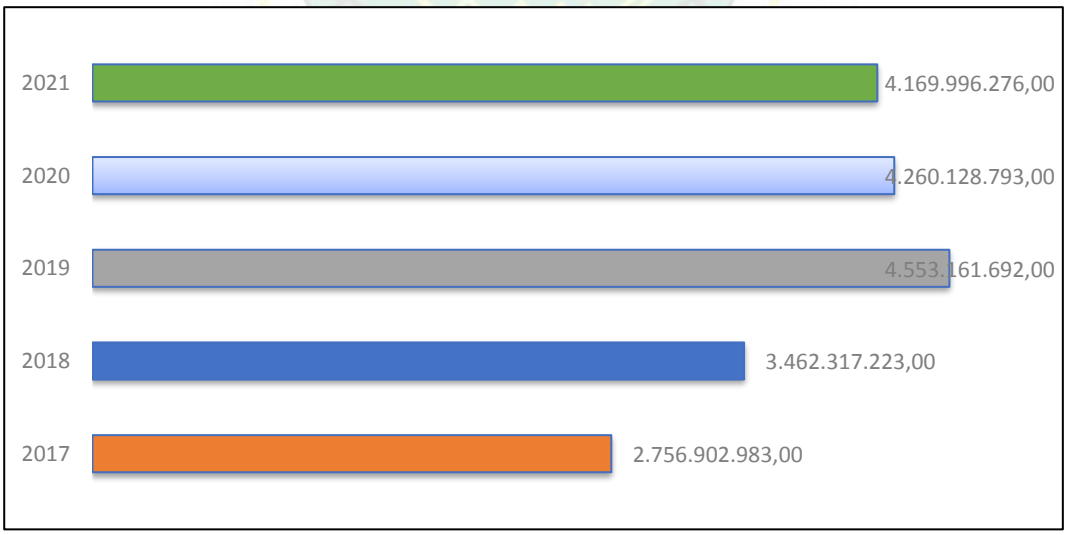

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya dengan rata-rata kontribusi terhadap Pajak Daerah sebesar 10,10 persen, masuk dalam lima besar penyumbang terbesar terhadap Pajak Daerah.

Grafik III- 15 : Realisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

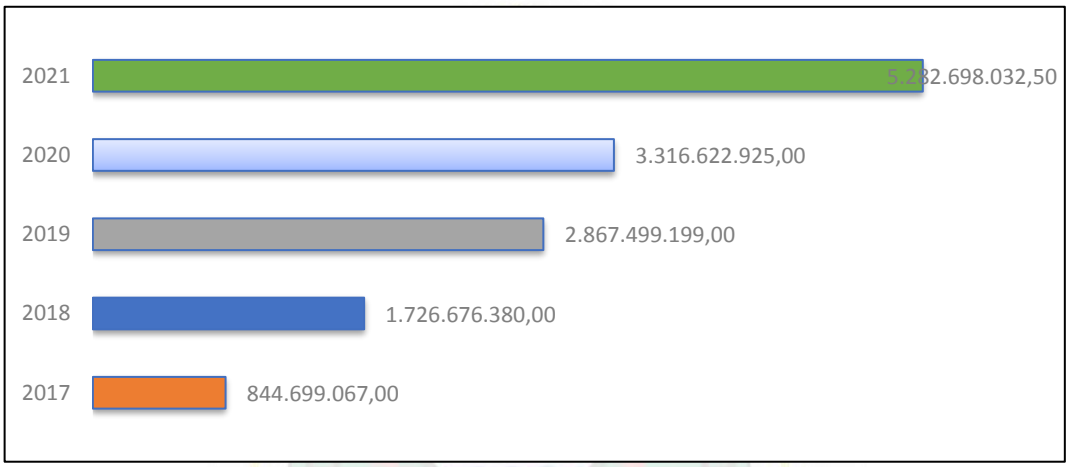

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan PAD sangat dibutuhkan dalam menggerakan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor Retribusi Daerah di Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021, berkontribusi cukup kecil terhadap Pendapatan Daerah tetapi tetap dilakukan upaya meningkatkan penerimaannya dengan perbaikan regulasi pengelolaan retribusi. Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Jasa Umum

dan Jasa Usaha telah diperbarui sesuai dengan kondisi saat ini dan dilakukan penyesuaian terhadap potensi obyek dan tarif retribusi yang menyesuaikan kondisi perkembangan ekonomi. Langkah ekstensifikasi juga dilakukan dengan penambahan jenis retribusi baru yang dipungut berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten. Retribusi juga diarahkan pengelolaannya untuk lebih tertib.

Realisasi penerimaan retribusi daerah secara kumulatif menunjukkan **perkembangan** yang fluktuatif. Dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 Retribusi Daerah menyumbang sebesar Rp.12,5 milyar dengan rata-rata kontribusi terhadap Pajak Daerah sebesar 2,24 persen. Hal ini perlu mendapat perhatian tersendiri meskipun komponen retribusi daerah ini proporsinya kecil jika dibandingkan dengan kompenen lainnya, tetap perlu dilakukan upaya-upaya ekstensifikasi untuk mendongkrak kontribusinya terhadap PAD.

Grafik III- 16 : Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

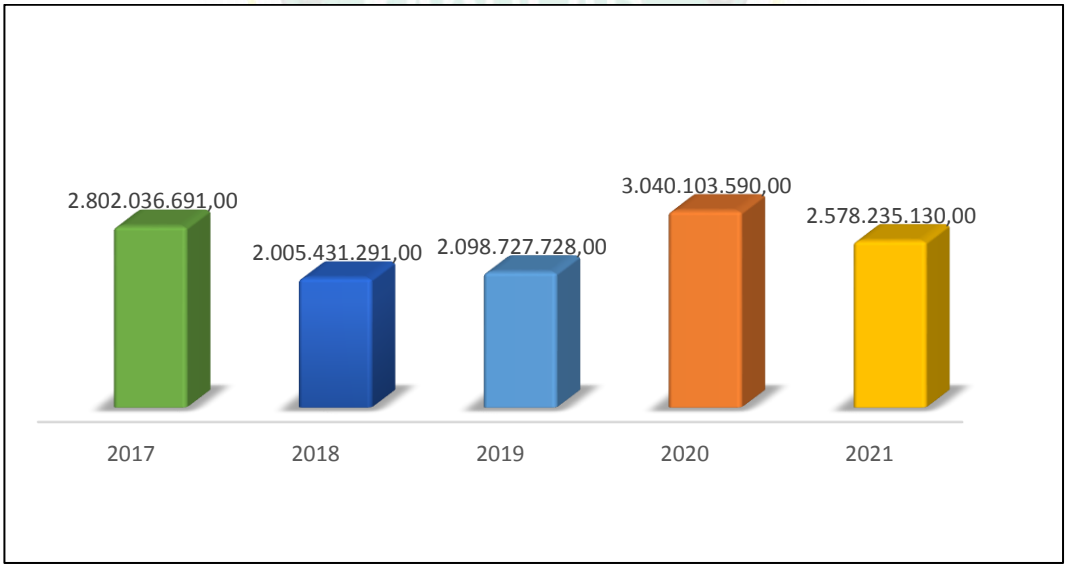

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Untuk jenis penerimaan jenis ini masih mengandalkan penerimaan deviden atas penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Sulselbar di samping deviden dari penyertaan modal dari Perusahaan Daerah dan Badan Usaha lainnya. Selama tahun 2017-2021, realisasi penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan masih fluktuatif, hal ini tergambar pada grafik berikut.

Grafik III- 17 : Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

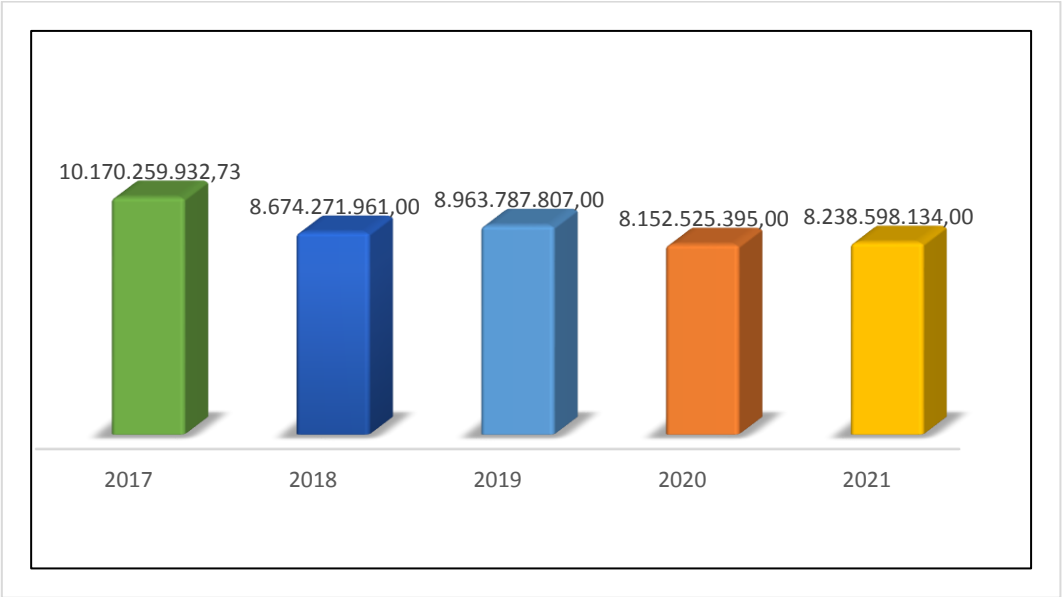

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Khusus Komponen **Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah** terdiri dari: hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada komponen penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah, kontributor terbesar pada sektor ini adalah Pendapatan BLUD yang menyumbang sebesar Rp.193,17 Milayar lebih selama kurun waktu Tahun 2017-2021. Adapun realisasi pada sektor Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berkontribusi sebesar 65,06 persen terhadap PAD sekaligus sebagai sumber pendapatan dengan kontributor terbesar.

Grafik III- 18 : Perkembangan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

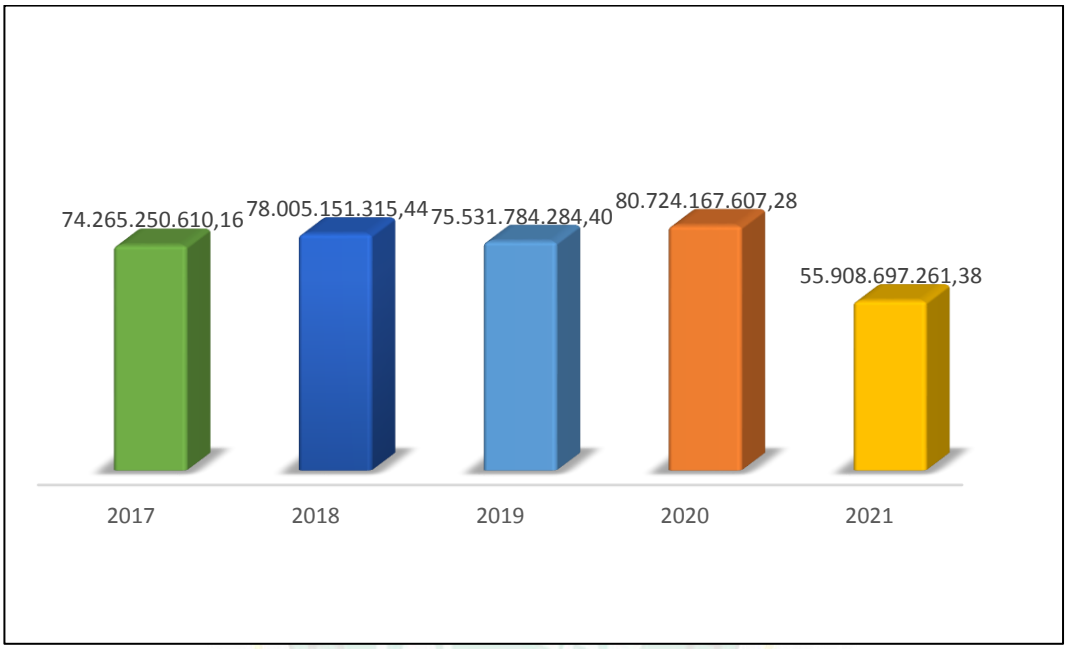

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari Dana Penyesuaian, sedangkan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dan Pendapatan Bantuan Keuangan.

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Realisasi DBH mengalami perkembangan yang fluktuatif dari periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dengan kontribusi sebesar Rp.90,76 milyar atau 2,20 persen terhadap Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Dana Bagi Hasil ini terbagi atas Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (sumber daya alam), adapun perkembangan realisasinya seperti tergambar pada grafik berikut.

Grafik III- 19 : Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

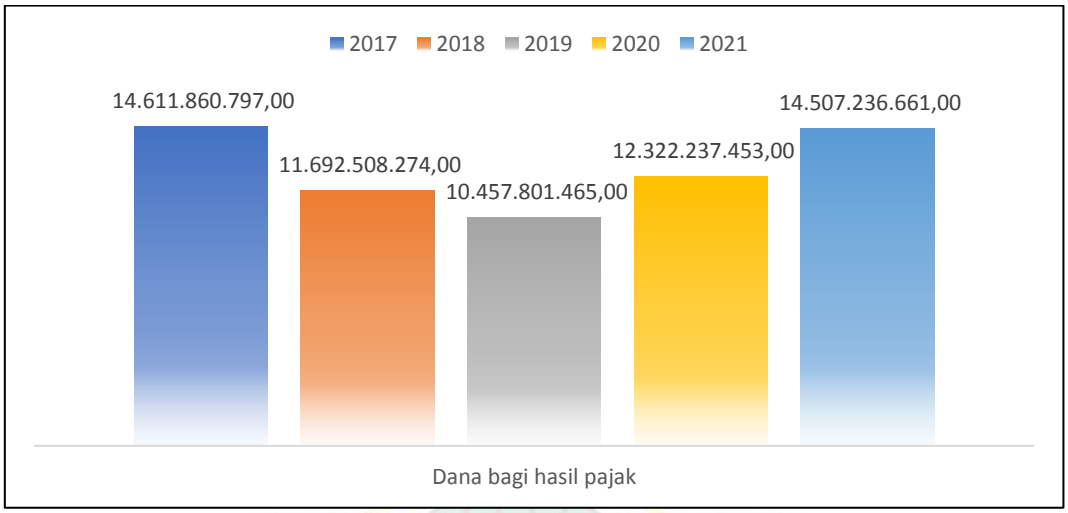

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Grafik III- 20 : Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

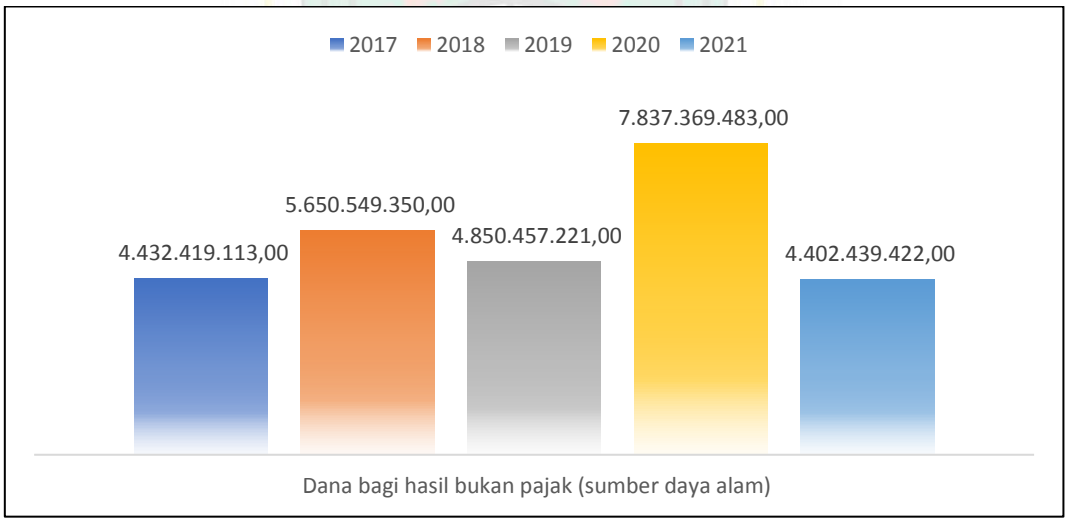

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dalam kurun waktu Tahun 2017-2019 Dana Alokasi Umum setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pada Tahun 2020 mengalami pengurangan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, berdampak terhadap refocusing anggaran yang bersumber dari DAU. Refocusing anggaran kembali terjadi pada Tahun 2021 sehingga DAU kembali mengalami pengurangan meskipun tidak sebesar Tahun 2020. Hal ini menyebabkan DAU dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 mengalami pertumbuhan yang negative sebesar -0,98 persen sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik III- 21 : Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

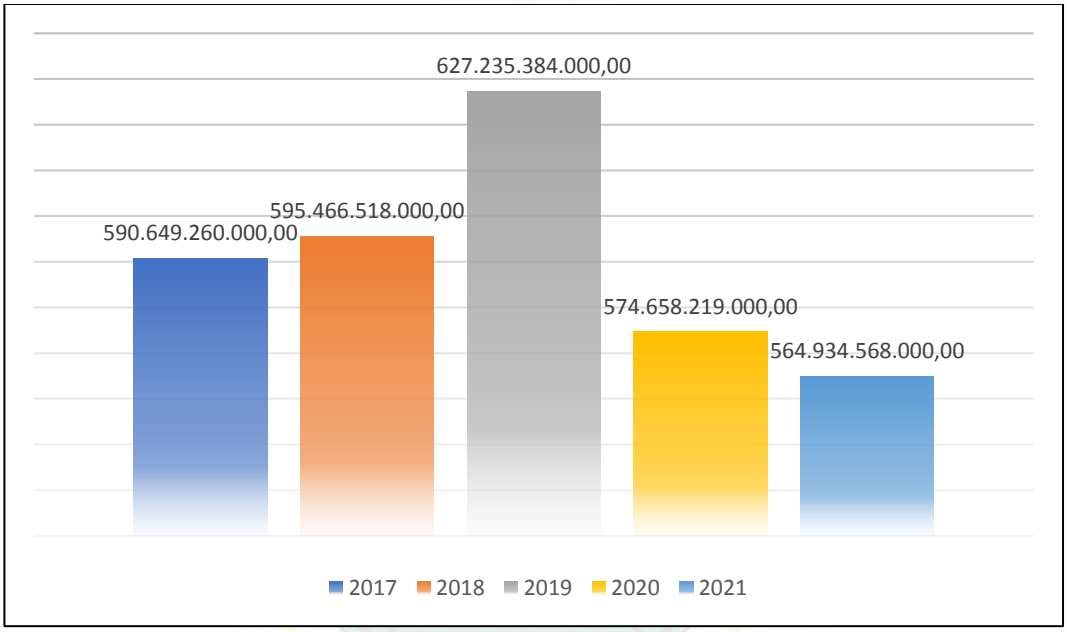

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. Dana Transfer Khusus meliputi Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik. **Dana Alokasi Khusus** yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Realisasi penerimanan Dana Alokasi khusus dalam kurun waktu Tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan pertumbuhan rata-rata 1,29 persen sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik III- 22 : Realisasi Penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

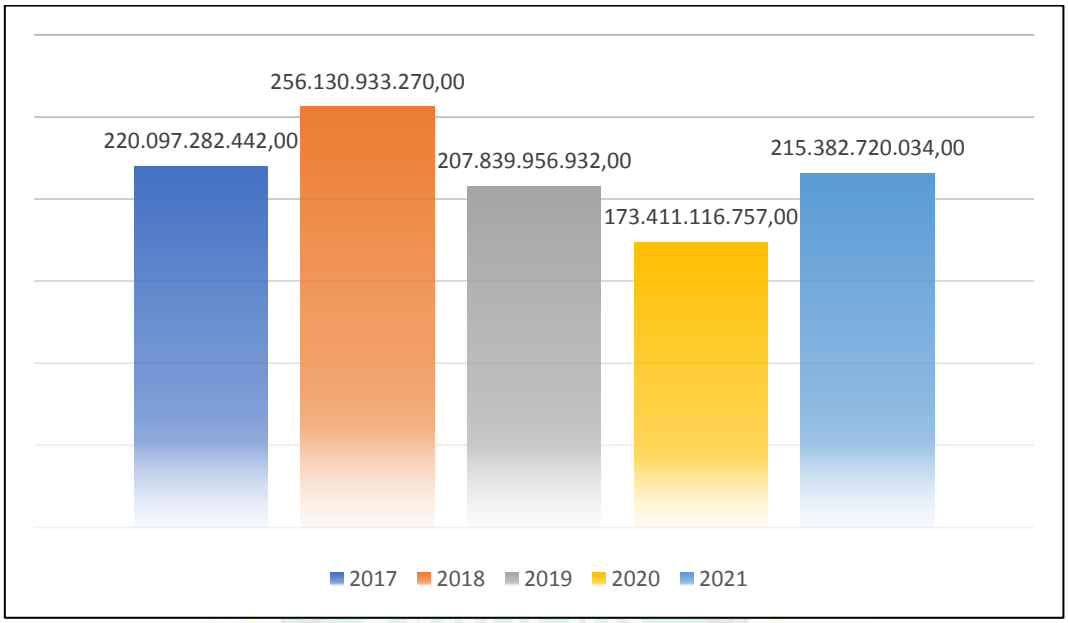

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **Hibah** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dalam periode Tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada Tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang cukup drastis dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -18,19 persen sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

Grafik III- 23 : Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

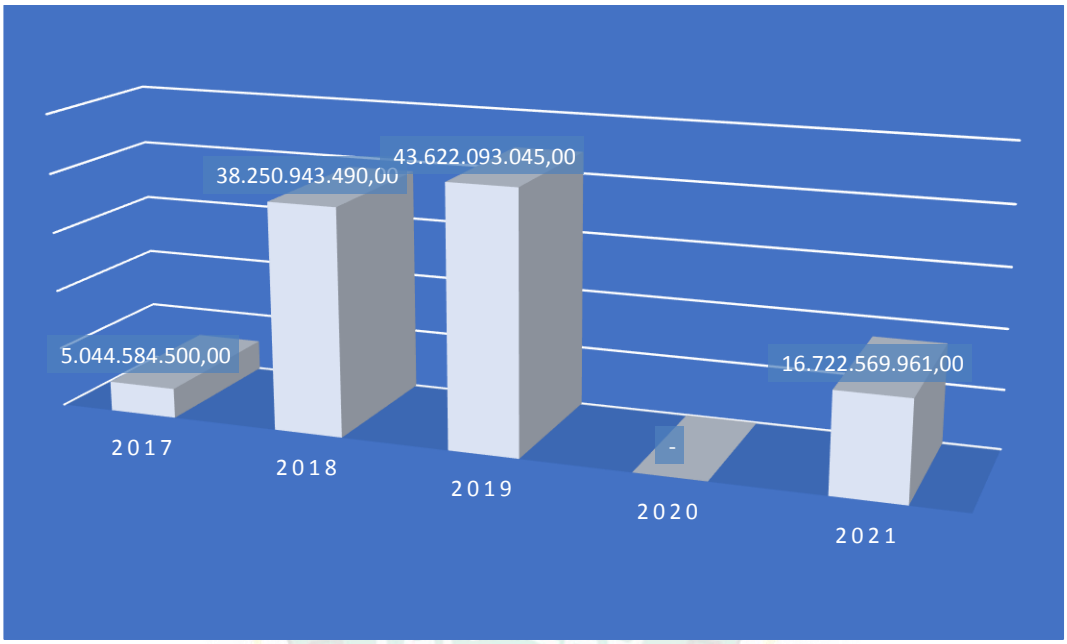

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

3.1.3 Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Secara umum komponen belanja daerah terdiri dari (1) Belanja Tidak Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; (2) Belanja Langsung yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Realisasi Belanja Daerah Periode Tahun 2017-2021 mengalami peningkatan pada periode Tahun 2017-2019. Pada Tahun Anggaran 2017 Realisasi Belanja Daerah sebesar Rp. 1,079 Triliun lebih dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1,146 Triliun lebih pada Tahun Anggaran 2019 atau mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,14 persen. Untuk periode Tahun 2017-2020 pada kelompok Belanja Tidak Langsung, menunjukkan bahwa komponen belanja pegawai masih mendominasi dengan rata-rata persentase sebesar 56,56 persen dari total belanja tidak langsung. Adapun komponen belanja tidak langsung yang mengalami penurunan cukup significant adalah pada belanja hibah dengan tingkat penurunan pertumbuhan sebesar 4,93 persen, Komponen belanja Bantuan Keuangan pada Tahun 2017

sebesar Rp. 98,09 Milyar naik menjadi sebesar Rp. 148,83 Milyar pada Tahun 2020, mengalami pertumbuhan sebesar 0,41 persen, Belanja Tidak Terduga Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 25,00 persen, sedangkan Belanja Bunga, Belanja Subsisdi, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bagi Hasil tidak ada realisasi pada periode Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020. Sedangkan pada kelompok **Belanja Langsung** menunjukkan bahwa komponen Barang dan Jasa mendominasi dengan rata-rata persentase terhadap total Belanja Langsung sebesar 49,00 persen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,44 persen. Selanjutnya komponen Belanja Modal meskipun menunjukkan pertumbnuhan yang negative namun menempati urutan kedua yang mendominasi terhadap Belanja Langsung dengan rata-rata persentase sebesar 36,20 persen dengan pertumbuhan rata-rata sebesar -27,99 persen, dan Belanja Pegawai dengan kontribusi terkecil terhadap Belanja Langsung dengan rata-rata persentase sebesar 14,80 persen dengan rata-rata pertumbuhan negative dalam periode yang sama yakni sebesar -8,82 persen. Selanjutnya perkembangan realisasi komponen Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam kurun waktu Tahun 2017-2020 ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik III- 24 : Realisasi Belanja Langsung Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

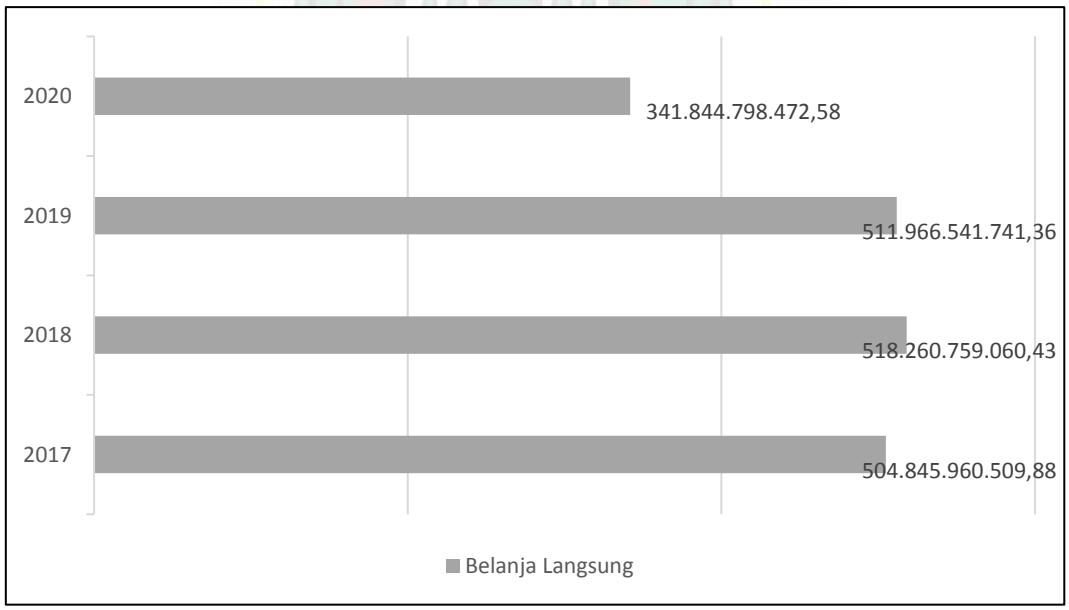

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Grafik III- 25 : Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

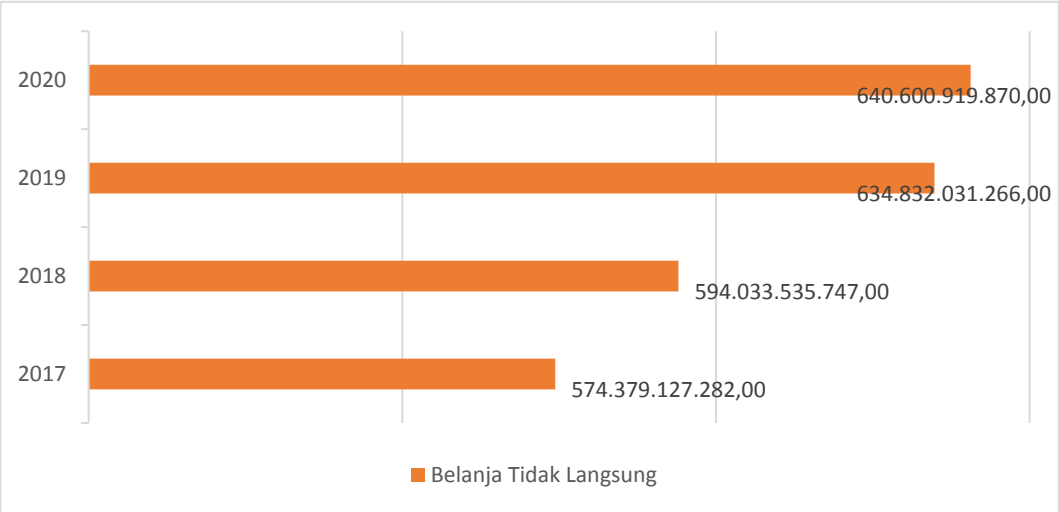

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

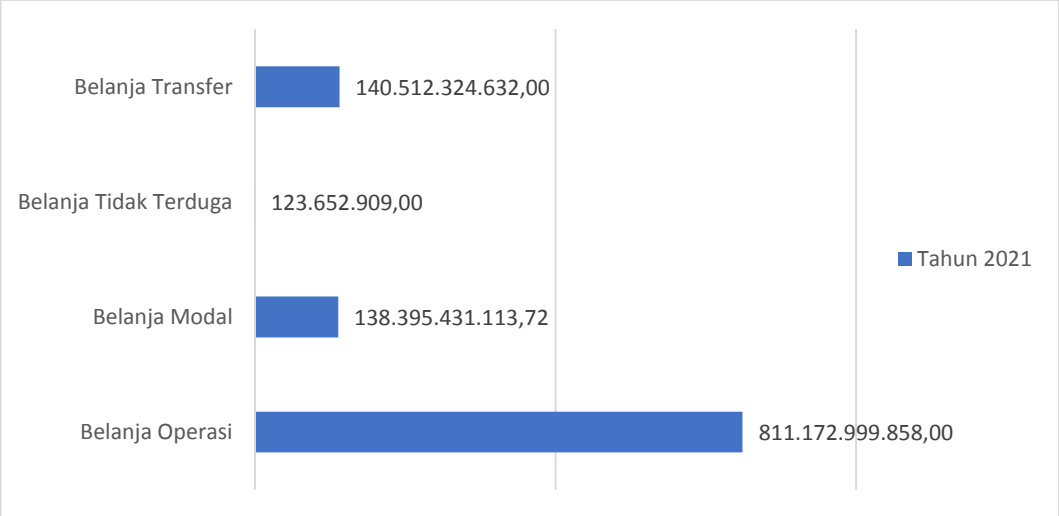

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 disajikan berdasarkan komponen belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, sedangkan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Takalar untuk Tahun 2021 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, hal ini disebabkan karena sejak Tahun 2021 komponen Belanja Daerah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sudah dinyatakan dicabut.

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah diperuntukkan mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Kalsifikasi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi Belanja Daerah mengalami peningkatan pada periode Tahun Anggaran 2020-2021. Pada Tahun Anggaran 2020 realisasi Belanja Daerah sebesar Rp.903,84 Milyar lebih dan naik menjadi sebesar Rp.1,090 Trilyun lebih pada Tahun Anggaran 2021 atau mengalami pertumbuhan sebesar 20,62 persen.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Pada Tahun Anggaran 2020 realisasi Belanja Operasi sebesar sebesar Rp.748,64 Milyar lebih dan naik menjadi sebesar Rp.811 Milyar lebih pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 8,35 persen. Pada periode Tahun Anggaran 2021 kelompok belanja operasi menunjukkan bahwa komponen belanja pegawai masih mendominasi dengan persentase sebesar 63,21 persen dari total belanja operasi.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Pada Tahun Anggaran 2020 realisasi Belanja Modal sebesar Rp.83,75 Milyar lebih dan naik menjadi sebesar Rp.138 Milyar lebih pada Tahun Anggaran 2021 dengan pertumbuhan sebesar 65,24 persen. Adapun komponen Belanja Modal didominasi oleh Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan persentase sebesar 36,69 persen dari total belanja modal.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada

Tahun 2020 sebesar Rp.2,04 Milyar lebih dan turun menjadi sebesar Rp.123,65 Juta lebih pada Tahun Anggaran 2021 dengan pertumbuhan negative sebesar 93,94 persen dengan kontribusi sebesar 0,01 persen dari total Belanja Daerah.

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Realisasi Belanja Transfer dari Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.69,40 Milyar lebih, naik menjadi Rp.140,51 Milyar lebih pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan 102,46 persen dengan kontribusi sebesar 12,89 persen dari total Belanja Daerah.

Adapun perkembangan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun 2021 disajikan pada table berikut.

Tabel III- 2 : Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

No	Uraian (Berdasarkan PP 58/2005)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
2	**Belanja**	**1.079.225.087.791,88**	**1.112.294.294.807,43**	**1.146.798.573.007,36**	**982.445.718.342,58**	**-6,18**
A.	**Belanja Tidak Langsung**	**74.379.127.282,00**	**594.033.535.747,00**	**634.832.031.266,00**	**640.600.919.870,00**	**1,91**
1	Belanja Pegawai	446.306.854.749,00	433.783.532.905,00	440.636.677.087,00	481.511.741.670,00	(0,72)
2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	29.979.704.683,00	23.747.307.342,00	45.692.182.542,00	8.208.700.000,00	(4,93)
5	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-
6	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
7	Belanja Bantuan Keuangan	98.092.567.850,00	136.252.695.500,00	148.503.171.637,00	148.839.751.900,00	0,41
8	Belanja Tidak Terduga	-	250.000.000,00	-	2.040.726.300,00	25,00
B	**Belanja Langsung**	**504.845.960.509,88**	**518.260.759.060,43**	**511.966.541.741,36**	**341.844.798.472,58**	**(14,86)**
1	Belanja Pegawai	73.280.677.939,00	80.209.755.590,44	80.082.509.863,00	44.232.975.108,00	(8,82)
2	Belanja Barang dan Jasa	210.761.346.204,00	260.237.792.381,99	234.868.462.828,36	213.858.104.372,63	0,44
3	Belanja Modal	220.803.936.366,88	177.813.211.088,00	197.015.569.050,00	83.753.718.991,95	(27,99)

Sumber : BPKD kabupaten Takalar, 2022

Tabel III- 3 : Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021 (Berdasarkan PP 12 Tahun 2019)

No	Uraian (Berdasarkan PP/12 2019)	Tahun (Rp.) 2021	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		Realisasi	
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*
2	**BELANJA**	**1.090.204.408.512,72**	**20,62**
2.1	**Belanja Operasi**	**811.172.999.858,00**	**8,35**
2.1.1	Belanja Pegawai	512.760.420.213,00	-2,47
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	293.678.939.045,00	37,32
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	4.733.640.600,00	-47,68
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00
2.2	**Belanja Modal**	**138.395.431.113,72**	**65,24**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	8.577.959.400,00	148,97
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.950.292.408,00	7,18
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	50.781.476.803,72	19,59
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	46.825.521.487,00	507,37
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.260.181.015,00	8,39
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	-100,00
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	**123.652.909,00**	**-93,94**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	123.652.909,00	-93,94
2.4	**Belanja Transfer**	**140.512.324.632,00**	**102,46**
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.557.695.125,00	-14,48
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	135.954.629.507,00	112,18

Sumber : BPKD kabupaten Takalar, 2022

3.1.4 Pembiayaan Daerah

Secara umum komponen **Pembiayaan Daerah** terdiri atas **Penerimaan Pembiayaan Daerah** didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dan **Pengeluaran Pembiayaan Daerah** didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang.

Tabel III- 4 : Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Tahun (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021	
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.3	**PEMBIAYAAN**	**46.197.165.268,57**	**29.576.207.860,18**	**66.290.665.488,19**	**52.085.690.904,43**	**115.871.660.688,70**	**47,30**
2.3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	49.197.165.268,57	29.576.207.860,18	71.190.665.488,19	56.236.690.904,43	116.871.660.688,70	46,91
2.3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	0,00	4.900.000.000,00	4.151.000.000,00	1.000.000.000,00	47,30

Sumber : BPKD kabupaten Takalar, 2022

Realisasi Pembiayaan Daerah selama Tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi Pada Tahun 2017 sebesar Rp. 46.19 Milyar lebih dan pada Tahun 2018 sebesar 29,57 Milyar lebih, mengalami kenaikan pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp 66,29 milyar lebih dan kembali mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi Rp.52,08 Milyar lebih, namun kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi sebesar Rp.115,87 Milyar lebih. Perkembangan pembiayaan selama Tahun 2017-2021 mengalami fluktatuasi ditunjukan pada grafik dibawah ini.

Grafik III- 26 : Realisasi Penerimaan Pembiayaan, dan Pengeluaraan Pembiayaan Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021



Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

3.2 Neraca Daerah

Perkembangan neraca daerah, menguraikan pelaporan keseimbangan umum daerah, yakni keseimbangan antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana daerah. Perkembangan neraca daerah Kabupaten Takalar selama periode pencatatan 2017-2021, ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel III- 5 : Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Uraian	Tahun (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021*	
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	**ASET**						
1.1	**Aset Lancar**						
1.1.1	Kas	29.886.990.926,18	71.190.665.488,19	56.242.886.675,43	121.215.699.203,08		77,57
1.1.2	Piutang	33.719.816.883,24	19.438.319.931,86	15.690.317.525,07	22.500.154.005,77		-6,08
1.1.3	Persediaan	11.293.477.539,32	13.333.559.791,96	17.426.932.033,30	12.091.938.238,75		6,05
	Jumlah Aset Lancar	**74.900.285.348,74**	**103.962.545.212,01**	**89.360.136.233,80**	**155.807.791.447,60**		**33,04**
1.2	**Aset Tetap**						
1.2.1	Tanah	198.359.005.908,00	202.892.457.359,00	275.131.126.892,00	363.227.089.655,50		23,30
1.2.2	Peralatan dan Mesin	265.746.484.175,96	287.071.677.989,22	306.178.885.117,00	337.965.733.968,49		8,35
1.2.3	Gedung dan Bangunan	516.325.934.361,89	557.897.654.692,18	629.924.778.760,09	660.496.631.968,64		8,61
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	978.405.780.408,83	1.041.645.203.611,11	1.106.341.328.029,13	1.124.199.654.837,48		4,76
1.2.5	Aset Tetap Lainnya	8.823.226.607,00	9.737.201.957,00	10.850.667.707,00	15.486.249.757,00		21,51
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.811.179.364,69	6.450.342.638,69	32.416.055.244,67	28.252.398.753,51		133,57
1.2.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-815.727.345.936,57	-859.811.723.724,11	-1.043.913.859.247,27	-1.186.884.190.316,65		13,50
	Jumlah Aset Tetap	**1.157.744.264.889,80**	**1.245.882.814.523,09**	**1.316.928.982.502,62**	**1.342.743.568.623,97**		**5,09**
1.3	**Aset Lainnya**						
1.3.1	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3.2	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	776.531.625,00	776.531.625,00	776.531.625,00	965.309.034,00		8,10
1.3.3	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

No	Uraian	Tahun (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021*	
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.3.4	Aset Tak Berwujud	1.495.175.750,00	863.472.500,00	635.744.076,82	384.724.467,88		-36,04
1.3.5	Aset Lain - Lain	214.653.610.211,24	120.788.681.201,80	68.155.992.317,71	40.460.684.660,53		-42,65
1.3.6	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Jumlah Aset Lainnya	**216.925.317.586,24**	**122.428.685.326,80**	**69.568.268.019,53**	**41.810.718.162,41**		**-42,21**
	JUMLAH ASET	**1.449.569.867.824,78**	**1.472.274.045.061,90**	**1.475.857.386.755,95**	**1.540.362.078.233,98**		**2,06**
2	**KEWAJIBAN**						
2.1	**Kewajiban Jangka Pendek**						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	13.036.310,00	0,00	6.195.771,00	0,00		-100,00
2.1.2	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3	Utang PPh Pasal 21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.4	Utang PPh Pasal 22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.5	Utang PPh Pasal 23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.6	Utang PPN	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.7	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.8	Pendapatan Diterima Dimuka	11.384.896,00	15.092.552,33	8.800.312,75	17.891.461,08		31,39
2.1.9	Utang beban	21.040.986.762,53	17.916.376.118,53	19.287.459.257,81	12.195.380.332,81		-14,66
2.1.10	Utang Bagian Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

No	Uraian	Tahun (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021*	
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.1.11	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**21.065.407.968,53**	**17.931.468.670,86**	**19.302.455.341,56**	**12.213.271.793,89**		**-14,65**
2.2	**Kewajiban Jangka Panjang**						
	Utang Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	**21.065.407.968,53**	**17.931.468.670,86**	**19.302.455.341,56**	**12.213.271.793,89**		**-14,65**
3	**EKUITAS DANA**						
3.1	**Ekuitas Dana Lancar**						
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	49.197.165.268,57	29.576.207.860,18	71.190.665.488,19	56.236.690.904,43		26,60
3.1.2	Pendapatan Yang Ditangguhkan	-	-	-	-		
3.1.3	Çadangan Piutang	-	-	-	-		
3.1.4	Cadangan Persediaan	-	-	-	-		
3.1.5	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	-	-	-	-		

No	Uraian	Tahun (Rp.)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	2021*	
		Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	Rp. (juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	**49.197.165.268,57**	**29.576.207.860,18**	**71.190.665.488,19**	**56.236.690.904,43**		**26,60**
3.2	**Ekuitas Dana Investasi**	-	-	-	-		
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	-	-	-	-		
3.2.1	Diinvestasikan Dalam Aset tetap	-	-	-	-		
3.2.2	Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	-	-	-	-		
3.2.3	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-	-	-		
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	-	-	-	-		
	JUMLAH EKUITAS DANA	**1.498.409.253.310,62**	**1.523.406.685.344,41**	**1.524.315.393.390,76**	**1.600.078.268.416,46**		**2,23**
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**1.519.474.661.279,15**	**1.541.338.154.015,27**	**1.543.617.848.732,32**	**1.612.291.540.210,35**		**2,01**

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

3.2.1 Aset

Analisis aset meliputi empat aspek utama, yakni aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Selama periode 2017-2021, Kabupaten Takalar mencatatkan perkembangan aset daerah dengan rata-rata pertumbuhan 2,06 persen. Pertumbuhan tersebut terutama dikontribusi dari aset lancar yang mencapai 33,04 persen, sedangkan aset tetap mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 5,09 persen. Pada periode yang sama, aset lancar mengalami penurunan capaian dengan rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -42,21 persen. Rendahnya pertumbuhan aset daerah secara keseluruhan disebabkan oleh penurunan yang terjadi pada rata-rata pertumbuhan aset lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan aset daerah lebih banyak ditujukan untuk memenuhi kewajiban- kewajiban jangka pendek daerah.

3.2.2 Kewajiban

Analisis yang terkait dengan kewajiban daerah, diklasifikasi ke dalam dua komponen, yakni kewajiban jangka pendek, dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban di dalam neraca memberi gambaran tentang besar-kecilnya utang pemerintah daerah terhadap pihak ketiga. Kewajiban pemerintah daerah menggambarkan semua jenis utang pemerintah daerah yang dilakukan pada periode tahun sebelumnya. Kewajiban daerah Kabupaten Takalar selama periode 2017-2021 terus mengalami penurunan dengan capaian kewajiban rata – rata sebesar -14,65 persen setiap tahunnya. Penurunan kewajiban daerah tersebut, terutama didorong oleh komponen pendapatan diterima di muka yang bertumbuh rata-rata sebesar 31,39 persen, kemudian rata-rata pertumbuhan utang beban sebesar -14,66 persen serta yang bertumbuh rata-rata sebesar -100 persen. Ketiga komponen inilah yang mendorong rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek hingga -14,65 persen setiap tahunnya selama periode 2017-2021. Sedangkan komponen-komponen kewajiban lainnya tidak berkontribusi sama sekali dengan realisasi 0 persen.

3.2.3 Ekuitas Dana

Secara konseptual, ekuitas dana merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah yang terbagi dalam tiga kategori, yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya. Ekuitas dana Kabupaten Takalar selama

periode 2017-2021 mengalami trend positif, meskipun rata - rata pertumbuhan yang relative kecil yakni hanya 2,23 persen setiap tahunnya. Kecilnya rata-rata pertumbuhan ekuitas dana dipengaruhi oleh minimnya kontribusi komponen ekuitas dana lancar, sedangkan komponen ekuitas dana investasi sama sekali tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan dana ekuitas. Meskipun demikian ekuitas dana tetap memperlihatkan sebuah pertumbuhan dan mampu menciptakan keseimbangan keuangan yang baik, antara aset daerah dengan kewajiban dan ekuitas dana yang secara rata-rata tumbuh sebesar 2,01 persen.

3.2.4 Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Takalar dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.2.4.1 Rasio Likuiditas

Kondisi Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio lancar mengalami penurunan/kenaikan dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021, hal ini menunjukkan besarnya/kecilnya aktiva lancar yang dapat digunakan untuk menutupi kewajiban jangka pendek atau utang lancarnya. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar mengartikan bahwa semakin tinggi pula kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kewajiban utang lancarnya. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III- 6 : Rasio Lancar Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2017	74.900.285.348,74	21.065.407.968,53	1 : 3,55
2	2018	103.962.545.212,01	17.931.468.670,86	1 : 5,79
3	2019	89.360.136.233,80	19.302.455.341,56	1 : 4,6
4	2020	155.807.791.447,60	12.213.271.793,89	1 : 12,75
5	2021*			

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Demikian pula yang diukur menggunakan Rasio Quick, rasio ini akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membayar

kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar atau tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan akan membutuhkan waktu yang lama untuk diuangkan dibanding dengan aset lainnya. Rasio cepat (Quick Ratio) Kabupaten Takalar menunjukkan nilai yang semakin menurun/naik dari Tahun 2017 ke Tahun 2021, kondisi ini perlu perhatian khusus yang mempertimbangkan penambahan hutang jangka pendek di tahun-tahun selanjutnya pada tabel berikut.

Tabel III- 7 : Rasio Quick Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Aset Lancar (Rp)	Persediaan (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2017	74.900.285.348,74	11.293.477.539,32	21.065.407.968,53	1 : 2,32
2	2018	103.962.545.212,01	13.333.559.791,96	17.931.468.670,86	1 : 3,32
3	2019	89.360.136.233,80	17.426.932.033,30	19.302.455.341,56	1 : 2,43
4	2020	155.807.791.447,60	12.091.938.238,75	12.213.271.793,89	1 : 6,41
5	2021*				

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Rasio Likiuditas yang diukur dengan rasio cash menunjukkan fluktuatif selama Tahun 2017-2021. Namun demikian, kemampuan membayar utang jangka pendek menunjukan kondisi yang sangat baik. Rincian rasio Cash daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III- 8 : Rasio Kas Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Kas (Rp)	Kewajiban Jangka Pendek (Rp)	Rasio
1	2017	29.886.990.926,18	21.065.407.968,53	1 : 1,41
2	2018	71.190.665.488,19	17.931.468.670,86	1 : 3,97
3	2019	56.242.886.675,43	19.302.455.341,56	1 : 2,91
4	2020	121.215.699.203,08	12.213.271.793,89	1 : 9,92
5	2021*			

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

3.2.4.2 Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas : Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Takalar.

Rasio total hutang terhadap total ekuitas pada Tahun 2017 hingga 2021 tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kisaran nilai 1,41 persen hingga 0,76 persen. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada Tahun 2017 lebih tinggi dari Tahun 2020, dan pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil, sedangkan data untuk Tahun 2021 belum bias diperoleh (nihil). Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel III.6 dan tabel berikut.

Tabel III- 9 : Rasio Total Kewajiban dengan Ekuitas Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Total Kewajiban	Ekuitas Dana	Rasio Hutang Terhadap Ekuitas
1	2017	21.065.407.968,53	1.498.409.253.310,62	1 : 71,13
2	2018	17.931.468.670,86	1.523.406.685.344,41	1 : 84,95
3	2019	19.302.455.341,56	1.524.315.393.390,76	1 : 78,97
4	2020	12.213.271.793,89	1.600.078.268.416,46	1 : 131,01
5	2021*			

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Tabel III- 10 : Rasio Total Kewajiban dengan Aset Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021

No	Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Aset (Rp)	Rasio
1	2017	21.065.407.968,53	1.449.569.867.824,78	1 : 68,81
2	2018	17.931.468.670,86	1.472.274.045.061,90	1 : 82,10
3	2019	19.302.455.341,56	1.475.857.386.755,95	1 : 76,46
4	2020	12.213.271.793,89	1.540.362.078.233,98	1 : 126,11
5	2021*			

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

3.2.4.3 Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas tidak relevan untuk dihitung dalam analisis keuangan karena Pemerintah Kabupaten Takalar tidak memiliki piutang.

3.3 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar sebagaimana tergambar dalam APBD selama periode 2017-2021, menguraikan dua aspek penting, yakni (1) proporsi penggunaan anggaran dan (2) hasil analisis pembiayaan. Pada kedua aspek ini telah dicermati sejumlah kebijakan keuangan daerah khususnya yang terkait orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Orientasi alokasi belanja dan pembiayaan pembangunan daerah ini sangat terkait dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada periode pembangunan berjalan, sehingga sangat terkait pada penguatan kapasitas terhadap pelayanan publik untuk penciptaan kesejehteraan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan, pemerintah Kabupaten Takalar telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan ASN. Khusus penyelamatan aset daerah, pada Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Takalar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengadakan supervisi dan penyelamatan aset terkait pendanaan, personil, prasarana dan dokumen (P3D). Selaian itu KPK juga mendorong dilakukan rekonsiliasi aset dengan untuk melancarkan proses sertifikasi dan perlindungan aset milik Pemerintah Kabupaten Takalar. Hal ini dilakukan karena sebagian aset pemda dikuasai oleh pihak ketiga. Pada tahun yang sama Kabupaten Takalar juga berhasil meningkatkan PAD sebesar Rp.22,03 Milyar lebih atau sebesar 21 persen dari Tahun 2019.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Takalar Untuk meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Takalar ditempuh dengan memberikan tambahan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Pemberian TPP telah melewati proses fasilitasi Ditjen Otoda Kemendagri dan Korsupgah KPK yang tertuang dalam peraturan Bupati No: 4 Tahun Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar. Tambahan TPP tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, agar memacu kinerja ASN agar semakin disiplin, inovatif, dan produktif.

3.3.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan Anggaran belanja untuk kebutuhan aparatur selama tahun 2017-2021 mengalami penurunan setiap tahunnya kecuali Tahun 2021 yang mengalami kenaikan. Tahun 2017 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur sebesar Rp.620,73 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 57,36 persen dari total pengeluaran daerah. Tahun 2018 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur menurun menjadi Rp.613,86 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 55.19 persen dari total pengeluaran daerah. Kemudian Tahun 2019 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali mengalami penurunan menjadi Rp.603,87 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 52,43 persen dari total pengeluaran daerah. Tahun 2020 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur kembali turun menjadi Rp.561,90 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 61,88 persen dari total pengeluaran daerah. Selanjutnya Tahun 2021 total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami peningkatan menjadi Rp.632,34 Milyar lebih atau memiliki kontribusi sebesar 57,95 persen dari total pengeluaran daerah. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Takalar Tahun 2017-2021 ditunjukan pada tabel III.10.

Tabel III- 11 : Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021

No	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (belanja + pengeluaran pembiayaan) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a) / (b) x 100%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2017	620.737.607.206,00	1.082.225.087.791,88	57,36
2	2018	613.866.479.007,44	1.112.294.294.807,43	55,19
3	2019	603.879.455.488,00	1.151.698.573.007,36	52,43
4	2020	561.907.724.467,95	907.998.613.324,58	61,88
5	2021*	632.342.608.336,00	1.091.204.408.512,72	57,95

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

3.3.2 Analisis Pembiayaan

Defisit Rill Anggaran Kabupaten Takalar selama Tahun 2017-2021 mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun secara komulatif mengalami kenaikan. Pada Tahun 2017 nilai defisit sebesar Rp. 19,49 Milyar lebih, mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi Rp.183,94 Milyar lebih pada Tahun 2021. Defisit rill anggaran Kabupaten Takalar selama periode Tahun 2017-2021 secara keseluruhan ditutupi dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Defisit Riil dan Komposisi penutupan defisit Anggaran, serta realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021 secara berturut-turut ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel III- 12 : Defisit Riil Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Tahun (Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.062.726.104.051,49	1.032.378.202.462,44	998.831.331.773,40	895.093.403.514,28	906.955.429.589,88
	Dikurangi Realisasi					
2	Belanja Daerah	1.079.225.087.791,88	1.112.294.294.807,43	1.146.798.573.007,36	987.775.068.324,58	1.089.899.000.668,72
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	3.000.000.000,00	-	4.900.000.000,00	4.151.000.000,00	1.000.000.000,00
A	**Defisit Riil**	**(19.498.983.740,39)**	**(79.916.092.344,99)**	**(152.867.241.233,96)**	**(96.832.664.810,30)**	**(183.943.571.078,84)**

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Tabel III- 13 : Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2017	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun anggaran sebelumnya	98,28	100,22	100,00	100,00	93,15
2	Pencairan dana cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan pinjaman daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Tabel III- 14 : Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Takalar Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021		Rata - rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	**Jumlah SILPA**	**49.197.165.269**	**100,00**	**29.576.207.860**	**100,00**	**71.190.665.488,19**	**100,00**	**56.236.690.904**	**100,00**	**116.836.238.840,70**	**100,00**	**100,00**
1.1	Pelampauan penerimaan PAD	1.129.716.722	2,30	5.510.839.950,00	18,63	2.143.546.199,57	3,01	-	0,00	-	0,00	4,79
1.2	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	48.067.448.547	97,70		0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	19,54
1.3	Pelampauan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	0,00	(122.303.000,00)	-0,41	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-0,08
1.4	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	-	0,00	24.187.670.910,18	81,78	69.047.119.288,62	96,99	56.236.690.904	100,00	-	0,00	55,75
1.5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
1.6	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Kinerja	-	0,00	-	0,00	-	0,00	0	0,00	116.836.238.840,70	100,00	20,00

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

3.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Takalar selama empat tahun ke depan. Dalam konteks pandemi global Covid-19, ruang fiskal pada periode RPD Tahun 2023-2026 diharapkan semakin lebar, hal ini disebabkan oleh upaya yang dilakukan pemerintah dengan capaian rata-rata vaksinasi seluruh Indonesia diatas 70 persen menuju *Herd Immunity* (kekebalan kelompok), sehingga refocusing dana APBD pada setiap OPD yang dialokasikan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran virus Covid-19 sudah jauh menurun dengan prioritas pemulihan perekonomian masyarakat lebih dikedepankan. Dengan demikian APBD bisa lebih difokuskan pada pendanaan program/kegiatan sesuai prioritas daerah.

3.4.1 Asumsi Ekonomi, Sosial, dan Fiskal

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah didasarkan atas asumsi makro ekonomi daerah, asumsi kondisi sosial masyarakat, dan asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023-2026. Ketiga asumsi ini memiliki korelasi secara langsung dan secara tidak langsung pada keuangan daerah ke depan, baik dari sisi pendapatan daerah maupun belanja daerah. Artinya, asumsi tersebut, selain akan menuntun proyeksi besaran pendapatan daerah, juga akan menentukan besarnya kebutuhan belanja daerah untuk jangka waktu empat tahun ke depan.

Asumsi makro ekonomi daerah Kabupaten Takalar yang diharapkan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan daerah Takalar empat tahun ke depan. Terkait dengan sudah melandainya wabah Covid-19 akan memberikan imbas positif terhadap perekonomian Takalar di beberapa sektor antara lain : 1) sektor pariwisata; serta 2) sektor perdagangan besar dan eceran. Berdasarkan hal tersebut, pertumbuhan ekonomi Takalar pada Tahun 2023-2026 diperkirakan akan tumbuh positif, dan jika kondisi semakin membaik dengan tercapainya Herd Community dan beraihnya status pandemi Covid-19 menjadi endemi, maka perekonomian Takalar diperkirakan akan mengalami pertumbuhan di atas 4-5 persen.

Dalam pencapaian sasaran indikator makro ekonomi daerah, pemerintah daerah Takalar selain berperan secara langsung dalam implementasi program pembangunan yang teralokasikan dalam APBD Kabupaten Takalar, secara tidak langsung juga dituntut untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku ekonomi lainnya dalam menjalankan aktivitas usahanya di Takalar. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing memberikan kontribusi pada pencapaian sasaran makro ekonomi Takalar, mulai pertumbuhan ekonomi, laju inflasi yang stabil, PDRB per kapita meningkat, persentase penduduk miskin yang menurun, indeks pembangunan manusia yang meningkat, pertumbuhan investasi yang tinggi, serta tingkat pengangguran terbuka yang menurun dan mencapai tingkat yang terendah. Indikator makro ekonomi daerah tersebut, bukan hanya berimplikasi pada kebutuhan belanja pembangunan daerah yang juga tidak sedikit, tetapi juga diharapkan mampu memberi dampak langsung pada peningkatan kapasitas keuangan daerah. Kemudian secara tidak langsung menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat secara luas, melalui pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kegiatan ekonomi sektor swasta, serta meningkatkan aktivitas perdagangan domestik dan luar negeri.

Asumsi pokok-pokok kebijakan fiskal khususnya Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023-2026 diperkirakan akan tumbuh positif. Hal ini disebabkan oleh melandainya wabah Covid-19.

Tabel III- 15 : Asumsi Capaian Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Perkiraan Capaian Tahun 2022	Tahun				Kondisi Akhir Periode
			2020	2021		2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,61	3,40-4,80	4,10-5,55	4,62-5,98	5,04-6,52	6,10-7,14	6,22-7,78	6,22-7,78
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,16	3,93	3,50	3,32	3,11	2,90	2,69	2,69
3	Inflasi	%	2,13	1,49	1,96	2,43	3,48	3,51	3,88	3,88
4	PDRB Per Kapita	Juta Rp	33,91	36,63	39,77	43,38	49,52	51,24	56,51	56,51
5	Tingkat Kemiskinan	%	8,44	8,25	7,35	7,09	6,90	6,69	6,60	6,60
6	Indeks Gini	Angka	0,360	0,368	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365	0,365
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,31	67,72	68,24	68,83	69,70	70,31	70,54	70,54

Sumber : Bappelitbangda 2022; data diolah

Tabel III- 16 : Asumsi Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

No.	Indikator	2023		2024		2025		2026	
		Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r	Pagu (Rp)	r
1	Pendapatan Asli Daerah	217.390.200.886,00	16,92	230.714.666.219,00	17,78	248.315.745.439,00	18,88	271.447.269.319,00	20,28
2	Pendapatan Transfer	1.021.867.891.716,00	79,55	1.021.867.891.716,00	78,73	1.021.867.891.716,00	77,68	1.021.867.891.716,00	76,34
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	45.275.300.000,00	3,52	45.275.300.000,00	3,49	45.275.300.000,00	3,44	45.275.300.000,00	3,38

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

3.4.2 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Struktur Pendapatan dan Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2023-2026 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Pendapatan Daerah dengan rincian pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan komponen belanja daerah dibagi atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Komponen Pendapatan diproyeksikan berdasarkan data pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah yang menghasilkan Pendapatan Daerah. Data tersebut ditabulasi dan diproyeksi dengan beberapa asumsi:

a. Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten Takalar belum cukup tinggi karena proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah selama Tahun 2023-2026 diproyeksikan rata-rata sebesar 18,46 persen atau lebih rendah dari dana transfer yang mencapai rata-rata 78,08 persen. Pada kelompok PAD selama Tahun 2023-2026 kontribusi terbesar bersumber dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebesar 49,66 persen. Perhitungan proyeksi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah, memperhatikan karakteristik Pajak Daerah yang dipungut oleh Kabupaten Takalar, sebagai berikut :
    1) Pajak Hotel, dihitung berdasarkan prediksi jumlah okupansi hotel dan sejenisnya termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang ada di Kabupaten Takalar. Pajak jenis ini diprediksi meningkat dengan memperhitungkan potensi kunjungan wisatawan lokal dan domestik di Kabupaten Takalar dengan membaiknya kondisi pasca pandemic Covid-19.
    2) Pajak Restoran, dihitung berdasarkan prediksi jumlah pelanggan restoran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
    3) Pajak Hiburan, dihitung berdasarkan prediksi jumlah penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
    4) Pajak Reklame, dihitung berdasarkan penyelenggaraan reklame yang meliputi benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak ini berbanding lurus dengan media pemasangan reklame yang disediakan oleh pemerintah daerah.

5) Pajak Penerangan Jalan, dihitung berdasarkan penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Semakin besar masyarakat yang menggunakan tenaga listrik, maka akan semakin meningkatkan pendapatan dari pajak ini.
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dihitung berdasarkan prediksi kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pajak jenis ini meliputi tambang galian C dan tambang pasir laut yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Takalar.
7) Pajak Air Tanah, dihitung berdasarkan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Jenis pajak ini diprediksi meningkat dengan semakin besarnya produksi air kemasan yang beroperasi di Takalar antara lain Club, JS dan Nuqi.
8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dihitung berdasarkan jumlah objek pajak prediksi peningkatan potensi objek pajak PBB. Peningkatan realisasinya ditempuh melalui intensifikasi untuk meminimalisir pajak terutang setiap tahunnya serta ekstensifikasi melalui pendataan objek yang belum terbit SPPT nya.
9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dihitung berdasarkan prediksi transaksi jual beli atas tanah dan bangunan di Kabupaten Takalar dengan memperhatikan trend BPHTB beberapa tahun yang lalu.

b. Pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer diproyeksikan meningkat setiap tahun. Kontribusi DAU dan DAK terhadap dana transfer pusat sangat dominan. Proyeksi tingkat pertumbuhan dana transfer ditentukan dengan mempertimbangkan realisasi pertumbuhannya terhadap pertumbuhan kondisi ekonomi makro nasional.

c. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemerintah mengoptimalkan alternatif pembiayaan infrastruktur antara lain melalui Hibah dan Pinjaman melalui Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, Pemerintah, ataupun Lembaga yang mendapatkan penugasan seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Berbagai sumber-sumber pendanaan alternative strategis diatas, menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pendanaan yang dapat mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Takalar.

Tabel III- 17 : Proyeksi Anggaran pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026

NO.	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN APBD							
		TA. 2023		TA. 2024		TA. 2025		TA. 2026	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	PENDAPATAN DAERAH	**1.284.533.392.602,00**	**100,00**	**1.297.857.857.935,00**	**100,00**	**1.315.458.937.155,00**	**100,00**	**1.338.590.461.035,00**	**100,00**
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	**217.390.200.886,00**	**16,92**	**230.714.666.219,00**	**17,78**	**248.315.745.439,00**	**18,88**	**271.447.269.319,00**	**20,28**
	Pajak Daerah	48.375.099.640,00	22,25	58.375.099.640,00	25,30	75.976.178.840,00	30,60	95.976.178.840,00	35,36
	Retribusi Daerah	37.108.713.446,00	17,07	40.433.178.779,00	17,53	40.433.178.799,00	16,28	43.564.702.679,00	16,05
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	12.563.787.800,00	5,78	12.563.787.800,00	5,45	12.563.787.800,00	5,06	12.563.787.800,00	4,63
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	119.342.600.000,00	54,90	119.342.600.000,00	51,73	119.342.600.000,00	48,06	119.342.600.000,00	43,97
	PENDAPATAN TRANSFER	**1.021.867.891.716,00**	**79,55**	**1.021.867.891.716,00**	**78,73**	**1.021.867.891.716,00**	**77,68**	**1.021.867.891.716,00**	**76,34**
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**911.096.700.000,00**	**89,16**	**911.096.700.000,00**	**89,16**	**911.096.700.000,00**	**89,16**	**911.096.700.000,00**	**89,16**
	Dana Transfer Umum	**595.545.615.000,00**	**65,37**	**595.545.615.000,00**	**65,37**	**595.545.615.000,00**	**65,37**	**595.545.615.000,00**	**65,37**
	Dana bagi hasil pajak/bukan pajak	30.611.047.000,00	5,14	30.611.047.000,00	5,14	30.611.047.000,00	5,14	30.611.047.000,00	5,14

NO.	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN APBD							
		TA. 2023		TA. 2024		TA. 2025		TA. 2026	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Dana alokasi umum	564.934.568.000,00	94,86	564.934.568.000,00	94,86	564.934.568.000,00	94,86	564.934.568.000,00	94,86
	Dana Transfer Khusus	**240.506.057.000,00**	**26,40**	**240.506.057.000,00**	**26,40**	**240.506.057.000,00**	**26,40**	**240.506.057.000,00**	**26,40**
	Dana Alokasi Khusus Fisik	123.236.173.000,00	51,24	123.236.173.000,00	51,24	123.236.173.000,00	51,24	123.236.173.000,00	51,24
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	117.269.884.000,00	48,76	117.269.884.000,00	48,76	117.269.884.000,00	48,76	117.269.884.000,00	48,76
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**75.045.028.000,00**	**8,24**	**75.045.028.000,00**	**8,24**	**75.045.028.000,00**	**8,24**	**75.045.028.000,00**	**8,24**
	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Desa	75.045.028.000,00	100	75.045.028.000,00	100	75.045.028.000,00	100	75.045.028.000,00	100
	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfer Pemerintah Provinsi	**35.726.163.716,00**	**3,50**	**35.726.163.716,00**	**3,50**	**35.726.163.716,00**	**3,50**	**35.726.163.716,00**	**3,50**
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	28.035.711.000,00	78,47	28.035.711.000,00	78,47	28.035.711.000,00	78,47	28.035.711.000,00	78,47
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NO.	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN APBD							
		TA. 2023		TA. 2024		TA. 2025		TA. 2026	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Pendapatan Bantuan Keuangan	7.690.452.716,00	21,53	7.690.452.716,00	21,53	7.690.452.716,00	21,53	7.690.452.716,00	21,53
	LAIAN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**45.275.300.000,00**	**3,52**	**45.275.300.000,00**	**3,49**	**45.275.300.000,00**	**3,44**	**45.275.300.000,00**	**3,38**
	Hibah	45.275.300.000,00	100,00	45.275.300.000,00	100,00	45.275.300.000,00	100,00	45.275.300.000,00	100,00
	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	**1.284.533.392.602,00**	**100,00**	**1.297.857.857.935,00**	**100,00**	**1.315.458.937.155,00**	**100,00**	**1.338.590.461.035,00**	**100,00**

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Tabel III- 18 : Proyeksi Anggaran Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 – 2026

NO.	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN APBD							
		TA. 2023		TA. 2024		TA. 2025		TA. 2026	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	BELANJA DAERAH	**1.248.283.392.602**	**100,00**	**1.256.607.857.935**	**100,00**	**1.284.208.937.155**	**100,00**	**1.307.340.461.035**	**100,00**
	Belanja Operasi	**776.274.349.109**	**62,19**	**788.695.774.874**	**62,76**	**810.544.272.655**	**63,12**	**833.675.796.547**	**63,77**
	Belanja Pegawai	496.037.085.277	63,90	511.719.363.110	65,92	529.128.254.810	68,16	552.317.591.210	71,15
	Belanja Barang dan Jasa	258.042.048.920	33,24	254.839.009.352	32,83	259.336.427.933	33,41	259.336.427.925	33,41
	Belanja Bunga	2.339.062.500	0,30	2.281.250.000	0,29	2.223.437.500	0,29	2.165.625.000	0,28
	Belanja Subsidi	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Belanja Hibah	18.245.353.074	2,35	18.245.353.074	2,35	18.245.353.074	2,35	18.245.353.074	2,35
	Belanja Bantuan Sosial	1.610.799.338	0,21	1.610.799.338	0,21	1.610.799.338	0,21	1.610.799.338	0,21
	Belanja Modal	**330.057.759.593**	**26,44**	**325.960.799.161**	**25,94**	**331.713.380.600**	**25,83**	**331.713.380.588**	**25,37**
	Belanja Modal	330.057.759.593	100,00	325.960.799.161	100,00	331.713.380.600	100,00	331.713.380.588	100,00
	Belanja Tidak Terduga	**4.000.000.000**	**0,32**	**4.000.000.000**	**0,32**	**4.000.000.000**	**0,31**	**4.000.000.000**	**0,31**
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	100,00	4.000.000.000	100,00	4.000.000.000	100,00	4.000.000.000	100,00
	Belanja Transfer	**137.951.283.900**	**11,05**	**137.951.283.900**	**10,98**	**137.951.283.900**	**10,74**	**137.951.283.900**	**10,55**
	Belanja Bagi Hasil	4.646.694.400	3,37	4.646.694.400	3,37	4.646.694.400	3,37	4.646.694.400	3,37
	Belanja Bantuan Keuangan	133.304.589.500	96,63	133.304.589.500	96,63	133.304.589.500	96,63	133.304.589.500	96,63
	Jumlah Belanja Daerah	**1.248.283.392.602**	**100,00**	**1.256.607.857.935**	**100,00**	**1.284.208.937.155**	**100,00**	**1.307.340.461.035**	**100,00**
	Surplus/(Defisit)	**36.250.000.000**		**41.250.000.000**		**31.250.000.000**		**31.250.000.000**	

NO.	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN APBD							
		TA. 2023		TA. 2024		TA. 2025		TA. 2026	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	PEMBIAYAAN DAERAH	**-36.250.000.000**	**-100,00**	**-41.250.000.000**	**-100,00**	**-31.250.000.000**	**-100,00**	**-31.250.000.000**	**-100,00**
	Penerimaan Pembiayaan	**7.700.000.000**	**21,24**	**7.700.000.000**	**18,67**	**7.700.000.000**	**24,64**	**7.700.000.000**	**24,64**
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	7.700.000.000	100,00	7.700.000.000	100,00	7.700.000.000	100,00	7.700.000.000	100,00
	Pencairan Dana Cadangan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Penerimaan Piutang Daerah	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**7.700.000.000**	**21,24**	**7.700.000.000**	**18,67**	**7.700.000.000**	**24,64**	**7.700.000.000**	**24,64**
	Pengeluaran Pembiayaan	**43.950.000.000**	**-121,24**	**48.950.000.000**	**-118,67**	**38.950.000.000**	**-124,64**	**38.950.000.000**	**-124,64**
	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000	11,38	10.000.000.000	20,43		0,00		0,00

NO.	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN APBD							
		TA. 2023		TA. 2024		TA. 2025		TA. 2026	
		(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%	(Rp.)	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	7.700.000.000	17,52	7.700.000.000	15,73	7.700.000.000	19,77	7.700.000.000	19,77
	Pembayaran Pokok Utang	31.250.000.000	71,10	31.250.000.000	63,84	31.250.000.000	80,23	31.250.000.000	80,23
	Pemberian Pinjaman Daerah								
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**43.950.000.000**	**-121,24**	**48.950.000.000**	**-118,67**	**38.950.000.000**	**-124,64**	**38.950.000.000**	**-124,64**
	Pembiayaan Netto	**-36.250.000.000**	**-100,00**	**-41.250.000.000**	**-100,00**	**-31.250.000.000**	**-100,00**	**-31.250.000.000**	**-100,00**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	**0**		**0**		**0**		**0**	

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

3.4.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dialokasikan kedalam 2 (dua) prioritas yaitu: Prioritas Pertama, untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar; Prioritas Kedua, untuk membiayai belanja pemenuhan Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah; serta untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar tertuang pada Table III.18. Kapasitas riil Pemerintah Kabupaten Takalar selama 4 (empat) tahun yang akan datang, dipergunakan untuk membiayai 2 (dua) kelompok prioritas sebagai berikut :

Prioritas Pertama Untuk membiayai belanja wajib yang ketentuannya diatur didalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

a. Belanja Fungsi Pendidikan, bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBD berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Belanja Fungsi Kesehatan, bahwa anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD sesuai Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
c. Belanja Infrastruktur, penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk mencapai target belanja infrastruktur daerah minimal 25 persen, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI;
d. Belanja Yang Bersumber Dari Pajak Rokok hak Kabupaten dengan komposisi : 50 persen specific grant dan 50 persen block grant, dari yang 50 persen specific grant, 75 persen untuk iuran JKN, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.
e. Belanja Bantuan Keuangan dari Kabupaten ke Desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit sebesar 10% dari Dana Perimbangan (DAU dan DBH) berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
f. Belanja khusus untuk pengawasan yang dialokasikan ke Inspektorat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan APBD

yang mengamanahkan alokasi dana (pagu) untuk pengawasan ke Inspektorat yakni diatas 10 Milyar atau 0,75% dari APBD.

Sedangkan Belanja Mengikat (Mandatory Expenditure), digunakan untuk sebagai berikut : Belanja Pegawai; Belanja DAK BOS; Belanja Operasional Kantor; dan Belanja Fungsional (RS yang melaksanakan PPK BLUD), juga untuk memenuhi belanja yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya seperti Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Belanja Tidak Terduga serta Belanja untuk pemenuhan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Prioritas Kedua untuk memenuhi belanja dalam rangka menjalankan Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam RPD, terdiri dari 3 (tiga) Tujuan dan 8 (delapan) sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

1. Memperkuat daya saing daerah
2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan
3. Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan

Sasaran :

1. Meningkatnya kualitas hidup manusia
2. Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah
3. Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah
4. Berkurangnya penduduk miskin
5. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
8. Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban

Prioritas Kedua juga digunakan untuk membiayai prioritas penyelenggaraan Pemerintah Daerah lainnya. Adapun Nilai kapasitas riil pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2023–2026, serta pembagian alokasi anggaran berdasarkan prioritas tersebut diatas ditunjukkan pada tabel III.19 dan tabel III.20 berikut:

Tabel III- 19 : Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi			
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Pendapatan	1.284.533.392.602,00	1.297.857.857.935,00	1.315.458.937.155,00	1.338.590.461.035,00
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-
3	Sisa lebih riil perhitungan anggaran	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00
4	Pinjaman Daerah				
	Total penerimaan	**1.292.233.392.602,00**	**1.305.557.857.935,00**	**1.323.158.937.155,00**	**1.346.290.461.035,00**
5	Dikurangi				
6	Belanja Operasi + BTT + Belanja Transfer				
7	Pengeluaran Pembiayaan	43.950.000.000,00	48.950.000.000,00	38.950.000.000,00	38.950.000.000,00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	**1.248.283.392.602,00**	**1.256.607.857.935,00**	**1.284.208.937.155,00**	**1.307.340.461.035,00**

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Tabel III- 20 : Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

No	Uraian	Proyeksi				Rata-rata Proporsi Per tahun (%)
		2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
I	**Kapasitas riil kemampuan keuangan**	**1.248.283.392.602,00**	**1.256.607.857.935,00**	**1.284.208.937.155,00**	**1.307.340.461.035,00**	**100,00**
1	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	982.294.257.775,73	1.005.646.353.944,96	1.024.282.528.121,21	1.052.507.224.641,88	79,75
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	265.989.134.826,27	250.961.503.990,04	259.926.409.033,79	254.833.236.393,12	20,25

Sumber : BKAD dan BAPPELITBANGDA Kabupaten Takalar; Tahun 2022

3.5 Pembiayaan Pembangunan Daerah Non Pemerintah

Untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah yang berimplikasi pada semakin meningkatnya kebutuhan dana dan pembiayaan pembangunan di daerah, sementara itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai keterbatasan dalam kemampuan pembiayaan pembangunan daerah, untuk itu dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan lain melalui Kemitraan Pembiayaan Daerah yang dilakukan antara Pemerintah, Swasta maupun dengan Dunia Usaha, melalui :

3.5.1 Pembiayaan melalui pinjaman daerah

Pembangunan Infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Infrastruktur yang layak dan memadai mampu meningkatkan percepatan pembangunan ekonomi dan sosial suatu daerah melalui penciptaan efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan. Salah satu komponen penting pada pembangunan infrastruktur yang baik didukung oleh pembiayaan yang layak dalam tahap perencanaan (planning), proses pembangunan (construction), hingga tahap operasi dan pemeliharaan infrastruktur (operational and maintenance). Konsep struktur pembiayaan meliputi pemilihan instrument keuangan, dan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada analisis estimasi arus kas yang dihasilkan baik berupa initial cash outflow yaitu pengeluaran kas untuk membiayai proyek selama dalam proses perencanaan, konstruksi, sampai dengan proyek siap untuk dioperasikan, maupun operational cash inflow yaitu penerimaan kas dari hasil pembangunan proyek infrastruktur dan pengeluaran kas untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Struktur pembiayaan yang baik memegang peranan penting dalam menanggulangi risiko konstruksi dan risiko ekonomi yang merupakan 2 risiko utama dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini disebabkan karena struktur pembiayaan mempengaruhi total life-cycle cost yang berdampak pada viabilitas keuangan suatu proyek pembangunan infrastruktur. Lebih lanjut, struktur pembiayaan yang baik juga akan mempengaruhi motivasi dan komitmen dari para pihak yang berpartisipasi sehingga mampu mencapai pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien. Pertimbangan konsep struktur pembiayaan pada proyek pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan komponen investasi yang baik dalam pelaksanaannya. Hal ini mengingat bahwa proyek

infrastruktur memiliki karakteristik dan keunikan dibandingkan dengan proyek lainnya.

Pembiayaan melalui pinjaman merupakan alternatif pendanaan APBD yang digunakan untuk : 1) menutup defisit APBD, pengeluaran pembiayaan; dan/atau kekurangan arus kas dalam rangka belanja modal daerah. 2) Percepatan pencapaian target Program Pembangunan Daerah. 3) Adanya kegiatan Prioritas Daerah. 4) Pembangunan infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Adapun alternative pinjaman yaitu melalui PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI"), Pemilihan PT. SMI, disebabkan beberapa hal yaitu:

1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang fokus pada pembiayaan infrastruktur.
2) Skema dan siklus pembiayaan tidak mengikuti tahun anggaran.
3) Tujuan pembiayaan untuk memperoleh manfaat ekonomi dan sosial serta manfaat lainnya.
4) Alternatif pembiayaan infrastruktur daerah

Adapun manfaat pinjaman daerah adalah :

1) Infrastruktur publik dapat segera memberikan manfaat kepada masyarakat.
2) Penghematan anggaran daerah dan meningkatkan pendapatan daerah (PAD).
3) Tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru di daerah.
4) Akselerasi program pembangunan jangka menengah daerah
5) Persiapan untuk mendapatkan akses instrumen pembiayaan yang lebih luas (salah satunya obligasi).

Adapun Jenis Pinjaman Daerah :

1) Pinjaman Jangka Pendek. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam tahun anggaran yang berkenaan. Pinjaman Jangka Pendek digunakan hanya untuk menutup kekurangan arus kas.
2) Pinjaman Jangka Menengah. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan gubernur, bupati, atau walikota yang bersangkutan. Pinjaman Jangka

Menengah digunakan untuk membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.

3) Pinjaman Jangka Panjang. Pinjaman Daerah dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, di mana kewajiban pembayaran kembali (pokok pinjaman, bunga, dan/atau kewajiban lainnya) harus dilunasi sesuai dengan persyaratan perjanjian. Pinjaman Jangka Panjang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi prasarana dan/atau sarana dalam rangka penyediaan pelayanan publik dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Menghasilkan penerimaan langsung berupa pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan pembangunan prasarana dan sarana tersebut;
   b. Menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya dikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidak dilaksanakan;
   c. Memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana ke depan secara lengkap dapat dilihat pada gambar skema berikut :

Gambar III- 1 : Konsep Pinjaman Daerah dan Rencana Ke depan

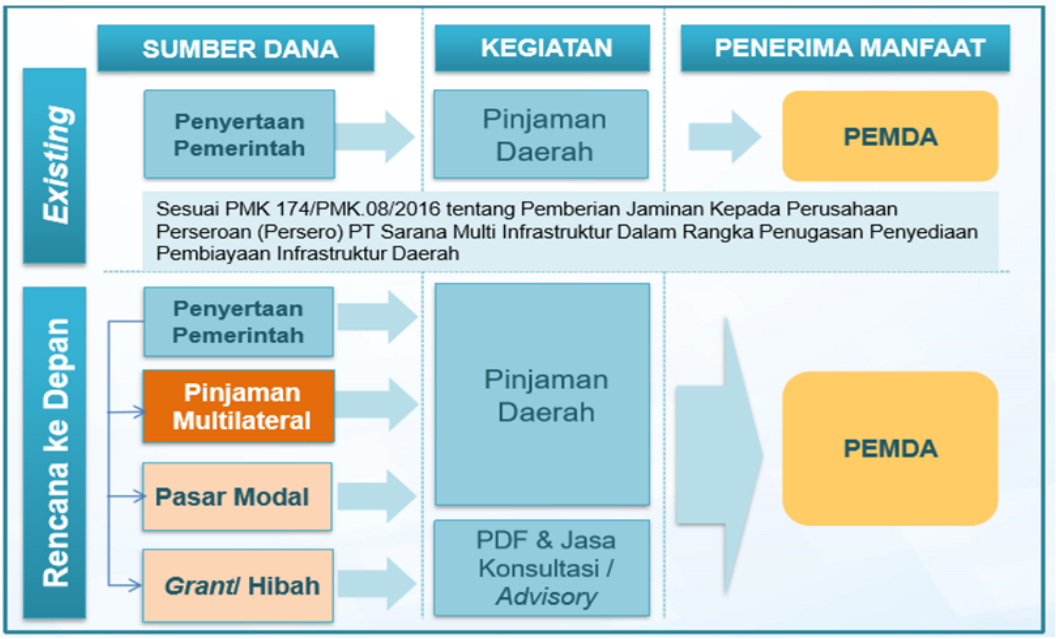

Rencana penyelenggaraan pinjaman daerah melalui PT. SMI di Kabupaten Takalar akan diarahkan untuk pembangunan Rumah Sakit Berakreditasi Internasional (RSI) beserta prasarananya, finalisasi kawasan kuliner Beba untuk UMKM, serta pembangunan jalan sebanyak 12 (dua belas) ruas.

3.6 Proyeksi Kebutuhan Investasi di Kabupaten Takalar

Dengan memperhitungkan target pembangunan wilayah Takalar, rencana kebutuhan investasi dalam empat tahun (2023-2026) mendatang sekitar Rp. 25 Triliun lebih. Dimana kebutuhan Investasi tersebut untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Takalar serta prioritas yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 antara lain untuk peruntukan Kawasan Industri (KI) Takalar, Pembangunan Bendungan Pammukkulu dan KSN Mamminasata.

Tabel III- 21 : Perkiraan Kebutuhan Investasi Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

No	Uraian	Perkiraan Kebutuhan Investasi (Trilyun Rupiah) 2023-2026
1	Bendungan Pammukkulu	1,984
2	Kawasan Industri (KI) Takalar	±10
3	KSN Mamminasata	±15

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Takalar, 2022 (Diolah)

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pada Sub Bab ini menguraikan isu-isu strategis Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan pokok yang dihadapi dalam proses pembangunan Kabupaten Takalar khususnya dalam masa Periode 2017-2021. Pada Gambaran Umum Kondisi Daerah yang telah disajikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih adanya persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam empat tahun kedepan. Sehingga permasalahan pembangunan yang disajikan merupakan buah pikir dari proses diskusi dan telaah terhadap kondisi kinerja pembangunan Kabupaten Takalar. Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yakni permasalahan untuk penentuan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

4.1.1 Permasalahan Pembangunan Untuk Penentuan Prioritas Daerah

Penuntasan permasalahan pembangunan merupakan salah satu esensi dari tujuan pembangunan daerah sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan tahap demi tahap. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan menjadi salah satu rujukan utama dalam merumuskan setiap kebijakan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah bersifat kompleks, baik bersumber dari permasalahan sektoral maupun wilayah. Dengan kebijakan yang tepat otomatis akan menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang efektif dan efisien dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. Untuk itu, hasil pengendalian dan evaluasi hasil-hasil pembangunan periode lalu sangat penting untuk memahami sejauhmana kebijakan pembangunan di masa lalu mampu memecahkan berbagai permasalahan.

Dari hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah dan analisis permasalahan pembangunan, permasalahan utama Kabupaten Takalar adalah “Kondisi Takalar belum sampai pada kondisi ideal yang diinginkan dan diharapkan oleh masyarakat”. Indikasi lebih lanjut atas permasalahan utama dimaksud dan menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam rencana pembangunan mendatang dijabarkan dalam permasalahan pokok.

Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan ke depan dengan disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode-periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan bersifat lokal, nasional maupun regional. Penjelasan lebih lanjut atas permasalahan pokok pembangunan daerah tersebut di atas, dijabarkan ke dalam permasalahan pembangunan daerah dan akar permasalahannya, sebagai berikut:

1 Masih rendahnya peningkatan kapasitas daya saing daerah secara berkelanjutan

Data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Takalar menunjukkan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, walaupun sejak dipublikasikannya IDSD Tahun 2017, Kabupaten Takalar baru mengikuti tahun 2019 sampai sekarang. Capaian IDSD Kabupaten Takalar Tahun 2019 adalah 1,20004 diatas Kabupaten Gowa dengan capain 0,851521 dan Kabupaten Jeneponto yang belum dinilai namun dibawah Kabupaten Pare – pare dengan capaian 3,05352. Capaian Tahun 2020 Kabupaten Takalar mengalami peningkatan yaitu 2.455 masih diatas Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto sebagai kabupaten tetangga dengan capaian Kabupaten Gowa sebesar 0.905 dan Kabupaten Jeneponto sebesar 0.139, namun masih dibawah Kabupaten Bone sebesar 2.978. Hasil penilaian menunjukkan bahwa Kabupaten Takalar masih perlu peningkatan di semua aspek. Untuk Pilar yang perlu perhatian adalah Dinamika Bisnis, Kapasitas inovasi, Perekonomian Daerah dan ukuran pasar.

Terkait dengan capaian 12 pilar Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2020 yaitu : Dinamika Bisnis nilai skor 1.375, Kapasitas Inovasi nilai skor 0.578, Kesiapan Teknologi nilai 2.000, Kelembagaan nilai skor 3.800, Infrastruktur nilai skor 2.917, Perekonomian Daerah nilai skor 1.786, Kesehatan nilai skor 3.500, Pendidikan dan Kesejahteraan nilai skor 2.625, Efisiensi Pasar Produk nilai skor 2.583, Ketenagakerjaan nilai skor 3.667, Akses Keuanagn nilai skor 2.167, Ukuran Pasar nilai skor 2.000. melihat data ini dapat disimpulkan bahwa pilar yang masih membutuhkan perhatian khusus yaitu Kapasitas Inovasi, Dinamika Pasar, Perekonomian Daerah, Ukuran Pasar, Kesiapsiagaan Teknologi, Akses Keuangan.

Dari sisi aspek Sumber Daya Manusia/ *Human Capital* belum optimal dalam mendukung peningkatan Indeks Daya Saing Daerah, Rendahnya kualitas manusia. Pokok masalah ini ditandai oleh IPM Takalar yg nilainya 67,72 pada tahun 2021, lebih rendah dari IPM Sulsel sebesar 72,24

dan nasional sebesar 72,29. Masalah pokok ini disebabkan oleh rendahnya indeks pendidikan sebesar 59,47, indeks kesehatan sebesar 72,77 dan pengeluaran perkapita masyarakat sebesar 10543 ribu rupiah. Akar masalahnya adalah masih rendahnya rata – rata lama sekolah sebesar 7,49, angka harapan lama sekolah sebesar 12,42 tahun, dan melek huruf Kabupaten Takalar Tahun 2021 sebesar 88,44 serta capaian SPM Pendidikan. Akar masalah lainnya adalah rendahnya angka harapan hidup 67,3 tahun dan capaian SPM Kesehatan 74,49%. Akar masalah lainnya adalah inflasi disebabkan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok dilihat dari Pengeluaran perkapita tahun 2021 sebesar .

Salah satu infrastruktur dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layak adalah masalah perumahan dan pemukiman. Jumlah rumah di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 adalah ±72.297 rumah. Salah satu prasyarat kondisi perumahan yang baik adalah apabila sanitasinya baik dan terstruktur. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan di Kabupaten Takalar pada tahun 2021 adalah 69.743 . Perhatian pemerintah harus diarahkan pada yang tidak menggunakan sanitasi yang layak karena sangat berpengaruh sekali dalam penurunan tingkat kesehatan di masyarakat. Penanganan sampah di Sulawesi Selatan pada Tahun 2017 sebesar 72,13% yang mengindikasikan bahwa upaya penanganan sampah belum dilakukan secara optimal. Beberapa faktor penghambat upaya penanganan sampah antara lain adalah masih TPA Balang belum sepenuhnya menggunakan sistem sanitary landfill. Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak di perkotaan dan perdesaan mencapai 76,69% sesuai data yang dirilis Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar Tahun 2021, akses air minum layak di perdesaan masih belum optimal, dikarenakan sumber air dan pengaliran yang digunakan masyarakat khususnya di Kecamatan Kepulauan Tanakeke. Kualitas infrastruktur aksesibilitas wilayah yang belum memadai dan tidak merata ditandai dengan masih rendahnya jaringan jalan dalam kondisi baik yaitu 53,64% dari panjang jalan 755 KM. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat penggunaan jalan di Kabupaten Takalar masih membutuhkan peningkatan guna meningkatkan akses pelayanan masyarakat, khususnya pada wilayah dengan kondisi jalan yang rusak dan daerah di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Tabel IV- 1 : Rumusan Masalah Masih Rendahnya Peningkatan Kapasitas Daya Saing Daerah Secara Berkelanjutan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Masih rendahnya indeks daya saing daerah Kabupaten Takalar	Sumber daya Manusia/ Human Capital belum optimal	Rata – rata lama sekolah masih rendah
		Harapan lama sekolah belum optimal
		Umur harapan hidup masih rendah
	Infrastruktur belum merata	Infrastruktur dasar yang belum optimal
		Sarana jalan kondisi baik belum terpenuhi
		Wilayah kepulauan

2 Pertumbuhan Ekonomi inklusif yang berkelanjutan belum optimal.

Rencana struktur ruang Kabupaten Takalar dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti pusat kegiatan nasional (PKN) diantaranya Bendungan Pammukkulu sejak Tahun 2017 sampai dengan 2022, pusat kegiatan wilayah pusat (PKW), kegiatan lokal maupun sub pusat kegiatan lokal, serta kawasan ibukota kecamatan dan kawasan pusat pertumbuhan industri Dari masalah utama pertumbuhan ekonomi inklusif yang belum optimal, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain: a. Potensi pariwisata masih perlu dikelola dengan maksimal Kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah masih sangat rendah yaitu hanya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD menurun di tahun 2021 dikarenakan masih dalam masa pandemi covid-19 dan juga target yang harus dicapai sangat tinggi (2,8 Milyar). Pada hal sebagai daerah yang memiliki kekayaan alam luar biasa potensial, Kabupaten Takalar memiliki beberapa tempat eksotis yang menjanjikan untuk menjadi tujuan pariwisata dunia. Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai obyek wisata yang memiliki daya tarik tetapi masih belum dikelola secara optimal padahal memiliki prospek pasar skala nasional dan internasional. Perlu adanya terobosan-terobosan yang baru dan efektif terkait pemasaran, pengelolaan resort, hingga peningkatan aksesibilitas menuju tempat wisata. Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Takalar terbentuk secara alamiah dari kondisi geografis, sejarah dan budaya. Potensi wisata yang berasal dari kondisi geografis meliputi obyek laut/bahari, pegunungan dan agro. Kawasan pariwisata berada di Kecamatan

Galesong Utara, Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kecamatan Polongbangkeng Utara, dan Kecamatan Sanrobone. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung di Kabupaten Takalar mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi -99,26 %. Oleh karena itu, agar potensi pariswisata bisa meningkatkan perekonomian wilayah dan menjadi sumber pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata yang berkesinambungan dan terarah.

Tingkat Pengangguran masih tinggi Jumlah angkatan kerja Tahun 2020 sebesar 143.243 orang meningkat di tahun 2021 sebanyak 151.752 orang, Komponen pembentuk angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada tahun 2020 tercatat sebesar 62,80 persen, meningkat 3,03 poin ditahun 2021 sebesar 65,83 persen. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2020 sebesar 4,16 turun menjadi 4 pada Tahun 2021. Ini menandakan bahwa tingkat pengangguran menurun pada tahun 2021.

Berbagai potensi sumber daya yang merupakan keanekaragaman dan kekayaan kabupaten Takala merupakan modal utama pelaksanaan pembangunan daerah. Namun dalam pengelolaannya, pemerintah daerah membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya sekaligus mempercepat laju roda perekonomian daerah. Realisasi penanaman modal di Kabupaten Takalar mengalami fluktuasi dan cenderung stagnan pada tahun-tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Takalar mencapai Rp.117.150.587.000 dengan jumlah investor 68 perusahaan Tahun 2021, mengingat cukup banyaknya potensi sumber daya alam, seharusnya investasi yang direalisasika untuk meningkatkan perekonomian dapat lebih dioptimalkan melalui berbagai kebijakan yang mendukung kemudahan penanaman modal.

Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Takalar belum tersedia yang bergerak disektor ekonomi sirkular, sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sampah yang menjadi masalah global. Disamping itu permaslaahan terkait promosi dan pemasaran produk – produk UKM yang belum optimal dengan melihat indikasi jumlah usaha mikro menjadi wirausaha sebesar 44,79 persen tahun 2021 mengalami peningkatan dari Tahun 2020 sebesar 39,49 persen.

Tabel IV- 2 : Rumusan Masalah Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Yang Berkelanjutan

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan yang belum maksimal	Faktor pasar belum tumbuh secara optimal	Produk – produk UKM belum bisa bersaing
		Kurangnya investasi PMDN
		Masih terbatasnya akses Permodalan bagi UMKM
		Tingkat pengangguran

3 Tata Kelola pemerintahan masih rendah;

Tata kelola pemerintah yang baik merupakan *core business* dalam mengimplementasikan pembangunan daerah mengingat aparatur pemerintah adalah subyek utama dalam pembangunan daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik menciptakan pelayanan publik yang cepat dan bersih sehingga tercipta kondisi yang kondusif antara pemerintahan dan masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat empat elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus diperhatikan untuk mencapai *good governance*, yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Empat hal tersebut akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Dari masalah utama belum terwujudnya secara optimal tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat beberapa permasalahan yang memicu masalah utama, antara lain:

1) Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan.

Hasil evaluasi tersebut menggambarkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika dihubungkan dengan capaian kinerja, ini di tandai dengan masih rendahnya indeks reformasi birokrasi, dimana pada Tahun 2020 mendapatkan nilai "C" dengan nilai 49,49. Penilaian dilakukan dengan mengukur delapan area perubahan reformasi birokrasi, yakni mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap indeks reformasi birokrasi dan tanggapan masyarakat melalui penilaian lapangan. Untuk meningkatkan indeks birokrasi maka kedelapan area perubahan reformasi birokrasi harus menjadi perhatian.

2) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja.

Nilai sakip pada tahun 2020 hanya bernilai CC (59,38), yang diukur dari komponen: 1) Perencanaan kinerja dengan nilai 21,08, 2) Pengukuran kinerja dengan nilai 13,07, 3) pelaporan kinerja dengan nilai 10,29, 4) evaluasi internal dengan nilai 4,1, dan 5) capaian kinrja dengan nilai 10,93.

3) Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik,

Penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Takalar belum sepenuhnya optimal seperti belum adanya *grand desaign* pengembangan SPBE Kabupaten dan belum terintegrasinya aplikasi e-government yang tersebar di beberapa perangkat daerah.

4) Kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan;

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa menurunnya tingkat partisipasi anak usia 7-12 tahun ditahun 2021 dengan capaian 90,52% dan partisipasi anak usia 13-15 tahun sebesar 76,46% serta nilai ASN Profesional 67,0% tergolong rendah pada tahun 2020, ini disebabkan:

a Belum optimalnya penguatan system manajemen SDM antara lain mengenai tindak lanjut hasil *assessment* sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi, penyusunan perencanaan pengembangan kompetensi pegawai atau *Human Capital Development Plan* (HCDP) belum menyeluruh dan belum dilakukannya pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal/sukses.

b Pemahaman pegawai terhadap kinerjanya belum optimal, tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya, tidak memahami kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi dan tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya.

c Budaya kerja positif belum optimal belum adanya agen perubahan/Kelompok Budaya Kerja disertai target – target nyata di masing – masing OPD yang melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas keberhasilan agen perubahan/Kelompok Budaya Kerja.

d Belum optimalnya penerapan *E-Government* di Lingkungan Pemerintah kabupaten Takalar.

Tabel IV- 3 : Rumusan Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan Yang Masih Rendah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas kinerja penyelenggaraan	Delapan area perubahan reformasi	1. Belum optimalnya

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
pemerintahan dan pelayanan	birokrasi belum optimal	penguatan system manajemen SDM
		2. Pemahaman pegawai terhadap kinerjanya belum optimal
		3. Belum tersusunnya peta proses bisnis
		4. Penerapan E-Government dilingkup Pemkab Takalar

4.1.2 Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya *gap* (jarak) antara kondisi yang ada pada saat ini dengan kondisi ideal. Berdasarkan pada kondisi yang tergambarkan pada Gambaran Umum Kondisi Daerah maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Takalar yang harus diselesaikan dalam periode 2023-2026 ke depan sebagai berikut :

4.1.2.1 Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar

4.1.2.1.1 Urusan Bidang Pendididikan

1. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 7,49 tahun, lebih rendah dari target RPJMD Tahun 2017 – 2022 sebesar 7,6 tahun Ini disebabkan oleh masih tingginya angka putus sekolah pada Pendidikan dasar.
2. Harapan Lama Sekolah juga masih rendah. Salah satu akar masalah dari belum optimalnya harapan lama sekolah ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Pendidikan. Angka harapan lama sekolah Tahun 2021 sebesar 12,42 tahun meningkat dari tahun 2020 sebesar 12,41 tahun. Selain masalah anak putus sekolah, yang disebakan oleh berbagai faktor, terjadi juga karena didtribusi tenaga pengajar yang belum merata .
3. Angka melanjutkan sekolah belum optimal.

4. Masih banyaknya Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang belum memenuhi Standar Kompetensi.
5. Sarana prasarana penunjang untuk pembelajaran belum terpenuhi sesuai standar sarana prasarana pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan. Selain itu sarana gedung banyak mengalami kerusakan sehingga proses pembelajaran belum maksimal sebagaimana tuntutan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses Pendidikan.
6. Masih Kurangnya Lembaga Paud dan lembaga Non Formal yang terakreditasi
7. Untuk Tahun 2020 Kasus pandemic covic-19 melanda dunia sehingga berdampak pada seluruh sektor terutama pendidikan. Belajar dari rumah atau secara konseptual adalah pembelajaran jarak jauh ini termasuk baru, sehingga berimplikasi pada proses pelaksanaan pembelajaran
8. Belum Meratanya Persebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4.1.2.1.2 Urusan Bidang Kesehatan

1. Masih rendahnya Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi. Jumlah RS di Kabupaten Takalar sampai dengan 2021 adalah sebanyak 4 (empat) RS yang terdiri atas 2 (dua) Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri dari 1 (satu) RSUD Type C dan 1 (satu) RSUD Type D, 1 (satu) RS Swasta dan 1 (satu) Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak. Jumlah Rumah Sakit yang terakreditasi sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 2 (dua) RS yaitu RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle dan RS Maryam, sementara 2 (dua) RS lainnya belum terakreditas karena baru didirikan pada tahun 2020.
2. Pelayanan terhadap Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan belum optimal sesuai dengan target
3. Pelayanan ibu hamil belum sesuai dengan standar (SPM) Penyebabnya adalah : Masih kurangnya jumlah tenaga dokter (Rasio Dokter Per Satuan Penduduk hanya sebesar 0,11 per 1000 penduduk), Masih kurangnya jumlah tenaga medis termasuk didalamnya tenaga bidan (Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk hanya sebesar 0,22 per 1000 penduduk). Rendahnya kunjungan ibu hamil pada pemeriksaan ke empat masa kehamilan (Cakupan K4 80,09%)
4. Kompetensi dan distribusi tenaga bidan yang belum merata.

5. Pelaksanaan pelayanan antenatal yang memenuhi kriteria 10T dan penerapan sistem pencatatannya belum dilaksanakan secara maksimal.
6. Ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan belum sesuai standar (SPM).
7. Masih rendahnya persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (64,34%),
8. Masih kurangnya jumlah tenaga dokter (Rasio Dokter Per Satuan Penduduk hanya sebesar 0,11 per 1000 penduduk)
9. Masih kurangnya jumlah tenaga medis termasuk didalamnya tenaga bidan (Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk hanya sebesar 0,22 per 1000 penduduk)
10. Bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir belum memenuhi standar.
11. Tingginya angka kematian Neonatal yang mencapai 4,70 per 1000 KH (setiap 1000 KH terdapat 4,70 bayi baru lahir yang meninggal).
12. Masih kurangnya jumlah tenaga dokter (Rasio Dokter Per Satuan Penduduk hanya sebesar 0,11 per 1000 penduduk)
13. Masih kurangnya jumlah tenaga medis termasuk didalamnya tenaga bidan (Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk hanya sebesar 0,22 per 1000 penduduk)
14. Masih rendahnya anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
15. Masih rendahnya persentase orang usia 15 – 29 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard, penyebanya rendahnya frekuensi pelaksanaan kegiatan skrining kesehatan berupa skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular, kurang maksimalnya penerapan pelayanan edukasi pada usia produktif.
16. Tidak maksimalnya pemanfaatan fasiltas pelayanan kesehatan atau UKBM

4.1.2.1.3 Urusan Bidang Pekerjaan Umum

1. Terbatasnya sumber dana bagi pembiayaan pembangunan dalam hal pemenuhan air bersih dan system pengelolaan air limbah.
2. Terbatasnya sumber dana bagi pembiayaan pembangunan dalam mencapai misi pada program P22 Bupati/Wakil Bupati Terpilih yaitu saluran pengairan yang perlu di tingkatkan baik dalam hal penambahan luasan untuk kebutuhan pengairan sawah pertanian

maupun perbaikan saluran (berat, sedang dan ringan), pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan, serta alokasi bedah rumah dan kawasan kumuh.

3. Lemahnya sistem informasi manajemen prasarana jalan, jembatan, drainase/saluran, pengairan, tata ruang, tenaga konstruksi, kawasan kumuh, dilingkungan organisasi.
4. Keterbatasan kualifikasi SDM dengan latar belakang pendidikan teknik, SDM yang dimiliki saat ini masih perlu ditingkatkan profesionalisme di bidang substansi prasarana wilayah.
5. Lambatnya pelaksanaan kontrak kegiatan sehingga berakibat lambatnya progres capaian kegiatan. Hal ini disebabkan antara lain proses perencanaan baru dilaksanakan pada tahun berjalan.
6. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.
7. Belum mantapnya good governance dalam penyelenggaraan pembangunan, menyebabkan masih kurangnya efektifitas dan efisiensi dalam penanganan program/kegiatan.
8. Tekanan yang cukup tinggi dari pihak masyarakat, LSM dan kelompok-kelompok politik terhadap Dinas PUPRPKP Kab. Takalar untuk lebih memiliki kinerja lebih baik dalam menangani permasalahan bidang infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman serta pengairan;
9. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait;
10. Kondisi sosial dan politik serta keamanan yang cenderung masih belum kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, yang cukup mempengaruhi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman serta pengairan;
11. Pertambahan penduduk yang cenderung meningkat, tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan serta bertambahannya beban jalan akibat bertambahnya jumlah kendaraan bermotor dari tahun ketahun yang makin tidak sebanding dengan ruas jalan yang tersedia;
12. Ketimpangan perkembangan wilayah yang berimplikasi terhadap pelayanan bidang infrastruktur, dan pengairan.

4.1.2.1.4 Urusaan Bidang Perumahan dan Permukiman

1. Belum terpenuhinya pemenuhan standar pelayanan minimal
2. Ketimpangan perkembangan wilayah yang berimplikasi terhadap pelayanan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

3. Kondisi sosial dan politik serta keamanan yang cenderung masih belum kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, yang cukup mempengaruhi pelaksanaan pembangunan bidang infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman serta pengairan;

4.1.2.1.5 Urusan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Dokumen perencanaan belum tersusun dengan baik sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat serta sub pemadam kebakaran;
2. Penegakan Perda/Perkada masih belum Optimal sehingga masyarakat, aparatur, atau badan hukum kurang mematuhi dan mentaati Perda/Perkada;
3. Belum optimalnya pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum untuk mematuhi dan menaati Perda dan peraturan Kepala Daerah;
4. Belum Optimalnya koordinasi penegakan perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
5. Kurangnya Jumlah Apartur/Personil Satpol PP dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Funsi Satpol PP;
6. Belum Optimalnya Pelaksanaan Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan) sehingga tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih rendah;
7. Belum optimalnya pelaksanaan cakupan patroli pengawasan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara menyeluruh;

4.1.2.1.6 Urusan Bidang Sosial

1. Belum meratanya PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya;
2. Belum tersedianya sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial berupa Panti sosial milik pemerintah daerah Kabupaten;

3. Belum tersedianya panti bagi lanjut usia terlantar, gepeng dan anak jalanan;
4. Perlu adanya Pendampingan BUMDES disetiap Desa sehingga BUMDES tersebut dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat ;
5. PKK belum aktif disetiap desa;
6. Adanya pandemi Covid-19
7. Pelatihan TOT 10 Program Pokok PKK dan Stady Komperatif bagi Tim Pengerak PKK belum memadai;
8. Kurangnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna dipedesaan;
9. Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Semangat Lembaga – Lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan Sosia, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Terbatasnya Peralatan Evakuasi bagi korban Bencana.

4.1.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib tidak Terkait Pelayanan Dasar

4.1.2.2.1 Urusan Bidang Tenaga Kerja

1. Kurangnya lapangan kerja
2. Kurangnya angkatan kerja yang terlatih dan berkompoten
3. Belum ada aturan bersama antar provinsi dan kabupaten;
4. Pelayanan terkait administrasi kependudukan dan administrasi perizinan masih dilakukan oleh beberapa instansi;
5. Kurangnya minat dan kemampuan dari masyarakat menciptakan lapangan kerja;
6. Tuntutan kualitas dan pelayanan informasi sosial semakin tinggi;
7. Perkembangan teknologi informasi semakin cepat;
8. Belum optimalnya dukungan instansi terkait;
9. Globalisasi dan pasar bebas

4.1.2.2.2 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

1. Belum semua SKPD melaksanakan PPRG
2. Masih rendahnya partisipasi perempuan dalam legislatif ditandai dengan partisipasi perempuan dilembaga legislatif tahun 2017 sebesar26 %

3. Rendahnya partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional dilihat dari jumlah tenaga profesional perempuan tahun 2018 sebesar42,94%
4. Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga dapat dilihat dari jumlah kontribusi perempuan tahun 2018 sebesar 31,10%
5. Belum optimalnya Pokja PUG (pengarus utamaan gender)
6. Belum terbentuknya Forum Peningkatan Kualitas hidup Perempuan(PKHP)
7. Belum terbentuknya Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP)
8. Belum optimalnya fokal Point gender
9. Masih adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dilihat dari data Tahun 2017 berjumlah 5 (lima) kasus meningkat pada Tahun 2018 menjadi 11 (sebelas) kasus;
10. Masih adanya korban kekerasan perempuan yang belum berani melapor.
11. Belum ada kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang terlaporkan
12. Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak) Kabupaten Takalar
13. Belum optimalnya kegiatan lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten
14. Belum optimalnya peran gugus tugas Kabupaten layak Anak
15. Belum semua Kecamatan menjadi Kecamatan Layak Anak
16. Belum tersedianya Peraturan Daerah / Peraturan Bupati Tentang Kabupaten Layak Anak
17. Meningkatnya jumlah korban kekerasan pada anak dilihat dari data tahun 2017 berjumlah 6 (enam) kasus meningkat pada tahun 2018 menjadi 17 (tujuh belas) kasus
18. Meningkatnya kasus anak berhadapan dengan hukum, dilihat dari data tahun 2016 tidak ada yang melapor dan pada tahun 2017 terdata 22 (dua puluh dua) kasus dan pada tahun 2018 terdata 31 (tiga puluh satu) kasus
19. Belum terdatanya pekerja anak khususnya pada sektor informal.
20. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM bagi pendamping yang memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan.
21. Masih adanya anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

22. Belum optimalnya lembaga penyedia perlindungan khusus anak

4.1.2.2.3 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

1. Peningkatan fungsi kelembagaan baik kelembagaan petani maupun kelembagaan yang ada di masyarakat dalam menerapkan ketersediaan pangan untuk mengantipasi terjadinya rawan pangan.
2. Cadangan pangan daerah perlu disiapkan dan penganggraannya perlu dimaksimalkan
3. Kondisi pandemic Covid-19 yang berimbas pada refokusing anggaran cukup mempengaruhi porsi penganggaran penyediaan sarana dan prasarana pertanian.

4.1.2.2.4 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

1. Penataan tanah yang menjadi asset daerah belum maksimal
2. Masih adanya tanah pemerintah yang belum bersertifikat

4.1.2.2.5 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup

1. Belum tersedianya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang merupakan instrumen perencanaan yang memiliki fungsi penting untuk menyeleraskan kebijakan lingkungan baik yang dibuat oleh lembaga yang secara khusus diberi tugas mengelola ligkungan maupun lembaga lain yang tugasnya juga terkait dengan persoalan lingkungan hidup.
2. Belum berfungsinya Laboratorium Lingkungan yang dapat digunakan untuk menilai kualitas lingkungan hidup terutama terhadap kualitas air dan udara. Peningkatan fungsi Laboratorium Lingkungan juga akan memberikan potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Masih rendahnya kualitas tutupan lahan yang ditandai dengan semakin berkurangnya luasan kawasan hutan mangrove yang berada di Kabupaten Takalar yang dapat memberikan manfaat ganda baik terhadap peningkatan keragaman hayati maupun fungsinya sebagai *barrier* alami dalam upaya pencegahan abrasi pantai yang terjadi di wilayah pesisir.
4. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah yang belum dilaksanakan secara maksimal yang ditandai dengan belum tersedianya Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

Tangga (Jakstrada) yang responsive.

4.1.2.2.6 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

1. Sumber Daya Manusia dalam hal ini ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sangat kurang dari segi kuantitasnya.
2. Perlu peningkatan kualiatas Sumber Daya Manusia bagi petugas pelayanan.
3. Usia dari peralatan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar banyak sudah berusia di atas 5 tahun, sehingga sangat rentan terjadi kerusakan.
4. Anggaran yang tersedia sangat terbatas untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar
5. Kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan dan dokumen pencatatan sipil, sebagai contoh, kurangnya masyarakat yang melakukan pelaporan kematian anggota keluarganya untuk diterbitkan Akte Kematian karena dianggap tidak penting, sehingga capaian persentase penerbitan Akte Kematian juga sangat kurang dari jumlah penduduk yang meninggal dunia.
6. Masih terdapat beberapa masyarakat yang yang belum/tidak memiliki surat nikah sehingga dalam penerbitan akte kelahiran anak tersebut tertera anak dari seorang ibu, bukan dari ayah dan ibu.
7. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang peraturan kependudukan dan pencatatan sipil.

4.1.2.2.7 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Perlu adanya Pendampingan BUMDES disetiap Desa sehingga BUMDES tersebut dapat berjalan dengan baik dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna meningkatkan taraf hidup masyarakat ;
2. PKK belum aktif disetiap desa;
3. Adanya pandemi Covid-19
4. Pelatihan TOT 10 Program Pokok PKK dan Stady Komperatif bagi Tim Pengerak PKK belum memadai;
5. Kurangnya Pengembangan Teknologi Tepat Guna dipedesaan;

6. Belum Optimalnya Pemberdayaan Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa;
7. Semangat Lembaga – Lembaga sosial sebagai mitra kerja pemerintah masih perlu ditingkatkan sebagai bentuk partisipatif aktif masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Terbatasnya peralatan evakuasi bagi korban bencana.

4.1.2.2.8 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

1. Keterbatasan kapasitas daerah dalam pengendalian penduduk
2. Menyebarnya permukiman penduduk
3. Bonus Demografi Pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan, kesempatan kerja terutama perempuan)
4. Banyaknya jumlah anak dan lansia dari jumlah penduduk
5. Adanya perbedaan pola pendataan antara BKKBN, BPS dan Kementerian Dalam Negeri
6. Unmet need tinggi, mengindikasikan bahwa pelayanan Keluarga berencana belum optimal.
7. Pemahaman tentang alat kontrasepsi MKJP masih rendah

4.1.2.2.9 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

1. Jumlah penduduk Kabupaten Takalar yang cukup tinggi yaitu sekitar ± 295.892 jiwa menyebabkan kebutuhan akan transportasi yang cukup tinggi.
2. Pencemaran lingkungan (polusi udara) yang diakibatkan kendaraan bermotor (motorized traffic) seperti angkutan kota, bus, truk, kendaraan pribadi dan sepeda motor, adapun faktor yang mempengaruhi karena banyaknya volume kendaraan yang beroperasi di jalan.
3. Kecelakaan lalu lintas, adapun faktor yang mempengaruhi diantaranya adalah faktor kedisiplinan pengendara, kondisi kendaraan yang tidak layak, kondisi jalan yang rusak dan sebagainya .
4. Masih kurang tersedianya fasilitas perlengkapan jalan di Kabupaten Takalar seperti marka, rambu, RPPJ dan paku jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya karena keterbatasan anggaran yang dimiliki
5. Rendahnya tingkat disiplin pengguna jalan, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah mental dari pengguna jalan tersebut

dan lemahnya penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas.

6. Tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan jaringan jalan di Kabupaten Takalar, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah kemudahan konsumen dalam memiliki kendaraan (fasilitas kredit) sementara Pemerintah Daerah kesulitan dalam pembebasan lahan untuk menambah ruas jalan yang baru.
7. Besarnya tingkat penggunaan kendaraan pribadi, faktor yang mempengaruhinya adalah banyaknya pengguna transportasi umum yang beralih ke kendaraan pribadi sementara angkutan umum dinilai tidak cukup nyaman.
8. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi disisi lain juga mempunyai pengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas.
9. Masih terbatasnya sumber daya manusia di bidang perhubungan berdasarkan standar pelayanan minimal.

4.1.2.2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

1. Belum terintegrasinya data OPD dalam system pemerintahan berbasis elektronik, ditandai dengan jumlah OPD yang yang mengakses data melalui jaringan yang siapkan oleh Dinas Kominfo masih 0% penyebabnya belum tersedianya system perangkat elektronik pada opd pemangku urusan
2. Kelompok Informasi Masyarakat belum terwujudnya pada seluruh wilayah Kecamatan Takalar pada tahun 2021 jumlahnya 0, disebabkan oleh tidak adanya pemahaman terhadap KIM oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pemangku urusan.
3. Pengelolaan SPAN LAPOR! untuk tingkat kabupaten belum sesuai harapan, di mana keluhan dan saran masyarakat belum terarahkan ke span lapor, span lapor sangat berguna untuk mengukur seberapa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh OPD berwenang, seberapa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan sarana dan prasarana dalam lingkup kabupaten.

4.1.2.2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

1. Terbatasnya sumber dana bagi pembiayaan pembangunan dalam mencapai misi pada program P22 Bupati/Wakil Bupati Terpilih yaitu bantuan modal

2. Keterbatasan kualifikasi SDM dengan latar belakang pendidikan di bidang teknik, SDM yang dimiliki saat ini masih perlu ditingkatkan profesionalisme di bidang substansi prasarana wilayah.
3. Masih kurangnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas.
4. Belum mantapnya good governance dalam penyelenggaraan pembangunan, menyebabkan masih kurangnya efektifitas dan efisiensi dalam penanganan program/kegiatan

4.1.2.2.12 Urusan Bidang Penanaman Modal

1. Investasi di Kabupaten Takalar belum optimal ditandai pencapaian nilai dan jumlah penanam modal masih rendah, sehingga perlu komitmen dari pemerintah untuk memberikan dukungan;
2. Sumber daya yang ada di Kabupaten Takalar belum terpromosi dengan baik sehingga para investor kurang informasi, diperlukan promosi di tingkat nasional dan internasional;
3. Pelayanan perizinan dan non perizinan belum optimal terkesan masih ada standar ganda dari pemberi izin;
4. Perizinan yang berliku-liku sehingga menimbulkan peluang terjadinya kolusi dan korupsi.
5. Kurangnya akses permodalan dan pendanaan;
6. Adanya Pandemi Covid -19 yang menjadi penghambat dalam menjalankan aktifitas dalam melayani masyarakat.

4.1.2.2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

1. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
2. Belum ada sistem informasi yang memadai di bidang kepemudaan menjadi tantangan secara umum
3. Belum tersedianya SDM Pemuda yang berkualitas
4. Belum membudayanya olahraga di tengah masyarakat
5. Belum optimalnya Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga di tingkat daerah, nasional, dan internasional

4.1.2.2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

1. Belum tersedianya data terkait organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi pembangunan daerah. Hal ini

disebabkan Dinas Komunikasi belum melakukan pengumpulan dan pengolahan.

4.1.2.2.15 Urusan Bidang Kebudayaan

1. Perencanaan Pengelolaan kawasan yang tidak tuntas /tidak tersedianya dokumen-dokumen perencanaan yang berupa naskah rencana induk atau masterplan penanganan cagar budaya sebagai upaya pengelolaan kawasan secara serius.
2. Pemerintah Kabupaten Takalar belum menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Cagar Budaya sehingga keberadaan Cagar Budaya di Takalar tidak memiliki payung hukum. Keberadaan Perda Cagar Budaya mempertimbangkan asas manfaat untuk perlindungan, pelestarian dan pengelolaan asset cagar budaya di wilayah Kabupaten Takalar. Adanya legalisasi Perda Cagar Budaya untuk mengantisipasi cagar budaya mempunyai status kepemilikan yang tetap aman.
3. Penetapan zonasi yang kurang melindungi keseluruhan aset kawasan.
4. Belum adanya penetapan bentuk pengorganisasian pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik kawasan cagar budaya.
5. Lemahnya dukungan hukum bagi pengelola untuk untuk melindungi cagar budaya termasuk potensi konflik atas pemanfaatan lahan pada lokasi cagar budaya.
6. Perlunya PPKD (Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) sebagai legalitas pemajuan kebudayaan.
7. Minimnya alokasi anggaran dan masih lemahnya SDM dalam pengelolaah cagar budaya

4.1.2.2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

1. Kurangnya alokasi anggaran untuk membiayai peningkatan kapasitas pelayanan perpustakaan umum daerah;
2. Kurangnya jumlah perpustakaan untuk melayani masyarakat yang populasinya semakin meningkat;

4.1.2.2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

1. Belum adanya dukungan dari tenaga pustakawan, tenaga arsiparis dan tenaga teknis yang kompeten untuk membina dan mengelola perpustakaan dan kearsipan Perangkat Daerah;
2. Belum adanya depo arsip sebagai tempat penyimpanan dan perlindungan arsip sesuai standar nasioanal;

3. Belum adanya Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

4.1.2.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

4.1.2.3.1 Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan

1. Masih tingginya penduduk miskin di wilayah pesisir dikuti dengan tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga berdampak bagi kurangnya peran seta masyarakat dalam pengeloaan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan. Oleh karenanya diperlukan sosialisasi yang lebih intensif tentang sistem pengelolaan kelautan dan perikanan.
2. Masih kurangnya kemampuan daya saing nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, serta promosi dan penyebar luasan informasi mengenai produk unggulan hasil perikanan di daerah.
3. Belum tersedianya pemetaan kawasan budidaya laut dan air tawar
4. Perubahan Iklim.
5. Sarana prasarana alat tangkap dan budidaya yang masih terbatas baik kualitas maupun jumlahnya.
6. Disiplin aparatur yang belum optimal

4.1.2.3.2 Urusan Bidang Pariwisata

1 Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan yang ada;
2 Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
3 Belum optimalnya kualitas pelayanan baik di sektor pariwisata;
4 Belum adanya regulasi (RIPARKAB/PERDA/PERBUP/TDUP) tentang Pariwisata di Kabupaten Takalar
5 Belum ada desain khusus tentang Pengembangan Kawasan Wisata
6 Belum terbangunnya Sistem Pelayanan melalui Penerapan Teknologi Informasi

4.1.2.3.3 Urusan Bidang Pertanian

1. Belum rampungnya kegiatan perbenihan
2. Adanya peningkatan kinerja pelayanan OPD yang semakin baik. Hal ini ditunjukan dengan tersalurnya bantuan ke masyarakat tani dengan tepat sasaran serta bertambahnya minat petani masuk dalam lembaga kelompok tani
3. Adanya degradasi lahan pertanian produktif dari tahun ke tahun sedangkan program perluasan lahan sangat terbatas sehingga berpotensi menurunkan produksi tanaman pangan dan hortikultura dan berdampak pada ketahanan pangan.

Antisipasinya berupa penyiapan regulasi LP2B serta penekanan lahan pengganti untuk pemanfaatan lahan pertanian selain untuk sawah.

4. Akses petani terhadap sumber pembiayaan dalam mendukung usaha taninya masih lemah dan tingkat kepercayaan perbankan dan lembaga keuangan lainnya terhadap usaha agribisnis masih kurang karena terkait dengan aspek agunan yang dimiliki oleh petani.
5. Tingginya ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk anorganik yang menyebabkan kerusakan sifat- fisika kimia tanah
6. Isu kelangkaan pupuk yang sebenarnya tidak demikian. Ketersedian pupuk subsidi selalu ada dan cukup sebagaimana kuota yang ditetapkan dalam ERDKK.
7. Kegiatan pengembangan kawasan komoditas perkebunan lain seperti kakao dan kapas masih perlu ditingkatkan sertaperlu adanya pendampingan peningkatan kapasitas teknis pada kelompok
8. Peningkatan populasi peternakan khususnya sapi
9. Perlu dikembangkan terkait olahan-olahan produk peternakan sesuai potensi ternak daerah
10. Database pertanian yang terpadu dan tepat sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam menyusun suatu perencanaan dan pengambilan keputusan.

4.1.2.3.4 Urusan Bidang Perdagangan

1. Belum semua pasar menjadi Pasar Sehat
2. Belum tertibnya penanganan pedagang kaki lima
3. Zonasi pasar belum optimal
4. Belum optimalnya perlindungan konsumen

4.1.2.3.5 Urusan Bidang Perindustrian

1. Belum adanya pemetaan pada jenis industri yang berada di Kabupaten Takalar.
2. Belum adanya sentra industri yang dibangun kabupaten Taklar, disebabkan belum adanya rencana induk industri yang susun.
3. Belum adanya standarisasi industri.
4. Akses dan fasilitas pembangunan Kawasan Industri belum optimal
5. Produksi industri di Kabupaten Takalar belum mampu menjadi produk yang berdaya saing

4.1.2.3.6 Urusan Bidang Transmigrasi

1. Kurangnya fasilitasi umum dan fasilitasi sosial di wilayah transmigrasi
2. Kurangnya tenaga pembimbing masyarakat transmigran

4.1.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

4.1.2.4.1 Sekretariat Daerah

1. Masih seringnya terjadi persinggungan antara bagian akibat adanya egosentris yang menganggap bagian yang satu perannya lebih penting daripada yang lain
2. Tugas pokok dan fungsi yang terkadang bukan pada tempatnya dan sering tidak konsisten
3. Pengelolaan data lengkap dan memadai tentang informasi belum tertata secara efektif dan efisien
4. Pemahaman akan konsep penggunaan Informasi Tekhnologi yang sejatinya dapat memberikan informasi evaluasi kebijakan serta yang menjadikan cara kerja lebih efektif, efisien dan fokus belum optimal digunakan
5. Masih adanya kebijakan-kebijakan dari atasan yang sering kali tidak sesuai dengan aturan yan berlaku
6. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan ASN di Lingkup Sekretariat Daerah
7. Jumlah ASN yang terlalu banyak sehingga ada satu jabatan yang dipangku oleh dua orang
8. Masih kurangnya SDM yang berkualitas

4.1.2.4.2 Seketariat Dewan

1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan penbagian pada Sekretariat DPRD masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan.
3. Pelaksanaan kegiatan dan angaran yang tersedia tidak sesuai Pelaksanaan
4. Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga dedikasi aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar yang ditandai dengan kurang disiplin.

5. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
6. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
7. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
8. Adanya Pengalihan/Penyusuaian sejumlah dana Sekretariat DPRD ke dana penanggulangan Covid_19 sehingga sehingga kegiatan di Sekretariat tidak dapat dimaksimalkan.
9. Tidak tersedianya beberapa item dalam standar harga sehingga memperlambat proses kegiatan membayar, pencatatan transaksi dalam penatausahaan keuangan.

4.1.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

4.1.2.5.1 Perencanaan

1. Kualitas perencanaan yang belum maksimal.
2. Perangkat daerah dalam menyusun perencanaan belum berbasis data
3. Pemahaman terhadap tata cara penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi belum optimal bagi perangkat daerah
4. Kesadaran pentingnya pengendalian dan evaluasi belum seutuhnya dimiliki oleh para ASN
5. Kemampuan para ASN dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah

4.1.2.5.2 Keuangan

1. Masih rendahnya akuntabilitas keuangan daerah yang ditandai dengan pemberian Opini WDP oleh BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga perlu adanya peningkatan opini atas laporan keuangan serta ketetapan waktu penyampaian laporan keuangan
2. Pelaksanaan pembangunan daerah membutuhkan pendanaan yang cukup besar, oleh karena itu sangat dibutuhkan peningkatan realisasi PAD setiap tahunnya.
3. Masih adanya penyalahgunaan dan penyorobotan asset daerah sehingga membutuhkan pengamanan asset daerah yang memadai

serta pemanfaatan asset yang optimal guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat

4. Masih banyak BMD yang belum memiliki nilai wajar, sehingga perlu adanya penilaian terhadap BMD (Apraisal).
5. Adanya BMD yang berlebih atau tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi kedinasan atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain, atau secara ekonomis lebih menguntukan bagi daerah apabila dijual. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi BMD melalui penjualan.
6. Efektifitas APBD akan meningkat apabila adanya pengalokasian anggaran yang tepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat banyak, sehingga perlu adanya peningkatan porsi belanja publik dari total belanja APBD

4.1.2.5.3 Kepegawaian

1. Pemanfaatan manajemen teknologi informasi dalam pelayanan kepegawaian;
2. Kualitas manajemen organisasi dan efektivitas pemenuhan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana dan peningkatan sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran organisasi;
3. Penempatan aparatur sesuai kemampuan dan kompetensi aparatur

4.1.2.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi serta sosialisasi peraturan kepegawaian;

4.1.2.5.5 Penelitian dan Pengembangan

1. Koordinasi lintas sektor belum optimal
2. Kurangnya sosialisasi terkait penelitan dan pengembangan
3. Anggaran yang belum optimal
4. Sumber daya manusia peneliti belum optimal.

4.1.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

4.1.2.6.1 Inspektorat Daerah

1. Nilai SAKIP Kabupaten masih belum mencapai target
2. Belum optimalnya pengeloaan keuangan dan asset daerah
3. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan

4. Terbatasnya jumlah SDM pemeriksa dan kurangnya kompetensi SDM pemeriksa
5. Masih lemahnya pengendalian intern

4.1.2.7 Unsur Kewilayahan

4.1.2.7.1 Kecamatan

1. Masih rendahnya pemahaman tupoksi di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
2. Masih adanya beberapa pelayanan masyarakat yang belum dapat
3. Ditangani secara prima karena keterbatasan sarana dan prasarana;
4. Masih perlu adanya peningkatan koordinasi di tingkat Kecamatan
5. Dengan semakin banyaknya program dan kegiatan dari tingkat atas.
6. Masih rendahnya SDM Perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
7. Kurang maksimalnya hasil pertanian di wilayah Kecamatan Mangarabombang

4.1.2.8 Unsur Pemerintahan Umum

4.1.2.8.1 Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Pemahaman arti demokratisasi dan keterbukaan yang terlalu berlebihan dilakukan oleh sebagian masyarakat.
2. Masih adanya sikap arogansi dan apriori pelaku birokrasi terhadap partisipasi publik.
3. Masih adanya pemahaman yang kurang terhadap makna desentralisasi maupun demokratisasi.
4. Masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang tentunya mempengaruhi pola pikir dan pola tindak dari masyarakat itu sendiri.
5. Masih adanya tekanan-tekanan politik dalam pengambilan keputusan bidang perencanaan dan pengangaran sehingga mengganggu tahapan dan proses perencanaan pembangunan.

4.2 Isu Strategis

4.2.1 Isu Internasional/Global

4.2.1.1 Capaian Sustainable Development Goals di Kabupaten Takalar

Mulai tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* / SDGs) tahun 2015-2030 secara resmi menggantikan transisi dari berakhirnya *Millenium Development Goals* (MDGs). SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan adalah kelanjutan dari

program MDGs. Berbeda dengan MDGs yang hanya memiliki 8 tujuan, SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target. Oleh karena itu SDGs memiliki cakupan yang lebih luas dan diharapkan mampu lebih tanggap akan kebutuhan universal. Adapun tujuan SDGs mencaku p tiga dimensi dari pembangunan berkelanjutan yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap lingkungan. SDGs dibuat berdasarkan momentum keberhasilan MDGs. Tujuan SDGs mencakup lebih banyak aspek kehidupan, dengan 5 poin yang menjadi pondasi dalam pelaksanaannya yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tujuan tersebut di tahun 2030 maka disusunlah 17 tujuan global yaitu: 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Tanpa Kelaparan; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesetaraan Gender; 6) Air bersih dan Sanitasi Layak; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur; 10) Berkurangnya Kesenjangan; 11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Ekosistem Lautan; 15) Ekosistem Daratan; 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Ketersediaan Data SDG's Kabupaten Takalar Tahun 2020 yang masih juga sangat minim. Total indikator tersedia 190 indikator, 33 indikator atau 17,36% yang mencapai target, 20 indikator atau 10,52% belum mencapai target, dan sisanya adalah 137 indikator atau 72,10% indikator tidak terdapat datanya. Tahun 2021 Total indikator tersedia 190 indikator, 84 indikator atau 44,21% yang mencapai target, 35 indikator atau 18,42% belum mencapai target, dan sisanya adalah 50 indikator atau 26,31% indikator tidak terdapat datanya Untuk itu tantangan kedepan Kabupaten Takalar terhadap capaian SDG's yang paling utama adalah mencakup kebutuhan data, melaksanakan indikator yang belum dilaksanakan, dan terakhir adalah mencapai indikator yang belum tercapai.

4.2.2 Isu Nasional

4.2.2.1 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2019 - 2024

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma"ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
10. Sinkronisasi Kesembilan Nawacita yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 kedalam RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 telah tertuang ke dalam tujuan dan sasaran pemerintah kabupaten Takalar

4.2.2.2 Covid – 19

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui (Kemenkes, 2020). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru (Kemenkes, 2020).

Berdasarkan hasil kegiatan surveilans data kejadian kasus Covid-19 di Kabupaten Takalar pertama kali dilaporkan pada tanggal 1 April 2020 yang berdomisli di Kelurahan Salaka Kecamatan Pattallassang, meskipun dalam pencatatan dan pelaporan kasus tersebut dialihkan ke Kabupaten Gowa (beradasarkan ID KTP) dengan riwayat paparan diduga berasal dari Jakarta (sebagai pelaku perjalanan)

Adapun kasus yang secara resmi dirilis sebagai kasus pertama di Kabupaten Takalar dilaporkan pada tanggal 8 April 2020 yang merupakan warga atau penduduk Kecamatan Galesong, di mana yang bersangkutan terpapar di lokasi kerja (salah satu pegawai pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar) yang memang berisiko tinggi untuk terpapar Covid-19

Berbagai upaya untuk menekan penyebaran dan memutuskan mata rantai penularan terus dilakukan, namun sampai saat ini situasi COVID-19 di tingkat global, nasional, regional dan lokal kuhsusnya di Kabupaten Takalar masih dalam risiko sangat tinggi. Untuk mendapatkan gambaran terkait perkembangan kasus Covid-19 Di Kabupaten Takalar akan disajikan dalam laporan ini sebagai bahan pertimbangan dalam penanggulangan maupun pengambilan kebijakan.

Regulasi yang disusun pemerintah Kabupaten Takalar terkait pandemic Covid – 19

1. Surat Edaran Dinas Nomor 106/DK.II/sek.1/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 tentang Surat Edaran Kesiapsiagaan menghadapi *Corona Virus 19* .
2. Peraturan Bupati Takalar No 25 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Peneakana Hukum Protokol Kesehatan
3. Surat Edaran Bupati Takalar Nomor 500/852/sos tanggal 27 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Desease 19 di* Kabupaten Takalar
4. SK Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019

4.2.2.3 Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Di satu sisi, digitalisasi, otomatisasi, dan penggunaan kecerdasan buatan dalam aktivitas ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam produksi modern, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen. Teknologi digital juga membantu proses pembangunan di berbagai bidang di antaranya pendidikan melalui

pembelajaran jarak jauh (distance learning), pemerintahan melalui e-government, inklusi keuangan melalui financial technology (fin-tech), dan pengembangan UMKM seiring berkembangnya e-commerce. Namun di sisi lain, perkembangan revolusi industri 4.0 berpotensi menyebabkan hilangnya pekerjaan di dunia. Diperkirakan 60 persen jabatan pekerjaan di dunia akan tergantikan oleh otomatisasi. Di Indonesia, diperkirakan 51,8 persen potensi pekerjaan yang akan hilang. Di samping itu, tumbuhnya berbagai aktivitas bisnis dan jual beli berbasis online belum dibarengi oleh optimalisasi penerimaan negara dan pengawasan kepatuhan pajak atas transaksi tersebut.

4.3 Isu Daerah

4.3.1 Isu Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan

4.3.2 Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Mamminasata. 11 program pembangunan prioritas Mamminasata,

1. Jaringan jalan metropolitan mamminasata
2. Pengelolaan sampah-TPA Regional mamminasata
3. Suplai air bersih
4. Pengelolaan limbah cair
5. Program Go Green
6. Kawasan kota baru
7. Center point of Indonesia
8. Drainase
9. Kawsan industri KIMA 2
10. Kawasan pendidikan Mamminasata
11. Kawasan maritim Takalar : Pengembangan kawasan industri maritim melalui penguatan industri kelautan di kawasan pesisir Takalar

Pengembangan kawasan pembangunan Mamminasata kabupaten Takalar dilakukan melalui pendekatan koridor pusat pertumbuhan dengan arah kebijakan akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas berbasis sumber daya alam serta pengembangan industry, peningkatan konektivitas antar wilayah dari pusat kegiatan menuju pusat pertumbuhan lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pembangunan infrastruktur wilayah Kabupaten Takalar dan sekitarnya, melalui:

1 Rencana Pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda transportasi(pelabuhan, bandara, transportasi massal dan kereta api)

2 Pengembangan komoditas unggulan melalui industry pengolahan sumber daya alam komoditas pertanian, perkebunan, logam dasar dan kemaritiman yang akan menjadi Pengembangan Industri Takalar. Sekaitan dengan hal tersebut dalam rangka Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas pusat kegiatan perdagangan dan jasa regional Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, dan Kecamatan Galesong Utara diperlukan Sumber dana baik dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah, dimana ada beberapa kementerian yang ikut dalam pelaksanaan pembanguan Mamminasata, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan swasta

3 Peningkatan akses perumahan dan permukiman yang layak, aman dan terjangkau yang bermuara pada adanya SPAM Regional, SPALD Regional, TPA Regional dan Rumah Susun Perkotaan.

4 Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan fasilitas pusat pelayanan kesehatan, lokasi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, dan Kecamatan Galesong Utara sumber pendanaan APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten, dan sumber lain yang sah. Instansi pelaksana Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta.

Gambar IV- 1 : Cakupan Kawasan Mamminasata

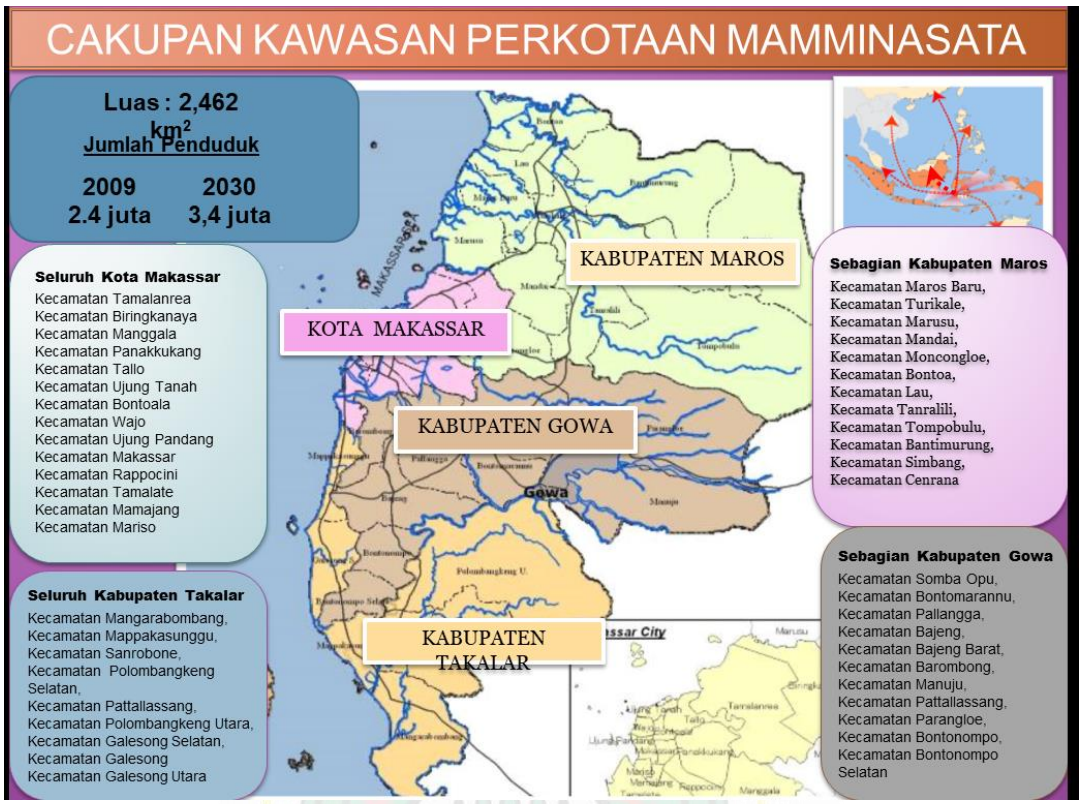

Sumber :

4.3.3 Isu Pembangunan Kabupaten Takalar

4.3.3.1 Telaah Dokumen RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005 -2025

4.3.3.1.1 Kawasan Industri Takalar

Kawasan Industri Takalar merupakan satu dari 6 (enam) kawasan yang termasuk ke dalam Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KI/KEK/DPP) di Wilayah Sulawesi dan termasuk ke dalam Koridor Pertumbuhan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020, tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan diperkuat dengan Perpres Nomor 109 tahun 2020. Rencana pengembangan Kawasan Industri Terintegrasi di Kabupaten Takalar akan dikembangkan bekerjasama dengan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) berlokasi di Kecamatan Mangarabombang dengan lahan seluas ± 3.500 Ha. Wilayah perencanaan meliputi 4 desa : Desa Laikang, Punaga, Cikoang, dan Pattopakang

Takalar Integrated Industrial Park (TIIP) merupakan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan berkonsep multiklaster industri yang didukung oleh infrastruktur kawasan yang lengkap sehingga

membutuhkan investasi besar guna membangun infrastruktur di dalamnya. Nilai investasi mencapai Rp 40 triliun. Nilai produksi dari industri pengolahan ini diperkirakan bisa mencapai Rp200 triliun per tahun dan secara langsung bakal menyerap 5.000 tenaga kerja dan secara tidak langsung mendorong 10.000 orang bekerja di kawasan tersebut.

Takalar Integrated Industrial Park (TIIP)/KITA rencananya dibangun di lahan seluas 3.500 Ha dengan perincian 2.600 Ha untuk kawasan industri, 100 Ha kawasan pelabuhan, 100 Ha kawasan perumahan dan komersial, serta 45 Ha menjadi kawasan golf. Lahan seluas 1.000 Ha untuk industri akan dijadikan bonded recycling nonferrous metals processing industry atau industri pengolahan logam bukan besi dan dikerjakan dalam beberapa tahap. Kementerian Perindustrian menyatakan Kawasan Industri Takalar akan menjadi Kawasan Berikat Nusantara dan menjadi sentra produksi industri pengolahan aluminium dan tembaga. Kawasan terpadu ini akan fokus pada industri pengolahan aluminium dan tembaga dengan konsep green and environmentally friendly. Pengembangan KITA (Takalar Integrated Industrial Park) terdiri dari 3 zona utama yaitu: 1. Zona Bonded Area Recycling Nonferrous Metal Processing Industry 2. Oil & Gas dan Petrochemical Industry 3. Zona Agribusiness Industry. Kawasan industri Takalar akan menjadi kawasan industri nonferrous metals terbesar dan pertama di Asia Tenggara.

4.3.3.1.2 Pembangunan Bendungan Pammukkulu

Pemerintah pusat terus menggenjot Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), salah satunya adalah Bendungan pammukkulu. Bendungan Pammukulu adalah salah satu diantara dua (2) Proyek Strategis Nasional selain Pembangunan Kawsan Industri Takalar. Bendungan pammukkulu ini yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan,

Bendungan Pamukkulu yang terletak di bagian hulu Sungai Pappa, berlokasi di Desa Kale Komara, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah aliran sungai Pamukkulu, merupakan salah satu daerah pengembangan irigasi, berada di Kabupaten Takalar. Daerah irigasi ini, memiliki jaringan irigasi, yang terdiri dari saluran terminal, saluran sekunder dan saluran tersier. Sumber air berasal dari alam yaitu sungai Pamukkulu. Bendungan Pamukkulu merupakan salah satu Program Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Bendungan ini dimulai pembangunannya pada November 2017, memiliki

kapasitas tampung maksimum 82,7 juta meter kubik dengan tinggi mencapai 65,50 meter dan lebar 8 meter.

Bendung Pamukkulu ini akan membawa beberapa manfaat antara lain:

1 Mensuplai irigasi seluas 6.150 ha yang meliputi DI Pamukulu, DI. Cakura, dan DI Jenemarrung,
2 Penyediaan air baku Kota Takalar sebesar 160 liter/detik
3 Mampu mengendalikan banjir 430 meter kubik per detik,
4 Fungsi konservasi air,
5 Pengembangan potensi Sumber daya Listrik dengan daya PLTA ±25 MW,
6 Pengembangan pariwisata daerah,
7 Dan pengembangan perikanan air tawar.

Bendungan Pamukkulu dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, didesain dengan tipe Urugan Batu Membran Beton (UBM) atau *Concrete Face Rockfill Dam* (CFRD). Pelaksanaan pembangunan Bendungan Pamukkulu dikerjakan dengan anggaran senilai Rp1,6 miliar melalui 2 paket pekerjaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan pembangunan Bendungan Pamukkulu Sulawesi Selatan rampung pada 2024. Dengan terbangunnya Bendungan Pammukkulu ini diharapkan Indeks Pertanian (IP) di Kabupaten Takalar akan meningkat dari 150 persen menjadi 250 persen dengan pola tanam padi - padi - palawija. Selain itu, Bendungan Pamukkulu ini akan menjadi bendungan ketiga terbesar di Sulsel setelah bendungan Bili-Bili dan Passolerang.

4.4 Isu – isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh permasalahan dan isu isu baik yang bersifat global maupun regional, maka hal hal yang menjadi isu strategis di Kabupaten Takalar adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar
2. Belum kuatnya bergaining position UKM dan sumberdaya wirausahawan
3. Pertumbuhan ekonomi yang belum fokus pada sektor unggulan
4. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia di perdesaan
5. Belum optimalnya upaya pencegahan pencemaran lingkungan dan sumberdaya alam
6. Belum berjalannya pelayanan publik yang efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi

7. Peningkatan dan pemerataan kualitas SDM yang berdaya saing dan bermartabat
8. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan ekonomi inklusif
9. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan pelayanan publik

BAB V
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan arahan Inmendagri No. 70 Tahun 2021, perumusan tujuan dan sasaran RPD didasarkan pada visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Tahap Keempat serta isu aktual. Tujuan dalam hal ini diartikan sebagai kondisi yang hendak diubah melalui RPD ini. Tujuan dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Sasaran adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam rangka tercapainya tujuan. Sasaran juga dirumuskan bersama indikator kinerja dan target kinerjanya. Indikator tujuan dan sasaran akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) bagi kepala daerah yang akan dilaporkan pencapaiannya setiap tahun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah

Visi RPJPD Kabupaten Takalar 2005-2025 adalah:

Masyarakat Mandiri, Demokratis, Berkeadilan Sosial dan Sejahtera Lahir-Bathin

Visi RPJPD Kabupaten Takalar memiliki filosofi bahwa kemajuan yang dicapai melalui pembangunan idealnya mengantar daerah tersebut pada kondisi kemandirian dalam mengelola sumberdaya tanpa mengabaikan interaksi dengan daerah lain. Dalam rangka ini, daya saing daerah menjadi sangat penting, baik untuk kemandirian maupun untuk interaksi dengan daerah lain. Visi RPJPD Kabupaten Takalar juga menekankan kondisi demokratis dan berkeadilan sosial sebagai satu kesatuan cita-cita ideal yang penekanannya pada pemerataan atas kesejahteraan yang dicapai secara bersama. Kesejahteraan tersebut idelanya mencakup dimensi lahir dan bathin, karena itu ketenteraman dan ketertiban yang terpelihara menjadi keniscayaan dari pencapaian pembangunan.

Misi RPJPD Kabupaten Takalah 2005-2025 adalah:

1. Peningkatan kualitas SDM dalam berbagai aspek untuk mendukung kemandirian daerah.
2. Peningkatan tata penyelenggaraan kehidupan sosial, politik dan pemerintahan yang demokratis.
3. Peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek.
4. Peningkatan produktivitas daerah yang mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara material.

5. Peningkatan pengamalan ajaran agama serta penghayatan nilai-nilai budaya dalam mendukung perwujudan kesejahteraan masyarakat secara bathiniah.

Sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Takalar Tahap Keempat secara garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Meningkatnya kualitas hidup manusia
2. Meningkatnya kapasitas infrastruktur daerah
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang tenteram lahir-bathin
6. Terpeliharanya kondisi lingkungan hidup daerah

Berdasarkan analisis terhadap kondisi eksternal dan internal daerah, maka isu-isu aktual yang dihadapi saat ini adalah:

1. Pemulihan dari dampak pandemik Covid-19 pada berbagai aspek kehidupan terutama aspek kesehatan dan perekonomian.
2. Ketidakpastian arah perkembangan perekonomian akibat gejolak antar negara pada level global yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah di Indonesia.
3. Dinamika politik nasional dan daerah terkait penyelenggaraan pemilihan umum pada tahun 2024.

Mengacu kepada visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan serta isu aktual, maka rumusan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Takalar 2023-2026 adalah sebagai berikut (Tabel V.1).

Tabel V- 1 : Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Takalar 2023-2026

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR
			2021-2022	2023	2024	2025	2026	2026
1.	**TUJUAN-1: MEMPERKUAT DAYA SAING DAERAH**	**INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)**	**2,445**	**2,450**	**2,453**	**2,500**	**2,510**	**2,510**
	SASARAN-1.1.: MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MANUSIA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	67,72	68,83	69,70	70,31	70,54	70,54
	SASARAN-1.2: MENINGKATNYA DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH	INDEKS DAYA SAING INFRASTRUKTUR DAERAH	29.170	29.174	29.178	29.182	29.186	29.186
2.	**TUJUAN-2: MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG INKLUSIF DAN RAMAH LINGKUNGAN**	**PDRB/KAPITA**	**33,97 JUTA**	**34,03**	**34,07**	**34,11**	**34,15**	**34,15**
		INDEKS GINI	**0,36**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**	**0,35**
	SASARAN-2.1:	PERTUMBUHAN EKONOMI	5,05	4.62-5.98	5.04-6.52	6.10-7.14	6.22-7.78	6.22-7.78

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR
			2021-2022	2023	2024	2025	2026	2026
	MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR-SEKTOR PEREKONOMIAN DAERAH	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA	4,16	4,00	3,96	3,91	3,86	3,86
	SASARAN-2.2: BERKURANGNYA PENDUDUK MISKIN	ANGKA KEMISKINAN (%)	8,25	7,09%	6,90%	6,69%	6,60%	6,60%
	SASARAN-2.3.: TERPELIHARANYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH (IKLHD)	58,98	59,02	59,06	59,10	59,14	59,14
3.	**TUJUAN 3: MEMPERBAIKI KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN**	**INDEKS REFORMASI BIROKRASI DAERAH**	**C (49,49)**	**BB (71-72)**	**BB (73-75)**	**BB (76-78)**	**BB (79-80)**	**BB (79-80)**
	SASARAN 3.1.: MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	NILAI SAKIP DAERAH	CC (59,38)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
		INDEKS KEPATUHAN TERHADAP SPM	46,11	60-70	70-80	80-90	90-100	100

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA				KONDISI AKHIR
			2021-2022	2023	2024	2025	2026	2026
	SASARAN 3.2.: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	BELUM DINILAI	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
	SASARAN 3.3.: TERPELIHARANYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN	ANGKA KRIMINALITAS	96,41 PER 100,000 PENDUDUK	91,91	89,41	86,91	84,41	84,41

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1 Strategi

Strategi dalam RPD ini diartikan sebagai rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Takalar 2023-2026. Proses perumusan strategi dilakukan dengan langkah-langkah: 1. Mengkaji sasaran pembangunan yang akan diwujudkan serta indikator kinerjanya; 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan tahun 2021; 3. Mengkaji permasalahan pembangunan utama dan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; 4. Menganalisis kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) dalam mencapai setiap sasaran; 4. Memformulasi alternative-alternatif strategi dan merumuskan pilihan strategi untuk setiap sasaran. Rumusan strategi RPD Kabupaten Takalar 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel VI-1.

Tabel VI- 1 : Strategi RPD Kabupaten Takalar 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
1.	Tujuan-1: Memperkuat daya saing daerah	Sasaran-1.1.: Meningkatnya kualitas hidup manusia	Pemenuhan SDM, sarana-prasarana dan kolaborasi multi pihak dalam perbaikan derajat pendidikan, derajat kesehatan, daya beli, kesetaraan gender, literasi masyarakat serta daya saing pemuda dan olah raga.
		Sasaran-1.2: Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	Pemenuhan SDM dan peralatan konstruksi dalam pembangunan dan pemeliharaan infratruktur jalan dan jembatan, perhubungan, perumahan dan pemukiman, ketersedian air bersih dan fasilitas sanitasi, pemanfaatan ruang berbasis RTRW.
2.	Tujuan-2: Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	Sasaran-2.1: Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pengembangan dan adopsi inovasi dalam peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, perindustrian, usaha mikro dan kecil, perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan kompetensi tenaga kerja dan pencari kerja secara adaptif dengan revolusi industri 4.0
		Sasaran-2.2: Berkurangnya penduduk miskin	Pengurangan beban pengeluaran, pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan UMKM dan perbaikan pemanfaatan dana desa bagi rumah tangga miskin berdasarkan DTKS yang akurat dan mutakhir

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Sasaran-2.3.: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Perbaikan sistem pengelolaan dan penegakan regulasi dalam penanganan limbah/bahan beracun dan berbahaya serta penanganan sampah berbasis reduce, reuse dan recicle (3R) diringi dengan pemeliharaan keragaman hayati.
3.	Tujuan 3: Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	Sasaran 3.1.: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja diiringi dengan perbaikan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dalam mencapai kinerja yang optimal
		Sasaran 3.2.: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan kesadaran masyarakat, pemenuhan SDM dan fasilitas, dan pemutakhiran data penerima layanan secara kontinyu dalam memenuhi SPM pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ketertiban dan perlindungan masyarakat dan sosial serta sistem pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan.
		Sasaran 3.3.: Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	Koordinasi Forkopimda, penguatan swadaya masyarakat dan pelibatan berbagai organisasi sosial-kemasyarakatan dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat serat wawasan kebangsaan.

6.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan agar pemerintah daerah lebih optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan tahunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPD ini. Rangkaian prioritas tahunan tersebut memiliki sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain dalam mencapai sasaran RPD. Rumusan arah kebijakan ini juga merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus. Arah kebijakan pembangunan RPD Kabupaten Takalar 2023-2026 pada dasarnya berisi prioritas pembangunan yang akan dijalankan setiap tahun. Setiap tahun akan dijalankan tema pembangunan tertentu, dan dalam payung tema pembangunan itu dikembangkan arah kebijakan pembangunan yang diprioritaskan. Arah kebijakan pembangunan RPD Kabupaten Takalar 2023-2026 dirumuskan pada Tabel VI-2 berikut.

Tabel VI- 2 : Arah Kebijakan Pembangunan RPD Kabupaten Takalar 2023-2026

No.	Sasaran	Arah Kebijakan			
		2023	2024	2025	2026
1.	Sasaran-1.1.: Meningkatnya kualitas hidup manusia	• Pembangunan kesehatan • Pembangunan pendidikan	• Penguatan daya beli masyarakat • Pengembangan literasi masyarakat	• Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	• Pengembangan daya saing pemuda dan olah raga
3.	Sasaran-1.2: Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	• Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas air bersih dan pengelolaan limbah domestik	• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan perhubungan	• Pembangunan dan pemeliharaan sarana irigasi dan sumberdaya air lainnya	• Pemeliharaan konsistensi pemanfaatan ruang berbasis RTRW
4.	Sasaran-2.1: Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	• Penyuluhan teknologi 4.0 untuk pertanian, peternakan dan perikanan • Pembangunan dan pemeliharaan sarana-prasarana pertanian, peternakan dan perikanan • Perintisan sistem ekonomi sirkuler	• Pengembangan kualitas koperasi dan permodalan UMKM • Pengembangan jaringan perdagangan barang pokok dan penting • Pengembangan sistem ekonomi sirkuler	• Pengembangan daya saing tenaga kerja • Pemantapan fungsi kawasan industri • Pengembangan produktivitas industri kecil dan rumah tangga • Akselerasi sistem ekonomi sirkuler •	• Pengembangan ekonomi kreatif • Pemantapan sistem pengelolaan pariwisata • Pemantapan sistem ekonomi sirkuler

No.	Sasaran	Arah Kebijakan			
		2023	2024	2025	2026
5.	Sasaran-2.2: Berkurangnya penduduk miskin	• Pemberdayaan masyarakat untuk orang miskin • Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan	• Perlindungan sosial bagi orang miskin • Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan •	• Penumbuhan usaha mikro bagi orang miskin • Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan	• Pemantapan akses layanan dasar untuk orang miskin • Pemanfaatan dana desa untuk penanggulangan kemiskinan
6.	Sasaran-2.3.: Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	• Pengendalian pencamaran tanah, air dan udara •	• Pengelolaan sampah berbasis reduce, reuse, recicle (3R)	• Pemeliharaan keanekaragaman hayati	• Penyadaran dan penegakan regulasi terkait lingkungan hidup
7.	Sasaran 3.1.: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	• Penguatan SAKIP daerah dan SAKIP perangkat daerah • Pemantapan sistem pengelolaan keuangan daerah	• Pemantapan sistem pengawasan internal pemerintah • Pemantapan sistem pengadaan barang dan jasa	• Pemantapan integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik • Pemantapan sistem pengelolaan arsip daerah •	• Pemantapan profesionalisme ASN • Pemantapan harmonisasi produk hukum daerah
8.	Sasaran 3.2.: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	• Pemantapan Mall Pelayanan Publik Terpadu	• Pengembangan inovasi pelayanan publik • Akselerasi pemenuhan standar pelayan berbasis SPM dan	• Penguatan kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan public	• Pemantapan pemenuhan standar pelayanan berbasis SPM

No.	Sasaran	Arah Kebijakan			
		2023	2024	2025	2026
		• Akselerasi pemenuhan cakupan pelayanan berbasis SPM	pelayanan public lainnya	• Pemantapan pemenuhan cakupan pelayanan SPM	dan pelayanan public lainnya • Pemantapan kecamatan dalam penyelenggaraan kewenangan pelayanan yang didelegasikan
9.	Sasaran 3.3.: Terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban	• Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	• Penguatan demokrasi dan dinamika politik daerah • Deteksi dini dan pencegahan konflik sosial	• Penguatan wawasan kebangsaan dan kesatuan nasional	• Penguatan dan pemeliharaan kesatuan bangsa

Berdasarkan arah kebijakan setiap tahun berdasarkan sasaran RPD sebagaimana termuat pada Tabel VI-2, maka tema pembangunan yang dijadikan acuan dalam perumusan prioritas pembangunan daerah untuk setiap tahun dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar VI- 1 : Tema Pembangunan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

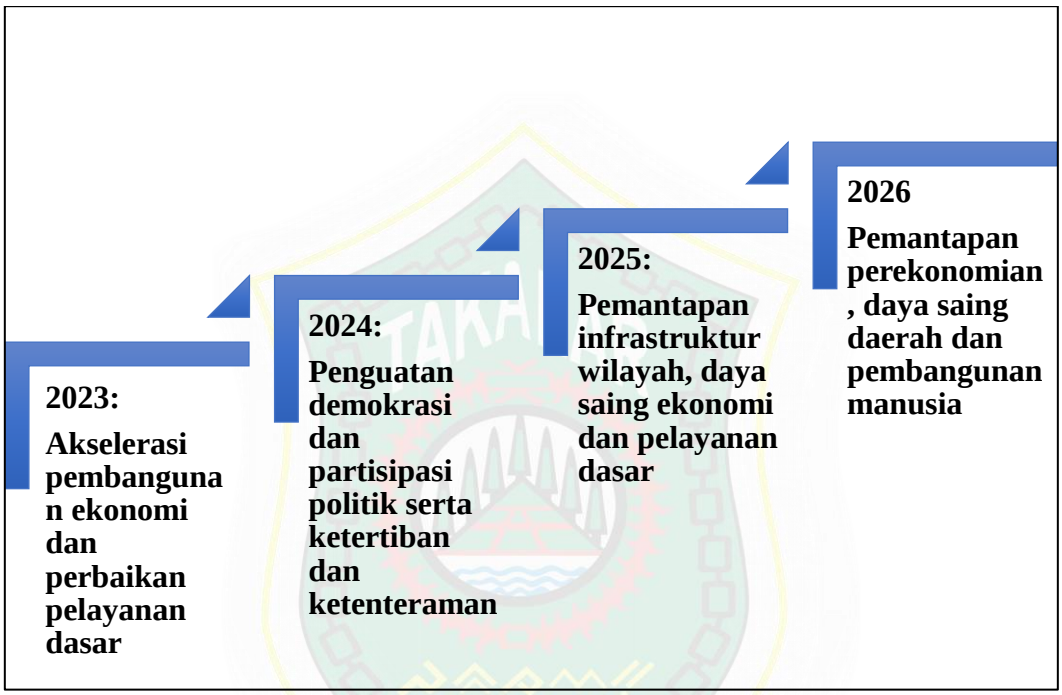

6.3 Program Prioritas

Program Prioritas daerah merupakan upaya dan dukungan terhadap pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005-2025 serta tujuan dan sasaran RPD. Selain itu, berdasarkan arahan Permendagri 86 Tahun 2017, faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan dalam perumusan program dan kegiatan, antara lain:

1) Pencapaian visi dan misi kepala daerah.
2) Pencapaian SDGs.
3) Pengentasan kemiskinan.
4) Pencapaian NSPK dan SPM.
5) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.
6) Pengembangan daerah terisolir.

Selain pertimbangan diatas, program prioritas Kabupaten Takalar juga diarahkan untuk pencapaian prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1) Pembangunan Manusia
2) Penguatan Infrastruktur Wilayah
3) Pengembangan dan Adopsi Inovasi dalam peningkatan Produktivitas dan Penyerapan Tenaga Kerja
4) Penurunan Kesenjangan Sosial Ekonomi
5) Pelestarian Lingkungan Hidup
6) Perbaikan Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
7) Penguatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Sektor

Program prioritas daerah Kabupaten Takalar merupakan upaya mejawab isu isu pembangunan daerah melalui pelaksanaan pembangunan, khususnya pada kegiatan yang memiiki nilai strategis dan daya ungkit dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program prioritas daerah dimaksudkan untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dan Tujuan Pembangunan Nasional melalui sinergitas perencanaan pembangunan nasional dan daerah dengan menerapkan prinsip kolaborasi sumber pendanaan yaitu APBN, APBD, KPBU, dan Swasta.

Program prioritas daerah Kabupaten Takalar merupakan sinergitas antara arahan pembangunan kewilayahan dan proyek prioritas Nasional (*Major Project*) dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang disajikan berdasarkan tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026. Pelaksanaan program prioritas daerah, indikasi pendanaannya dapat dimutakhirkan melalui RPD dan RKPD dengan mempertimbangkan kesiapan pelaksanaan, pemutakhiran besaran dan

sumber pendanaan guna memastikan prioritas pembangunan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien sesuai dengan perkembangan pembangunan. Daftar prioritas daerah beserta sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan disajikan pada tabel berikut :

Tabel VI- 3 : Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Takalar

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)					(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
					Tujuan 1. Memperkuat daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Angka	2,445 (Tahun 2020)											
					Sasaran 1.1. Meningkatnya kualitas hidup manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	67,72		298.942.428.304		312.379.499.980		320.710.804.351		334.362.870.489		1.266.395.603.124	
1	0 1				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					83.034.956.641		91.923.669.005		99.206.122.405		109.465.900.005		383.630.648.056	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	0 1	0 2			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	61,01	100	83.034.956.641	100	91.923.669.005	100	99.206.122.405	100	109.465.900.005	100	383.630.648.056	
						Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartsipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	83,39	100		100		100		100		100		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	37,86	100		100		100		100		100		
						Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	1,68	10		20		30		35		35		
						Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	1,53	10		20		30		35		35		
2	2 2				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					1.315.000.000		1.015.000.000		1.015.000.000		750.000.000		4.095.000.000	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
2	2 2	0 2			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan sebagai budaya	%	15	47	1.315.000.000	55	1.015.000.000	77	1.015.000.000	100	750.000.000	100	4.095.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	2 3				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					10.375.000.000		10.375.000.000		10.375.000.000		10.375.000.000		41.500.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	2 3	0 2			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	1,3	1,3	10.375.000.000	1,4	10.375.000.000	1,5	10.375.000.000	1,6	10.375.000.000	1,6	41.500.000.000	
2	1 9				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					234.000.000		221.000.000		221.000.000		221.000.000		897.000.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	1 9	0 2			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	%	99,77	100	234.000.000	100	221.000.000	100	221.000.000	100	221.000.000	100	897.000.000	
1	0 2				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					200.529.230.663		206.390.589.975		207.439.440.946		211.096.729.484		825.455.991.068	Dinas Kesehatan
1	0 2	0 2			Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	104,13	100	131.977.200.663	100	136.838.559.975	100	136.887.410.946	100	139.544.699.484	100	545.247.871.068	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	96,77	100		100		100		100		100		
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	%	109,69	100		100		100		100		100		
						Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	80,39	100		100		100		100		100		
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	89,27	100		100		100		100		100		
						Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	52,03	100		100		100		100		100		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60	100		100		100		100		100		
						Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	22,97	100		100		100		100		100		
						Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	85,22	100		100		100		100		100		
						Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	68,35	100		100		100		100		100	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	42,45	100		100		100		100		100		
						Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	82,59	100		100		100		100		100		
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,16	9		7		5		3		3		
						Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH	Angka	190											

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Angka	3,81										
						Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	%	100	100		100		100		100		100		
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,133	0,133	68.552.030.000	0,12	69.552.030.000	0,11	70.552.030.000	0,01	71.552.030.000	0,01	280.208.120.000	RSUD HPDN
2	0 9				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					2.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		5.000.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	0 9	0 2			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	8,03	9	2.000.000.000	10	1.000.000.000	11	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	5.000.000.000	
2	1 4				Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					1.454.241.000		1.454.241.000		1.454.241.000		1.454.241.000		5.816.964.000	Dinas PPKBPPPA
2	1 4	0 4			Program Pemberdayaan dan Peningkatan	Persentase Kelompok Tribina	%	50	67	1.454.241.000	83	1.454.241.000	90	1.454.241.000	100	1.454.241.000	100	5.816.964.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Keluarga Sejahtera (KS)														
					Sasaran 1.2. Meningkatnya daya saing infrastruktur daerah	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	2,445		43.042.992.000		39.808.877.780		40.943.557.880		40.943.557.880		164.738.985.540	
1	0 3				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					38.692.992.000		36.667.992.000		37.202.992.000		37.202.992.000		149.766.968.000	Dinas PUPRPKP
1	0 3	0 2			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	Rasio	26,17	26,17	2.254.784.000	27,17	2.254.784.000	28,17	2.254.784.000	29,17	2.254.784.000	29,17	9.019.136.000	
						Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	77	77		80		83		86		86		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0 3	0 3			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	%	92,91	100	6.279.375.000	100	6.279.375.000	100	6.279.375.000	100	6.279.375.000	100	25.117.500.000	
						Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	%	62,56	100		100		100		100		100		
1	0 3	0 5			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	4,88	100	4.307.866.000	100	4.307.866.000	100	4.307.866.000	100	4.307.866.000	100	17.231.464.000	
1	0 3	0 6			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	2,9	5	1.900.000.000	100	700.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	4.600.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0 3	0 7			Program Pengembangan Permukiman	Presesntase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	n/a		600.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.100.000.000	
1	0 3	0 8			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi persetujuan bangunan gedung (PBG)	%	n/a	n/a	600.000.000	50	600.000.000	70	600.000.000	90	600.000.000	90	2.400.000.000	
1	0 3	0 9			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	ha	11.597,98	##### #	900.000.000	11.597,98	700.000.000	11.597,98	700.000.000	11.597,98	700.000.000	11.597,98	3.000.000.000	
						Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	%	60	70		80		90		100		100		
1	0 3	1 0			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	%	63,9	70	20.555.967.000	75	20.555.967.000	80	20.555.967.000	85	20.555.967.000	85	82.223.868.000	
1	0 3	1 1			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	37	50	270.000.000	60	270.000.000	70	305.000.000	80	305.000.000	80	1.150.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0 3	1 2			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	%	20	40	1.025.000.000	60	500.000.000	80	700.000.000	100	700.000.000	100	2.925.000.000	
						Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	%	0	40		60		80		100		100		
2	1 5				Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan					1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		5.400.000.000	Dinas Perhubungan
2	1 5	0 2			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	%	N/A	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	3.800.000.000	
						Persentase layanan angkutan darat	%	N/A	100		100		100		100		100		
2	1 5	0 3			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan angkutan penyeberangan	%	N/A	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.600.000.000	
1	0 4				Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					3.000.000.000		1.790.885.780		2.390.565.880		2.390.565.880		9.572.017.540	Dinas PUPRPKP

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0 4	0 2			Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang mendapatkan izin	%	66,7	60	1.150.000.000	60	640.885.780	80	640.885.780	80	640.885.780	80	3.072.657.340	
1	0 4	0 3			Program Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	%	0	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	600.000.000	
						Persentase ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	%	0	100		100		100		100		100		
1	0 4	0 4			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani	%	0	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	
						Persentase Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8,52	8,13008		8,928571		9,80392		9,8039216		10,86957		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	0 4	0 5			Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	n/a	16,9492	1.200.000.000	20,40816	500.000.000	25,641	1.099.680.100	25,641026	1.099.680.100	25,64103	3.899.360.200	
					Tujuan 2. Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan ramah lingkungan	PDRB/kapita		33,97 (ribu)		33.875.297.000		30.951.297.000		30.121.297.000		30.445.461.100		125.393.352.100	
						Gini Rasio		0,365											
					Sasaran 2.1 Meningkatnya produktivitas dan penyerapan tenaga kerja sektor-sektor perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi		5,05		23.879.157.000		22.155.157.000		22.170.157.000		22.190.157.000		90.394.628.000	
						Tingkat Pengangguran Terbuka		4											
3	2 5				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					8.706.027.000		8.556.027.000		8.556.027.000		8.556.027.000		34.374.108.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	2 5	0 3			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil	Ton	22.011	22.011	7.106.027.000	22.050	7.106.027.000	22.050	7.106.027.000	22.050	7.106.027.000	22.050	28.424.108.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	Ton	590.403	590.403	1.150.000.000	590.403	1.050.000.000	590.403	1.050.000.000	590.403	1.050.000.000	590.403	4.300.000.000	
3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persenatse poklahsar yang meningkat kelasnya	%	25	25	450.000.000	26	400.000.000	27	400.000.000	28	400.000.000	28	1.650.000.000	
3	27				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					11.795.000.000		10.295.000.000		10.295.000.000		10.295.000.000		42.680.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	3,75	3,75	7.395.000.000	4,5	7.395.000.000	5	7.395.000.000	5,5	7.395.000.000	5,5	29.580.000.000	
						Cakupan bina kelompok petani	%	46,88	50		60		70		80		80		
						Persentase peningkatan produksi peternakan	%	2,38	3,5		4		5		6		6		
3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan	%	90	93	1.300.000.000	95	1.300.000.000	97	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	5.200.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan holtikultura	%	71,43	80		90		95		100		100		
						Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan	%	80	90		95		97		100		100		
3	2 7	0 4			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase peningkatan Usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV	%	NA	90	3.000.000.000	95	1.500.000.000	97	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	7.500.000.000	
						Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	%	NA	100		100		100		100		100		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	-5,42	-6,5		-7		-7,5		-8		-8		
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	N/A	90	100.000.000	95	100.000.000	97	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	
2	17				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					500.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.700.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	%	44,79	44,79	200.000.000	48,79	200.000.000	52,79	200.000.000	56,79	200.000.000	56,79	800.000.000	
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas	%	N/A	N/A	300.000.000	44,79	200.000.000	48,79	200.000.000	52,79	200.000.000	52,79	900.000.000	
3	31				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					325.000.000		275.000.000		255.000.000		275.000.000		1.130.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	3 1	0 2			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	%	0,57	0,57	200.000.000	20	150.000.000	40	130.000.000	50	150.000.000	60	630.000.000	
						Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	%	50	50		50		50			50		50		
						Persentase cakupan pengembangan sentra industri	%	N/A	N/A		20		30		40		40		
3	3 1	0 3			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	N/A	100		100		100		100		100		
						Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota	%	N/A	100		100		100		100		100		
3	3 1	0 4			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIIN)	%	25	25	25.000.000	25	25.000.000	27	25.000.000	30	25.000.000	30	100.000.000	
2	1 8				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					509.695.000		509.695.000		509.695.000		509.695.000		2.038.780.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	1 8	0 2			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	%	24	24	45.000.000	24	45.000.000	25	45.000.000	26	45.000.000	26	180.000.000	
						Persentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	%	N/A	100		100		100		100		100		
2	1 8	0 3			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi	%	19,72	19,72	50.000.000	23,72	50.000.000	28,72	50.000.000	32,72	50.000.000	32,72	200.000.000	
2	1 8	0 4			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	%	19,97	19,97	25.000.000	23,97	25.000.000	28,97	25.000.000	32,97	25.000.000	32,97	100.000.000	
2	1 8	0 5			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM	%	19,10	19,10	369.695.000	23,10	369.695.000	28,10	369.695.000	32,10	369.695.000	32,10	1.478.780.000	
2	1 8	0 6			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	%	50	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	80.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	2 6				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					993.435.000		1.069.435.000		1.069.435.000		1.069.435.000		4.201.740.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	2 6	0 2			Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan wisata	hari	1	2	904.435.000	2	1.000.435.000	2	1.000.435.000	2	1.000.435.000	2	3.905.740.000	
3	2 6	0 3			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per kebangsaan	%	0	100	4.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	28.000.000	
						Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang Ke Kabupaten/Kota	%	0	100		100		100		100		100		
3	2 6	0 5			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kraetif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	%	66,67	80	85.000.000	100	61.000.000	100	61.000.000	100	61.000.000	100	268.000.000	
3	3 0				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.200.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	3 0	0 2			Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perlengkapan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	92,47	92,47	50.000.000	93	50.000.000	94	50.000.000	95	50.000.000	95	200.000.000	
3	3 0	0 3			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	%	50	50	50.000.000	75	50.000.000	85	50.000.000	90	50.000.000	90	200.000.000	
3	3 0	0 4			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	%	0,5	0,5	100.000.000	1	100.000.000	1,5	100.000.000	2	100.000.000	2	400.000.000	
3	3 0	0 6			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	%	54,5	54,5	100.000.000	60	100.000.000	65	100.000.000	70	100.000.000	70	400.000.000	
2	0 7				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					480.000.000		480.000.000		480.000.000		480.000.000		1.920.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	n/a	n/a	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	%	2,3	3	380.000.000	4	380.000.000	5	380.000.000	6	380.000.000	6	1.520.000.000	
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	75,51	77	50.000.000	79	50.000.000	81	50.000.000	83	50.000.000	83	200.000.000	
1	03				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					270.000.000		270.000.000		305.000.000		305.000.000		1.150.000.000	Dinas PUPRPKP
1	03	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	37	38	270.000.000	39	270.000.000	40	305.000.000	41	305.000.000	41	1.150.000.000	
					Sasaran 2.2. Berkurangnya penduduk miskin	Angka Kemiskinan (%)		8,25		4.714.900.000		3.564.900.000		3.564.900.000		3.564.900.000		15.409.600.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	09				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					3.353.900.000		2.353.900.000		2.353.900.000		2.353.900.000		10.415.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	8,03	9	2.000.000.000	10	1.000.000.000	11	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	5.000.000.000	
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Angka	N/A	84,2	753.900.000	87,9	753.900.000	91,5	753.900.000	95,2	753.900.000	95,2	3.015.600.000	
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kecamatan/wilayah rentan rawan pangan	%	0	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	2.400.000.000	
2	17				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					750.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		2.700.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
2	17	02			Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	N/A	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	73	73	25.000.000	75	25.000.000	76	25.000.000	77	25.000.000	77	100.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	1 7	0 4			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	%	23,5	23,5	50.000.000	23,5	50.000.000	24	50.000.000	25	50.000.000	25	200.000.000	
2	1 7	0 5			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang bersertifikat kompetensi	%	20	20	100.000.000	25	100.000.000	26	100.000.000	27	100.000.000	27	400.000.000	
2	1 7	0 6			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	20	20	50.000.000	25	50.000.000	26	50.000.000	27	50.000.000	27	200.000.000	
2	1 7	0 7			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	44,79	44,79	200.000.000	48,79	200.000.000	52,79	200.000.000	56,79	200.000.000	56,79	800.000.000	
2	1 7	0 8			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas	%	N/A	N/A	300.000.000	44,79	200.000.000	48,79	200.000.000	52,79	200.000.000	52,79	900.000.000	
1	0 6				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					360.000.000		360.000.000		360.000.000		360.000.000		1.440.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
1	0 6	0 2			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	%	80	80	70.000.000	85	70.000.000	90	70.000.000	100	70.000.000	100	280.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0 6	0 4			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti	%	21,26	80	125.000.000	80	125.000.000	80	125.000.000	80	125.000.000	80	500.000.000	
						Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	%	0	80		80		80		80		80		
						Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial usia lanjut terlantar diluar panti	%	64,91	80		80		80		80		80		
						Persentase pelayanana rehabilitasi Sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	%	0	80		80		80		80		80		
						Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	%	80	80		80		80		80		80		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	%	6,64	80		80		80		80		80		
1	0 6	0 5			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosia	%	0	98	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	420.000.000	
1	0 6	0 6			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	%	87	89	60.000.000	90	60.000.000	95	60.000.000	100	60.000.000	100	240.000.000	
						Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	%	0	80		80		80		80		80		
2	1 3				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan					201.000.000		151.000.000		151.000.000		151.000.000		654.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Masyarakat Desa														
2	1 3	0 2			Program Penataan Desa	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	120.000.000	
2	1 3	0 3			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	Desa	76	87	11.000.000	87	11.000.000	96	11.000.000	96	11.000.000	96	44.000.000	
2	1 3	0 5			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Desa	76	87	160.000.000	87	110.000.000	96	110.000.000	96	110.000.000	96	490.000.000	
3	3 2				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3	3 2	0 5			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	
3	3 2	0 5			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					Sasaran 2.3. Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Angka	58,98		5.281.240.000		5.231.240.000		4.386.240.000		4.690.404.100		19.589.124.100	
2	1 1				Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup					3.781.240.000		3.731.240.000		3.731.240.000		3.731.240.000		14.974.960.000	Dinas LH dan Pertanahan
2	1 1	0 2			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan hidup	%	60	80	200.000.000	80	150.000.000	85	150.000.000	85	150.000.000	85	650.000.000	
2	1 1	0 3			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Indeks	69,51	58,95	1.481.240.000	59,05	1.481.240.000	60,00	1.481.240.000	65,00	1.481.240.000	65,00	5.924.960.000	
						Indeks kualitas udara	Indeks	85,69	83,79		83,99		83,99		83,99		83,99		
2	1 1	0 4			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	30,39	31,18	50.000.000	32,24	50.000.000	31,25	50.000.000	31,50	50.000.000	31,50	200.000.000	
2	1 1	0 5			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan	Jumlah limbah B3 yang dikelola	%	59,131,75	30		30		30		30		30		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Beracun (Limbah B3)														
2	1 1	0 6			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	1,31	30	50.000.000	35	50.000.000	40	50.000.000	45	50.000.000	45	200.000.000	
2	1 1	1 1			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	%	72,13	75	2.000.000.000	80	2.000.000.000	85	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	8.000.000.000	
1	0 3				Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					1.500.000.000		1.500.000.000		655.000.000		959.164.100		4.614.164.100	Dinas PUPRPKP

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0 3	0 4			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase peningkatan pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	72,13		1.500.000.000		1.500.000.000		655.000.000		959.164.100		4.614.164.100	
					Tujuan 3. Memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi		49,49 (Tahun 2020)		795.473.686.188		804.074.679.279		811.309.223.779		820.534.498.441		3.228.527.087.687	
					Sasaran 2.2.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Daerah		59,38 (Tahun 2020)		765.172.991.353		774.263.984.444		771.248.528.944		780.473.803.606		3.091.159.308.347	
										569.762.644.953		574.261.450.544		581.303.807.544		590.586.894.706		2.315.914.797.747	
x	xx	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah	%	92	93	564.312.644.953	93	568.861.450.544	93	575.653.807.544	93	584.936.894.706	93	2.293.764.797.747	Semua Perangkat daerah
x	xx	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, keprotokoleran,)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	%	0	0	5.450.000.000	0	5.400.000.000	20	5.650.000.000	22,5	5.650.000.000	22,5	22.150.000.000	Bagian Ortala Sekretariat Daerah

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	%	62	62		64		66		68		68		
						Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		
						Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Skor	62	64		66		68		68		68		
						Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	%	0	0		0		20		25		25		
5	0 1				Perencanaan					1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		5.400.000.000	Bappelitbangda
5	0 1	0 2			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah	%	100	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	3.000.000.000	
						Capaian kinerja Perangkat Daerah	%	86,65	87		90		92		94		96		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	2.400.000.000	
						Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100		100		100		100		100		
						Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang	%	100	100		100		100		100		100		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						infrastruktur dan kewilayahan													
6	0 1				Inspektorat Daerah					1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		5.800.000.000	Inspektorat
6	0 1	0 2			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%			1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		4.000.000.000	
6	0 1	0 3			Program Perumusann Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03	%			450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		1.800.000.000	
5	0 2				Keuangan					189.040.346.400		193.732.533.900		183.674.721.400		183.616.908.900		750.064.510.600	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	0 2	0 2			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD tepat waktu	%	100	100	178.707.855.741	100	183.400.043.241	100	174.042.230.741	100	174.014.418.241	100	710.164.547.964	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	%	91	92		93		94		95		95		
						Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	%	91	92		93		94		95		95		
5	0 2	0 3			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	%	89	90	2.787.782.359	91	2.787.782.359	92	2.087.782.359	93	2.057.782.359	93	9.721.129.436	
5	0 2	0 4			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	%	42,23	100	7.544.708.300	100	7.544.708.300	100	7.544.708.300	100	7.544.708.300	100	30.178.833.200	
						Jumlah penambahan wajib pajak baru	%	N/A	100		100		100		100		100		
6	0 1				Inspektorat Daerah					1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		5.800.000.000	Inspektorat
6	0 1	0 2			Program Penyelenggaraa n Pengawasan	Persentase pertanggungjawaba n keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	80	80	1.000.000.000	85	1.000.000.000	90	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	4.000.000.000	
6	0 1	0 3			Program Perumusann Kebijakan,	Persentase penyelesaian temuan	%	80	80	450.000.000	85	450.000.000	90	450.000.000	95	450.000.000	95	1.800.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Pendampingan dan Asistensi	berulang kode 01, 02 dan 03													
5	0 1				Perencanaan					1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		5.400.000.000	Bappelitbangda
5	0 1	0 2			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah	%	100	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	3.000.000.000	
						Capaian kinerja Perangkat Daerah	%	86,65	87		90		92		94		96		
5	0 1	0 3			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	2.400.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100		100		100		100		100		
						Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100		
2	1 3				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					320.000.000		220.000.000		220.000.000		220.000.000		980.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	1 3	0 4			Program Adminsitrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	%	93	95	320.000.000	98	220.000.000	98	220.000.000	100	220.000.000	100	980.000.000	
7	0 1				Kecamatan					450.000.000		450.000.000		450.000.000		450.000.000		1.800.000.000	Kecamatan
7	0 1	0 6			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	1.800.000.000	
					Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepatuhan terhadap SPM	Indeks	46,11	50	25.563.704.835	60	25.063.704.835	70	25.313.704.835	80	25.313.704.835	80	101.254.819.340	
						Indeks kepatuhan terhadap standar pelayanan non SPM	Indeks												
						Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks												
4	0 1				Sekretariat Daerah					12.540.000.000		12.290.000.000		12.540.000.000		12.540.000.000		49.910.000.000	Sekretariat Daerah
x	x	0 1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum,	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	%	0	0	5.450.000.000	0	5.400.000.000	20	5.650.000.000	22,5	5.650.000.000	22,5	22.150.000.000	Bagian Ortala Sekretariat Daerah

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
					keprotokoleran,)													
						Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas 80%	%	62	62		64		66		68		68		
						Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		
						Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Skor	62	64		66		68		68		68		
						Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	%	0	0		0		20		25		25		
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitas	%	100	100	6.000.000.000	100	5.900.000.000	100	5.900.000.000	100	5.900.000.000	100	23.700.000.000	
						Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Status	CC	B		B		B		B		B		
						Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat	%	100	100		100		100		100		100		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						yang tepat dan akurat													
4	0 1	0 3			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	100	100	1.090.000.000	100	990.000.000	100	990.000.000	100	990.000.000	100	4.060.000.000	
						Persentase Penayangan SIRUP	%	100	100		100		100		100		100		
						Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan	%	100	100		100		100		100		100		
						Tingkat Inflas	Nilai	2,05	2,05		2,03		2,02		2,01		2,01		
2	1 2				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					248.704.835		248.704.835		248.704.835		248.704.835		994.819.340	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	1 2	0 2			Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP-el	%	97	97	188.704.835	97	188.704.835	97	188.704.835	97	188.704.835	97	754.819.340	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik	%	98	98		98		98		98		98		
						Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	%	50	50		55		60		65		65		
2	1 2	0 3			Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	%	97	97	50.000.000	98	50.000.000	99	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	
						Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		
						Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		
2	1 2	0 4			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	%	98	98	10.000.000	98	10.000.000	99	10.000.000	99	10.000.000	98	40.000.000	
						persentase Penyajian data kependudukan skala	%	98	98		98		99		99				

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Provinsi dalam 1 Tahun													
4	0 2				Sekretariat DPRD					12.000.000.000		11.750.000.000		11.750.000.000		11.750.000.000		47.250.000.000	Sekertariat Dewan
4	0 2	0 2				Presentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai propemperda	%	83,33	100	12.000.000.000	100	11.750.000.000,00	100	11.750.000.000,00	100	11.750.000.000,00	100	47.250.000.000	
						Presentase aspirasi yang ditindaklanjuti	%	100	100		100		100		100		100		
7	0 1				Kecamatan					775.000.000		775.000.000		775.000.000		775.000.000		3.100.000.000	Kecamatan
7	0 1	0 2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	100	100	775.000.000	100	775.000.000	100	775.000.000	100	775.000.000	100	3.100.000.000	
					Sasaran 3.3. Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban	Angka Kriminalitas				4.736.990.000		4.746.990.000		14.746.990.000		14.746.990.000		36.112.960.000	
1	0 5				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					2.290.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		2.300.000.000		6.325.000.000	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, dan BPBD

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	0 5	0 2			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	93,26	93,26	703.000.000	94	613.000.000	95	650.000.000	95	663.000.000	95	2.629.000.000	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	93,26	93,26		94		95		95		95		
1	0 5	0 3			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	< 10%	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	1.848.000.000	
						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	< 10%	100		100		100		100		100		
						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	81,25%	100		100		100		100		100		

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
						Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100		100		100		100		100		
						Persentase penanganan pasca bencana	%	88	100		100		100		100		100		
1	0 5	0 4			Program Pencegahan, Penanggulangan , Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	98,25	98,25	637.000.000	98,25	737.000.000	98,25	700.000.000	99	687.000.000	99	1.848.000.000	
						Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	15	15		15		15		15		15		
1	0 6				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					60.000.000		60.000.000		60.000.000		60.000.000		240.000.000	Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa
1	0 6	0 6			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	%	87	89	60.000.000	90	60.000.000	95	60.000.000	100	60.000.000	100	240.000.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	%	0	80		80		80		80		80		
7	01				Kecamatan					950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		3.800.000.000	Kecamatan
7	01	03			Program Koordiansi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kasus	100	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	100	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	1.800.000.000	
8	01				Kesatuan Bangsa dan Politik					1.436.990.000		1.436.990.000		11.436.990.000		11.436.990.000		25.747.960.000	Kesbangpol
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di masyarkat	Kejadian	2	0	100.000.000	2	130.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	430.000.000	
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	%	50	100	986.990.000	100	1.036.990.000	100	10.986.990.000	100	10.986.990.000	100	23.997.960.000	

Kode					Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/ outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2020/2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Etika Serta Budaya Politik														
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatn	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	%	42	53	100.000.000	66	100.000.000	81	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	Kejadian	24	24	70.000.000	24	70.000.000	24	70.000.000	24	70.000.000	24	280.000.000	
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka potensi gangguan ideologi, politik,pertahanan dan keamanan	Kejadian	12	12	180.000.000	12	100.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	12	640.000.000	

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan

Kerangka pendanaan pada bagian ini menggambarkan perspektif rencana penganggaran untuk empat tahun ke depan periode RPD Kabupaten Takalar. Penyajian kerangka pendanaan dimaksudkan untuk menampilkan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah yang menjadi dasar penyusunan target dan pendanaan program. Adapun gambaran mengenai kekuatan anggaran pemerintah Kabupaten Takalar selama 4 (empat) tahun ke depan tergambar pada Table VII.1

Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan tabel VII.1 tersebut mengalami pertumbuhan positif, hal ini dipengaruhi oleh proyeksi Pendapatan yang mengalami kenaikan dari Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, dimana pada Tahun 2023 pendapatan daerah Kabupaten Takalar diproyeksi sebesar Rp.1,260 Trilliun lebih, mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar kurang lebih 2 persen dibanding dengan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1 Trilliun. Dari sisi belanja, pada Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 1,2 Trilliun lebih atau mengalami penurunan sebesar -0,16 persen jika dibanding dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 1,500 Trillliun lebih. Berdasarkan hasil proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut, dapat dirumuskan kerangka pendanaan keuangan daerah Kabupaten Takalar untuk Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026. Kerangka pendanaan ini menyajikan hasil penghitungan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah beserta dengan alokasi prioritas pembangunan daerah Takalar.

Tabel VII- 1 : Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

NO.	Kapasitas Riil / Belanja	PROYEKSI ANGGARAN APBD			
		TA. 2023	TA. 2024	TA. 2025	TA. 2026
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(5)*	*(7)*	*(9)*
	BELANJA DAERAH	**1.248.283.392.602**	**1.256.607.857.935**	**1.284.208.937.155**	**1.307.340.461.035**
	Belanja Operasi	**776.274.349.109**	**788.695.774.874**	**810.544.272.655**	**833.675.796.547**
	Belanja Pegawai	496.037.085.277	511.719.363.110	529.128.254.810	552.317.591.210
	Belanja Barang dan Jasa	258.042.048.920	254.839.009.352	259.336.427.933	259.336.427.925
	Belanja Bunga	2.339.062.500	2.281.250.000	2.223.437.500	2.165.625.000
	Belanja Subsidi	0	0	0	0
	Belanja Hibah	18.245.353.074	18.245.353.074	18.245.353.074	18.245.353.074
	Belanja Bantuan Sosial	1.610.799.338	1.610.799.338	1.610.799.338	1.610.799.338
	Belanja Modal	**330.057.759.593**	**325.960.799.161**	**331.713.380.600**	**331.713.380.588**
	Belanja Modal	330.057.759.593	325.960.799.161	331.713.380.600	331.713.380.588
	Belanja Tidak Terduga	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**	**4.000.000.000**
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	Belanja Transfer	**137.951.283.900**	**137.951.283.900**	**137.951.283.900**	**137.951.283.900**
	Belanja Bagi Hasil	4.646.694.400	4.646.694.400	4.646.694.400	4.646.694.400
	Belanja Bantuan Keuangan	133.304.589.500	133.304.589.500	133.304.589.500	133.304.589.500
	Jumlah Belanja Daerah	**1.248.283.392.602**	**1.256.607.857.935**	**1.284.208.937.155**	**1.307.340.461.035**

Sumber : BPKD Kabupaten Takalar; 2022

Peningkatan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah ini diharapkan dapat didorong oleh pertumbuhan pendapatan daerah, disamping itu juga diharapkan dari pelampauan target pendapatan berupa optimalisasi PAD, peningkatan dana perimbangan, dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai dampak efektifnya pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Tantangan terbesarnya adalah pemerintah daerah dituntut untuk secara kreatif dan inovatif menghadirkan sejumlah alokasi belanja daerah yang secara nyata mampu menciptakan sumber-sumber pendapatan baru tersebut, baik berupa pajak dan retribusi daerah, obyek bagi hasil pajak/ non pajak, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

7.2 Program Perangkat Daerah

Arsitektur perencanaan pembangunan memisahkan antara aspek strategis dan operasional, maka program prioritas dipisahkan pula menjadi 2 (dua), yaitu program prioritas untuk perencanaan strategis dan program prioritas untuk perencanaan operasional. Program prioritas yang dikategorikan strategis merupakan tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan.

Pagu indikatif merupakan kebutuhan pendanaan pelaksanaan program pembangunan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan pendanaannya. Dalam RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 terdapat program perangkat daerah sebanyak 184 program. Program perangkat daerah dan besaran pagu indikatif setiap program dapat dilihat dalam Tabel VII.2

Tabel VII- 2 : Kerangka Pendanaan Dan Program RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Urusan Wajib Pelayanan Dasar					401.549.643.925		414.835.601.381		424.787.162.081		439.908.392.319		1.678.215.799.706	
1	01				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					84.449.956.641		93.588.669.005		100.871.122.405		111.030.900.005		389.940.648.056	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	61,01	100	83.034.956.641	100	91.923.669.005	100	99.206.122.405	100	109.465.900.005	100	383.630.648.056	
						Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartsipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	83,39	100		100		100		100		100			
						Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	37,86	100		100		100		100		100			

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Pesentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	1,68	10		20		30		35		35		
						Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	1,53	10		20		30		35		35		
1	01	03			Program Pengembangan Kurikulum	Presentase perangkat Kurikulum yang dikembangkan	%	70	70	800.000.000	75	900.000.000	80	900.000.000	85	800.000.000	85	3.400.000.000	
1	01	04			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio terhadap murid per kelas rata-rata	Rasio	1:21	1:21	90.000.000	1:21	90.000.000	1:20	90.000.000	1:20	90.000.000	1:20	360.000.000	
						Guru yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	%	99	100		100		100		100		100		
	01	05			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang dibina	%	100	100	150.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	750.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	PAUD	126	126		130		135		140		140		
						Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	%	77,3	77,3		80		83		86		86		
						Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	%	63,6	63,6		65		68		70		70		
						Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	Lembaga	9	9		11		13		15		15		
1	01	06			Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Presentase Bahasa dan sastra yang dikembangkan	%	N/A	100	375.000.000	100	475.000.000	100	475.000.000	100	475.000.000	100	1.800.000.000	
1	02				Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan					202.614.665.284		208.976.024.596		210.355.451.796		214.012.740.334		835.958.882.010	Dinas Kesehatan
1	02	02			Program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	104,13	100	131.977.200.663	100	136.838.559.975	100	136.887.410.946	100	139.544.699.484	100	545.247.871.068	
						Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	%	96,77	100		100		100		100		100		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	%	109,69	100		100		100		100		100		
						Persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	80,39	100		100		100		100		100		
						Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	89,27	100		100		100		100		100		
						Persentase warga negara produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	52,03	100		100		100		100		100		
						Persentase warga Negara usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60	100		100		100		100		100		
						Persentase warga negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	22,97	100		100		100		100		100		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase warga negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	85,22	100		100		100		100		100		
						Persentase warga negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	68,35	100		100		100		100		100		
						Persentase Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	42,45	100		100		100		100		100		
						Persentase Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	%	82,59	100		100		100		100		100		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	11,16	9		7		5		3		3		
						Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan per 100.000 KH	Angka	190											
						Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	Angka	3,81											
						Persentase Penemuan dan Penanganan Kasus	%	100	100		100		100		100		100		
						Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	%	0,133	0,133	68.552.030.000	0,12	69.552.030.000	0,11	70.552.030.000	0,01	71.552.030.000	0,01	280.208.120.000	RSUD HPDN
1	02	03			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	0	23	735.434.621	35	935.434.621	47	1.280.000.000	58	1.280.000.000	58	4.230.869.242	
1	02	04			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Sarana Pengelolaan Makanan dan Minuman yang berijin	%	86,27	90	450.000.000	95	750.000.000	100	625.000.000	100	625.000.000	100	2.450.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	02	05			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga aktif	%	38,04	38,04	900.000.000	38,04	900.000.000	40	1.011.010.850	45	1.011.010.850	45	3.822.021.700	
1	03				Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					40.192.992.000		38.167.992.000		37.857.992.000		38.162.156.100		154.381.132.100	Dinas PUPRPKP
1	03	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	Rasio	26,17	26,17	2.254.784.000	27,17	2.254.784.000	28,17	2.254.784.000	29,17	2.254.784.000	29,17	9.019.136.000	
						Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	77	77		80		83		86		86		
1	03	03			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	%	92,91	100	6.279.375.000	100	6.279.375.000	100	6.279.375.000	100	6.279.375.000	100	25.117.500.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	%	62,56	100		100		100		100		100		
1	03	04			Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	72,13		1.500.000.000		1.500.000.000		655.000.000		959.164.100		4.614.164.100	
1	03	05			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	4,88	100	4.307.866.000	100	4.307.866.000	100	4.307.866.000	100	4.307.866.000	100	17.231.464.000	
1	03	06			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	2,9	5	1.900.000.000	10	700.000.000	15	1.000.000.000	20	1.000.000.000	20	4.600.000.000	
1	03	07			Program Pengembangan Permukiman	Presesntase Jalan Lingkungan dalam kondisi baik	%	N/A		600.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.100.000.000	
1	03	08			Program Penataan Bangunan Gedung	Presentase Rekomendasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	N/A	N/A	600.000.000	50	600.000.000	70	600.000.000	90	600.000.000	90	2.400.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	03	09			Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	ha	11.597,98	11.597,98	900.000.000	11.597,98	700.000.000	#######	700.000.000	11.597,98	700.000.000	#######	3.000.000.000	
						Presentase ketersediaan LPJU pada jalan kabupaten	%	60	70		80		90		100		100		
1	03	10			Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota (%)	%	63,9	70	20.555.967.000	75	20.555.967.000	80	20.555.967.000	85	20.555.967.000	85	82.223.868.000	
1	03	11			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Operator/ Teknis/ Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	%	37	50	270.000.000	60	270.000.000	70	305.000.000	80	305.000.000	80	1.150.000.000	
1	03	12			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase wilayah yang telah tersusun rencana tata ruang	%	20	40	1.025.000.000	60	500.000.000	80	700.000.000	100	700.000.000	100	2.925.000.000	
						Persentase wilayah yang telah ditetapkan rencana tata ruangnya	%	0	40		60		80		100		100		
1	04				Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman					3.050.000.000		1.850.885.780		2.450.565.880		2.450.565.880		9.802.017.540	Dinas PUPRPKP
1	04	02			Program Pengembangan Perumahan	Persentase perumahan yang mendapatkan ijin	%	66,7	60	1.150.000.000	60	640.885.780	80	640.885.780	80	640.885.780	80	3.072.657.340	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	04	03			Program Kawasan Permukiman	Persentae ketersediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota	%	0	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	600.000.000	
						Persentase keetrsediaan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	%	0	100		100		100		100		100		
1	04	04			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/ Kota yang Ditangani	%	0	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	2.000.000.000	
						Persentase penurunan Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	8,52	8,130081		8,9285714		9,80392		9,803922		10,8696		
1	04	05			Program Peningkatan Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase ketersediaan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	N/A	16,94915	1.200.000.000	20,408163	500.000.000	25,641	1.099.680.100	25,64103	1.099.680.100	34,4828	3.899.360.200	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	04	06			Program Peningkatan Pelayanan Sertifikat, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase peningkatan layanan sertifikat, kualifikasi, klasifikasi, dan register perumahan dan kawasan permukiman	%	0	20,33898	50.000.000	25,531915	60.000.000	34,2857	60.000.000	52,17391	60.000.000	52,1739	230.000.000	
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					1.340.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		4.477.000.000	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, dan BPBD
1	05	02			Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	93,26	93,26	703.000.000	94	613.000.000	95	650.000.000	95	663.000.000	95	2.629.000.000	
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	93,26	93,26		94		95		95		95		
1	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	98,25	98,25	637.000.000	98,25	737.000.000	98,25	700.000.000	99	687.000.000	99	1.848.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Penyelamatan Non Kebakaran														
						Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	Menit	15	15		15		15		15		15		
1	05				Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat					950.000.000		950.000.000		950.000.000		950.000.000		1.848.000.000	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran, dan BPBD
1	05	03			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	%	< 10%	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	1.848.000.000	BPBD
						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	< 10%	100		100		100		100		100		
						Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan	%	81,25%	100		100		100		100		100		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Evakuasi Korban Bencana													
						Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100		100		100		100		100		
						Persentase penanganan pasca bencana	%	88	100		100		100		100		100		
1	06				Urusan Pemerintahan Bidang Sosial					400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.600.000.000	Dinas Sosial dan Pemerintahan Masyarakat Desa
1	06	02			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	%	80	80	70.000.000	85	70.000.000	90	70.000.000	100	70.000.000	100	280.000.000	
1	06	04			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar Penyandang disabilitas diluar panti	%	21,26	80	125.000.000	80	125.000.000	80	125.000.000	80	125.000.000	80	500.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase pelayanan rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	%	0	80		80		80		80		80		
						Persentase Pelayanan rehabilitasi Sosial usia lanjut terlantar diluar panti	%	64,91	80		80		80		80		80		
						Persentase pelayanana rehabilitasi Sosial usia tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	%	0	80		80		80		80		80		
						Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	%	80	80		80		80		80		80		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	%	6,64	80		80		80		80		80		
1	06	05			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Pelayanan Perlindungan dan jaminan sosia	%	0	98	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	105.000.000	100	420.000.000	
1	06	06			Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	%	87	89	60.000.000	90	60.000.000	95	60.000.000	100	60.000.000	100	240.000.000	
						Persentase Peningkatan kapasitas bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	%	0	80		80		80		80		80		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	06	07			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan	%	100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	160.000.000	
					Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar					33.557.854.000		31.705.354.000		31.705.354.000		30.940.354.000		127.908.916.000	
2	07				Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja					510.000.000		510.000.000		510000000		510.000.000		2.040.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	07	02			Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	n/a	n/a	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	
2	07	03			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	%	2,3	3	380.000.000	4	380.000.000	5	380.000.000	6	380.000.000	6	1.520.000.000	
2	07	04			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	75,51	77	50.000.000	79	50.000.000	81	50.000.000	83	50.000.000	83	200.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	07	05			Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	120.000.000	
2	08				Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		2.200.000.000	Dinas PPKBPPPA
2	08	02			Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	90	90	100.000.000	95	100.000.000	95	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	
2	08	03			Program Perlindungan Perempuan	Presentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	%	80	80	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	95	50.000.000	95	200.000.000	
2	08	04			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase kelompok perempuan berdaya	%	80	80	250.000.000	90	250.000.000	95	250.000.000	95	250.000.000	95	1.000.000.000	
2	08	05			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	%	85	85	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	95	50.000.000	95	200.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	08	06			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase jumlah forum anak yang telah dibentuk	%	90	95	50.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	
2	08	07			Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks perlindungan anak	Indeks	45	55	50.000.000	65	50.000.000	75	50.000.000	80	50.000.000	80	200.000.000	
2	09				Urusan Pemerintahan Bidang Pangan					3.553.900.000		2.553.900.000		2.553.900.000		2.553.900.000		11.215.600.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	8,03	9	2.000.000.000	10	1.000.000.000	11	1.000.000.000	12	1.000.000.000	12	5.000.000.000	
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor PPH Konsumsi	Angka	N/A	84,2	753.900.000	87,9	753.900.000	91,5	753.900.000	95,2	753.900.000	95,2	3.015.600.000	
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	0	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	0	2.400.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	
2	10				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan					130.000.000		130.000.000		130.000.000		130.000.000		520.000.000	Dinas LH dan Pertanahan
2	10	03			Program Pengadaan tanah Unruk Kepentingan Umum	Persentase Penetapan tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	%	25,42	0,5	30.000.000	60	30.000.000	70	30.000.000	80	30.000.000	80	120.000.000	
						Jumlah Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Lokasi	15	15		18		20		23		23		
2	10	05			Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian maslaah ganti kerugian dan santunan tanah	%	100	75	20.000.000	80	20.000.000	85	20.000.000	90	20.000.000	90	80.000.000	
2	10	08			Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase tanah Untuk Masyarakat	%	0	30	20.000.000	35	20.000.000	40	20.000.000	45	20.000.000	45	80.000.000	
2	10	12			Program Pengurusan Hak - hak Atas Tanah	Persentase pengajuan hak - hak atas tanah yang diurus	%	60,15	65	20.000.000	70	20.000.000	75	20.000.000	80	20.000.000	80	80.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	10	13			Program Survey, Pengukuran dan Pemetaan	Persentase tanah yang telah diukur	%	50	60	20.000.000	70	20.000.000	80	20.000.000	85	20.000.000	85	80.000.000	
2	10	17			Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	Persentase konflik, sengketa dan perkara tanah yang tertangani	%	50	55	20.000.000	60	20.000.000	62	20.000.000	65	20.000.000	65	80.000.000	
2	11				Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup					3.831.240.000		3.781.240.000		3.781.240.000		3.781.240.000		15.174.960.000	Dinas LH dan Pertanahan
2	11	02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase perencanaan bidang lingkungan hidup	%	60	80	200.000.000	80	150.000.000	85	150.000.000	85	150.000.000	85	650.000.000	
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air	Indeks	69,51	58,95	1.481.240.000	59,05	1.481.240.000	60,00	1.481.240.000	65,00	1.481.240.000	65,00	5.924.960.000	
						Indeks kualitas udara	Indeks	85,69	83,79		83,99		83,99		83,99		83,99		
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	30,39	31,18	50.000.000	32,24	50.000.000	31,25	50.000.000	31,50	50.000.000	31,50	200.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah limbah B3 yang dikelola	%	59,131,75	30		30		30		30		30		
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	1,31	30	50.000.000	35	50.000.000	40	50.000.000	45	50.000.000	45	200.000.000	
2	11	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pendidikan dan pelatihan masyarakat yang dilaksanakan	%	100	50	50.000.000	60	50.000.000	70	50.000.000	80	50.000.000	80	200.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	11	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	%	20	30		40		50		60		60	-	
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditangani	%	100	80		85		90		95		95	-	
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/ Kota	%	72,13	75	2.000.000.000	80	2.000.000.000	85	2.000.000.000	90	2.000.000.000	90	8.000.000.000	
2	12				Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		2.000.000.000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Perekaman KTP-el	%	97	97	188.704.835	97	188.704.835	97	188.704.835	97	188.704.835	97	754.819.340	
						Persentase penduduk yang sudah mempunyai KTP Elektronik	%	98	98		98		98		98		98		
						Persentase Anak Usia 01-7 Tahun Kurang 1 (satu) hari yang Memiliki KIA	%	50	50		55		60		65		65		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
2	12	03			Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-18 tahun	%	97	97	50.000.000	98	50.000.000	99	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	
						Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		
						Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100		100		100		100		100		
2	12	04			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pemanfaatan data kependudukan	%	98	98	10.000.000	98	10.000.000	99	10.000.000	99	10.000.000	98	40.000.000	
						persentase Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam 1 Tahun	%	98	98		98		99		99				

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	12	05			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase OPD yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	98	98	251.295.165	98	251.295.165	98	251.295.165	98	251.295.165	98	1.005.180.660	
2	13				Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					521.000.000		371.000.000		371.000.000		371.000.000		1.634.000.000	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
2	13	02			Program Penataan Desa	Persentase kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	%	100	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	30.000.000	100	120.000.000	
2	13	03			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama antar desa	Desa	76	87	11.000.000	87	11.000.000	96	11.000.000	96	11.000.000	96	44.000.000	
2	13	04			Program Adminsitrasi Pemerintahan Desa	Persentase aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tata kelola pemdes	%	93	95	320.000.000	98	220.000.000	98	220.000.000	100	220.000.000	100	980.000.000	
2	13	05			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi	Desa	76	87	160.000.000	87	110.000.000	96	110.000.000	96	110.000.000	96	490.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					dan Masyarakat Hukum Adat	produktif dan pemberdayaan													
2	14				Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					4.842.519.000		4.842.519.000		4.842.519.000		4.842.519.000		19.370.076.000	Dinas PPKBPPPA
2	14	02			Program Pengendalian Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Angka	1,07	1,03	150.000.000	1,02	150.000.000	1,01	150.000.000	1,00	150.000.000	1,00	600.000.000	
						TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,11	2,08		2,06		2,04		2,02		2,02		
						Age Specific Fertility Rate (ASFR)	Angka	149	145		138		130		125		125		
2	14	03			Program Pembinaan Keluaraga Berencana (KB)	Persentase Capaian KB Aktif	%	71	75	3.238.278.000	80	3.238.278.000	85	3.238.278.000	87	3.238.278.000	87	12.953.112.000	
2	14	04			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Kelompok Tribina	%	50	67	1.454.241.000	83	1.454.241.000	90	1.454.241.000	100	1.454.241.000	100	5.816.964.000	
2	15				Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan					1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		5.400.000.000	Dinas Perhubungan
2	15	02			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	%	N/A	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	950.000.000	100	3.800.000.000	
						Persentase layanan angkutan darat	%	N/A	100		100		100		100		100		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	15	03			Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase layanan angkutan penyeberangan	%	N/A	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	1.600.000.000	
2	16				Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika					1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		1.100.000.000		4.400.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	%	N/A	25	100.000.000	25	100.000.000	30	100.000.000	35	100.000.000	35	400.000.000	
						Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	%	N/A	25		25		30		35		35		
2	16	03			Program Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi	%	N/A	25	1.000.000.000	25	1.000.000.000	30	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	4.000.000.000	
2	17				Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					725.000.000		625.000.000		625.000.000		625.000.000		2.600.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
2	17	02			Program Pelayanan Izin	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	N/A	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
					Usaha Simpan Pinjam														
2	17	03			Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	%	73	73	25.000.000	75	25.000.000	76	25.000.000	77	25.000.000	77	100.000.000	
2	17	04			Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Sehat	%	23,5	23,5	50.000.000	23,5	50.000.000	24	50.000.000	25	50.000.000	25	200.000.000	
2	17	05			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi yang bersertifikat kompetensi	%	20	20	100.000.000	25	100.000.000	26	100.000.000	27	100.000.000	27	400.000.000	
2	17	06			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan volume usaha koperasi	%	20	20	50.000.000	25	50.000.000	26	50.000.000	27	50.000.000	27	200.000.000	
2	17	07			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	%	44,79	44,79	200.000.000	48,79	200.000.000	52,79	200.000.000	56,79	200.000.000	56,79	800.000.000	
2	17	08			Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro naik kelas	%	N/A	N/A	300.000.000	44,79	200.000.000	48,79	200.000.000	52,79	200.000.000	52,79	900.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	18				Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal					509.695.000		509.695.000		509.695.000		509.695.000		2.038.780.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	18	02			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/ Kota	%	24	24	45.000.000	24	45.000.000	25	45.000.000	26	45.000.000	26	180.000.000	
						Persentase Penetapan dan Pelaksanaan Kebijakan Penanaman Modal	%	N/A	100		100		100		100		100		
2	18	03			Program Promosi Penanaman Modal	Persentase peningkatan minat investasi	%	19,72	19,72	50.000.000	23,72	50.000.000	28,72	50.000.000	32,72	50.000.000	32,72	200.000.000	
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penyelesaian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai dengan SOP	%	19,97	19,97	25.000.000	23,97	25.000.000	28,97	25.000.000	32,97	25.000.000	32,97	100.000.000	
2	18	05			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan pelaku usaha/penanam modal terhadap penyampaian LKPM	%	19,10	19,10	369.695.000	23,10	369.695.000	28,10	369.695.000	32,10	369.695.000	32,10	1.478.780.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase pemenuhan data dan informasi penanaman modal	%	50	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	80.000.000	
2	19				Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga					379.500.000		327.000.000		327.000.000		327.000.000		1.360.500.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	19	02			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pengembangan kapasitas daya Saing Kepemudaan	%	99,77	100	234.000.000	100	221.000.000	100	221.000.000	100	221.000.000	100	897.000.000	
2	19	03			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cakupan Pembinaan Olahraga	%	100	100	95.500.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	56.000.000	100	263.500.000	
2	19	04			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase peningkatan kapasitas kepramukaan	%	0	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	
2	20				Urusan Pemerintahan Bidang Statistik					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	N/A	25	200.000.000	25	200.000.000	30	200.000.000	35	200.000.000	35	800.000.000	
						Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan daerah	%	N/A	25		25		30		35		35		
2	21				Urusan Pemerintahan Bidang Persandian					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamatan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	28,57	28,57	200.000.000	28,57	200.000.000	30	200.000.000	33	200.000.000	33	800.000.000	
2	22				Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan					3.955.000.000		3.455.000.000		3.455.000.000		2.690.000.000		13.555.000.000	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan
2	22	02			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal (ritual adat dan tradisi) yang dikembangkan sebagai budaya	%	15	47	1.315.000.000	55	1.015.000.000	77	1.015.000.000	100	750.000.000	100	4.095.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	22	03			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	22	40	1.455.000.000	60	1.255.000.000	80	1.255.000.000	100	1.255.000.000	100	5.220.000.000	
2	22	04			Program Pembinaan Sejarah	Persentase Pembinaan Sejarah yang dilaksanakan	%	N/A	100	185.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	185.000.000	100	740.000.000	
2	22	05			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	60	60	1.000.000.000	75	1.000.000.000	85	1.000.000.000	100	500.000.000	100	3.500.000.000	
2	23				Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan					10.425.000.000		10.425.000.000		10.425.000.000		10.425.000.000		41.700.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	23	02			Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	1,3	1,3	10.375.000.000	1,4	10.375.000.000	1,5	10.375.000.000	1,6	10.375.000.000	1,6	41.500.000.000	
2	23	03			Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Koleksi	87,48	87,48	50.000.000	88	50.000.000	89	50.000.000	90	50.000.000	90	200.000.000	
2	24				Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		1.100.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2	24	02			Program Pengelolaan Arsip	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	48,73	63,83	150.000.000	77,29	150.000.000	92,59	150.000.000	100,00	150.000.000	100,00	600.000.000	
2	24	03			Program Perlindungan dan penyelamatan Arsip	Persentase keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	69,63	72,41	75.000.000	77,48	75.000.000	81,35	75.000.000	85,42	75.000.000	85,42	300.000.000	
2	24	04			Program Perizinan Pengelolaan Arsip	Persentase Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan	%	0	35	50.000.000	55	50.000.000	75	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase pengguna pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	%	0	35		55		75		100		100		
					Urusan Pilihan					22.999.462.000		21.380.462.000		21.360.462.000		21.380.462.000		87.120.848.000	
3	25				Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan					8.706.027.000		8.556.027.000		8.556.027.000		8.556.027.000		34.374.108.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Volume produksi perikanan tangkap nelayan kecil	Ton	22.011	22.011	7.106.027.000	22.050	7.106.027.000	22.050	7.106.027.000	22.050	7.106.027.000	22.050	28.424.108.000	
3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Volume produksi perikanan budidaya	Ton	590.403	590.403	1.150.000.000	590.403	1.050.000.000	590.403	1.050.000.000	590.403	1.050.000.000	590.403	4.300.000.000	
3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Poklahsar yang meningkat kelasnya	%	25	25	450.000.000	26	400.000.000	27	400.000.000	28	400.000.000	28	1.650.000.000	
3	26				Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata					998.435.000		1.079.435.000		1.079.435.000		1.079.435.000		4.236.740.000	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
3	26	02			Program Peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Lama kunjungan Wisata	Hari	1	2	904.435.000	2	1.000.435.000	2	1.000.435.000	2	1.000.435.000	2	3.905.740.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	26	03			Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0	100	4.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	100	28.000.000	
						Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	0	100		100		100		100		100		
3	26	04			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan hak Kekayaan Intelektual	Persentase cakupan pengembangan ekonomi kreatif	%	0	50	5.000.000	70	10.000.000	90	10.000.000	100	10.000.000	50	35.000.000	
3	26	05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kraetif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang bersertifikat kompetensi	%	66,67	80	85.000.000	100	61.000.000	100	61.000.000	100	61.000.000	100	268.000.000	
3	27				Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian					12.645.000.000		11.145.000.000		11.145.000.000		11.145.000.000		46.080.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	27	02			Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	3,75	3,75	7.395.000.000	4,5	7.395.000.000	5	7.395.000.000	5,5	7.395.000.000	5,5	29.580.000.000	
						Cakupan bina kelompok petani	%	46,88	50		60		70		80		80		
						Persentase peningkatan produksi peternakan	%	2,38	3,5		4		5		6		6		
3	27	03			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman pangan	%	90	93	1.300.000.000	95	1.300.000.000	97	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	5.200.000.000	
						Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung tanaman perkebunan dan hortikultura	%	71,43	80		90		95		100		100		
						Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian mendukung peternakan	%	80	90		95		97		100		100		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
3	27	04			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Prosentase peningkatan usaha produk hewan yang bersertifikat PRA/NKV	%	N/A	90	3.000.000.000	95	1.500.000.000	97	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	7.500.000.000	
						Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	N/A	100		100		100		100		100		
						Persentase penyediaan dan pengembangan sarana pertanian mendukung kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	-5,42	-6,5		-7		-7,5		-8		-8		
3	27	05			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana OPT	%	N/A	90	100.000.000	95	100.000.000	97	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	
3	27	06			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase usaha pertanian yang diberikan izin		N/A	80	50.000.000	85	50.000.000	90	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	27	07			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas pada kelompok tani/gapoktan	%	N/A	70%	800.000.000	75%	800.000.000	80	800.000.000	85	800.000.000	85	3.200.000.000	
3	30				Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan					275.000.000		275.000.000		275.000.000		275.000.000		1.100.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
3	30	03			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan yang mengalami peningkatan standar SNI	%	50	50	50.000.000	75	50.000.000	85	50.000.000	90	50.000.000	90	200.000.000	
3	30	04			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	%	0,5	0,5	100.000.000	1	100.000.000	1,5	100.000.000	2	100.000.000	2	400.000.000	
3	30	06			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	%	54,5	54,5	100.000.000	60	100.000.000	65	100.000.000	70	100.000.000	70	400.000.000	
3	30	07			Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	Persentase peningkatan pelaku usaha yang difasilitasi pemasaran	%	25	25	25.000.000	25	25.000.000	30	25.000.000	35	25.000.000	35	100.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
3	31				Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian					325.000.000		275.000.000		255.000.000		275.000.000		1.130.000.000	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
3	31	02			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	%	0,57	0,57	200.000.000	20	150.000.000	40	130.000.000	50	150.000.000	60	630.000.000	
						Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP	%	50	50		50		50		50		50		
						Persentase cakupan pengembangan sentra industri	%	N/A	N/A		20		30		40		40		
3	31	03			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	N/A	100		100		100		100		100		
						Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di daerah Kabupaten/ Kota	%	N/A	100		100		100		100		100		
3	31	04			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase informasi industri dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	%	25	25	25.000.000	25	25.000.000	27	25.000.000	30	25.000.000	30	100.000.000	
3	32				Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi					50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		200.000.000	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
																			Kerja dan Transmigrasi
3	32	05			Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase perencanaan kawasan transmigrasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	
3	32	05			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase kawasan transmigrasi yang naik kelas	%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	
					Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan					204.080.346.400		208.522.533.900		198.714.721.400		198.656.908.900		809.974.510.600	
4	01				Sekretariat Daerah					12.540.000.000		12.290.000.000		12.540.000.000		12.540.000.000		49.910.000.000	Sekretariat Daerah
4	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Penataan Organisasi, Umum, keprotokoleran,)	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks RB baik (BB)	%	0	0	5.450.000.000	0	5.400.000.000	20	5.650.000.000	22,5	5.650.000.000	22,5	22.150.000.000	Bagian Ortala Sekretariat Daerah
						Persentase Perangkat Daerah dengan nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) diatas	%	62	62		64		66		68		68		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						80%													
						Persentase pelayanan kedinasan pimpinan dan pelayanan tamu tepat waktu	%	100	100		100		100		100		100		
						Nilai Sakip Sekretariat Daerah	Skor	62	64		66		68		68		68		
						Persentase Perangkat Daerah yang nilai AKIP nya B	%	0	0		0		20		25		25		
4	01	02			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang difasilitas	%	100	100	6.000.000.000	100	5.900.000.000	100	5.900.000.000	100	5.900.000.000	100	23.700.000.000	
						Status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Status		B		B		B		B		B		
						Persentase penyelesaian pengajuan administrasi kesejahteraan rakyat	%	100	100		100		100		100		100		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						yang tepat dan akurat													
4	01	03			Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	100	100	1.090.000.000	100	990.000.000	100	990.000.000	100	990.000.000	100	4.060.000.000	
						Persentase Penayangan SIRUP	%	100	100		100		100		100		100		
						Persentase rumusan kebijakan perekonomian dan pembangunan daerah yang dimanfaatkan menjadi kebijakan	%	100	100		100		100		100		100		
						Tingkat Inflas	Nilai	2,05	2,05		2,03		2,02		2,01		2,01		
4	02				Sekretariat DPRD					12.000.000.000		11.750.000.000		11.750.000.000		11.750.000.000		47.250.000.000	Sekertariat Dewan
4	02	02			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Presentase raperda yang disahkan menjadi perda tepat waktu sesuai propemperda	%	83,33	100	12.000.000.000	100	11.750.000.000,00	100	11.750.000.000,00	100	11.750.000.000,00	100	47.250.000.000	
						Presentase aspirasi	%	100	100		100		100		100		100		

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						yang ditindaklanjuti													
					Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan					191.540.346.400		196.232.533.900		186.174.721.400		186.116.908.900		760.064.510.600	
5	01				Perencanaan					1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		1.350.000.000		5.400.000.000	Bappelitbangda
5	01	02			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan strategis pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah	%	100	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	750.000.000	100	3.000.000.000	
						Capaian kinerja Perangkat Daerah	%	86,65	87		90		92		94		96		
5	01	03			Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah	Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	100	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	2.400.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	100	100		100		100		100		100		
						Rata-rata nilai sub komponen perencanaan kinerja tahunan pada komponen perencanaan kinerja perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan	%	100	100		100		100		100		100		
5	02				Keuangan					189.040.346.400		193.732.533.900		183.674.721.400		183.616.908.900		750.064.510.600	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase dokumen APBD tepat waktu	%	100	100	178.707.855.741	100	183.400.043.241	100	174.042.230.741	100	174.014.418.241	100	710.164.547.964	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
						Persentase dokumen pengelolaan perbendaharaan daerah tepat waktu	%	91	92		93		94		95		95		
						Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan tepat waktu	%	91	92		93		94		95		95		
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) tepat waktu	%	89	90	2.787.782.359	91	2.787.782.359	92	2.087.782.359	93	2.057.782.359	93	9.721.129.436	
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi Daerah	%	42,23	100	7.544.708.300	100	7.544.708.300	100	7.544.708.300	100	7.544.708.300	100	30.178.833.200	
						Jumlah penambahan wajib pajak baru	%	N/A	100		100		100		100		100		
5	03				Kepegawaian					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.200.000.000	BKPSDM
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase penerbitan SK secara tepat waktu	%	N/A	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	300.000.000	100	1.200.000.000	
						Persentase penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan	%	N/A	100		100		100		100		100		
						Persentase aparatur yang berkinerja baik	%	N/A	100		100		100		100		100		
5	04				Pendidikan dan Pelatihan					200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		800.000.000	BKPSDM

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
5	04	02			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur	%	N/A	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	800.000.000	
5	05				Penelitian dan Pengembangan					650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		2.600.000.000	Bappelitbangda
5	05	02			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang terpilih sebagai bahan perencanaan pembangunan	%	N/A	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	650.000.000	100	2.600.000.000	
					Urusan Pengawasan Urusan Pemerintahan					1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		5.800.000.000	
6	01				Inspektorat Daerah					1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		5.800.000.000	Inspektorat
6	01	02			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	%	80	80	1.000.000.000	85	1.000.000.000	90	1.000.000.000	95	1.000.000.000	95	4.000.000.000	
6	01	03			Program Perumusann Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penyelesaian temuan berulang kode 01, 02 dan 03	%	80	80	450.000.000	85	450.000.000	90	450.000.000	95	450.000.000	95	1.800.000.000	
					Urusan Kewilayahan					4.600.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000		4.600.000.000			
7	01				Kecamatan					4.550.000.000		4.550.000.000		4.550.000.000		4.550.000.000		18.200.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase sarana prasarana kecamatan dan kelurahan dalam kondisi baik	%	40	70%	150.000.000	80%	150.000.000	90%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	Kecamatan Pattallassang
							%	81,99%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	Kecamatan Polongbangkeng Utara
							%	96,11	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
							%	94,44	95	75.000.000	96	75.000.000	97	75.000.000	99	75.000.000	99	300.000.000	Kecamatan Mangarabombang
							%	61,76	70	75.000.000	75	75.000.000	85	75.000.000	95	75.000.000	95	300.000.000	Kecamatan Mappakasunggu
							%	90	95	50.000.000	97	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Sanrobone
							%	95	95	50.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	95	50.000.000	95	200.000.000	Kecamatan Galesong Selatan
							%	60	80	50.000.000	85	50.000.000	90	50.000.000	95	50.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Galesong
							%	61,76	70	75.000.000	75	75.000.000	85	75.000.000	95	75.000.000	95	300.000.000	Kecamatan Galesong Utara
							%	90	95	50.000.000	97	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan	%	70	85%	950.000.000	90%	950.000.000	95%	950.000.000	100%	950.000.000	100%	3.800.000.000	Kecamatan Pattallassang
							%	100%	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	2.400.000.000	Kecamatan Polongbangkeng Utara
							%	100	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	600.000.000	100%	2.400.000.000	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
							%	86,36	88	100.000.000	90	100.000.000	93	100.000.000	95	100.000.000	95	400.000.000	Kecamatan Mangarabombang
							%	63,89	80	100.000.000	85	100.000.000	90	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Kecamatan Mappakasunggu
							%	85	90	25.000.000	95	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Sanrobone
							%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Galesong Selatan
							%	70,50	80	25.000.000	85	25.000.000	90	25.000.000	95	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Galesong
							%	63,89	80	100.000.000	85	100.000.000	90	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	Kecamatan Galesong Utara
							%	85	90	25.000.000	95	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup di Kecamatan	Kasus	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	10	200.000.000	Kecamatan Pattallassang
							Kasus	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	5	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	Kecamatan Polongbangkeng Utara
							Kasus	N/A	10	50.000.000	10	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	200.000.000	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
							Kasus	N/A	11	50.000.000	9	50.000.000	7	50.000.000	4	50.000.000	4	200.000.000	Kecamatan Mangarabombang
							Kasus	N/A	10	50.000.000	7	50.000.000	5	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	Kecamatan Mappakasunggu
							Kasus	N/A	8	50.000.000	6	50.000.000	5	50.000.000	4	50.000.000	4	200.000.000	Kecamatan Sanrobone
							Kasus												Kecamatan Galesong Selatan
							Kasus	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000	Kecamatan Galesong
							Kasus	N/A	15	50.000.000	11	50.000.000	6	50.000.000	2	50.000.000	0	200.000.000	Kecamatan Galesong Utara
							Kasus	N/A	8	50.000.000	6	50.000.000	5	50.000.000	4	50.000.000	4	200.000.000	Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemeritahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang telah dilaksanakan	%	0	70%	50.000.000	80%	50.000.000	90%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Pattallassang
							%	83,33%	90%	50.000.000	95%	50.000.000	95%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Polongbangkeng Utara
							%	76,97	90	50.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
							%	87,50	90	25.000.000	92	25.000.000	94	25.000.000	95	25.000.000	95	100.000.000	Kecamatan Mangarabombang
							%	N/A	85	25.000.000	90	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Mappakasunggu
							%	87,50	90	25.000.000	90	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Sanrobone
							%	100	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Galesong Selatan
							%	N/A	80	25.000.000	85	25.000.000	90	25.000.000	95	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Galesong
							%	N/A	85	25.000.000	90	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Galesong Utara
							%	87,50	90	25.000.000	90	25.000.000	95	25.000.000	100	25.000.000	100	100.000.000	Kecamatan Kepulauan Tanakeke

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase laporan keuangan desa yang selesai tepat waktu	%	83,36%	90%	50.000.000	90%	50.000.000	95%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Polongbangkeng Utara
							%	80	80%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	200.000.000	Kecamatan Polongbangkeng Selatan
							%	64	72	50.000.000	81	50.000.000	90	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Mangarabombang
							%	56	60	50.000.000	70	50.000.000	80	50.000.000	90	50.000.000	90	200.000.000	Kecamatan Mappakasunggu
							%	80	85	50.000.000	90	50.000.000	95	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Sanrobone
							%	90	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	50.000.000	90	200.000.000	Kecamatan Galesong Selatan
							%		80	50.000.000	85	50.000.000	90	50.000.000	95	50.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Galesong
							%	56	60	50.000.000	70	50.000.000	80	50.000.000	90	50.000.000	90	200.000.000	Kecamatan Galesong Utara
							%	80	85	50.000.000	90	50.000.000	95	50.000.000	100	50.000.000	100	200.000.000	Kecamatan Kepulauan Tanakeke
					Unsur Pemerintahan Umum					1.256.990.000		1.336.990.000		11.256.990.000		11.256.990.000		25.107.960.000	
8	01				Kesatuan Bangsa dan Politik					1.256.990.000		1.336.990.000		11.256.990.000		11.256.990.000		25.107.960.000	Kesbangpol

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD	
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8	01	02			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Angka potensi konflik SARA di masyarkat	Kejadian	2	0	100.000.000	2	130.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	430.000.000	
8	01	03			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya	%	50	100	986.990.000	100	1.036.990.000	100	10.986.990.000	100	10.986.990.000	100	23.997.960.000	
8	01	04			Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatn	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang dibina	%	42	53	100.000.000	66	100.000.000	81	100.000.000	100	100.000.000	100	400.000.000	
8	01	05			Program Pembinaan dan Pengembangan Katahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Angka potensi konflik ekonomi, sosial dan budaya di masyarakat	Kejadian	24	24	70.000.000	24	70.000.000	24	70.000.000	24	70.000.000	24	280.000.000	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
8	01	06			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Angka potensi gangguan ideologi, politik,pertahanan dan keamanan	Kejadian	12	12	180.000.000	12	100.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	12	640.000.000	
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					564.312.644.953		568.861.450.544		575.653.807.544		584.936.894.706		2.293.764.797.747	
1	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan urusan penunjang perankat daerah	%	92,5		564.312.644.953		568.861.450.544		575.653.807.544		584.936.894.706		2.293.764.797.747	Seluruh Perangkat Daerah
Total										1.424.090.297.768		1.447.587.935.820		1.444.446.228.525		1.467.989.920.925		5.762.849.382.652	

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					Urusan Wajib Pelayanan Dasar					401.549.643.925		414.835.601.381		424.787.162.081		439.908.392.319		1.678.215.799.706	
1	01				Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan					84.449.956.641		93.588.669.005		100.871.122.405		111.030.900.005		389.940.648.056	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	02			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase warga negara usia 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	%	61,01	100	83.034.956.641	100	91.923.669.005	100	99.206.122.405	100	109.465.900.005	100	383.630.648.056	
						Persentase warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartsipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	83,39	100		100		100		100		100			
						Persentase jumlah warga negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	37,86	100		100		100		100		100			

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAKALAR

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang terdiri dari Indikator Kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disebut sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDG's) pada akhir periode RPD.

8.1.1 Indikator Kinerja Makro

Penetapan Indikator Makro adalah gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dengan menilai capaian kinerja masing–masing indikator kinerja secara makro. Indikator makro tersebut terdiri dari enam indikator yang diamanahkan oleh pemerintah pusat sebagaimana dituangkan dalam Permendagri 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Enam indikator kinerja makro tersebut juga merupakan bagian dari IKU daerah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut.

Tabel VIII- 1: Penetapan Target Indikator Kinerja Makro Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

No	Indikator	Satuan	Kodisi Awal		Perkiraan Capaian Tahun 2022	Tahun				Kondisi Akhir Periode
			2020	2021		2023	2024	2025	2026	
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	-0,61	5,05	4,10-5,55	4,62-5,98	5,04-6,52	6,10-7,14	6,22-7,78	6,22-7,78
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,16	4,23*	3,50	3,32	3,11	2,90	2,69	2,69
3	PDRB Per Kapita	Juta Rp	33,91	36,63	39,77	43,38	49,52	51,24	56,51	56,51
4	Tingkat Kemiskinan	%	8,44	8,25	7,35	7,09	6,90	6,69	6,60	6,60
5	Gini Rasio	Angka	0,360	0,360	0,365	0,368	0,365	0,365	0,365	0,365
6	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,31	67,72	68,24	68,83	69,70	70,31	70,54	70,54
7	Inflasi	Angka	2,13	1,49*	1,96	2,43	3,48	3,51	3,88	3,88

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar; 2022 (data diolah)

8.1.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemabngunan Daerah (impact based). Tujuan penetapan IKU adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator tujuan dan sasaran daerah pada masa jabatan pemerintah daerah. Adapun target IKU disajikan sebagai berikut.

Tabel VIII- 2 : Penetapan Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisai Target Tahun 2022*	Target capaian				Kondisi Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,445	2,447	2,450	2,453	2,500	2,510	2,510
2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,72	67,74	68,83	69,70	70,31	70,54	70,54
3	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29.170	29.172	29.174	29.178	29.182	29.186	29.186
4	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	33,97 Juta	33,99 Juta	34,03	34,07	34,11	34,15	34,15
5	Rasio Gini	Angka	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	4.10-5.55	4.62-5.98	5.04-6.52	6.10-7.14	6.22-7.78	6.22-7.78
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,16	4,16	4,00	3,96	3,91	3,86	3,86
8	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (Angka Kemiskinan)	Persen	8,25%	7,35%	7,09%	6,90%	6,69%	6,60%	6,60%
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	58,98	59,00	59,02	59,06	59,10	59,14	59,14
10	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	C (49,49)	B (70,00)	BB (71-72)	BB (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (79-80)

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2021	Realisai Target Tahun 2022*	Target capaian				Kondisi Akhir Periode RPD
					2023	2024	2025	2026	
11	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	CC (59,38)*	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)	BB (71-80)
12	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	46,11	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	100
13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Belum dinilai	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
14	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	96,41	94,41	91,91	89,41	86,91	84,41	84,41

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar; 2022 (data diolah)

8.1.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (outcome based) pada masa jabatan pemerintah daerah yang disusun sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan dan kewenangan pemerintah kabupaten.

Tabel VIII- 3: Penetapan Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
1			**Aspek Kesejahteraan Masyarakat**						
1	**1**		**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**						
1	1	1	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,450	2,453	2,500	2,510	2,510
1	1	2	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	68,83	69,70	70,31	70,54	70,54
1	1	3	Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah	Angka	29.174	29.178	29.182	29.186	29.186
1	1	4	PDRB/Kapita	Juta Rupiah	34,03	34,07	34,11	34,15	56,51
1	1	5	Rasio Gini	Angka	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
1	1	6	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4.62-5.98	5.04-6.52	6.10-7.14	6.22-7.78	6,22-7,78
1	1	7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,00	3,96	3,91	3,86	3,86
1	1	8	Persentase Penduduk dibawah Garis Kemiskinan (Angka Kemiskinan)	Persen	8,40%	8,31%	8,22%	8,16%	8,16%
1	1	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	Point	59,02	59,06	59,10	59,14	59,14
1	1	10	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	BB (71-72)	BB (73-75)	BB (76-78)	BB (79-80)	BB (79-80)

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
1	1	11	Nilai SAKIP Daerah	Predikat	B	B	BB	BB	BB
1	1	12	Indeks Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Minimal	Indeks	60-70	70-80	80-90	90-100	100
1	1	13	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
1	1	14	Angka Kriminalitas	Kasus Per 100.000 Penduduk	91,91	89,41	86,91	84,41	84,41
2			**Aspek Pelayanan Umum**						
2	**1**		**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**						
2	**1**		**Pendidikan**						
2	1	1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100	100	100	100	100
2	1	2	Tingkat partisipasi warga usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	100	100	100	100
2	1	3	Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	100	100
2	1	4	Tingkat partisipasi warga usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	100	100

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
2	1	5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	100	100
2	**2**		**Kesehatan**						
2	2	1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	Persen	100	100	100	100	100
2	2	2	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100
2	2	3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100
2	2	4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	100	100
2	2	5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	100	100	100
2	2	6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
2	2	7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
2	2	8	Persentase orang usia 15 – 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
2	2	9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
2	2	10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
2	2	11	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
2	2	12	Persentase penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
2	2	13	Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
2	2	14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100
2	**3**		**Pekerjaan Umum dan Penataan ruang**						
2	3	1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
2	3	2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
2	3	3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	100	100	100	100	100
2	3	4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadapa air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
2	3	5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	100	100	100	100	100
2	3	6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100	100	100	100
2	3	7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
2	3	8	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	100	100	100	100
2	3	9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konsruksi	Persen	100	100	100	100	100
2	**4**		**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**						

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
2	4	1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
2	4	2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/ kota	Persen	100	100	100	100	100
2	4	3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/kota yang ditangani	Persen	100	100	100	100	100
2	4	4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	100	100	100	100	100
2	4	5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	100	100
2	**5**		**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**						
2	5	1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100
2	5	2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100
2	5	3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100	100	100

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
2	5	4	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100	100	100
2	5	5	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100	100	100
2	5	6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100
2	5	7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15	15	15	15	15
2	**6**		**Sosial**						
2	6	1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti (indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100
2	6	2	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
3			**Layanan Urusan Wajib Non Dasar**						
3	**1**		**Tenaga Kerja**						

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
3	1	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100	100
3	1	2	Persentase tenaga kerja bersertifikasi kompetensi	Persen	3	4	5	6	6
3	1	3	Tingkat produktivitas Tenaga Kerja	Persen	100	100	100	100	100
3	1	4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	100	100	100	100	100
3	1	5	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	77	79	81	83	83
3	**2**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
3	2	1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	90	95	95	95	95
3	2	2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	100	100	100	100	100
3	2	3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 1000 Penduduk Perempuan	100	100	100	100	100
3	**3**		**Pangan**						

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
3	3	1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	9	10	11	12	12
3	**4**		**Pertanahan**						
3	4	1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100
3	4	2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	50	60	70	80	80
3	4	3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	100	100	100	100	100
3	4	4	Tersedianya tanah obyek Landreform (TOL) yang siap direditribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan Tanah Absente	Persen	100	100	100	100	100
3	4	5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
3	4	6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	100	100	100	100	100
3	**5**		**Lingkungan Hidup**						
3	5	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Angka	59,02	59,06	59,10	59,14	59,14

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
3	5	2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100
3	5	3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	100	100	100	100	100
3	**6**		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**						
3	6	1	Perekaman KTP elektronik	Persen	97	97	97	97	97
3	6	2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	50	55	60	65	65
3	6	3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	97	98	99	100	100
3	6	4	Jumlah OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	98	98	98	98	98
3	**7**		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**						
3	7	1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persen	100	100	100	100	100
3	7	2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persen	7	13	20	26	26
3	**8**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
3	8	1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Per 1000 WUS	2,08	2,06	2,04	2,02	2,02

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
3	8	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence rate/ mCPR)	Persen	68,73	68,73	68,73	68,73	68,73
3	8	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	13,29	13,28	13,27	13,26	13,26
3	**9**		**Perhubungan**						
3	9	1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
3	9	2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
3	**10**		**Komunikasi dan Informatika**						
3	10	1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	25	25	30	35	35
3	10	2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100	100
3	10	3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota	Persen	100	100	100	100	100
3	**11**		**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**						

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
3	11	1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	100	100	100	100	100
3	11	2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	44,79	48,79	52,79	56,79	56,79
3	**12**		**Penanaman Modal**						
3	12	1	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	Persen	24	24	25	26	26
3	**13**		**Kepemudaan dan Olahraga**						
3	13	1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	100	100	100	100	100
3	13	2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100
3	13	3	Peningkatan prestasi olahraga	Persen	100	100	100	100	100
3	**14**		**Statistik**						
3	14	1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	25	25	30	35	35
3	14	2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	25	25	30	35	35
3	**15**		**Persandian**						
3	15	1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	28,57	28,57	30	33	33

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
3	**16**		**Kebudayaan**						
3	16	1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100
3	**17**		**Perpustakaan**						
3	17	1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	1,3	1,4	1,5	1,6	1,6
3	17	2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100
3	**18**		**Kearsipan**						
3	18	1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) pasal 40 dan pasal 50 Undang – undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan	Persen	100	100	100	100	100
3	18	2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	63,83	77,29	92,59	100	100
4			**Layanan Urusan Pilihan**						
4	**8**		**Kelautan dan Perikanan**						

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
4	**8**		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kab/kota (sumber data: one data KKP)	Persen	100	100	100	100	100
4	**1**		**Pariwisata**						
4	1	1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100
4	1	2	Tingkat hunian akomodasi	Persen	100	100	100	100	100
4	1	3	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	100	100	100	100	100
4	1	4	Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	Persen	100	100	100	100	100
4	**2**		**Pertanian**						
4	2	1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Persen	100	100	100	100	100
4	2	2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	100	100	100
4	**5**		**Perdagangan**						
4	5	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/ SIUP Pusat Perlengkapan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	100	100	100	100	100
4	5	2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	100	100	100	100	100

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
4	5	3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UPPP) yang ditera sah yang berlaku	Persen	100	100	100	100	100
4	**6**		**Perindustrian**						
4	6	1	Pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	Persen	100	100	100	100	100
4	6	2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industry dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	100	100	100	100	100
4	6	3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100
4	6	4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
4	6	5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100
4	6	6	Tersedianya informal industry secara lengkap dan terkini	Persen	100	100	100	100	100
6			**Penunjang Urusan**						
6	**1**		**Perencanaan dan Keuangan**						
6	1	1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
6	1	2	Rasio PAD	Persen	100	100	100	100	100
6	1	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Persen	100	100	100	100	100
6	1	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Persen	100	100	100	100	100
6	1	5	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	100	100	100	100	100
6	1	6	Opini laporan keuangan	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
6	**2**		**Pengadaan**						
6	2	1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	0	0
6	2	2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	100	100	100	100	100
6	2	3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Angka	100	100	100	100	100
6	**2**		**Keuangan**						
6	2	1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100
6	2	2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	100	100	100	100	100
6	2	3	Manajemen Aset	Persen	100	100	100	100	100
6	2	4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	100	100	100	100	100
6	**3**		**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**						
6	3	1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Angka	100	100	100	100	100

No.			Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
					2023	2024	2025	2026	
6	3	2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Angka	100	100	100	100	100
6	3	3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%)(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Angka	100	100	100	100	100
7			**Pengawasan Urusan Pemerintahan**						
7	**1**		**Transparansi**						
7	1	1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	100	100	100	100	100
7	1	2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Takalar; 2022 (data diolah)

8.2 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. SPM ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 serta diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan sasaran. Mekanisme penerapan SPM tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VIII- 4 : Penetapan Target Indikator SPM Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target			
		2023	2024	2025	2026
Pelayanan Dasar Pendidikan					
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)					
Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang berpartispasi dalam PAUD	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan Dasar					

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2023	2024	2025	2026
Jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan Keseteraan					
Jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Dasar Kesehatan					
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					
Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Balita					
Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar					
Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif					

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2023	2024	2025	2026
Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut					
Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					
Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus					
Jumlah Warga Negara penderita Diabetes mellitus yang mendapatkan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat					
Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis					
Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeiciency Virus*)					

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target			
		2023	2024	2025	2026
Jumlah Warga Negara Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari					
Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman					
Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana					
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah					
Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Dasar Sosial					
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar Di Luar Panti					

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target			
		2023	2024	2025	2026
Jumlah warga negara yang penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar Di Luar Panti					
Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar Di Luar Panti					
Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti					
Jumlah warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%	100%	100%	100%
Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.					
Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat					

Bidang Urusan/Jenis Pelayanan/Indikator	Target Nasional	Target 2023	2024	2025	2026
Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum					
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana					
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran					
Jumlah Laporan dan Pengaduan Masyarakat akan Bencana Kebakaran	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Takalar, 2021 (data diolah)

8.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Suistainable Development Goals (TPB/SDGs)

Sebagai pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan/Suistainable Development Goals (TPB/SDGs) kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global. TPB/SDGs bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat masyarakat mencakup 17 tujuan. Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat kabupaten.

Penetapan target indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel VIII- 5 : Penetapan Target Indikator TPB/SDGs Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
TUJUAN 1 : MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN							
1.2. PADA TAHUN 2030, MENGURANGI SETIDAKNYA SETENGAH PROPORSI LAKI-LAKI, PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK DARI SEMUA USIA, YANG HIDUP DALAM KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI, SESUAI DENGAN DEFINISI NASIONAL							
(1.2.1*)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	Persen	8,4	8,31	8,22	8,16
1.3. MENERAPKAN SECARA NASIONAL SISTEM DAN UPAYA PERLINDUNGAN SOSIAL YANG TEPAT BAGI SEMUA, TERMASUK KELOMPOK YANG PALING MISKIN, DAN PADA TAHUN 2030 MENCAPAI CAKUPAN SUBSTANSIAL BAGI KELOMPOK MISKIN DAN RENTAN.							
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	BPJS	Persen	100	100	100	100
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan	Persen	87,87	87,9	87,93	87,95
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan	Dinas Sosial PMD	Persen	100	100	100	100

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.						
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Bidang Rehabilitasi sosial	Jiwa	18.550	19.848	21.237	22.274
1.4. PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, KHUSUSNYA MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN, MEMILIKI HAK YANG SAMA TERHADAP SUMBER DAYA EKONOMI, SERTA AKSES TERHADAP PELAYANAN DASAR, KEPEMILIKAN DAN KONTROL ATAS TANAH DAN BENTUK KEPEMILIKAN LAIN, WARISAN, SUMBER DAYA ALAM, TEKNOLOGI BARU, DAN JASA KEUANGAN YANG TEPAT, TERMASUK KEUANGAN MIKRO.							
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS	Persen	92,5	93	93	93
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	68.73	68.73	68.73	68.73

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.						
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPRPKP dan Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas PUPRPKP dan Dinas Kesehatan	Persen	65,59	65.60	65.61	65.62
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	71,79	71,81	71,85	71,9
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	65,67	66,17	66,67	67,17
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Capil	Persen	100	100	100	100

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	BPS	Persen	PM	PM	PM	PM
1.5. PADA TAHUN 2030, MEMBANGUN KETAHANAN MASYARAKAT MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, DAN MENGURANGI KERENTANAN MEREKA TERHADAP KEJADIAN EKSTRIM TERKAIT IKLIM DAN GUNCANGAN EKONOMI, SOSIAL, LINGKUNGAN, DAN BENCANA.							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal akibat bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulan Bencana Daerah	Jiwa	PM	PM	PM	PM
	Jumlah korban hilang akibat bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulan Bencana Daerah	Jiwa	PM	PM	PM	PM
	Jumlah korban terluka akibat bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulan Bencana Daerah	Jiwa	PM	PM	PM	PM
	Jumlah korban mengungsi akibat bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulan Bencana Daerah	Jiwa	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Badan Penanggulan Bencana Daerah	Lokasi	7	7	7	7
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial PMD	Persen	100	100	100	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Dinas Sosial PMD	Persen	PM	PM	PM	PM
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Lokasi	7	7	7	7
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	PM	PM	PM	PM
1.A. MENJAMIN MOBILISASI YANG SIGNIFIKAN TERKAIT SUMBER DAYA DARI BERBAGAI SUMBER, TERMASUK MELALUI KERJASAMA PEMBANGUNAN YANG LEBIH BAIK, UNTUK MENYEDIAKAN SARANA YANG MEMADAI DAN TERJANGKAU BAGI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN MENGAKHIRI KEMISKINAN DI SEMUA DIMENSI.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Sosial PMD	Persen	100	100	100	100
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Persen	35	37	39	41
TUJUAN 2 : MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK, SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN							
2.1. PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN KELAPARAN DAN MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA ORANG, KHUSUSNYA ORANG MISKIN DAN MEREKA YANG BERADA DALAM KONDISI RENTAN, TERMASUK BAYI, TERHADAP MAKANAN YANG AMAN, BERGIZI, DAN CUKUP SEPANJANG TAHUN.							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	6,55	6,53	6,51	6,49

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Dinas Kesehatan	Persen	18,5	18,0	17,5	17,0
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	3,80	3,78	3,76	3,74
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	7,71	7,70	7,69	7,68
2.2. PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN SEGALA BENTUK KEKURANGAN GIZI, TERMASUK PADA TAHUN 2025 MENCAPAI TARGET YANG DISEPAKATI SECARA INTERNASIONAL UNTUK ANAK PENDEK DAN KURUS DI BAWAH USIA 5 TAHUN, DAN MEMENUHI KEBUTUHAN GIZI REMAJA PEREMPUAN, IBU HAMIL DAN MENYUSUI, SERTA MANULA.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan	Persen	21,59	21,57	21,55	21,53

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Dinas Kesehatan	Persen	31,50	31,40	31,30	31,20
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan	Persen	7,50	7,48	7,46	7,44
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan	Persen	26,5	26,4	26,3	26,2
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Dinas Kesehatan	Persen	80	80	80	80
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	86,4	88,4	90,4	92,4
TUJUAN 3 : MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA							
3.1.PADA TAHUN 2030, MENGURANGI RASIO ANGKA KEMATIAN IBU HINGGA KURANG DARI 70 PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan	Kematian Per 100.000 KH	188,88	187,38	185,88	184,38

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	BPS	Persen	100	100	100	100
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	BPS	Persen	92,5	93	93	93
3.2.PADA TAHUN 2030, MENGAKHIRI KEMATIAN BAYI BARU LAHIR DAN BALITA YANG DAPAT DICEGAH, DENGAN SELURUH NEGARA BERUSAHA MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN NEONATAL SETIDAKNYA HINGGA 12 PER 1000 KH (KELAHIRAN HIDUP) DAN ANGKA KEMATIAN BALITA 25 PER 1000.							
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kematian Per 1000 KH	0,52	0,51	0,5	0,49
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kematian Per 1000 KH	3,63	3,62	3,61	3,60
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Dinas Kesehatan	Kematian Per 1000 KH	3,63	3,62	3,61	3,60

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.3.PADA TAHUN 2030, MENGAKHIRI EPIDEMI AIDS, TUBERKULOSIS, MALARIA, DAN PENYAKIT TROPIS YANG TERABAIKAN, DAN MEMERANGI HEPATITIS, PENYAKIT BERSUMBER AIR, SERTA PENYAKIT MENULAR LAINNYA							
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Dinas Kesehatan	Persen	<0,5%	<0,5%	<0,5%	<0,5%
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinas Kesehatan	Per 100.000 Penduduk	180	178	176	174
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Dinas Kesehatan	Per 1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk	< 1/1000 Penduduk
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis).	Dinas Kesehatan	Orang	<5	<5	<5	<5
	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Kusta).	Dinas Kesehatan	Orang	<25	<25	<25	<25
3.4.PADA TAHUN 2030, MENGURANGI HINGGA SEPERTIGA ANGKA KEMATIAN DINI AKIBAT PENYAKIT TIDAK MENULAR, MELALUI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN, SERTA MENINGKATKAN KESEHATAN MENTAL DAN KESEJAHTERAAN.							
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	7,06	7,04	7,02	7,00

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Dinas Kesehatan	Persen	18,58	18,08	17,58	17,08
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	9,81	9,51	9,21	8,91
3.4.2*	Angka kematian (*insidens rate*) akibat bunuh diri.	BPS	Persen	PM	PM	PM	PM
3.5. MEMPERKUAT PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYALAHGUNAAN ZAT, TERMASUK PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PENGGUNAAN ALKOHOL YANG MEMBAHAYAKAN.							
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	BNK	Persen	1,90	1,89	1,88	1,87
3.7.PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES UNIVERSAL TERHADAP LAYANAN KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI, TERMASUK KELUARGA BERENCANA, INFORMASI DAN PENDIDIKAN, DAN INTEGRASI KESEHATAN REPRODUKSI KE DALAM STRATEGI DAN PROGRAM NASIONAL							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	13,83	11,33	8,83	6,33

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	70,82	73,82	76,82	79,82
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	17,28	17,78	18,28	18,78
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	2,41	2,31	2,21	2,11
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	1,92	1,87	1,82	1,77
3.8.MENCAPAI CAKUPAN KESEHATAN UNIVERSAL, TERMASUK PERLINDUNGAN RISIKO KEUANGAN, AKSES TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BAIK, DAN AKSES TERHADAP OBAT- OBATAN DAN VAKSIN DASAR YANG AMAN, EFEKTIF, BERKUALITAS, DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA ORANG							
3.8.1.(a)	*Unmet need pelayanan kesehatan.*		Persen	13,29	13,28	13,27	13,26

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Dinas Kesehatan dan BPJS	Jiwa Per 1000 Penduduk	1000	1000	1000	1000
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan dan BPJS	Persen	100	100	100	100
3.9.PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH KEMATIAN DAN KESAKITAN AKIBAT BAHAN KIMIA BERBAHAYA, SERTA POLUSI DAN KONTAMINASI UDARA, AIR, DAN TANAH.							
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Dinas Kesehatan	Persen	PM	PM	PM	PM
3.A.MEMPERKUAT PELAKSANAAN THE FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL WHO DI SELURUH NEGARA SEBAGAI LANGKAH YANG TEPAT.							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan	Persen	PM	PM	PM	PM
3.B.MENDUKUNG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN VAKSIN DAN OBAT PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR YANG TERUTAMA BERPENGARUH TERHADAP NEGARA BERKEMBANG, MENYEDIAKAN AKSES TERHADAP OBAT DAN VAKSIN DASAR YANG TERJANGKAU, SESUAI THE DOHA DECLARATION TENTANG THE TRIPS AGREEMENT AND PUBLIC HEALTH, YANG MENEGASKAN HAK NEGARA BERKEMBANG UNTUK MENGGUNAKAN SECARA PENUH KETENTUAN DALAM KESEPAKATAN ATAS ASPEK-ASPEK PERDAGANGAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERKAIT KELELUASAAN UNTUK MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT, DAN KHUSUSNYA, MENYEDIAKAN AKSES OBAT BAGI SEMUA.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100
3.C.MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN PEMBIAYAAN KESEHATAN DAN REKRUTMEN, PENGEMBANGAN, PELATIHAN, DAN RETENSI TENAGA KESEHATAN DI NEGARA BERKEMBANG, KHUSUSNYA NEGARA KURANG BERKEMBANG, DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL.							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Dinas Kesehatan	Per 1000 Penduduk	3,67	4,17	4,67	5,17
TUJUAN 4 : MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA							
4.1.PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH TANPA DIPUNGUT BIAYA, SETARA, DAN BERKUALITAS, YANG MENGARAH PADA CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG RELEVAN DAN EFEKTIF.							
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	100	100	100	100

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	78,32	78,82	79,32	79,82
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	64,94	65,44	65,94	66,44
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	108,71	109,21	109,71	110,21
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	82,84	83,34	83,84	84,34
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Tahun	8,49	8,99	9,49	9,99
4.2.PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA ANAK PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI MEMILIKI AKSES TERHADAP PERKEMBANGAN DAN PENGASUHAN ANAK USIA DINI, PENGASUHAN, PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH DASAR YANG BERKUALITAS, SEHINGGA MEREKA SIAP UNTUK MENEMPUH PENDIDIKAN DASAR.							
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	47,65	47,65	47,65	47,65

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.4.PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN JUMLAH PEMUDA DAN ORANG DEWASA YANG MEMILIKI KETERAMPILAN YANG RELEVAN, TERMASUK KETERAMPILAN TEKNIK DAN KEJURUAN, UNTUK PEKERJAAN, PEKERJAAN YANG LAYAK DAN KEWIRAUSAHAAN.							
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DMPTSP NakerTrans	Persen	PM	PM	PM	PM
4.5.PADA TAHUN 2030, MENGHILANGKAN DISPARITAS GENDER DALAM PENDIDIKAN, DAN MENJAMIN AKSES YANG SAMA UNTUK SEMUA TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEJURUAN, BAGI MASYARAKAT RENTAN TERMASUK PENYANDANG CACAT, MASYARAKAT PENDUDUK ASLI, DAN ANAK-ANAK DALAM KONDISI RENTAN.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat	87,31	87,81	88,31	88,81

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.6.PADA TAHUN 2030, MENJAMIN BAHWA SEMUA REMAJA DAN PROPORSI KELOMPOK DEWASA TERTENTU, BAIK LAKI-LAKI MAUPUN PEREMPUAN, MEMILIKI KEMAMPUAN LITERASI DAN NUMERASI.							
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	83,25	83,75	84,25	84,75
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	PM	PM	PM	PM
4.A.MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN FASILITAS PENDIDIKAN YANG RAMAH ANAK, RAMAH PENYANDANG CACAT DAN GENDER, SERTA MENYEDIAKAN LINGKUNGAN BELAJAR YANG AMAN, ANTI KEKERASAN, INKLUSIF DAN EFEKTIF BAGI SEMUA.							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH), Untuk SD/MI/sederajat.						
	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH), Untuk SD/MI/sederajat.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persen	PM	PM	PM	PM
4.C.PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PASOKAN GURU YANG BERKUALITAS, TERMASUK MELALUI KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PELATIHAN GURU DI NEGARA BERKEMBANG, TERUTAMA NEGARA KURANG BERKEMBANG, DAN NEGARA BERKEMBANG KEPULAUAN KECIL.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.		Persen	53,33	58,33	63,33	68,33
TUJUAN 5 : MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN							
5.1.MENGAKHIRI SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP KAUM PEREMPUAN DIMANAPUN.							
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Dokumen	2	3	4	5
5.2.MENGHAPUSKAN SEGALA BENTUK KEKERASAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DAN PRIBADI, TERMASUK PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL, SERTA BERBAGAI JENIS EKSPLOITASI LAINNYA.							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir (Kekerasan Fisik)	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	0,63	0,62	0,61	0,6

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	0,0007	0,0006	0,0005	0,0004
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	0,63	0,62	0,61	0,6
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	100	100	100	100
5.3.MENGHAPUSKAN SEMUA PRAKTIK BERBAHAYA, SEPERTI PERKAWINAN USIA ANAK, PERKAWINAN DINI DAN PAKSA, SERTA SUNAT PEREMPUAN.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	% 18 Tahun	15,56	15,06	14,56	14,06
			% 15 Tahun	1,2	1,19	1,18	1,17

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	tahun dan sebelum umur 18 tahun						
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Umur	24	24	24	24
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Kelahiran pada perempuan umur 15-18 Tahun	18	16	14	12
5.5.MENJAMIN PARTISIPASI PENUH DAN EFEKTIF, DAN KESEMPATAN YANG SAMA BAGI PEREMPUAN UNTUK MEMIMPIN DI SEMUA TINGKAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KEHIDUPAN POLITIK, EKONOMI, DAN MASYARAKAT.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	BPS	Persen	26,67	30,00	30,00	30,00
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial (Bupati, Eselon I - II)	BPS	Persen	13,64	18,18	22,73	27,27
	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BPS	Persen	20,00	25,00	30,00	30,00

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.6.MENJAMIN AKSES UNIVERSAL TERHADAP KESEHATAN SEKSUAL DAN REPRODUKSI, DAN HAK REPRODUKSI SEPERTI YANG TELAH DISEPAKATI SESUAI DENGAN PROGRAMME OF ACTION OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POPULATION ANDDEVELOPMENT AND THE BEIJING PLATFORM SERTA DOKUMEN-DOKUMEN HASIL REVIU DARI KONFERENSI-KONFERENSI TERSEBUT.							
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	PM	PM	PM	PM
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	13,46	13,29	13,12	12,95
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	30	35	40	45
5.B.MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	BPS	Persen	75	76	77	78
TUJUAN 6 : MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN							
6.1.PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES UNIVERSAL DAN MERATA TERHADAP AIR MINUM YANG AMAN DAN TERJANGKAU BAGI SEMUA.							
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPRPKP dan Dinas Kesehatan	Persen	100	100	100	100
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Dinas PUPRPKP	M3/detik	6.150	6.400	6.650	6.900
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas PUPRPKP	Persen	76,45	76,95	77,45	77,95
6.2.PADA TAHUN 2030, MENCAPAI AKSES TERHADAP SANITASI DAN KEBERSIHAN YANG MEMADAI DAN MERATA BAGI SEMUA, DAN MENGHENTIKAN PRAKTIK BUANG AIR BESAR DI TEMPAT TERBUKA, MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA KEBUTUHAN KAUM PEREMPUAN, SERTA KELOMPOK MASYARAKAT RENTAN.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (Rumah Tangga)	Dinas Kesehatan	Persen	20	22	24	26
	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air (Penduduk)	Dinas Kesehatan	Persen	20	22	24	26
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Kesehatan dan Dinas PPKBPPPA	Persen	65,59	65.60	65.61	65.62
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Dinas Kesehatan	Desa/Kelurahan	100	100	100	100
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Dinas Kesehatan	Desa/Kelurahan	0	0	0	0

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Dinas PUPRPKP	Persen	25	27	29	31
6.3.PADA TAHUN 2030, MENINGKATKAN KUALITAS AIR DENGAN MENGURANGI POLUSI, MENGHILANGKAN PEMBUANGAN, DAN MEMINIMALKAN PELEPASAN MATERIAL DAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA, MENGURANGI SETENGAH PROPORSI AIR LIMBAH YANG TIDAK DIOLAH, DAN SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN DAUR ULANG, SERTA PENGGUNAAN KEMBALI BARANG DAUR ULANG YANG AMAN SECARA GLOBAL.							
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Dinas PUPRPKP	Persen	5	5,5	6	6,5
6.3.2.(a)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Pollution Index	70	70,25	70,5	70,75
6.4.PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN EFISIENSI PENGGUNAAN AIR DI SEMUA SEKTOR, DAN MENJAMIN PENGGUNAAN DAN PASOKAN AIR TAWAR YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENGATASI KELANGKAAN AIR, DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH ORANG YANG MENDERITA AKIBAT KELANGKAAN AIR.							
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Dinas PUPRPKP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
6.5.PADA TAHUN 2030, MENERAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR TERPADU DI SEMUA TINGKATAN, TERMASUK MELALUI KERJASAMA LINTAS BATAS YANG TEPAT.							
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Dinas PUPRPKP	1 RPDAST	1 RPDAST	1 RPDAST	1 RPDAST	1 RPDAST
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Dinas PUPRPKP	Jaringan Informasi	1	2	3	4
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Dinas PUPRPKP	Wilayah Sungai	1	2	3	4
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.		Lembaga	1	2	3	4
TUJUAN 7 : MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA							
7.2.PADA TAHUN 2030, MENINGKAT SECARA SUBSTANSIAL PANGSA ENERGI TERBARUKAN DALAM BAURAN ENERGI GLOBAL.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Persen	23,66	22,99	22,32	21,65
TUJUAN 8 : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA							
8.1. MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN EKONOMI PER KAPITA SESUAI DENGAN KONDISI NASIONAL DAN, KHUSUSNYA, SETIDAKNYA 7 PERSEN PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO PER TAHUN DI NEGARA KURANG BERKEMBANG.							
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS		43,38	49,52	51,24	56,51
8.2.MENCAPAI TINGKAT PRODUKTIVITAS EKONOMI YANG LEBIH TINGGI, MELALUI DIVERSIFIKASI, PENINGKATAN DAN INOVASI TEKNOLOGI, TERMASUK MELALUI FOKUS PADA SEKTOR YANG MEMBERI NILAI TAMBAH TINGGI DAN PADAT KARYA.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	Persen	4.62-5.98	5.04-6.52	6.10-7.14	6.22-7.78
8.3.MENGGALAKKAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRODUKTIF, PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA LAYAK, KEWIRAUSAHAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI, DAN MENDORONG FORMALISASI DAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH, TERMASUK MELALUI AKSES TERHADAP JASA KEUANGAN.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-	BPS	Persen	45,9	45,93	45,96	45,99

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	pertanian, berdasarkan jenis kelamin.						
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	BPS	Persen	41,61	41,96	42,31	42,66
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	BPS	Persen	83,23	81,53	79,83	78,13
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	BPS	Persen	30	30,5	31	31,5
8.5.PADA TAHUN 2030, MENCAPAI PEKERJAAN TETAP DAN PRODUKTIF DAN PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI SEMUA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI, TERMASUK BAGI PEMUDA DAN PENYANDANG DIFABILITAS, DAN UPAH YANG SAMA UNTUK PEKERJAAN YANG SAMA NILAINYA.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	BPS	Rupiah/ Jam	PM	PM	PM	PM
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	RPD	Persen	3,32	3,11	2,9	2,69
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	BPS	Persen	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
8.6.PADA TAHUN 2020, SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI PROPORSI USIA MUDA YANG TIDAK BEKERJA, TIDAK MENEMPUH PENDIDIKAN ATAU PELATIHAN.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas PMPTSP Naker Trans	Persen	40,59	40,27	39,95	39,63
8.9.PADA TAHUN 2030, MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN UNTUK MEMPROMOSIKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN YANG MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA DAN MEMPROMOSIKAN BUDAYA DAN PRODUK LOKAL.							
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Persen	1,03	1,04	1,05	1,06
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Orang	100	150	200	250
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Orang	1618	1941	2329	2795

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Rupiah (Dalam Juta)	1.000	1030	1061	1093
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Persen	10	10,04	10,08	10,12
8.10.MEMPERKUAT KAPASITAS LEMBAGA KEUANGAN DOMESTIK UNTUK MENDORONG DAN MEMPERLUAS AKSES TERHADAP PERBANKAN, ASURANSI DAN JASA KEUANGAN BAGI SEMUA.							
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan	Per 100.000 penduduk	6,43	7,29	8,33	8,33
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan	Km	<5	<5	<5	<5

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan	Persen	32	32,5	33	33,5
TUJUAN 9 : MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI							
9.1.MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN TANGGUH, TERMASUK INFRASTRUKTUR REGIONAL DAN LINTAS BATAS, UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA, DENGAN FOKUS PADA AKSES YANG TERJANGKAU DAN MERATA BAGI SEMUA.							
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Perhubungan	Dermaga	1	1	1	1
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Perhubungan	Pelabuhan	1	1	1	1
9.2.MEMPROMOSIKAN INDUSTRIALISASI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, DAN PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN PROPORSI INDUSTRI DALAM LAPANGAN KERJA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO, SEJALAN DENGAN KONDISI NASIONAL, DAN MENINGKATKAN DUA KALI LIPAT PROPORSINYA DI NEGARA KURANG BERKEMBANG.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan	Persen	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan	Persen	PM	PM	PM	PM
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan	Persen	PM	PM	PM	PM
9.3.MENINGKATKAN AKSES INDUSTRI DAN PERUSAHAAN SKALA KECIL, KHUSUSNYA DI NEGARA BERKEMBANG, TERHADAP JASA KEUANGAN, TERMASUK KREDIT TERJANGKAU, DAN MENGINTEGRASIKAN KE DALAM RANTAI NILAI DAN PASAR.							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian dan Perdagangan	Persen	PM	PM	PM	PM
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Dinas Koperasi, UMKM , Perindustrian	Persen	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		dan Perdagangan					
9.5. MEMPERKUAT RISET ILMIAH, MENINGKATKAN KAPABILITAS TEKNOLOGI SEKTOR INDUSTRI DI SEMUA NEGARA, TERUTAMA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK PADA TAHUN 2030, MENDORONG INOVASI DAN SECARA SUBSTANSIAL MENINGKATKAN JUMLAH PEKERJA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PER 1 JUTA ORANG DAN MENINGKATKAN PEMBELANJAAN PUBLIK DAN SWASTA UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persen	PM	PM	PM	PM
9.C.SECARA SIGNIFIKAN MENINGKATKAN AKSES TERHADAP TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, DAN MENGUSAHAKAN PENYEDIAAN AKSES UNIVERSAL DAN TERJANGKAU INTERNET DI NEGARA-NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2020.							
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	75	80	85	90

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	83	88	93	98
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	62	67	72	77
TUJUAN 10 : MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTARNEGARA							
10.1.PADA TAHUN 2030, SECARA PROGRESIF MENCAPAI DAN MEMPERTAHANKAN PERTUMBUHAN PENDAPATAN PENDUDUK YANG BERADA DI BAWAH 40% DARI POPULASI PADA TINGKAT YANG LEBIH TINGGI DARI RATA-RATA NASIONAL.							
10.1.1*	Koefisien Gini.	RPD	Indeks	0,368	0,365	0,365	0,365
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	RPD	Persen	7,09	6,9	6,69	6,6
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	Dinas Sosial PMD	Desa	0	0	0	0
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	Dinas Sosial PMD	Desa	5	10	15	20
10.2.PADA TAHUN 2030, MEMBERDAYAKAN DAN MENINGKATKAN INKLUSI SOSIAL, EKONOMI DAN POLITIK BAGI SEMUA, TERLEPAS DARI USIA, JENIS KELAMIN, DIFABILITAS, RAS, SUKU, ASAL, AGAMA ATAU KEMAMPUAN EKONOMI ATAU STATUS LAINNYA.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	RPD	Persen	9,16	9,13	9,1	9,07
10.3.MENJAMIN KESEMPATAN YANG SAMA DAN MENGURANGI KESENJANGAN HASIL, TERMASUK DENGAN MENGHAPUS HUKUM, KEBIJAKAN DAN PRAKTIK YANG DISKRIMINATIF, DAN MEMPROMOSIKAN LEGISLASI, KEBIJAKAN DAN TINDAKAN YANG TEPAT TERKAIT LEGISLASI DAN KEBIJAKAN TERSEBUT.							
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	BPS	Persen	PM	PM	PM	PM
10.4.MENGADOPSI KEBIJAKAN, TERUTAMA KEBIJAKAN FISKAL, UPAH DAN PERLINDUNGAN SOSIAL, SERTA SECARA PROGRESIF MENCAPAI KESETARAAN YANG LEBIH BESAR.							
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	BPJS Ketenagakerjaan	Persen	71,58	71,65	71,72	71,79
TUJUAN 11 : MENJADIKAN KOTA DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN							
11.1.PADA TAHUN 2030, MENJAMIN AKSES BAGI SEMUA TERHADAP PERUMAHAN YANG LAYAK, AMAN, TERJANGKAU, DAN PELAYANAN DASAR, SERTA MENATA KAWASAN KUMUH.							
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.		Persen	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11.5.PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH KEMATIAN DAN JUMLAH ORANG TERDAMPAK, DAN SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KERUGIAN EKONOMI RELATIF TERHADAP PDB GLOBAL YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA, DENGAN FOKUS MELINDUNGI ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG DALAM SITUASI RENTAN.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal akibat dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa Per 1000 Penduduk	PM	PM	PM	PM
	Jumlah korban hilang akibat dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa Per 1000 Penduduk	PM	PM	PM	PM
	Jumlah korban terluka akibat dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa Per 1000 Penduduk	PM	PM	PM	PM
	Jumlah korban mengungsi akibat dampak bencana per 100.000 orang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa Per 1000 Penduduk	PM	PM	PM	PM
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Unit	1	2	2	2
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rupiah	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
11.6.PADA TAHUN 2030, SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI JUMLAH KEMATIAN DAN JUMLAH ORANG TERDAMPAK, DAN SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KERUGIAN EKONOMI RELATIF TERHADAP PDB GLOBAL YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA, DENGAN FOKUS MELINDUNGI ORANG MISKIN DAN ORANG-ORANG DALAM SITUASI RENTAN.							
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Persen	73,65	75,15	76,65	78,15
11.B. PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN SECARA SUBSTANSIAL JUMLAH KOTA DAN PERMUKIMAN YANG MENGADOPSI DAN MENGIMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI TENTANG PENYERTAAN, EFISIENSI SUMBER DAYA, MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM, KETAHANAN TERHADAP BENCANA, SERTA MENGEMBANGKAN DAN MENGIMPLEMENTASIKAN PENANGANAN HOLISTIK RISIKO BENCANA DI SEMUA LINI, SESUAI DENGAN THE SENDAI FRAMEWORK FOR DISASTER RISK REDUCTION 2015-2030.							
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	1	1	1	1
TUJUAN 12 : MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN							
12.4.PADA TAHUN 2020 MENCAPAI PENGELOLAAN BAHAN KIMIA DAN SEMUA JENIS LIMBAH YANG RAMAH LINGKUNGAN, DI SEPANJANG SIKLUS HIDUPNYA, SESUAI KERANGKA KERJA INTERNASIONAL YANG DISEPAKATI DAN SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI PENCEMARAN BAHAN KIMIA DAN LIMBAH TERSEBUT KE UDARA, AIR, DAN TANAH UNTUK MEMINIMALKAN DAMPAK BURUK TERHADAP KESEHATAN MANUSIA DAN LINGKUNGAN.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Ton	70	70,5	71	71,5
12.5.PADA TAHUN 2030, SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI PRODUKSI LIMBAH MELALUI PENCEGAHAN, PENGURANGAN, DAUR ULANG, DAN PENGGUNAAN KEMBALI.							
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Bidang Kebersihan	Ton/Hari	1,5	2,5	3,5	4,5
TUJUAN 13 : MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA							
13.1.MEMPERKUAT KAPASITAS KETAHANAN DAN ADAPTASI TERHADAP BAHAYA TERKAIT IKLIM DAN BENCANA ALAM DI SEMUA NEGARA.							
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jiwa Per 1000 Penduduk	PM	PM	PM	PM
TUJUAN 15 : MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI							
15.3.PADA TAHUN 2020, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN LAHAN DAN TANAH KRITIS, TERMASUK LAHAN YANG TERKENA PENGGURUNAN, KEKERINGAN DAN BANJIR, DAN BERUSAHA MENCAPAI DUNIA YANG BEBAS DARI LAHAN TERDEGRADASI.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Persen	PM	PM	PM	PM
115.9.PADA TAHUN 2020, MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI EKOSISTEM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KE DALAM PERENCANAAN NASIONAL DAN DAERAH, PROSES PEMBANGUNAN, STRATEGI DAN PENGANGGARAN PENGURANGAN KEMISKINAN.							
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan	Dokumen	1	1	1	1
TUJUAN 16 : MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAAN AKSES KEADILAN UNTUK SEMUA, DAN MEMBANGUN KELEMBAGAAN YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN INKLUSIF DI SEMUA TINGKATAN							
16.1.SECARA SIGNIFIKAN MENGURANGI SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN TERKAIT ANGKA KEMATIAN DIMANAPUN.							
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	BPS	Kasus	<5	<5	<5	<5
		Polres Takalar	Kasus	<5	<5	<5	<5
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	BPS	per 100.000 penduduk	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	BPS	Persen	PM	PM	PM	PM
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	BPS	Persen	PM	PM	PM	PM
16.2.MENGHENTIKAN PERLAKUAN KEJAM, EKSPLOITASI, PERDAGANGAN, DAN SEGALA BENTUK KEKERASAN DAN PENYIKSAAN TERHADAP ANAK.							
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak	Persen	1,93	1,93	1,92	1,92

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak	Persen	0,00078	0,00078	0,00077	0,00076
	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak	Persen	0,00078	0,00078	0,00077	0,00076
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan	Dinas Pengendalian Penduduk,	Persen	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	seksual sebelum umur 18 tahun.	Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak					
	Proporsi laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak	Persen	PM	PM	PM	PM
16.5.SECARA SUBSTANSIAL MENGURANGI KORUPSI DAN PENYUAPAN DALAM SEGALA BENTUKNYA.							
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	BPS	Indeks	PM	PM	PM	PM
16.6.MENGEMBANGKAN LEMBAGA YANG EFEKTIF, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN DI SEMUA TINGKAT.							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Persen	96	96	97	97
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	100
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	Persen	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (71-80)	BB (71-80)
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Persen	100	100	100	100

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
		Sekretariat Daerah					
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	Persen	100	100	100	100
16.7.MENJAMIN PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG RESPONSIF, INKLUSIF, PARTISIPATIF DAN REPRESENTATIF DI SETIAP TINGKATAN.							
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak	Persen	26,67	30,00	30,00	30,00

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak	Persen	13,64	18,18	22,73	27,27
16.9.PADA TAHUN 2030, MEMBERIKAN IDENTITAS YANG SYAH BAGI SEMUA, TERMASUK PENCATATAN KELAHIRAN.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Persen	100	100	100	100
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Persen	100	100	100	100
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Persen	100	100	100	100

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
16.10.MENJAMIN AKSES PUBLIK TERHADAP INFORMASI DAN MELINDUNGI KEBEBASAN MENDASAR, SESUAI DENGAN PERATURAN NASIONAL DAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL.							
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Dinas Komunikasi dan Informasi	Persen	100	100	100	100
TUJUAN 17 : MENGUATKAN SARANA PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN							
17.1.MEMPERKUAT MOBILISASI SUMBER DAYA DOMESTIK, TERMASUK MELALUI DUKUNGAN INTERNASIONAL KEPADA NEGARA BERKEMBANG, UNTUK MENINGKATKAN KAPASITAS LOKAL BAGI PENGUMPULAN PAJAK DAN PENDAPATAN LAINNYA.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Persen	0,70	0,61	0,52	0,43

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Persen	0,63	0,55	0,47	0,39
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Persen	40,92	41,41	41,9	42,39
17.6.Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Dinas Komunikasi dan Informasi	Persen	75	80	85	90
17.8.MENGOPERASIONALISASIKAN SECARA PENUH BANK TEKNOLOGI DAN SAINS, MEKANISME PEMBANGUNAN KAPASITAS TEKNOLOGI DAN INOVASI UNTUK NEGARA KURANG BERKEMBANG PADA TAHUN 2017 DAN MENINGKATKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI YANG MEMAMPUKAN, KHUSUSNYA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.							
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	62	67	72	77
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan	BPS	Persen	100	100	100	100

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	akses telekomunikasi universal dan internet.						
17.17.MENDORONG DAN MENINGKATKAN KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA DAN MASYARAKAT SIPIL YANG EFEKTIF, BERDASARKAN PENGALAMAN DAN BERSUMBER PADA STRATEGI KERJASAMA.							
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Proyek	PM	PM	PM	PM
17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Rupiah	PM	PM	PM	PM
17.18.PADA TAHUN 2020, MENINGKATKAN DUKUNGAN PENGEMBANGAN KAPASITAS UNTUK NEGARA BERKEMBANG, TERMASUK NEGARA KURANG BERKEMBANG DAN NEGARA BERKEMBANG PULAU KECIL, UNTUK MENINGKATKAN SECARA SIGNIFIKAN KETERSEDIAAN DATA BERKUALITAS TINGGI, TEPAT WAKTU DAN DAPAT DIPERCAYA, YANG TERPILAH BERDASARKAN PENDAPATAN,							

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
GENDER, UMUR, RAS, ETNIS, STATUS MIGRASI, DIFABILITAS, LOKASI GEOGRAFIS DAN KARAKTERISTIK LAINNYA YANG RELEVAN DENGAN KONTEKS NASIONAL.							
17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	Persen	PM	PM	PM	PM
17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Persen	PM	PM	PM	PM
17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	Persen	PM	PM	PM	PM

Kode Indikator	Nama Indikator	Sumber Data	Satuan	Target Pencapaian			
				2023	2024	2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persen	90	90	90	90
17.9. PADA TAHUN 2030, MENGANDALKAN INISIATIF YANG SUDAH ADA, UNTUK MENGEMBANGKAN PENGUKURAN ATAS KEMAJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN YANG MELENGKAPI PRODUK DOMESTIK BRUTO, DAN MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAPASITAS STATISTIK DI NEGARA BERKEMBANG.							
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persen	100	100	100	100
17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Persen	100	100	100	100
17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	Persen	100	100	100	100

BAB IX
PENUTUP

9.1 Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat tujuan, sasaran dan program pemerintah Kabupaten Takalar. Tahun 2022 merupakan periode terakhir pemerintahan Syamsari dan Ahmad Dg. Se're sehingga RPD merupakan dokumen transisi sampai tersusunnya dokumen RPJMD periode berikutnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 tetap berpedoman pada RPD sampai tersusunnya dokumen RPJMD hasil pilkada serentak Tahun 2024 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari periode RPJMD tersebut (2024-2029). Program-program pada Tahun 2024 tersebut diarahkan untuk menjaga kesinambungan aktivitas dan capaian program tahun sebelumnya, sehingga setiap Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan perencanaan pembangunan Tahun 2024 tetap mengacu kepada program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran tahap keempat RPJPD Kabupaten Takalar Tahun 2005- 2025. Sebagai upaya tujuan dan sasaran pembangunan, arah kebijakan serta melaksanakan program yang tercantum dalam RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Pj. Bupati Takalar;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Pj. Bupati Takalar dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Takalar;
3. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Takalar agar melaksanakan program-program dalam RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Prioritas, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026;

5. RPD yang dijabarkan ke dalam Renstra-PD selanjutnya menjadi acuan dalam penjabaran rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja-PD, hingga penyusunan rencana kerja anggaran perangkat daerah.
6. Dalam rangka perencanaan tahunan, RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026 ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar selama periode berlakunya. RKPD yang disusun setiap tahunnya selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan rencana anggaran daerah, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan penetapan APBD setiap tahun anggaran;
7. Berkaitan dengan pelaksanaan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, setiap Perangkat Daerah (PD) perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPD Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026, dan melakukan sosialisasi baik terhadap aparat Pemerintah daerah, dan masyarakat sipil guna menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal;
8. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Takalar yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPD ini, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus disampaikan kepada DPRD Kabupaten Takalar sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dalam proses pelaksanaannya.
9. Pengendalian dan Evaliasi serta perubahan RPD Kabupaten Takalar dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Takalar bersama DPRD dan masyarakat harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama periode 4 (empat) tahun yang tertuang dalam RPD dimaksud, dan untuk menjamin pencapaian kinerja pembangunan daerah secara optimal serta menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat.

BUPATI TAKALAR

H. SYAMSARI

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Penyelarasan Target Indikator Makro Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Takalar Tahun 2023-2026

No	Indikator Makro	Satuan	Target											
			2023			2024			2025			2026		
			Nasional	Provinsi	Takalar	Nasional	Provinsi	Takalar	Nasional	Provinsi	Takalar	Nasional	Provinsi	Takalar
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	6,0-6,3	5,04-6,52	4,62-5,98	6,2-6,5	-	5,04-6,52	-	-	6,10-7,14	-	-	6,22-7,78
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,3-6,0	5,69	3,32	3,6-4,3	-	3,11	-	-	2,90	-	-	2,69
3	Inflasi	%	9 - 10	3,0-1,0	2,43	-	-	3,48	-	-	3,51	-	-	3,88
4	PDRB Per Kapita	Juta Rp		65,98	43,38	80*	-	49,52	-	-	51,24	-	-	56,51
5	Tingkat Kemiskinan	%	7,0-8,0	7,45	7,09	6,0-7,0	-	6,90	-	-	6,69	-	-	6,60
6	Gini Rasio	Angka	0,375-0,378	0,381	0,368	0,360-0,374	-	0,365	-	-	0,365	-	-	0,365
7	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	73,29-73,25	73,05	68,83	75,54	-	69,70	-	-	70,31	-	-	70,54

Sumber : RPJMN 2020-2024; Perubahan RPJMD Prov.Sulsel 2019-2023; data diolah